DEKONSTRUKSI PRINSIP DASAR AKUNTANSI DENGAN MENGGUNAKAN NILAI-NILAI TASAWUF

DISERTASI
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Doktor
dalam Studi Islam

oleh:
RADEN ARFAN RIFQIAWAN
NIM: 2100029050

PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2025

HALAMAN JUDUL

DEKONSTRUKSI PRINSIP DASAR AKUNTANSI DENGAN MENGGUNAKAN NILAI-NILAI TASAWUF

DISERTASI
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Doktor
dalam Studi Islam

oleh:
RADEN ARFAN RIFQIAWAN
NIM: 2100029050

PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2025

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap	:	**Raden Arfan Rifqiawan**
NIM	:	2100029050
Judul Penelitian	:	**Dekonstruksi Prinsip Dasar Akuntansi dengan Menggunakan Nilai-Nilai Tasawuf**
Program Studi	:	Studi Islam
Konsentrasi	:	Akuntansi Syariah

menyatakan bahwa proposal disertasi yang berjudul:

DEKONSTRUKSI PRINSIP DASAR AKUNTANSI DENGAN MENGGUNAKAN NILAI-NILAI TASAWUF

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 27 Desember 2024

Pembuat Pernyataan,



Raden Arfan Rifqiawan
NIM: 2100029050

NOTA DINAS

Semarang, 30 Desember 2024

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap disertasi yang ditulis oleh:

Nama	:	**Raden Arfan Rifqiawan**
NIM	:	2100029050
Konsentrasi	:	Akuntansi Syariah
Program Studi	:	S.3 Studi Islam
Judul	:	**Dekonstruksi Prinsip Dasar Akuntansi Dengan Menggunakan Nilai-Nilai Tasawuf**

Kami memandang bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Promosi Disertasi (Terbuka).

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Ko-Promotor,

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP: 197108301998031003

Promotor,

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP: 196701171997031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA
Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24 7614454,
Email: pascasarjana@walisongo.ac.id, Website:
http://pasca.walisongo.ac.id/

PENGESAHAN PROPOSAL DISERTASI

Proposal disertasi yang ditulis oleh:

Nama lengkap : **Raden Arfan Rifqiawan**
NIM : 2100029050
Judul Penelitian : **Dekonstruksi Prinsip Dasar Akuntansi dengan Menggunakan Nilai-Nilai Tasawuf**

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Seminar Proposal Disertasi pada tanggal 3 April 2024 dan dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan penelitian dan penulisan disertasi untuk memenuhi persyaratan meraih gelar doktor dalam bidang studi Islam

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan	tanggal	Tanda tangan
Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag. Ketua Sidang/Penguji	21/5-2024	
Dr. Ratno Agriyanto, M.Si. Sekretaris Sidang/Penguji	13/5-2024	
Prof. Dr. H. Abdul Ghofur M.Ag. Promotor/Penguji	20/5-2024	
Dr. Ali Murtadho, M.Ag. Ko-Promotor/Penguji	14/5 2024	
Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag Penguji 1	2-5-2024	
Dr. H. Abdul Muhaya, M.A. Penguji 2	2/5 2024	
Dr. H. Safi'i, M.Ag. Penguji 3	7/5 2024	

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA
Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24 7614454,
Email: pascasarjana@walisongo.ac.id, Website:
http://pasca.walisongo.ac.id/

FKM-6

PENGESAHAN MAKALAH UJIAN KOMPREHENSIF

Makalah ujian komprehensif yang ditulis oleh:

Nama lengkap : **Raden Arfan Rifqiawan**
NIM : 2100029050
Program Studi : S.3 Studi Islam
Konsentrasi : Akuntansi Syariah
Judul Penelitian : **Integrasi Nilai-Nilai Tasawuf dalam *Syarah Ḥikam* Syekh Aḥmad Zarrūq pada Prinsip Dasar Akuntansi**

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 13 November 2024 dan dapat diterima sebagai syarat pengajuan disertasi dan memenuhi standar diterbitkan di jurnal ilmiah.

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan	tanggal	Tanda tangan
Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag. Ketua Sidang/Penguji	21/11-2024	
Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., A.Kt. Sekretaris Sidang/Penguji	18/11-24	
Dr. Ali Murtadho, M.Ag. Penguji 1	18/11 24	
Dr. H. Abdul Muhaya, M.A. Penguji 2	21/11 24	
Dr. H. Safi'i, M.Ag. Penguji 3	20/11 24	

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA
Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24 7614454,
Email: pascasarjana@walisongo.ac.id, Website:
http://pasca.walisongo.ac.id/

PERSETUJUAN DISERTASI UJIAN TERTUTUP

Disertasi yang ditulis oleh:

Nama lengkap : **Raden Arfan Rifqiawan**
NIM : 2100029050
Judul Penelitian : **Dekonstruksi Prinsip Dasar Akuntansi Dengan Menggunakan Nilai-Nilai Tasawuf**

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Disertasi (Tertutup) pada tanggal 16 Desember 2024 dan dinyatakan LULUS serta dapat dijadikan syarat Ujian Promosi Doktor.

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan	tanggal	Tanda tangan
Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag. Ketua Sidang/Penguji	03/01/25	
Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., A.kt. Sekretaris Sidang/Penguji	30/12/24	
Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. Promotor/Penguji	30/12/24	
Dr. Ali Murtadho, M.Ag. Ko-Promotor/Penguji	30/12/24	
Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., MSi., Akt. Penguji 1	30/12/24	
Dr. H. Abdul Muhaya, M.A. Penguji 2	31/12/24	
Dr. H. Safii, M.Ag. Penguji 3	03/01/25	

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA
Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Telp./Fax: 024--7614454, 70774414

FDD-38

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TERBUKA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa disertasi saudara:

Nama : Raden Arfan Rifqiawan

NIM : 2100029050

Judul : DEKONSTRUKSI PRINSIP DASAR AKUNTANSI DENGAN MENGGUNAKAN NILAI-NILAI TASAWUF

telah diujikan pada 6 Mei 2025 dan dinyatakan:

LULUS

dalam Ujian Terbuka Disertasi Program Doktor sehingga dapat dilakukan Yudisium Doktor.

NAMA	TANGGAL	TANDATANGAN
Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. Ketua/Promotor/Penguji	6/5/2025	
Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag. Sekretaris/Penguji	6/5/2025	
Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. Promotor/Penguji	6/5/2025	
Dr. H. Ali Murtadho, M.Ag. Kopromotor/Penguji	6/5/2025	
Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., MSi., A Penguji	6/5/2025	
Dr. H. Abdul Muhaya, M.A. Penguji	6/5/2025	
Dr. H. Safii, M.Ag. Penguji	6/5/2025	
Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., A.kt., Penguji	6/5/2025	

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ.[1]

يسروا ولا تعسروا، وبشروا، ولا تنفروا.[2]

[1]"Qur'an Kemenag," diakses 27 Desember 2024, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=119&to=119.

[2]Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Riyadh: Dār al-Ḥaḍārah lil al-Nasyr wa al-Tauzī', 2014), 25.

ABSTRAK

Prinsip dasar akuntansi yang ada saat ini lebih berfokus pada aspek materialistik, mengabaikan dimensi moral dan spiritual. Hal tersebut mendorong perlunya pengembangan prinsip dasar yang lebih holistik, yang mencakup aspek moral dan spiritual. Dimensi moral dan spiritual sejatinya merupakan bagian dari kajian tasawuf. Penelitian ini menggunakan delapan nilai tasawuf dari *turāṡ* al-Syāżiliyyah untuk mengatasi kelemahan prinsip dasar akuntansi tersebut. Nilai-nilai tersebut meliputi *ṣidq* (kejujuran), *yusrā* (kemudahan), *khasyah* (takut pada Tuhan), *hijrah* (perpindahan), *ṣuḥbah* (persahabatan), *ijtihād* (kesungguhan), *murāqabah* (pengawasan), dan *lā taqif,* yaitu semangat tak pernah berhenti dalam mencari kebenaran. Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab pertanyaan: (1) Apa saja kelemahan dalam prinsip dasar akuntansi saat ini, dan mengapa nilai-nilai tasawuf digunakan untuk mendekonstruksi prinsip dasar tersebut? (2) Bagaimana nilai-nilai tasawuf digunakan untuk mendekonstruksi prinsip dasar akuntansi tersebut? (3) Apa saja rekomendasi prinsip dasar akuntansi berdasarkan dekonstruksi nilai-nilai tasawuf? Dengan metode riset pustaka dan pendekatan dekonstruksi, penelitian ini menganalisis literatur tasawuf dan akuntansi secara kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip dasar akuntansi saat ini memiliki kelemahan dalam hal pengabaian dimensi moral dan spiritual. Nilai-nilai tasawuf digunakan untuk mendekonstruksi karena menekankan pentingnya kesadaran moral, spiritual yang dapat mengatasi kelemahan tersebut. Dekonstruksi dilakukan dengan membongkar dan memperbaiki prinsip dasar tersebut dengan menggunakan nilai-nilai tasawuf. Rekomendasinya adalah prinsip dasar akuntansi holistik, yang tidak fokus pada keuntungan finansial saja, tetapi juga mengedepankan aspek etika, moral, dan spiritual. Implikasi teoretisnya adalah penambahan dimensi moral dan spiritual yang membuka ruang bagi pengembangan akuntansi berkelanjutan. Implikasi praktisnya adalah penerapan prinsip dasar yang baru ini dapat meningkatkan transparansi, kepatuhan, kepercayaan, dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Keyword: **dekonstruksi, prinsip dasar akuntansi, nilai-nilai tasawuf**

ABSTRACT

The current fundamental accounting principles primarily focus on materialistic aspects, neglecting moral and spiritual dimensions. This necessitates the development of more holistic principles that incorporate moral and spiritual aspects. These dimensions are inherently part of the study of Sufism. This research utilizes eight Sufi values from the *turās* al-Syāżiliyyah to address the weaknesses of these accounting principles, namely *ṣidq* (honesty), *yusrā* (ease), *khasyah* (fear of God), *hijrah* (transformation), *ṣuḥbah* (companionship), *ijtihād* (diligence), *murāqabah* (self-supervision), and *lā taqif*, which signifies an unyielding spirit in the pursuit of truth. The study aims to answer the following questions: (1) What are the weaknesses in the current accounting principles, and why are Sufi values used to deconstruct them? (2) How are Sufi values applied in deconstructing these principles? (3) What recommendations can be made for new accounting principles based on this deconstruction? This study critically analyzes Sufi and accounting literature using a literature review method and a deconstructive approach. The findings reveal that the current accounting principles suffer from a disregard for moral and spiritual dimensions. Sufi values are applied in the deconstruction process as they emphasize the importance of moral, spiritual, and social awareness to address these deficiencies. The deconstruction involves dismantling and reconstructing the principles using Sufi values. The recommendation is for holistic accounting principles that do not solely prioritize financial gains but also uphold ethical, moral, and spiritual values. The theoretical implication is the addition of moral and spiritual dimensions, paving the way for the development of sustainable accounting. The practical implication is that implementing these new principles can enhance transparency, compliance, trust, and corporate social responsibility.

Keywords: **deconstruction, fundamental accounting principles, Sufi values**

ملخص البحث

تركز المبادئ الأساسية الحالية للمحاسبة على الجوانب المادية، متجاهلةً الأبعاد الأخلاقية والروحية، مما يستدعي تطوير مبادئ أكثر شمولية تشمل الجوانب الأخلاقية والروحية. وتعد هذه الأبعاد جزءاً من دراسة التصوف. تعتمد هذه الدراسة على ثماني قيم تصوفية مستمدة من تراث الشاذلية لمعالجة قصور تلك المبادئ، وهي: الصدق، اليسر، الخشية، الهجرة، الصحبة، الاجتهاد، المراقبة، ولا تقف، أي الحماسة التي لا تتوقف في البحث عن الحقيقة. تهدف الدراسة إلى الإجابة عن: (١) ما هي أوجه القصور في المبادئ الحالية للمحاسبة ولماذا تُستخدم قيم التصوف لتفكيكها؟ (٢) كيف تُوظَّف قيم التصوف في تفكيك المبادئ الأساسية للمحاسبة؟ (٣) ما هي التوصيات المتعلقة بالمبادئ الأساسية بناءً على تفكيك قيم التصوف؟ باستخدام منهج البحث المكتبي ونهج التفكيك، تحلل الدراسة الأدبيات المتعلقة بالتصوف والمحاسبة بشكل نقدي. وقد أظهرت النتائج أن المبادئ الحالية تتسم بالقصور في إغفال الأبعاد الأخلاقية والروحية. وتُستخدم قيم التصوف لتفكيكها لأنها تؤكد على الوعي الأخلاقي والروحي لمعالجة تلك النقائص. يتم التفكيك من خلال إعادة بناء المبادئ وتصحيحها باستخدام قيم التصوف. والتوصية هي وضع مبادئ شمولية لا تقتصر على الأرباح المالية، بل تعزز الأخلاق والمبادئ الروحية. أما الآثار النظرية فهي إضافة أبعاد أخلاقية وروحية تفتح المجال لتطوير محاسبة مستدامة. وأما الآثار العملية فهي أن تطبيق هذه المبادئ يعزز الشفافية، الامتثال، الثقة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

الكلمات المفتاحية: التفكيك، المبادئ الأساسية للمحاسبة، القيم الصوفية

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ż
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	y

Vokal Pendek

...َ .	= a	كَتَبَ	kataba
... .	= i	سُئِلَ	su’ila
...ُ .	= u	يَذْهَبُ	yażhabu

Vokal Panjang

...َا	= ā	قَالَ	qāla
اِيْ	= ī	قِيْلَ	qīla
اُوْ	= ū	يَقُوْلُ	yaqūlu

Diftong

اَيْ	= ai	كَيْفَ	kaifa
اَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

Catatan:
Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt., Tuhan semesta alam. *Ṣalawat* dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, serta seluruh pengikut *sunnah* beliau hingga akhir zaman.

Dengan mengucapkan syukur, *al-ḥamdulillāh*, penulis telah menyelesaikan karya tulis ini berkat dukungan dari berbagai pihak. Mengingat penyelesaian disertasi ini melibatkan banyak pihak, penulis dengan hormat menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, antara lain:

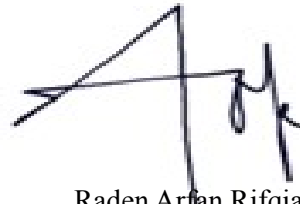
1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, yang telah memimpin institusi dengan baik, khususnya dalam penyelenggaraan Program Studi S3.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhyar Fanani, M.A., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang; Bapak Dr. H. Nasihun Amin, M.Ag., selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang; dan Bapak Prof. Dr. H. Raharjo, M.Ed.St., selaku Ketua Program Studi S3, yang telah memimpin program serta membimbing mahasiswa hingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku *promotor*, yang dengan arif, santun, dan sabar telah memberi motivasi dan bimbingan kepada penulis.

4. Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Ag., selaku *co-promotor*, yang telah membimbing, memberikan arahan, dan tak henti-hentinya mendorong agar disertasi ini segera selesai.
5. Para Guru Besar dan Dosen Pengajar pada Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang yang telah berbagi ilmu, antara lain Bapak Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A.; Bapak Prof. Dr. H. Abdurahman Mas'ud, M.A.; Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.; Bapak Prof. Dr. H. Sholihan, M.Ag.; Bapak Prof. Dr. H. Fatah Syukur, M.Ag.; Bapak Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag.; Ibu Prof. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.A.; Bapak Prof. Dr. H. Rohmadi; Bapak Prof. Dr. H. Shodiq Abdullah; Bapak Dr. H. Abdul Muhayya, M.A.; Bapak Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag.; dan Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. Semoga Allah Swt. membalas amal saleh beliau semua dengan pahala yang berlipat.
6. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi doktoral ini dengan segera.
7. Ayah tercinta, Bapak Drs. H. Z. Amri Amno, M.Sc.; Ibu tercinta, Ibu Hj. Winarni Sunariati, S.H.; Ayah mertua, Bapak Drs. H. Wahid Mustain, M.M. (alm.); dan Ibu mertua, Ibu Hj. Siti Maryam, S.Pd.I., yang senantiasa memberikan aliran doa dan dukungan penuh.
8. Ibu Nautika Attamimi, S.E.I., istri tercinta, serta anak-anak buah hati tersayang, Raden Abil Hasan Asy-Syadzili dan Raden Ahmad Athaillah As-Sakandari, yang selalu memberikan dorongan dan semangat sehingga karya ini dapat terselesaikan.
9. Kolega seangkatan di Program Pascasarjana S3 UIN Walisongo Semarang, yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan kuat dalam penyelesaian disertasi ini.

Kepada semua pihak, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memanjatkan doa semoga amal baik tersebut dicatat sebagai amal saleh. *Āmīn Yā Rabb al-ʻĀlamīn.* Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk menyempurnakan disertasi ini. Demikian, terima kasih.

Semarang, 27 Desember 2024

Penulis



Raden Arfan Rifqiawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI.....iii
NOTA DINAS.....v
PENGESAHAN PROPOSAL DISERTASI.....vii
PENGESAHAN MAKALAH UJIAN KOMPREHENSIF.....ix
PERSETUJUAN DISERTASI UJIAN TERTUTUP.....xi
PENGESAHAN MAJLIS PENGUJI UJIAN TERBUKA.....xiii
MOTTO.....xv
ABSTRAK.....xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....xxiii
KATA PENGANTAR.....xxv
DAFTAR ISI.....xxix
DAFTAR TABEL.....xxxiii
DAFTAR GAMBAR.....xxxv
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah.....30
C. Tujuan Penelitian.....30
D. Manfaat penelitian.....31
E. Kajian Pustaka.....32
F. Metode Penelitian.....38
G. Sistematika Pembahasan.....50
BAB II PRINSIP DASAR AKUNTANSI.....53
A. *Grand Theory* Ilmu Akuntansi.....53
B. Perkembangan Teori Akuntansi.....54
C. Elemen Struktur Teori Akuntansi.....59
D. Pengertian Prinsip Dasar Akuntansi.....64
E. Sumber Prinsip Dasar Akuntansi.....71
F. Prinsip Dasar Akuntansi.....75
BAB III KETERKAITAN ANTARA KELEMAHAN PRINSIP DASAR AKUNTANSI DAN TERJADINYA SKANDAL KORPORASI.....99
A. Celah Prinsip Dasar Akuntansi.....99
B. Pengertian Etika, Moral, Spiritual, dan Akhlak.....101

C. Skandal Enron....109
D. Skandal Toshiba....112
E. Skandal Merrill Lynch....116
F. Skandal Lehman Brothers....120
G. Skandal Worldcom....124
H. Skandal Xerox Corporation....127
I. Skandal Carillion....130
J. Skandal HealthSouth....133
K. Skandal Kimia Farma....137
L. Skandal Garuda Indonesia....141
M. Skandal Jiwasraya....145
N. Skandal Envy....150
O. Skandal di Industri Perbankan Syariah....154
BAB IV NILAI-NILAI TASAWUF YANG MENDEKONSTRUKSI PRINSIP DASAR AKUTANSI....165
A. Pedoman Dasar Akuntansi dalam Islam....165
B. Nilai-nilai Pokok Tasawuf....171
C. Prinsip Muamalah dalam Tasawuf....173
D. Pembaharuan Tasawuf oleh Syekh Abū al-Ḥasan al-Syāżilī....174
E. *Ṣidq* (Kejujuran)....177
F. *Yusrā* (Kemudahan)....182
G. *Khasyah* (Rasa Takut kepada Allah)....188
H. *Hijrah* (Perpindahan)....194
I. *Ṣuḥbah* (Persahabatan)....198
J. *Ijtihād* (Kesungguhan)....206
K. *Murāqabah* (Pengawasan Terus-menerus)....209
L. *Lā Taqif* (Tidak Pernah Berhenti Mencari Kebenaran)....214
BAB V DEKONSTRUKSI PRINSIP DASAR AKUNTANSI DENGAN MENGGUNAKAN NILAI-NILAI TASAWUF....219
A. Identifikasi Prinsip Dasar Akuntansi....219
B. Analisis Oposisi Biner....252
C. Pembalikan Hierarki....277
D. Integrasi Nilai Tasawuf dalam Prinsip Dasar Akuntansi....291
E. Rekomendasi Prinsip Dasar Akuntansi setelah Dekonstruksi…326
BAB VI PENUTUP....341

A. Kesimpulan.....341
B. Implikasi.....344
DAFTAR PUSTAKA.....349
BIODATA PENULIS.....375

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Prinsip Dasar Akuntansi dalam Berbagai Referensi.....83
Tabel 3.1 Kelemahan Prinsip Dasar Akuntansi pada Berbagai Kasus..107
Tabel 5.1 Integrasi Nilai Tasawuf dalam Prinsip Dasar Akuntansi……324
Tabel 5.2 Rekomendasi Prinsip Dasar Akuntansi Pasca Dekonstruksi.337

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hierarki Elemen Struktur Teori Akuntansi.....59

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar riset akuntansi saat ini menggunakan paradigma positivisme.[1] Paradigma tersebut menekankan pendekatan kuantitatif yang hanya berfokus pada hal-hal empiris, sehingga aspek metafisika tidak dianggap sebagai objek kajian ilmu pengetahuan. Suatu hal dapat dijadikan objek ilmu pengetahuan jika memiliki wujud yang positif dan dapat diamati secara langsung.[2] Pembatasan tersebut menghalangi eksplorasi dimensi non material yang sebenarnya dapat berkontribusi pada pengembangan prinsip dasar akuntansi yang lebih inklusif. Oleh sebab itu, pengkajian ulang paradigma positivisme sangat diperlukan untuk menciptakan sistem akuntansi yang holistik, relevan, dan berkelanjutan. Dekonstruksi dalam konteks ini dapat membuka wawasan baru dalam memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, serta mempertimbangkan nilai-nilai non empiris dalam praktik akuntansi. Dengan demikian, akuntansi dapat bertransformasi menjadi disiplin yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan etika, serta memberi ruang bagi pendekatan yang lebih adil dan demokratis.[3]

---

[1]Jaka Isgiyarta, "Telaah Kritis Filsafat Positivisme Untuk Pengembangan Teori Akuntansi," *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 15, no. 2 (2011): 204, https://journal.uii.ac.id/JAAI/article/view/3752.

[2]Mulyadi Kartanegara, *Menyibak Tirai Kejahilan: Pengantar Epistemologi Islam* (Bandung: Mizan, 2003), 31.

Sebagai alternatif, pendekatan dekonstruksi menawarkan perspektif berbeda dengan menyoroti pentingnya aspek-aspek non material, yang sering kali terabaikan dalam paradigma positivisme. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengangkat kembali dimensi-dimensi yang kurang diperhatikan dalam riset akuntansi, yang mayoritas mengadopsi metode kuantitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkenalkan sudut pandang yang lebih holistik, mengingat akuntansi tidak hanya berkaitan dengan angka, tetapi juga nilai-nilai sosial dan etika.

Untuk menghadapi tantangan dalam mengembangkan sistem akuntansi yang etis dan berkelanjutan, pendekatan postmodernisme, terutama melalui teori dekonstruksi yang diperkenalkan oleh Jacques Derrida, menjadi kerangka berpikir yang relevan. Teori dekonstruksi bertujuan mengkritisi konsep kebenaran tunggal yang diusung oleh ilmu pengetahuan modern.[4] Era postmoderisme ingin melihat suatu fenomena sosial, fenomena keberagaman, realistas fisika, apa adanya, tanpa terlebih dahulu terkurung dalam anggapan teori baku yang diciptakan pada masa modernisme.[5] Dalam akuntansi, ini berarti memperhatikan dimensi sosial dan etika, bukan hanya angka, sejalan dengan kritik teori dekonstruksi Derrida untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan.

---

[3]Jurana, *Konsep Pendidikan Akuntansi Merdeka: Dekonstruksi Pemikiran Ki Hadjar Dewantara* (Surabaya: Penerbit Peneleh, 2021), 62–66.

[4]Johan Setiawan dan Ajat Sudrajat, "Pemikiran Postmodernisme dan Pandangannya terhadap Ilmu Pengetahuan," *Jurnal Filsafat* 28, no. 1 (28 Februari 2018): 31, doi:10.22146/jf.33296.

[5]M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 101.

Dekonstruksi mengungkap bias dan kontradiksi tersembunyi untuk menghasilkan interpretasi baru. Menurut Derrida, teori dekonstruksi disusun untuk menantang gagasan tradisional tentang bahasa, makna, dan interpretasi. Teori ini muncul pada pertengahan abad ke-20 sebagai respons terhadap strukturalisme, dengan memberikan kritik mendalam terhadap asumsi-asumsi yang dianggap stabil dalam tradisi tersebut.[6] Derrida menyoroti kompleksitas makna dalam teks atau gagasan dengan menegaskan bahwa makna tidak bersifat tetap dan selalu terbuka untuk berbagai interpretasi, tergantung pada konteks serta perspektif individu.[7]

Dekonstruksi tidak hanya mengungkap ketidakkonsistenan dalam teks atau gagasan, tetapi juga mempertanyakan dasar pemikiran yang selama ini dianggap kokoh dalam budaya atau sistem tertentu.[8] Pendekatan tersebut membuka ruang eksplorasi lebih lanjut untuk memahami bagaimana nilai-nilai sosial, politik, dan budaya turut membentuk pemahaman terhadap teks atau gagasan.[9] Prinsip utama dekonstruksi adalah bahwa interpretasi tidak pernah final, melainkan

---

[6]Brooj Nasser A. Alsaqer, "The Role of Deconstructing as a Part of Translation Process in Literary Text," *World Journal of Advanced Research and Reviews* 20, no. 2 (2023): 962, doi:10.30574/wjarr.2023.20.2.2335.

[7]Natasha Constantin dan Fitzerald Kennedy Sitorus, "Dekonstruksi Makna dan Bahasa dalam Perspektif Jacques Derrida," *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial* (JKOMDIS) 3, no. 3 (15 Desember 2023): 797, doi:10.47233/jkomdis.v3i3.1315.

[8]I Made Marthana Yusa, "Upside Down Building: Suatu Karya Dekonstruksi Desain Arsitektur," *Jurnal Studi Kultural* 1, no. 2 (2016): 66.

[9]Irfan, "Semiotika Dekonstruksi dan Post-Strukturalis Pemikiran Jacques Derrida dan Roland Barthes," *Tanra: Jurnal Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar* 9, no. 2 (4 Juni 2022): 97, doi:10.26858/tanra.v9i2.33302.

selalu terbuka untuk revisi dan rekonstruksi berdasarkan sudut pandang baru atau konteks yang berbeda.[10]

Dekonstruksi mendorong peninjauan ulang terhadap teks atau gagasan yang sudah mapan. Sebagai contoh, Arató, dalam upayanya mendekonstruksi sistem pendidikan, menerapkan konsep ini dengan memperkenalkan pembelajaran kooperatif. Arató merombak struktur hierarkis yang eksklusif dengan menggantinya melalui interaksi sosial yang lebih inklusif dan demokratis, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang adil dan kolaboratif. Pendekatan dekonstruksi ini mendorong pemahaman yang lebih kritis terhadap norma dan struktur yang ada, membuka ruang bagi perubahan.[11] Dalam konteks akuntansi, pendekatan serupa dapat diterapkan untuk merancang praktik yang lebih transparan, etis, dan responsif terhadap kepentingan semua pihak, menciptakan keseimbangan yang lebih adil dalam dunia bisnis.[12]

Rekayasa sosial adalah bagian dari kajian ilmu sosial, yang menganalisis kompleksitas kehidupan sosial, termasuk pengaruh struktur sosial terhadap perilaku dan hubungan antarindividu.[13] Sebagai objek

---

[10]Natasya Atmim Maulida, "The Deconstruction In The Short Story Jimat Sero by Eka Kurniawan," *Jurnal Kawruh Abiyasa* 3, no. 1 (11 Juli 2023): 26, doi:10.59301/jka.v3i1.56.

[11]Ferenc Arató, "Deconstructing Exclusion: A Post-Structuralist Approach to Inclusiveness," dalam *Inclusive University - How to Increase Academic Excellence Focusing on The Aspects of Inclusion* (Hungary: University of Pécs, 2015), 47.

[12]Abdul Nasser Hasibuan, *Pengembangan Konsep Akuntansi Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2023), 197.

[13]Sofi Ayu Nur Martasari, Bagus Setiawan, dan Sevina Yushinta Anjani, "Kurangnya Pemahaman tentang Konsep Dasar Ilmu Sosial di Jenjang Sekolah Menengah," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 3, no. 1

dekonstruksi, ilmu sosial mengkaji bagaimana pengetahuan dan realitas sosial dibangun.[14] Dekonstruksi menekankan keragaman pendekatan: misalnya pendekatan klasik yang menganalisis struktur sosial dan ketidaksetaraan melalui statistik, serta romantisme yang menyoroti pengalaman, emosi, dan kreativitas individu dalam konteks sosial. Kedua pendekatan ini memberikan wawasan berbeda namun saling melengkapi dalam memahami dinamika masyarakat.[15] Menurut Wainwright, dekonstruksi berdampak signifikan pada kajian humaniora seperti hukum, antropologi, kajian gender, linguistik, dan sastra, dengan mempertanyakan konstruksi sosial dan mengungkap aspek tersembunyi.[16] Dengan demikian, dekonstruksi memperkaya pemahaman sosial budaya dan menawarkan perspektif kritis baru.[17]

Akuntansi, sebagai cabang ilmu sosial, relevan untuk dianalisis dengan pendekatan dekonstruksi guna membongkar asumsi tersembunyi, mengungkap bias, dan mendorong reformasi yang mengintegrasikan

(2024): 4, doi:10.55606/jurrish.v3i1.2187.

[14]Ferry Adhi Dharma, "Konstruksi Realitas Sosial:Pemikiran Peter L. Berger tentang Kenyataan Sosial:," *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (1 September 2018): 1–2, doi:10.21070/kanal.v6i2.101.

[15]Galen Watts dan Dick Houtman, "The Specter of Authenticity: Social Science after the Deconstruction of Romanticism," *History of the Human Sciences*, 24 Mei 2024, 2, doi:10.1177/09526951241245014.

[16]Seradona Altiria, "Dekonstruksi Derrida pada Kajian Linguistik Kognitif," Prosiding Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya (KOLITA) 21, no. 21 (30 Oktober 2023): 273, doi:10.25170/kolita.21.4857.

[17]Matthew J. Phillips, "Towards a Social Constructionist, Criticalist, Foucauldian-Informed Qualitative Research Approach: Opportunities and Challenges," *SN Social Sciences* 3, no. 10 (10 Oktober 2023): 2–3, doi:10.1007/s43545-023-00774-9.

nilai etika, moral, dan keberlanjutan dalam praktiknya.[18] Menurut Skinner, dekonstruksi akuntansi berbeda dari rekonstruksi dan destruksi. Pendekatan ini menolak dominasi konstruksi tanpa menghancurkan praktik yang ada, sambil mengusulkan alternatif berbasis teori sosiologi kritis. Baik konstruksionis maupun dekonstruksionis sepakat menolak pendekatan konvensional dan menawarkan pendekatan holistik yang kritis terhadap struktur akuntansi.[19] Dengan menggunakan dekonstruksi sebagai alat analisis, teori akuntansi dapat dieksplorasi lebih mendalam untuk menunjukkan bahwa akuntansi tidak hanya mencerminkan kepentingan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, politik, dan budaya.[20]

Gagasan untuk mendekonstruksi prinsip dasar akuntansi tidak muncul secara spontan, melainkan berakar dari kritik mendalam terhadap praktik akuntansi konvensional yang telah dikaji dalam berbagai literatur ilmiah. Rifai dan Asrori mengemukakan bahwa akuntansi konvensional kerap berfokus pada aspek materialistik dan ekonomi semata, sehingga mengabaikan dimensi etika dan spiritual yang sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan

[18]Rui Vieira dan Keith Hoskin, "Re-thinking The 'Disciplinary' Power of Accounting: A Foucauldian Reading of How Disciplinary Accounting Knowledge Translates into Managerial Strategy in a Portuguese Bank," *Critical Perspectives on Accounting* 99 (1 Maret 2024): 15, doi:10.1016/j.cpa.2024.102715.

[19]Akhmad Riduwan dan Andayani Andayani, "Dimensi Kritis Pemikiran Akuntansi yang Teralienasi: Dialog Imajiner Konstruksionis dan Dekonstruksionis," *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 19, no. 2 (26 September 2019): 169, doi:10.25105/mraai.v19i2.3854.

[20]Ari Kamayanti dkk., *Metodologi Paradigma Nusantara* (Surabaya: Penerbit Peneleh, 2022), 64.

keberlanjutan bisnis.[21] Perspektif ini didukung oleh Nurhidayah, yang menyoroti bahwa skandal keuangan yang marak terjadi mencerminkan etika kapitalistik yang hanya menekankan pada keuntungan finansial, tanpa memperhatikan nilai-nilai moral dan spiritual.[22]

Skandal keuangan tersebut bukan hanya akibat perilaku individu akuntan, tetapi juga mencerminkan kelemahan pada prinsip dasar penyusunan laporan keuangan yang didominasi oleh logika kapitalistik. Astuti dan Faisal mengkritik bahwa akuntansi konvensional terlalu terpusat pada optimalisasi laba dan pemuasan kepentingan pemangku kepentingan oportunistik. Pendekatan tersebut, selain membuka ruang bagi perilaku tidak etis, juga mengabaikan nilai-nilai moral serta spiritual yang penting, sehingga berujung pada skandal keuangan, ketidakseimbangan, dan ancaman terhadap keberlanjutan bisnis.[23] Susilowati menambahkan bahwa akuntansi konvensional cenderung memprioritaskan kepatuhan pada standar industri tanpa mempertimbangkan dampak sosial maupun etika.[24] Pandangan ini diperkuat oleh Rohman dan Anggraeni, yang menegaskan bahwa

[21]Fuad Yanuar Akhmad Rifai and Ahmad Labib Asrori, "Akuntansi Dalam Kajian Filsafat Ilmu Dan Spiritualitas Islam," *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9, no. 1 (18 Januari 2023): 17–18, doi:10.37567/alwatzikhoebillah.v9i1.1534.

[22]Ida Ayu Nursanty, "Spiritual Religius Sebagai Basis Etika Akuntan Profesional," *Valid: Jurnal Ilmiah* 13, no. 3 (July 12, 2016): 289–97.

[23]An Ras Try Astuti and Andi Faisal, "Tasawwuf Sebagai Lokomotif Syariah Enterprise Theory," *AL MA'ARIEF : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 3, no. 1 (June 27, 2021): 13–14, doi:10.35905/almaarief.v3i1.1538.

[24]Lantip Susilowati, "Tanggung Jawab, Keadilan Dan Kebenaran Akuntansi Syariah |," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2017): 296–300, https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/nisbah/article/view/618.

akuntansi konvensional memiliki keterbatasan mendasar, seperti ketidakmampuan menciptakan kesejahteraan sosial, kerusakan lingkungan yang timbul akibat promosi keuntungan investasi, serta penggunaan filsafat barat yang cenderung bebas nilai.[25]

Harahap menyatakan bahwa pada masa awal perkembangannya hingga abad ke-20, laporan keuangan masih dianggap benar atau *true*. Namun, dengan perkembangan akuntansi modern, istilah tersebut berubah menjadi wajar atau *fairly stated*, yang mencerminkan ketidakmampuan akuntansi konvensional untuk menjamin kebenaran data secara mutlak. Perubahan ini mengindikasikan perlunya pendekatan baru yang lebih dapat menjamin kebenaran *output* akuntansi, seperti yang diharapkan dari akuntansi syariah. Sayangnya, akuntansi syariah juga belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh kapitalisme, karena dalam prinsip dasar akuntansi syariah, istilah benar dan wajar masih bercampur, padahal definisi keduanya itu berbeda. [26]

Alfia dkk. mengkritisi bahwa tujuan akuntansi syariah saat ini masih terinfiltrasi oleh nilai-nilai modernisme yang menekankan sisi materialistik. Akibatnya, dimensi spiritual yang seharusnya menjadi inti dari akuntansi syariah sering kali termarjinalkan, sehingga memunculkan pertanyaan kritis: di mana letak dimensi ibadah dalam praktik akuntansi syariah? Pertanyaan ini menegaskan perlunya revisi mendasar terhadap

[25]Taufiqur Rohman and Umi Suswati Anggraeni, "Kerangka Konseptual Akuntansi Konvensional Dan Akuntansi Syariah," *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 2 (5 Desember 2021): 46–47, doi:10.54471/muhasabatuna.v3i2.1170.

[26]Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi, Edisi Revisi 2011* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), 358.

prinsip dasar akuntansi untuk menciptakan sistem yang lebih holistik, yang tidak hanya mempertimbangkan keuntungan material, tetapi juga mengintegrasikan dimensi etika, moral, dan spiritual secara seimbang. [27]

Untuk menjawab persoalan di atas, penting dilakukan analisis mendalam terhadap sumber primer dari prinsip dasar akuntansi yang berlaku saat ini. Analisis tersebut dapat diperkuat dengan bukti empiris berupa skandal-skandal akuntansi yang tercatat dalam berbagai sumber sekunder, guna mengidentifikasi akar masalah dari praktik akuntansi yang ada. Dari pembacaan awal terhadap sumber-sumber prinsip dasar akuntansi yang ada, ditemukan indikasi awal yang relevan sebagai berikut. Beberapa prinsip dasar, meskipun telah mapan, ternyata memiliki keterbatasan dalam mencerminkan dinamika sosial dan etika yang berkembang. Hal itu menunjukkan perlunya perubahan pendekatan yang lebih inklusif dan berfokus pada keberlanjutan, agar akuntansi dapat beradaptasi dengan tantangan zaman yang semakin kompleks.

Prinsip dasar akuntansi yang diterapkan saat ini cenderung berfokus pada aspek materialistik, seperti angka, laporan keuangan, dan pengukuran yang objektif, tanpa memberikan perhatian yang cukup pada dimensi moral dan spiritual. Hal ini mengarah pada orientasi yang terlalu sempit dalam mengevaluasi kinerja dan keberhasilan suatu entitas bisnis, yang lebih mementingkan keuntungan finansial daripada dampak sosial dan etika yang dihasilkan. Ketika perusahaan berfokus pada pencapaian

[27]Yulis Alfia, Iwan Triyuwono, and Aji Mulawarman, "Kritik Atas Tujuan Akuntansi Syariah: Perspektif Realitas Sadrian," *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)* 3, no. 2 (2018): 100–106, http://journal.pnm.ac.id/index.php/aksi/article/view/68.

keuntungan semata, nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial sering kali terabaikan, padahal hal-hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam operasional dan pengambilan keputusan bisnis.[28]

Selain itu, prinsip-prinsip dasar akuntansi yang berlaku saat ini, sering kali tidak mencerminkan kejujuran. Salah satu contoh utamanya adalah prinsip konservatisme, yang mengharuskan untuk tidak mencatat potensi keuntungan yang belum terealisasi, sementara potensi kerugian yang belum terjadi justru harus dicatat. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran, karena laporan keuangan seharusnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya, bukan didasarkan pada keputusan yang membatasi informasi.[29] Hal ini juga terlihat dalam prinsip materialitas, yang memungkinkan informasi yang dianggap tidak signifikan untuk diabaikan, padahal bisa jadi informasi tersebut sangat penting bagi pihak lain yang berkepentingan. Dalam konteks ini, prinsip materialitas juga memungkinkan prinsip dasar akuntansi lainnya untuk diabaikan jika dianggap tidak penting bagi pemilik modal, yang berarti ada potensi untuk menyembunyikan informasi yang seharusnya disampaikan secara transparan. Prinsip ini menunjukkan bagaimana akuntansi sering kali mengabaikan kejujuran demi memenuhi kepentingan pemegang saham atau pemilik modal.[30]

[28]Aji Dedi Mulawarman, *Akuntansi Pertanian: a Prophetic Legacy* (Surabaya: Penerbit Peneleh, 2019), xv.

[29]Waluyo, *Akuntansi Pajak (Ed.1)* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2008), 26.

[30]Dian Agustia dkk., *Sustainability - Konsep Dan Pelaporan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2023), 23–24.

Lebih lanjut, prinsip periode waktu yang membatasi laporan keuangan pada periode tertentu sering kali tidak relevan dengan kenyataan di lapangan, terutama untuk perusahaan dengan siklus operasional jangka panjang. Ini membuat laporan keuangan menjadi kurang representatif terhadap kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Selain itu, prinsip tersebut juga berpotensi menyebabkan kegiatan memperindah laporan keuangan (*window dressing*).[31] Begitu juga dengan penggunaan satuan moneter, yang tidak mencerminkan perubahan daya beli masyarakat, yang mana ini jelas bukan gambaran yang jujur tentang keadaan ekonomi.[32] Selain itu, prinsip *going concern* yang mengasumsikan perusahaan akan terus beroperasi tanpa mempertimbangkan kemungkinan kebangkrutan, dapat menutupi kenyataan bahwa banyak perusahaan akhirnya bisa bangkrut. Hal ini sangat merugikan pengguna laporan keuangan yang membutuhkan informasi yang lebih jujur dan akurat mengenai risiko yang ada.[33]

Dalam kerangka konseptual penyusunan laporan keuangan syariah di Indonesia, terdapat prinsip kejujuran, materialitas, dan konservatisme, yang sebenarnya saling bertentangan.[34] Kejujuran yang

[31]Mahesh Kumar M. Meenkera dan Sushil Beliya, *Accounting for Managers* (Bhopal: AG Publishing House, 2022), 124–28.

[32]Tri Astuti, Ribka Shintia Febriarti Bonara, dan Marti Dewi Ungkari, *Akuntansi Keuangan* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 8.

[33]Edward I. Altman, Edith Hotchkiss, dan Wei Wang, *Corporate Financial Distress, Restructuring, and Bankruptcy: Analyze Leveraged Finance, Distressed Debt, and Bankruptcy* (John Wiley & Sons, 2019), 224.

[34]*Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah* (KDPPLKS) adalah pedoman yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas berbasis syariah. Kerangka ini mengatur prinsip-prinsip akuntansi sesuai dengan prinsip syariah. KDPPLKS dikeluarkan oleh

dimaksud dalam akuntansi syariah sering kali terdistorsi oleh penerapan prinsip materialitas yang memungkinkan pengabaian informasi yang tidak dianggap signifikan. Sementara itu, konservatisme memaksa untuk tidak mencatat potensi keuntungan yang mungkin terjadi, namun tetap mengharuskan pencatatan kerugian yang belum terjadi. Ketika ketiga prinsip ini digabungkan dalam satu sistem, prinsip tersebut justru menciptakan ketidakseimbangan dalam mendefinisikan kejujuran dalam laporan keuangan. Kejujuran seharusnya mencakup transparansi dan keterbukaan informasi yang relevan, tanpa mengorbankan kepentingan pihak manapun, namun dalam praktiknya hal ini seringkali tidak tercermin dalam laporan keuangan yang ada.

Akuntansi yang ada saat ini juga terkesan rumit dan sulit dipahami oleh orang awam karena adanya asimetri informasi.[35] Padahal, dengan kemajuan teknologi seperti AI, *blockchain*, dan *big data*, kejujuran dalam laporan keuangan kini lebih mungkin untuk tercapai. Misalnya, AI dapat menganalisis laporan keuangan secara mendalam dalam hitungan detik dan mendeteksi kecurangan pada ribuan transaksi dengan cepat. Selain itu, *blockchain* menjamin bahwa setiap transaksi tervalidasi oleh jutaan pengguna, membuatnya tidak bisa diubah atau dimanipulasi tanpa izin bersama. Teknologi-teknologi ini membuka

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

[35]Alfizi dkk., *Manajemen Integrasi Nilai Islam dalam Berbagai Perspektif Teori* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2023), 70.

peluang besar untuk menciptakan sistem akuntansi yang lebih jujur, transparan, dan bebas dari korupsi.[36]

Namun, penting untuk dicatat bahwa kejujuran dalam akuntansi berbeda dengan kejujuran yang lebih universal atau yang diajarkan dalam tasawuf. Dalam akuntansi, kejujuran lebih diartikan sebagai obyektivitas, yang mengharuskan laporan mencerminkan fakta yang dapat diterima dan diverifikasi oleh pihak yang berkepentingan, meskipun hal tersebut bisa berarti menerima prinsip materialitas dan konservatisme. Obyektivitas ini memungkinkan informasi yang tidak material untuk diabaikan dan bahkan dapat digunakan untuk mengakali kebenaran, tergantung pada interpretasi dan kepentingan pihak yang terlibat.

Sebaliknya, kejujuran yang universal atau yang diajarkan dalam tasawuf berarti bahwa setiap proses dan hasil harus sesuai dengan kebenaran, tanpa kompromi atau distorsi. Kejujuran dalam konteks ini mengharuskan seluruh informasi akuntansi untuk dilaporkan dengan cara yang transparan dan akurat, mencerminkan kenyataan tanpa ada upaya untuk menyembunyikan atau mengubah fakta. Dengan demikian, penerapan kejujuran yang lebih mendalam dan tanpa kompromi ini dalam praktik akuntansi akan memperkuat integritas laporan keuangan dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan.

---

[36]Tengku Irmayani, Kariono, dan Fredick Broven, *Artificial Intelligence dalam Politik Mengubah Lanskap Demokrasi di Era Digital* (Bantul: Jejak Pustaka, 2024), 167–69.

Kejujuran dalam akuntansi seharusnya tidak menerima prinsip konservatisme atau materialitas. Konservatisme menghalangi untuk mencatat potensi keuntungan yang bisa dicapai, sementara materialitas membolehkan untuk mengabaikan informasi yang seharusnya disampaikan hanya karena dianggap tidak signifikan. Kejujuran menuntut agar setiap informasi yang relevan untuk pemangku kepentingan dilaporkan apa adanya, tanpa mempertimbangkan apakah itu sesuai dengan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Kejujuran dalam akuntansi harus patuh pada nilai-nilai kebenaran itu sendiri, yang mengharuskan seluruh proses dan output akuntansi mencerminkan kenyataan dan memberikan informasi yang jujur dan transparan.

Jika tidak berani melakukan dekonstruksi terhadap prinsip-prinsip dasar akuntansi yang sudah ada, akuntansi akan menjadi semakin tidak relevan dengan perkembangan zaman. Sementara itu, penerapan standar IFRS yang telah diadopsi di Indonesia memberikan peluang besar untuk memperbaharui sistem akuntansi agar lebih transparan dan mencerminkan kejujuran.[37] Namun, dekonstruksi terhadap prinsip-prinsip dasar akuntansi yang ada tidak dilakukan karena adanya keterikatan kuat pada norma-norma yang sudah mapan serta resistensi terhadap perubahan yang dapat dianggap mengganggu kestabilan sistem yang sudah terbentuk. Padahal, tanpa perubahan tersebut, akuntansi akan terus terhambat dalam menciptakan sistem yang lebih akurat, transparan,

[37]Arie Pratama, *Studi Implementasi Akuntansi Keuangan di Berbagai Industri* (Sleman: Bintang Semesta Media, 2022), 7–11.

dan sesuai dengan tuntutan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi prinsip dasar akuntansi yang ada saat ini serta menawarkan rekomendasi pembaruan prinsip dasar akuntansi dengan menggunakan nilai-nilai tasawuf.

Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar akuntansi yang ada saat ini perlu diperbaharui untuk mencerminkan dimensi sosial, etika, dan spiritual. Pembaruan ini akan menciptakan sistem akuntansi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan memperhatikan tanggung jawab sosial serta keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan dekonstruksi untuk mengkritisi prinsip-prinsip yang ada dan membuka ruang bagi dimensi sosial, etika, dan spiritual dalam akuntansi modern, guna menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan.

Menurut My Accounting Course, teori akuntansi adalah kerangka konseptual yang membentuk cara informasi keuangan direkam, diproses, dan dilaporkan, bukan sekadar kumpulan aturan teknis.[38] Menurut Hendriksen, teori akuntansi adalah hasil penalaran logis yang menghasilkan prinsip-prinsip umum. Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka untuk mengevaluasi praktik akuntansi dan mendorong inovasi dalam pengembangan prosedur baru. Teori tersebut mendasari pemahaman dan perbaikan praktik akuntansi, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi keuangan bagi investor, manajemen, dan pihak eksternal. Teori akuntansi tidak hanya

[38]William Smart Inyang, Rose Emmanuel Eyo, dan Mary Eyong Nkang, "Accounting Theory's Elements, Structures, Conceptual Framework and Financial Reporting: A Conceptual Approach," *Internasional Journal of Advanced Researh (IJAR)* 8, no. 12 (2020): 65.

mengatur praktik saat ini, tetapi juga memungkinkan perkembangan di masa depan.[39] Perkembangan ini membutuhkan panduan terbaik bagi para pengguna teknologi akuntansi dalam menyusun, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan secara akurat. Panduan tersebut diterima dalam dunia akuntansi berdasarkan pemahaman, penalaran, observasi, dan konsensus.[40]

Dalam sejarah literatur, panduan tersebut disebut dengan berbagai istilah yang berbeda. *APB Statement No. 4* menyebutnya sebagai keutamaan dasar akuntansi.[41] Buku *Prinsip Akuntansi Indonesia Tahun 1973* menyebutnya sebagai sifat dan keterbatasan laporan keuangan.[42] Buku *Prinsip Akuntansi Indonesia Tahun 1984* menyebutnya sebagai konsep-konsep dasar akuntansi.[43] Buku *Prinsip-prinsip Akuntansi Jilid 1* karya C. Rollin Niswonger dkk. menyebutnya sebagai sepuluh konsep dan prinsip dasar akuntansi.[44] Buku *Teori Akuntansi Buku Satu* karya Ahmad Riahi Belkaoui menyebutnya sebagai prinsip-

[39]Augustine E Osho dan Florence M Ayorinde, "The General Tenets of Positive Accounting Theory Towards Accounting Practice and Disclosure in Corporate Organizations in Nigeria," *Journal of Economics and Sustainable Development* 9, no. 20 (2018): 1, https://core.ac.uk/reader/234648624.

[40]Jan Hoesada, *Teori Akuntansi dalam Hampiran Historiografis Taksonomis* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022), 259.

[41]Accounting Principles Board, *APB Statement No.4: Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business Enterprises* (American Institute of Certified Public Accountants, 1970), 10–11.

[42]Ikatan Akuntan Indonesia, *Prinsip Akuntansi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1973), 14–15.

[43]Ikatan Akuntan Indonesia, *Prinsip Akuntansi Indonesia 1984* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991, 4–6.

[44]C Niswonger Rollin, Philip E. Fess, dan Carl S. Warren, *Prinsip-Prinsip Akuntansi, Jilid 1*, 16 ed. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992), 526–44.

prinsip akuntansi.[45] *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah* (KDPPLKS) tidak memberi sebutan khusus untuk panduan tersebut, namun nilai-nilainya tersebar dalam bebagai halaman dokumen.[46]

Hal serupa juga ditemukan dalam *Conceptual Framework for Financial Reporting* (CFFR)[47] dan *Draft Exposure Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan* (DE KKPK).[48] Terakhir, buku *Teori Akuntansi dalam Hampiran Historiografis Taksonomis* karya Jan Hoesada menyebutnya dengan dua nama, yaitu prinsip akuntansi dan prinsip dasar akuntansi. Beberapa panduan disebutkan secara berurutan,

[45]Ahmed Riahi Belkaoui, *Teori Akuntansi Buku Satu*, 5 ed. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006), 270–73.

[46]Ikatan Akuntan Indonesia, *"Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah"* (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2007).

[47]*Conceptual Framework for Financial Reporting* (CFFR) adalah kerangka konseptual yang dikeluarkan oleh International Accounting Standards Board (IASB) pada September 2010 dan direvisi Maret 2018. Tujuannya adalah untuk menyediakan pedoman bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan dengan prinsip transparansi, relevansi, dan konsistensi. IASB sendiri adalah badan independen yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menetapkan standar akuntansi internasional yang dikenal sebagai International Financial Reporting Standards (IFRS). IASB berlokasi di London, Inggris. Lembaga ini bertujuan untuk mempromosikan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, transparan, dan dapat dipahami.

[48]*DE KKPK* adalah dokumen konsep yang diterbitkan untuk konsultasi publik mengenai revisi kerangka konseptual pelaporan keuangan. Dokumen ini dirancang untuk memberikan pedoman bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. *DE KKPK* ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada 26 Juni 2019. Dokumen tersebut dikeluarkan sebagai bagian dari upaya untuk menyesuaikan standar pelaporan keuangan Indonesia dengan standar internasional, yaitu IFRS.

sementara yang lain tidak. Meskipun istilahnya berbeda, panduan tersebut berfungsi untuk memastikan akurasi, konsistensi, dan transparansi dalam pelaporan keuangan.[49]

Dalam penelitian ini, istilah prinsip dasar akuntansi digunakan untuk menyebut panduan tersebut dengan beberapa alasan. Pertama, istilah tersebut menggambarkan panduan menyeluruh yang digunakan dalam proses akuntansi. Berbagai literatur akuntansi memang menggunakan istilah berbeda untuk menggambarkan konsep ini. Namun, meskipun istilahnya beragam, inti dari setiap istilah tetap merujuk pada prinsip yang sama, yaitu memastikan akurasi, konsistensi, dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Kedua, pemilihan istilah prinsip dasar akuntansi dilakukan atas pertimbangan logis untuk menyatukan variasi terminologi yang ada, sekaligus memberikan kejelasan dan konsistensi dalam penelitian ini. Dengan demikian, penggunaan istilah ini dapat menghindari kebingungan dan memastikan fokus tetap pada panduan yang mendasari pelaporan keuangan. Ketiga, istilah ini menegaskan bahwa yang dibahas adalah aspek fundamental dalam akuntansi, bukan hanya aspek teknis.

Perlu diperhatikan bahwa penerapan prinsip-prinsip dasar akuntansi memerlukan konsensus dari berbagai pihak dengan kepentingan berbeda. Karena informasi keuangan penting bagi banyak pihak, prinsip-prinsip tersebut harus dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Proses mencapai konsensus ini memang rumit, namun tujuannya tetap menjaga integritas dan keandalan informasi

[49]Hoesada, *Teori Akuntansi dalam Hampiran*, 259.

keuangan.[50] Prinsip dasar akuntansi adalah fondasi yang diakui dalam dunia akuntansi, memberikan kerangka kerja fundamental dalam praktik akuntansi. Namun, dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang kompleks, prinsip-prinsip ini perlu dinilai ulang agar tetap relevan, terutama dalam konteks keadilan sosial dan keberlanjutan.[51]

Pendekatan dekonstruksi mengungkap bias dan asumsi tersembunyi dalam prinsip dasar akuntansi tanpa menggantikannya. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan prinsip-prinsip tersebut memenuhi kebutuhan akuntansi modern yang lebih inklusif dan etis. Pendekatan tersebut membuka perspektif baru untuk memperkaya praktik akuntansi, mengidentifikasi elemen yang tidak relevan atau memperkuat ketimpangan. Dengan demikian, akuntansi dapat bertransformasi menjadi alat yang lebih adaptif dan bermanfaat, mendukung keberlanjutan, keadilan sosial, serta meningkatkan akuntabilitas terhadap dampak etis dan ekologis bisnis.

Sebagai bagian dari kajian di atas, penelitian ini memperkenalkan nilai-nilai tasawuf sebagai perspektif alternatif dalam mengkritisi prinsip-prinsip dasar akuntansi. Nilai-nilai tasawuf, dengan penekanan pada keseimbangan dan kejujuran, dapat berfungsi sebagai kerangka etis yang relevan dalam mengarahkan reformasi akuntansi yang lebih adil dan inklusif. Meskipun tasawuf sering kali diidentifikasi

[50] *Hoesada, Teori Akuntansi dalam Hampiran,* 259.

[51] Suhendi Zulhelmy, *Dasar–Dasar Akuntansi Islamic View* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 29.

dengan konsep spiritual, nilai-nilainya dapat diterapkan secara lebih luas dalam konteks sosial-ekonomi modern. Hal ini memungkinkan seseorang untuk menjadi pebisnis yang sufi, yang tidak hanya mengedepankan profit tetapi juga berupaya memajukan praktik akuntansi yang lebih etis.[52]

Selain itu, nilai-nilai tasawuf juga dapat digunakan untuk memperbaiki prinsip dasar akuntansi, sehingga lebih mencerminkan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aspek pelaporannya. Dekonstruksi prinsip dasar akuntansi menggunakan nilai-nilai tasawuf bertujuan menggantikan pendekatan yang terlalu materialistik dengan perspektif yang lebih etis dan berkelanjutan. Nilai-nilai tasawuf memberikan kerangka yang seimbang antara dunia material dan spiritual. Dalam tradisi tasawuf, nilai-nilai seperti kejujuran, kemudahan, takut kepada tuhan, hijrah, persahabatan, kesungguhan, pengawasan, dan semangat tak pernah berhenti dalam mencari kebenaran menjadi dasar untuk mengembangkan sistem akuntansi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada moralitas dan etika. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini, prinsip dasar akuntansi dapat dibangun kembali menjadi lebih inklusif, etis, dan berkelanjutan, serta memainkan peran penting dalam mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan di dunia bisnis modern.

Dekonstruksi dilakukan dengan merujuk pada kitab-kitab *turās* tasawuf yang kaya akan warisan spiritual dan etika Islam. Kitab-kitab ini, yang meliputi karya-karya klasik dari para sufi dan ulama besar,

[52]Azim Jamal, *Corporate Sufi* (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2007), 26.

menyajikan pandangan mendalam tentang keseimbangan antara dunia material dan spiritual. Dengan menggunakan *turāṡ* tasawuf sebagai dasar, dekonstruksi terhadap prinsip-prinsip dasar akuntansi dapat membantu mengidentifikasi aspek-aspek etis yang mungkin terabaikan dalam praktik akuntansi modern. Tasawuf menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, nilai-nilai yang selaras dengan tuntutan akuntansi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Contoh dari kitab-kitab tasawuf tersebut adalah kitab-kitab tasawuf al-Syāżiliyyah. Al-Syāżiliyyah sendiri merupakan nama suatu tarekat yang didirikan oleh Syekh Abū al-Ḥasan al-Syāżilī.[53] Kata al-Syāżiliyyah dinisbatkan pada suatu daerah di Afrika, dimana al-Syāżilī menghabiskan masa kecilnya hingga beranjak dewasa di sana.[54] Berbeda dengan kebanyakan tarekat yang menganjurkan murid-muridnya untuk menjauhi dunia, al-Syāżiliyyah justru mewajibkan para muridnya untuk bekerja.

Selain itu, para muridnya diperintahkan untuk selalu menghadiri salat lima waktu secara berjamaah. Tarekatnya menekankan kesalehan sosial daripada personal.[55] Syekh Abū al-Ḥasan al-Syāżilī sendiri adalah

[53]Muhammad Nasrullah, "Tarekat Syāżiliyyah dan Pengaruh Ideologi Aswaja di Indonesia," *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 2 (31 Desember 2020): 240, doi:10.33852/jurnalin.v4i2.225.

[54]Syekh Abu al-Hasan asy-Syadzili, *Risalah al-Amin, Kitab Tasawuf yang Mengantarkan Kita Cepat Sampai kepada-Nya* (Jakarta: Wali Pustaka, 2018), xvii.

[55]Rosi Islamiyati, "Tarekat Syāżiliyyah dalam Dimensi Kesalehan Individual dan Kesalehan Sosial serta Pengaruh Modernisasi dan Globalisasi," *Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* 22, no. 1 (11 Maret 2022): 138–40, doi:10.14421/ref.2022.2201-07.

seorang yang kaya raya. Dia selalu berpakaian rapi dan indah ke mana pun dia berada.[56] Tarekatnya dikenal ringan dalam amal, lebih menekankan *riyāḍah* hati daripada fisik. Tidak ada larangan untuk menikmati makanan dan minuman yang nikmat selama tetap bersyukur kepada Allah. Oleh karena hal itu, tarekat ini sering disebut sebagai tarekat syukur.[57]

Ajaran Syāżiliyyah dipilih sebagai landasan dekonstruksi prinsip dasar akuntansi dalam penelitian ini karena:

1. Pendekatannya moderat terhadap kehidupan dunia.

   Al-Syāżilī mengajarkan bahwa seorang sufi tidak seharusnya memiliki cinta berlebihan terhadap dunia (*ḥubb al-dunyā*), tetapi juga tidak perlu membenci atau menanggalkan keduniawian seperti kekayaan dan jabatan. Hal yang terpenting adalah perilaku seorang sufi harus sesuai dengan ketentuan syariat dan mengenal Allah (*ma'rifat Allāh*).[58]

2. Keterlibatan sosial yang aktif.

   Abū al-Ḥasan al-Syāżilī, seorang sufi besar sekaligus pendiri tarekat al-Syāżiliyyah, dikenal tidak hanya karena kedalaman spiritualnya, tetapi juga karena keterlibatannya yang aktif dalam kehidupan sosial. Ia menekankan bahwa seorang sufi tidak seharusnya

[56]Muḥammad Ibn Abī al-Qāsim al-Ḥumairī, *Jejak-Jejak Wali Allah, Melangkah Menuju Gerbang Kewalian Bersama Syekh Abū al-Ḥasan al-Syāżilī* (Jakarta: Erlangga, t.t.), 4.

[57]Abdul Wahab Farhat dan Muhammad Abdullah, *Syekh Abū al-Ḥasan al-Syāżilī Sang Wali Penembus Batas* (Depok: Keira Publishing, 2019), 159.

[58]Saifulah, "Distingsi dan Diaspora Tasawuf Abū Al-Ḥasan al-Syāżilī," *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (8 Desember 2014): 354, doi:10.15642/teosofi.2014.4.2.353-381.

hanya berkonsentrasi pada ritual agama, melainkan juga harus berperan aktif dalam masyarakat. Menurutnya, jika semua *sālik* (orang yang menjalani perjalanan spiritual) yang jujur dan saleh hanya fokus pada ibadah tanpa memperhatikan kondisi sosial, orang-orang yang tidak jujur dan serakah akan mengambil alih kekuasaan. Pandangan ini menunjukkan pentingnya keterlibatan sosial aktif sebagai bagian dari keseimbangan antara spiritualitas dan tanggung jawab sosial.[59]

3. Pencapaian hakikat spiritual melalui cinta dan *ma'rifat.*

Pada awalnya al-Syāżilī memandang pembersihan jiwa sebagai metode terbaik untuk mencapai hakikat spiritual. Proses ini terdiri atas tiga tahapan penting: *takhallī* (membersihkan jiwa dari hal-hal buruk), *taḥallī* (mengisi jiwa dengan kebaikan), dan *tajallī* (perwujudan diri yang bersih sebagai cerminan kepribadian sejati). Ketiga tahapan ini dianggap esensial dalam membentuk karakter individu melalui model pendidikan karakter yang diterapkan dalam ajarannya.

Namun pada perkembangannya al-Syāżilī melakukan pembaharuan dalam tasawuf, meninggalkan metode *takhallī*, *taḥallī* ,dan *tajallī.* Dia menggunakan metode cinta dan *ma'rifat* pada Allah dalam pencapaian hakikat spiritual. Metodenya dikenal juga dengan tarekat syukur yang menekankan kejujuran dalam ibadah dan

[59]Erlina Anggraini, "Redefining The Concept of Asceticism (Zuhd) in Tasawwuf:Abul Hasan Ash-Shadhili's View And His Tariqa Shadhiliyya," *Teosofia: Indonesian Journal of Islamic Mysticism* 8, no. 1 (29 Juni 2019): 28.

keyakinan untuk mencapai Allah, bukan banyaknya pembersihan jiwa.[60]

4. Semangat jihad dalam melawan ketidakadilan.

   Abū al-Ḥasan al-Syāżilī mengajarkan semangat jihad yang kuat dalam melawan ketidakadilan. Pada usia 60 tahun, meskipun mengalami kebutaan, ia tetap berjuang membela umat muslim ketika Prancis menduduki Mesir selama Perang Salib. Pandangannya menunjukkan bahwa jihad tidak hanya berupa perjuangan spiritual melawan hawa nafsu, tetapi juga mencakup perlawanan fisik terhadap penjajahan dan penindasan. Semangat jihad ini diwariskan kepada generasi selanjutnya, seperti perjuangan Umar Mukhtar, seorang pengikut tarekat al-Syāżiliyyah, yang memimpin perlawanan panjang melawan kolonial Italia di Libya. Jihad dalam tarekat ini menjadi simbol keberanian dan keteguhan hati dalam mempertahankan kebenaran, meskipun menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar.[61]

5. Kemampuan beradaptasi dengan tradisi lokal.

   Al-Syāżilī dan para penerusnya mengembangkan tarekat ini dengan cara yang memungkinkan ajaran spiritualnya dipraktikkan di tengah masyarakat tanpa bertentangan dengan tradisi lokal. Kemampuan adaptasi ini terlihat dalam keberhasilan tarekat al-Syāżiliyyah untuk berintegrasi dengan kebudayaan di berbagai wilayah, seperti Afrika Utara, Mesir, dan daerah lainnya. Fleksibilitas ini membuat tarekat tetap relevan dan diterima secara luas karena

[60]Abdul Wahab Farhat and Muhammad Abdullah, *Syekh Syekh Abū Al-Ḥasan al-Syāżilī Sang Wali Penembus Batas* (Depok: Keira Publishing, 2019), 159–212.

[61]Meirison Meirison dan M. Harir Muzakki, "Implementing The Spirit of Jihad in Sufism," *Jurnal Theologia* 31, no. 1 (21 Juni 2020): 13–14.

mampu menyerap elemen-elemen tradisi lokal sambil tetap berpegang pada inti ajaran tasawuf.[62]

6. Relatif mudah, tidak formalistis.

Tarekat al-Syāżiliyyah dikenal mudah dalam pengamalannya.[63] Pendekatan yang digunakan lebih menekankan syukur (*gratitude*), yaitu ajaran untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia, baik dalam kondisi senang maupun sulit. Metode ini berbeda dengan pendekatan *mujāhadah* yang diperkenalkan oleh al-Gazālī, yang menekankan perjuangan keras melawan hawa nafsu dan disiplin diri yang ketat. Dalam tarekat al-Syāżiliyyah, para pengikut tidak diharuskan menjalani latihan spiritual yang berat, seperti puasa panjang atau pembatasan kenikmatan duniawi, melainkan diajarkan untuk bersyukur secara sederhana dan praktis dalam kehidupan sehari-hari.[64]

Menurut Husain, pada awalnya tarekat al-Syāżiliyyah tidak memerlukan silsilah formal dalam menjalankan tradisi spiritualnya. Otoritas para pemimpin tarekat ini didasarkan pada *wilāyah* (kepemimpinan spiritual) yang bersifat langsung, tanpa dimediasi oleh jalur keturunan. Bahkan Syekh Abū al-'Abbās al-Mursī menyatakan bahwa seorang wali kutub tidak harus keturunan Nabi Saw. Ia bisa saja berasal dari keturunan yang lain.[65] Selain itu, para

[62]Saifulah, "Distingsi Dan Diaspora Tasawuf Abū Al-Ḥasan al-Syāżilī," 371–72.

[63]Samsul Munir Amin, *Ilmu Tasawuf* (Jakarta: Amzah, 2012), 310.

[64]Stephen Davis Trevathan, "Living without Why: An Exploration of Personal Muslim Authenticity" (University of Birmingham, College of Arts of Law Department of Theology and Religion, 2013), 230–32.

[65]Ibnu Athaillah, *Laṭā'if al-Minan, Rahasia Yang Mahaindah, Belajar Hidup Berkah dari Kekasih Allah* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008), 159.

tokoh awal seperti al-Syāżilī dan al-Iskandarī menekankan pentingnya hubungan langsung dengan Allah dan esensi ajaran tanpa bergantung pada ritual formal atau silsilah tertentu. Namun, dalam perkembangannya, beberapa cabang tarekat mulai menggunakan inisiasi formal, sementara yang lain tetap memberikan *ijāzah* tanpa ritual khusus. Hal ini menegaskan bahwa dalam tarekat al-Syāżiliyyah, esensi ajaran lebih diutamakan dibandingkan ritual formal yang mengikat.[66]

Melalui pendekatan moderat terhadap kehidupan duniawi, Syāżiliyyah menyeimbangkan pemanfaatan kekayaan dengan prinsip-prinsip spiritual yang etis. Keterlibatan sosial yang aktif menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, melampaui sekadar fokus pada keuntungan semata. Pendidikan karakter melalui pembersihan jiwa mendorong integritas dan moralitas dalam setiap keputusan keuangan, menghindari praktik-praktik yang hanya berorientasi pada angka. Semangat jihad dalam melawan ketidakadilan memperkuat pentingnya transparansi dan keadilan dalam laporan keuangan. Kemampuan beradaptasi dengan tradisi lokal memberikan fleksibilitas dalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi di berbagai konteks budaya. Dengan pendekatan yang mudah diamalkan dan tidak formalistis, ajaran Syāżiliyyah menawarkan kerangka kerja fleksibel, etis, dan holistik untuk menghadapi tantangan akuntansi dalam dunia bisnis modern.

[66]Nathan Hofer, *The Popularisation of Sufism in Ayyubid and Mamluk Egypt, 1173-1325* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016), 137–38.

Fleksibilitas ajaran ini memungkinkan integrasi prinsip-prinsip spiritual dengan praktik bisnis tanpa mengabaikan profesionalisme.

Adapun kitab-kitab tasawuf yang memuat ajaran Syāżiliyyah yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain: *Risālat al-Amīn* karya Syekh Abū al-Ḥasan al-Syāżilī, *Laṭā'if al-Minan* karya Syekh Ibnu 'Aṭā'illah al-Sakandarī, *Syarah al-Ḥikam al-'Aṭā'iyyah* karya Syekh Aḥmad Zarrūq, dan *Durrat al-'Asrār* karya Syekh Ibnu Ṣabbāg. Kitab-kitab tersebut memuat ajaran yang relevan dengan konteks kehidupan sosial dan spiritual, termasuk dalam pengambilan keputusan bisnis yang beretika. Pendekatan Syāżiliyyah, yang menekankan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual, dapat diterapkan dalam praktik akuntansi modern.

Ajaran ini memadukan tanggung jawab sosial dengan integritas spiritual, memastikan bahwa keputusan keuangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan prinsip keadilan. Fleksibilitas ajaran ini memungkinkan penyesuaian terhadap konteks budaya lokal, seperti yang terlihat dari penyebaran tarekat Syāżiliyyah di Afrika Utara, Mesir, hingga Indonesia.[67] Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan nilai-nilai tasawuf Syāżiliyyah sebagai landasan untuk mendekonstruksi prinsip-prinsip dasar akuntansi, menjadikannya lebih inklusif, etis, dan berkelanjutan.

[67]Rusydie Anwar, *Syeikh Abu Hasan As-Syadzili, Kisah Hidup dan Dalil Tasawuf untuk Menggapai Kebahagiaan Sejati* (Yogyakarta: Araska, 2022), 90–92.

Pendekatan tasawuf Syāżiliyyah menawarkan solusi praktis untuk mengatasi kelemahan dalam prinsip dasar akuntansi yang ada dengan menyeimbangkan antara keuntungan material dan tanggung jawab moral. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan pengawasan spiritual dari ajaran Syāżiliyyah memberikan landasan etis yang kuat untuk menciptakan praktik akuntansi yang lebih transparan dan berkelanjutan. Penelitian ini tidak hanya menganalisis kelemahan dalam prinsip dasar akuntansi yang ada, tetapi juga menawarkan pendekatan yang lebih seimbang, relevan, dan dapat diterapkan dalam dunia bisnis modern. Oleh karena itu, nilai-nilai tasawuf Syāżiliyyah digunakan sebagai kerangka untuk memperbaiki prinsip-prinsip akuntansi, menciptakan praktik yang lebih etis, inklusif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini penting karena menawarkan alternatif terhadap paradigma positivisme yang dominan dalam riset akuntansi, yang lebih menekankan aspek kuantitatif dan empiris. Pendekatan positivisme cenderung mengabaikan dimensi sosial, etika, dan spiritual, yang merupakan aspek penting dalam praktik akuntansi yang berkelanjutan dan inklusif. Sebaliknya, pendekatan dekonstruksi yang diadopsi dalam penelitian ini membuka ruang untuk mengeksplorasi nilai-nilai etika dan kearifan lokal, termasuk tasawuf, yang selama ini terabaikan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menggali perspektif yang lebih holistik, mengintegrasikan prinsip moral dan spiritual ke dalam praktik akuntansi modern, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan material semata.

Mengangkat tasawuf dalam konteks hukum dan akuntansi berfokus pada aspek moral dan spiritual yang dapat memperkaya pemahaman terhadap praktik akuntansi. Dalam sistem akuntansi yang terstruktur secara konvensional, prinsip-prinsip seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan sering kali diabaikan. Sistem akuntansi konvensional sering mengabaikan prinsip kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Dengan menggunakan tasawuf yang menekankan kejujuran, kerendahan hati, dan keharmonisan, penelitian ini merekomendasikan prinsip dasar akuntansi yang lebih etis dan holistik, mempertimbangkan dampak sosial dan spiritual selain keuntungan materi. Pendekatan ini mengkritisi prinsip dasar akuntansi tradisional, membuka peluang pembaruan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Filosofi dekonstruksi dalam akuntansi muncul untuk mengatasi keterbatasan prinsip dasar yang tidak mencakup dinamika sosial, ekonomi, dan spiritual modern. Pendekatan ini mempertanyakan asumsi praktik akuntansi tradisional yang berfokus pada nilai material dan efisiensi, seperti entitas ekonomi, periode waktu, dan pengungkapan paripurna, yang sering mengabaikan aspek moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tasawuf, seperti kejujuran, kolaborasi, dan kesederhanaan, dekonstruksi ini menciptakan pendekatan holistik yang memandang perusahaan sebagai bagian dari ekosistem sosial yang lebih besar. Penyesuaian ini diperlukan untuk menyelaraskan praktik akuntansi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam riset ini adalah:

1. Apa saja kelemahan dalam prinsip dasar akuntansi saat ini, dan mengapa nilai-nilai tasawuf digunakan untuk mendekonstruksi prinsip dasar tersebut?
2. Bagaimana nilai-nilai tasawuf digunakan untuk mendekonstruksi prinsip dasar akuntansi tersebut sehingga dapat mengatasi kelemahannya?
3. Apa saja rekomendasi prinsip dasar akuntansi berdasarkan dekonstruksi dengan nilai-nilai tasawuf tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja kelemahan dalam prinsip dasar akuntansi saat ini, dan mengapa nilai-nilai tasawuf digunakan untuk mendekonstruksi prinsip dasar tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai tasawuf digunakan untuk mendekonstruksi prinsip dasar akuntansi tersebut sehingga dapat mengatasi kelemahannya.
3. Untuk mengetahui apa saja rekomendasi prinsip dasar akuntansi berdasarkan dekonstruksi dengan nilai-nilai tasawuf tersebut?

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran teori. Spiritualisasi akuntansi harus juga mendekonstruksi bangunan keilmuannya, tidak hanya *ayatisasi* dan *arabisasi* istilah-istilah akuntansi yang berterima umum saat ini.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung sistem akuntansi jujur, baik di sektor privat maupun publik. Sistem ini mencakup transparansi, akurasi, dan akuntabilitas, memastikan laporan keuangan yang akurat dan penggunaan dana negara yang efisien, meningkatkan kepercayaan publik dan integritas pengelolaan sumber daya.
3. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk mengembangkan pemikiran kritis terhadap konsep akuntansi yang ada. Dengan mendekonstruksi prinsip dasar menggunakan nilai-nilai tasawuf, penelitian ini dapat menawarkan perspektif akuntansi yang lebih holistik, berkelanjutan, serta mempertimbangkan aspek finansial, etika, dan spiritual.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi MUI, sehingga fatwa yang dikeluarkan tentang transaksi ekonomi syariah tidak hanya berbicara tentang sah atau tidak sah, tetapi juga menilai kejujuran, kemudahan, etika, hubungan yang harmonis antara manajer dengan *stakeholders*.
5. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi bank syariah dalam menyusun peraturan bagi karyawannya agar peraturan

tersebut sejalan dengan semangat spiritualisasi akuntansi, sehingga seluruh elemen perusahaan menyadari keberadaan ilahi dalam menjalankan operasional bisnisnya.

6. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi masyarakat dalam merancang pola hubungan yang jujur dan harmonis antar elemen masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

E. Kajian Pustaka

Dekonstruksi prinsip dasar akuntansi dengan menggunakan nilai-nilai tasawuf adalah bentuk dari spiritualisasi ilmu pengetahuan modern. Beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan tema tersebut antara lain:

1. Djasuli dkk. menulis artikel ilmiah berjudul "Akuntansi 'Sirrun': Menyingkap Standar Akuntansi Internasional Berbasis Ajaran Tasawuf Syaikhona Kholil." Penelitian tersebut bertujuan untuk mengungkap nilai-nilai yang mendasari standar akuntansi internasional dengan menggunakan pendekatan pemikiran tasawuf Syaikhona Kholil. Metode yang digunakan melibatkan eksplorasi pemikiran tasawuf Syaikhona Kholil serta memohon petunjuk Tuhan melalui praktik keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi internasional cenderung berfokus pada kepentingan *stakeholders*, sedangkan konsep Akuntansi *Sirrun* menawarkan pandangan holistik yang mencakup nilai-nilai tak terlihat. Implikasi penelitian tersebut adalah perlunya rekonstruksi standar akuntansi dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritualitas

untuk mencapai keseimbangan yang dapat mengungkap dimensi abstrak dalam realitas akuntansi.[68]

2. Farhan menulis artikel ilmiah berjudul "Zuhud, Sebuah Laku Tasawuf untuk Tazkiyah Peradaban Akuntansi." Penelitian tersebut bertujuan untuk merekonstruksi akuntansi modern dengan menggunakan paradigma postmodernisme, di mana zuhud dijadikan sebagai pendekatan dekonstruktif. Hasil analisis penelitian tersebut menekankan pentingnya kembali kepada nilai-nilai ketuhanan dalam praktik ilmu akuntansi. Nilai-nilai tersebut meliputi mengesakan Allah, mematuhi perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan menjadikan-Nya sebagai tujuan hidup.[69]
3. Mulawarman menulis artikel ilmiah berjudul "Menuju Teori Akuntansi Syariah Baru." Tulisan tersebut bertujuan untuk menyusun *New Islamic Accounting Theory* (NIAT) atau teori akuntansi syariah baru. NIAT dirancang berdasarkan atmosfer Islam yang universal, nilai-nilai tauhid, serta keunikan dalam aktivitas bisnis umat muslim.[70]

---

[68]Mohamad Djasuli dkk., "Akuntansi 'Sirrun': Menyingkap Standar Akuntansi Internasional Berbasis Ajaran Tasawuf Syaikhona Kholil," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 14, no. 3 (31 Desember 2023): In Press, doi:10.21776/ub.jamal.2023.14.3.39.

[69]Ali Farhan, "Zuhud, Sebuah Laku Tasawuf untuk Tazkiyah Peradaban Akuntansi," *Akuntansi : Jurnal Akuntansi Integratif* 6, no. 2 (2 Oktober 2020): 87–96, doi:10.29080/jai.v6i2.261.

[70]Aji Dedi Mulawarman dkk., "Menuju Teori Akuntansi Syariah Baru," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 1 Januari 2011, 61, doi:10.20885/jeki.vol1.iss1.art4.

4. Triyuwono menulis artikel ilmiah berjudul "Akuntansi Syariah, Menuju Puncak Kesadaran Ketuhanan Manunggaling Kawula Gusti." Dalam tulisannya, ia menyatakan bahwa akuntansi syariah harus memahami kenyataan secara ontologis dalam arti jamak, mulai dari realitas fisik hingga kenyataan mutlak. Dari segi epistemologis, akuntansi syariah harus disusun berdasarkan kombinasi nalar rasional dengan emosi dan intuisi, serta kombinasi simultan antara dunia material dan immaterial. Landasannya adalah falsafah bahwa segala sesuatu milik Tuhan akan kembali kepada Tuhan, atau secara kontroversial dikenal sebagai *manunggaling kawula-Gusti*. Dengan filosofi tersebut, akuntansi syariah dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran akan Tuhan. Meskipun namanya terdengar diskriminatif, akuntansi syariah dimaksudkan untuk digunakan oleh semua orang tanpa membedakan agama, karena hakikat Islam adalah rahmat bagi semesta. Harapannya, akuntansi syariah dapat memperbaiki perilaku manusia agar menjadi lebih patuh kepada Tuhan.[71]
5. Sholihan menulis buku berjudul *Falsafah Kesatuan Ilmu, Paradigma Keilmuan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*. Dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa spiritualisasi ilmu-ilmu modern berarti menghadirkan ketuhanan dan etika pada ilmu pengetahuan modern untuk memastikan bahwa semua ilmu pengetahuan

[71]Iwan Triyuwono, "Akuntansi Syari'ah: Menuju Puncak Kesadaran Ketuhanan Manunggaling Kawulo Gusti," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 2, no. 2 (2011): 19–20, https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/148.

ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan alam semesta, bukan untuk menghancurkannya. Istilah spiritualisasi digunakan sebagai pengganti islamisasi dengan tujuan menghindari kontroversi. Istilah islamisasi ilmu pengetahuan masih belum sepenuhnya diterima di kalangan intelektual muslim. Namun, spiritualitas yang dimaksud merujuk pada nilai-nilai sakral yang terkandung dalam ajaran Islam.[72]

6. Kamayanti menulis buku berjudul *Metode Penelitian Kualitatif Akuntansi, Pengantar Religiositas Keilmuan*. Dalam bukunya, ia membagi penelitian akuntansi menjadi lima paradigma, yaitu positivisme, interpretivisme, kritis, postmodernisme, dan spiritualisme religius.[73] Ia juga menawarkan pendekatan hermeneutika, etnometodologi, dan fenomenologi dalam riset akuntansi untuk memperluas cara pandang dalam memahami fenomena akuntansi.[74]
7. Triyuwono dkk. menulis buku berjudul *Filsafat Ilmu Akuntansi, Berpikir Kontemplatif, Holistik, Intuitif, Imajinatif, Kreatif, Rasional dan Radikal dalam Akuntansi*. Dalam bukunya, disebutkan bahwa akuntansi berbasis spiritualisme religius adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengkomunikasian transaksi sosial dan bisnis

[72]Sholihan, *Falsafah Kesatuan Ilmu, Paradigma Keilmuan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (Semarang: Rasail Media Group, 2021), 210–11.

[73]Ari Kamayanti, *Metode Penelitian Kualitatif Akuntansi, Pengantar Religiositas Keilmuan* (Malang: Penerbit Peneleh, 2021), 50.

[74]Kamayanti, *Metode Penelitian Kualitatif Akuntansi, Pengantar Religiositas Keilmuan* , 110, 149, 169.

yang didasarkan pada wahyu Tuhan. Hati yang bersih pada manusia dan ruh Tuhan menjadi faktor utama dalam penyajian laporan akuntansi. Keikhlasan dan kejujuran para penyaji laporan akuntansi juga menjadi landasan utama, sehingga informasi yang disajikan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi penggunanya.[75]

8. Kamayanti menulis buku berjudul *Metodologi Konstruktif Riset Akuntansi, Membumikan Religiositas*. Dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa dalam dua dekade terakhir, pendekatan dekonstruksi yang dicetuskan oleh Jacques Derrida tampaknya telah menarik perhatian sebagian periset akuntansi. Dekonstruksi menjadi menarik karena mempertanyakan kemapanan ilmu, termasuk ilmu akuntansi. Sikap kritis tersebut kerap menimbulkan kegelisahan bagi banyak pihak. Akuntansi, yang selama ini dianggap mapan dengan definisi-definisi dan praktik-praktik yang diajarkan, ditantang dengan beragam definisi serta praktik baru.[76]
9. Mulawarman menulis buku berjudul *Menyibak Akuntansi Syariah, Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi*. Dalam bukunya, ia menyebutkan bahwa banyak pakar akuntansi syariah yang bersikap pragmatis justru hanya membenarkan teori akuntansi konvensional (kapitalis), melabelinya dengan ayat-ayat al-Quran tanpa menyentuh landasan filosofisnya, lalu menyajikannya

[75]Iwan Triyuwono dkk., *Filsafat Ilmu Akuntansi, Berpikir Kontempelatif, Holistik, Intuitif, Imajinatif, Kreatif, Rasional dan Radikal dalam Akuntansi* (Malang: Mitra Wacana Media, 2016), 210.

[76]Ari Kamayanti, *Metodologi Konstruktif Riset Akuntansi, Membumikan Religiositas* (Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh, 2016), 144–45.

> sebagai teori akuntansi syariah. Seharusnya, akuntansi syariah, sebagaimana dinyatakan oleh Triyuwono, memiliki dasar filsafat yang manusiawi, mengemansipasi, ruhaniah, dan berketuhanan. Konsep tersebut harus dilandasi oleh iman, ilmu, dan amal untuk mencerminkan esensi akuntansi syariah yang sebenarnya.[77]

Berdasarkan riset-riset terdahulu, belum ada penelitian yang secara komprehensif mendekonstruksi prinsip dasar akuntansi berbasis *turāṡ* klasik, baik dari *turāṡ fiqh* maupun tasawuf. Penelitian ini menawarkan inovasi dengan pendekatan baru, yaitu mendekonstruksi prinsip dasar akuntansi menggunakan nilai-nilai tasawuf yang terdapat dalam *turāṡ* klasik, yang merupakan bagian integral dari khazanah pengetahuan Islam. Pendekatan ini membuka ruang untuk menggabungkan ajaran spiritual dengan praktik akuntansi, menciptakan sistem akuntansi yang lebih holistik, etis, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya kajian akuntansi yang berbasis pada tradisi dan nilai-nilai Islam.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya terbatas pada konteks Indonesia, penelitian ini merujuk pada sumber prinsip dasar akuntansi yang lebih luas dan bersifat internasional, mencakup perspektif global dalam praktik akuntansi. Dekonstruksi yang dilakukan

[77]Aji Dedi Mulawarman, *Menyibak Akuntansi Syariah, Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013), 81–82.

dalam penelitian ini tidak hanya membongkar prinsip dasar akuntansi secara menyeluruh, tetapi juga menggunakan nilai-nilai tasawuf sebagai dasar pembaruan dalam akuntansi. Sementara itu, penelitian terdahulu cenderung fokus pada aspek teknis atau praktis tanpa mendalami secara utuh bangunan filosofis yang mendasari prinsip-prinsip tersebut. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini menawarkan pandangan baru yang lebih mendalam dan lebih inklusif dalam bidang akuntansi.

F. Metode Penelitian

1. Paradigma, Jenis, dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma non-positivisme, yang merupakan bagian dari pendekatan kualitatif dan terbuka terhadap berbagai metode analisis data. Paradigma non-positivisme ini mencakup semua bidang, memungkinkan fleksibilitas, dan mendukung penggunaan berbagai pendekatan. Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah postmodernisme, yang menolak konsep kebenaran tunggal dan menggantikannya dengan berbagai kebenaran alternatif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan paradigma spiritual-religius yang diperkenalkan oleh Kamayanti. Paradigma tersebut menekankan kesadaran akan keberadaan ilahi serta membangun pengetahuan berdasarkan wahyu.[78] Pendekatan ini sejalan dengan salah satu strategi paradigma kesatuan ilmu di UIN Walisongo, yaitu spiritualisasi ilmu

[78]Kamayanti, *Metode Penelitian Kualitatif Akuntansi, Pengantar Religiositas Keilmuan*, 50.

pengetahuan modern, yang mengintegrasikan dimensi spiritual dalam pengembangan ilmu.[79]

Jenis penelitian ini adalah riset pustaka yang didasarkan pada dokumen-dokumen berupa artikel dan buku. Sumber-sumber tersebut dianalisis untuk menggali pemahaman mendalam mengenai topik yang dibahas. Proses ini melibatkan identifikasi dan sintesis informasi yang relevan dari berbagai referensi untuk memberikan perspektif yang komprehensif.[80] Metode ini dipilih karena sesuai dengan fokus utama penelitian, yaitu mendekonstruksi prinsip dasar akuntansi menggunakan nilai-nilai tasawuf melalui analisis teoretis dan konseptual. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara akuntansi dan spiritualitas dalam konteks modern. Pendekatan studi pustaka dinilai lebih relevan untuk memenuhi kebutuhan penelitian ini karena beberapa alasan:

1. Pendekatan studi pustaka bertumpu pada literatur utama, seperti kitab tasawuf klasik dan teori akuntansi, yang menjadi sumber utama dalam membangun argumen konseptual. Data empiris lapangan tidak diperlukan, karena penelitian ini tidak berorientasi pada pengumpulan data fenomenal, melainkan pada analisis kritis terhadap teori dan konsep.
2. Pendekatan studi pustaka memberikan cakupan universal. Data lapangan sering kali menghasilkan temuan yang spesifik pada

[79]Sholihan, *Falsafah Kesatuan Ilmu, Paradigma Keilmuan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 210–11.

[80]Mulyawan Syafwandy Nugraha, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), 223–30.

konteks tertentu, sedangkan penelitian ini bertujuan membangun kerangka kerja yang holistik dan dapat diterapkan secara luas. Studi pustaka memungkinkan generalisasi yang lebih kuat karena didasarkan pada teori yang bersifat global.

3. Pendekatan studi pustaka menawarkan efisiensi dalam proses penelitian. Pengumpulan data lapangan memerlukan sumber daya yang besar, baik dari segi waktu, biaya, maupun validasi data. Sebaliknya, studi pustaka memungkinkan analisis langsung terhadap literatur yang relevan, sehingga lebih efisien tanpa mengurangi kedalaman kajian.
4. Pendekatan studi pustaka sangat sesuai dengan kerangka dekonstruksi yang menjadi inti penelitian. Dekonstruksi memerlukan analisis teks dan konsep untuk membongkar asumsi dan struktur yang ada, yang lebih efektif dilakukan melalui studi pustaka dibandingkan dengan observasi atau wawancara lapangan.
5. Pendekatan studi pustaka memungkinkan fokus pada dimensi historis dan filosofis. Nilai-nilai tasawuf yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur klasik, seperti *turāṡ* al-Syāżiliyyah. Dimensi ini tidak dapat dijangkau melalui data empiris lapangan, melainkan melalui kajian literatur yang mendalam.

Selain itu, jurnal yang menunjukkan kelemahan dalam prinsip dasar akuntansi berfungsi sebagai pendukung analisis, tetapi bukan sebagai landasan utama dalam penelitian ini. Jurnal tersebut hanya mengidentifikasi kelemahan pada beberapa prinsip, sedangkan penelitian

ini bertujuan untuk mendekonstruksi seluruh prinsip dasar akuntansi yang tercantum dalam dokumen resmi prinsip dasar akuntansi yang berterima umum pada suatu negara. Dokumen resmi ini menjadi fokus utama dekonstruksi untuk mengungkap ambiguitas dan kelemahan yang tersembunyi. Dalam hal ini, jurnal berperan sebagai penguat argumen dan memberikan bukti tambahan yang mendukung kritik yang diajukan.

Oleh karena itu, pendekatan studi pustaka dipilih karena dianggap lebih relevan, efektif, dan sesuai dengan tujuan penelitian ini. Adapun metode lapangan dapat dipertimbangkan pada tahap implementasi untuk menguji efektivitas kerangka kerja yang dihasilkan, namun tidak menjadi bagian dari penelitian ini. Dalam penelitian ini, perspektif peneliti memainkan peran penting karena menjadi alat utama dalam menafsirkan dan menganalisis data dari literatur yang tersedia.[81] Fokus penelitian ini berangkat dari pengamatan terhadap praktik akuntansi yang berpedoman pada prinsip dasar akuntansi, yang sering dianggap sebagai kebenaran tunggal, tetapi justru memunculkan beberapa masalah yang membutuhkan upaya dekonstruksi.

Dekonstruksi merupakan metodologi kualitatif dari ilmu filosofis yang memungkinkan pengungkapan makna tersirat dari alat penilaian keberlanjutan.[82] Pendekatan ini, yang merupakan bagian dari postmodernisme, pertama kali dicetuskan oleh Jacques Derrida. Derrida

[81]Arief Furchan, *Studi Tokoh: Metode Penelitian mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 9.

[82]Lorenzo Bonisoli, Emilio Galdeano-Gómez, dan Laura Piedra-Muñoz, "Deconstruction: The Qualitative Methodology for The Analysis of Sustainability Assessment Tools of Agri-System," *MethodsX* 5 (1 Januari 2018): 635, doi:10.1016/j.mex.2018.06.003.

menekankan bahwa teks tidak stabil karena diinterpretasikan secara berbeda oleh individu-individu.[83] Menurut Derrida, dekonstruksi harus membongkar teks-teks filsafat dengan meminjam konsep-konsep filsafat itu sendiri untuk mengungkap asumsi tersembunyi dan kontradiksi dalam sistem pemikiran. Prinsip dasar akuntansi, yang dibangun di atas landasan filsafat seperti positivisme, dapat didekonstruksi dengan menerapkan analisis kritis terhadap struktur pemikiran yang mendasarinya.

Dalam hal ini, dekonstruksi menantang oposisi biner seperti entitas ekonomi yang memisahkan perusahaan dan pemiliknya, serta mempertanyakan asumsi tentang kebenaran dan makna yang sering dianggap universal.[84] Dengan menggunakan pendekatan dekonstruksi Derrida, penelitian ini akan mendekonstruksi prinsip dasar akuntansi yang berterima umum dengan nilai-nilai tasawuf. Dekonstruksi berbeda dengan rekonstruksi. Dekonstruksi berfokus pada pemecahan atau pelonggaran struktur yang ada, membebaskan elemen-elemen yang sebelumnya terikat pada aturan atau sistem yang kaku.

Proses ini menciptakan fleksibilitas dan memungkinkan munculnya sudut pandang baru serta kritik terhadap konsep-konsep yang sudah mapan. Namun, agar hasil dekonstruksi tidak kehilangan arah dan fokus, diperlukan proses rekonstruksi sebagai langkah akhir. Rekonstruksi menyusun ulang elemen-elemen yang telah diurai dengan

[83]Harold Bloom dkk., *Decontruction and Criticism* (New York: The Seabury Press, 1979), 83–84.

[84]Christopher Norris, *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida* (Yogyakarta: Buku Bijak, 2022), 72.

penekanan pada landasan nilai dan pemahaman yang lebih kokoh. Rekonstruksi memastikan bahwa struktur yang dihasilkan mencapai bentuk final yang utuh, selaras dengan tujuan dan nilai dasar yang diinginkan. Dengan kata lain, dekonstruksi membuka ruang interpretasi baru, sementara rekonstruksi menyempurnakan hasilnya menjadi struktur akhir yang stabil dan bermakna.[85]

Penelitian ini menggunakan metode dekonstruksi, bukan rekonstruksi, karena bertujuan untuk membongkar prinsip dasar akuntansi yang selama ini dianggap mapan dengan membuka ruang interpretasi yang lebih luas dan memperkaya makna yang ada. Proses ini memungkinkan akuntansi untuk berkembang menjadi lebih adaptif dan relevan terhadap kebutuhan zaman, terutama dalam menghadapi tuntutan etis dan spiritual yang selama ini mungkin terpinggirkan dalam pendekatan konvensional. Meskipun merekomendasikan usulan rumusan yang baru, dekonstruksi tidak seperti rekonstruksi yang menyusun ulang elemen-elemen dalam bentuk akhir yang stabil.

Sebaliknya, dekonstruksi terus mempertanyakan dan menggali elemen-elemen baru sehingga hasilnya bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan. Dengan demikian, hasil dekonstruksi bukanlah tujuan akhir yang mengikat, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang menginspirasi pengembangan lebih lanjut. Dekonstruksi mendorong pandangan bahwa praktik akuntansi tidak sekadar sebagai

[85]Amir Bandar Abdul Majid, "Dekonstruksi dan Rekonstruksi terhadap Pendidikan Karakter di Masa Pandemi Covid 19: Strategi Pembelajaran Mata Kuliah Muamalat," *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 7, no. 1 (5 April 2021): 98–100, doi:10.31943/jurnal_risalah.v7i1.173.

alat ekonomi semata, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab sosial dan moral yang sejalan dengan nilai-nilai mendalam, termasuk aspek ketuhanan dan kemanusiaan.

2. Sumber Data

Sumber yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini terdiri atas dua bentuk. Sumber primer meliputi buku atau dokumen resmi tentang prinsip dasar akuntansi, serta kitab-kitab tasawuf yang digunakan sebagai bahan untuk melakukan dekonstruksi. Adapun dokumen resmi mengenai prinsip dasar akuntansi tersebut meliputi *APB Statement No. 4 Tahun 1970*, *Buku Prinsip Akuntansi Indonesia Tahun 1973*, *Buku Prinsip Akuntansi Indonesia Tahun 1984*, *Buku Prinsip Akuntansi Jilid 1, oleh* C. Rollin Niswonger dkk. Tahun 1992, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Tahun 1994*, *Buku Teori Akuntansi Buku Satu oleh* Ahmad Riahi Belkaoui Tahun 2006, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah Tahun 2007*, *Conceptual Framework for Financial Reporting Tahun 2018*, *Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Tahun 2019*, *Buku Teori Akuntansi dalam Hampiran Historiografis Taksonomis oleh* Jan Hoesada Tahun 2022.

Sementara itu, kitab-kitab tasawufnya antara lain *Risālat al-Amīn* karya Syekh Abū al-Ḥasan al-Syāżilī, *Laṭā'if al-Minan* karya Syekh Ibnu 'Aṭā'illah al-Sakandarī, *Syarah al-Ḥikam al-'Aṭā'iyyah* karya Syekh Aḥmad Zarrūq, dan *Durrat al-'Asrār* karya Syekh Ibnu Ṣabbāg. Adapun sumber sekundernya mencakup karya dan pemikiran lain, baik berupa

buku, kitab, jurnal ilmiah, maupun sumber-sumber elektronik dari internet yang relevan dengan tujuan penelitian.

3. Uji Validitas Data

Uji validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Menurut Djam'an Satori & Komariah, triangulasi dapat dimaknai sebagai usaha untuk memeriksa data dari berbagai sumber, menggunakan beragam cara, dan dalam berbagai waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan waktu. Triangulasi sumber bertujuan untuk memastikan bahwa data berasal dari sumber yang kredibel, sementara triangulasi waktu digunakan untuk memeriksa konsistensi isi data dari waktu ke waktu.[86]

Data dalam penelitian ini berasal dari sumber yang kredibel dalam bidang akuntansi, seperti APB di Amerika Serikat, IASB di Inggris, IAI di Indonesia, serta para akademisi akuntansi seperti C. Rollin Niswonger, Ahmad Riahi Belkaoui, dan Jan Hoesada. Selain itu, data juga diperoleh dari sumber yang kredibel dalam bidang tasawuf, yakni Syekh Abū al-Ḥasan al-Syāżilī (w. 1258), Syekh Ibnu 'Aṭā'illah al-Sakandarī (w. 1309), Syekh Aḥmad Zarrūq (w. 1493),[87] dan Syekh Ibnu Ṣabbāg, yang menulis tentang kehidupan dan pemikiran al-Syāżilī

[86]Andarusni Alfansyur and Mariyani Mariyani, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial," *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (27 Desember 2020): 149, doi:10.31764/historis.v5i2.3432.

[87]Saifulah, "Distingsi Dan Diaspora Tasawuf Abū Al-Ḥasan al-Syāżilī," *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (December 8, 2014): 366–73, doi:10.15642/teosofi.2014.4.2.353-381.

pada kurun sekitar enam dekade setelah wafatnya al-Syāżilī.[88] Zarrūq menyebut kitab *al-Ḥikam* dengan nisbah al-Syāżiliyyah, menunjukkan bahwa kitab tersebut mengusung ajaran tasawuf Syekh Abū al-Ḥasan al-Syāżilī.[89]

Adapun tahun terbit sumber data primer dalam penelitian ini bervariasi. Untuk sumber prinsip dasar akuntansi, data diterbitkan pada tahun 1970, 1973, 1984, 1992, 1994, 2006, 2007, 2018, 2019, dan 2022. Sementara itu, manuskrip tasawuf yang digunakan telah di-*tahqiq* dan diterbitkan oleh penerbit di Timur Tengah pada tahun 2001, 2006, 2008, dan 2018. Prinsip dasar akuntansi yang diterbitkan oleh berbagai sumber pada tahun yang berbeda konsisten dalam memuat komponen yang sama beserta pengertiannya. Perbedaannya terletak pada cara penulisan, ada yang eksplisit dan ada yang tidak. Begitu pula dengan nilai-nilai tasawuf yang ditulis oleh penulis dan generasi yang berbeda, semuanya memuat pokok-pokok ajaran tasawuf al-Syāżilī seperti yang telah disampaikan pada latar belakang penelitian ini.

Perbedaan mendasar antara prinsip dasar akuntansi dan nilai-nilai tasawuf dapat dilihat dari fokus dan tujuan masing-masing. Prinsip dasar akuntansi menekankan penyajian informasi keuangan yang konsisten dan terukur berdasarkan standar yang berlaku universal, sedangkan tasawuf berorientasi pada pengembangan nilai moral dan spiritual yang holistik. Pendekatan yang saling bertolak belakang ini

[88]Muḥammad bin Abī al-Qāsim al-Ḥumairī Syekh Ibnu Ṣabbāg, *The Mystical Teachings of Al-Shadhili: Including His Life, Prayers, Letters, and Followers. A Translation from the Arabic of Ibn al-Sabbagh's Durrat al-Asrar Wa Tuhfat al-Abrar* (New York: SUNY Press, 1993), xiii.

[89]Syekh Ahmad Zarruq, *Al-Hikam Ibn 'Athaillah, Ulasan al-Arif Billah Syekh Ahmad Zarruq* (Jakarta: Qalam, 2017), 27.

justru membuka ruang untuk saling melengkapi. Nilai-nilai moral dan spiritual tasawuf dapat digunakan untuk mendekonstruksi kelemahan dalam prinsip dasar akuntansi, seperti reduksi realitas ekonomi menjadi sekadar angka, pengabaian dimensi etika, dan kurangnya perhatian terhadap tanggung jawab sosial. Dengan integrasi ini, sistem akuntansi dapat dirancang ulang agar lebih selaras dengan kebutuhan moral dan spiritual manusia, menciptakan keseimbangan antara tujuan material dan etika dalam praktik akuntansi. Integrasi ini juga memberikan perspektif baru untuk memahami hubungan antara tanggung jawab sosial, keberlanjutan, dan pelaporan keuangan, yang semakin relevan dalam konteks global saat ini.

Epistemologi keduanya juga memberikan perspektif menarik. Prinsip dasar akuntansi tumbuh dari pengalaman empiris melalui praktik profesional dalam dunia nyata, seperti materialitas dan konservatisme. Sebaliknya, nilai-nilai tasawuf bersumber dari pengalaman spiritual mendalam, yang diperoleh melalui munajat, doa, dan zikir. Akuntansi, yang menuntut kejujuran dan transparansi, dapat diperkaya dengan nilai-nilai tasawuf yang mendalam, membawa integritas moral ke dalam praktik pencatatan dan pelaporan keuangan. Dalam sinergi ini, akuntansi tidak lagi hanya tentang angka, tetapi juga tentang bagaimana menjaga keadilan, kejujuran, dan kebermanfaatan bagi masyarakat luas.

4. Teknik Analisis Data

Pendekatan dekonstruksi dapat diterapkan melalui berbagai tahapan yang beragam sesuai dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Meskipun prinsip dasarnya sama, yaitu mengupas lapisan-lapisan makna

teks untuk membuka interpretasi yang lebih luas dan kritis, penerapan tahapan dalam metode dekonstruksi dapat berbeda-beda. Beberapa penelitian membagi pendekatan ini ke dalam tahapan tertentu yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengkritik, dan mengembangkan pemahaman baru terhadap struktur teks yang ada. Variasi tahapan ini mencerminkan fleksibilitas pendekatan dekonstruksi dalam menghadapi kerumitan makna dan keterkaitan antar elemen teks.

Dalam proses dekonstruksi, yang diubah bukanlah makna itu sendiri, melainkan klaim bahwa satu bentuk pemahaman terhadap teks dianggap lebih benar dibandingkan dengan pemahaman lainnya.[90] Dekonstruksi tidak menghancurkan pemahaman yang ada, tetapi menambah perspektif alternatif guna menolak kebenaran tunggal dan memperluas cakrawala pemahaman terhadap berbagai pandangan dan makna.[91] Menurut Al-Fayyadl, metode dekonstruksi dalam analisis data mencakup tiga tahap utama: pertama, menafsirkan teks filosofis untuk memahami makna; kedua, mencari kelemahan tersembunyi seperti kontradiksi atau ketidakkonsistenan; dan ketiga, mempermainkan logika teks untuk mendekonstruksi argumen dasarnya. Tahap-tahap ini membuka interpretasi baru serta memperkaya pemahaman filosofis secara kritis dan mendalam.[92]

---

[90]Muhammad Al-Fayyadl, *Derrida* (Yogyakarta: LKiS, 2009), 80.

[91]Luky Patricia Widianingsih, "Accounting of Peace: Green Movement in Industry 4.0 (Necessity of Deconstruction?)," *International Journal of Advanced Research (IJAR)* 6, no. 5 (2018): 43, doi:http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/7006.

[92]Damayanti dan Syarifuddin, "Dekonstruksi Hubungan Keagenan Dalam Proses Anggaran," 93.

Menurut Maulida, metode dekonstruksi meliputi dua tahap utama: pertama, *double reading* untuk mengidentifikasi ideologi teks dan hierarki melalui oposisi biner, dengan menelusuri makna dominan yang membentuk struktur pemahaman; kedua, *decentering* yang membalikkan atau melepaskan makna dari struktur awal menggunakan konsep *différance*, yakni menunda makna dan menciptakan jarak antar elemen. Proses ini menolak *logosentrisme* dan membuka ruang bagi interpretasi yang lebih dinamis.[93] Menurut Johnson, tujuan dekonstruksi adalah mengungkap oposisi-oposisi hierarkis yang tersembunyi dalam sebuah teks. Dekonstruksi, menurut Riduwan, mencakup tiga tahap utama: pertama, pembacaan dan deskripsi teks untuk memahami makna awal; kedua, analisis teks guna mengungkap makna tersembunyi dan inkonsistensi; ketiga, transformasi makna untuk memunculkan perspektif baru.

Berdasarkan uraian di atas, pendekatan dekonstruksi yang diadaptasi dalam penelitian ini akan mencakup tahapan-tahapan yang relevan untuk menganalisis dan mendekonstruksi prinsip dasar akuntansi. Teknik analisis data ini dirancang untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi berbagai lapisan makna yang mungkin tersembunyi dalam prinsip akuntansi, sekaligus mengungkap inkonsistensi atau kontradiksi yang dapat memperkaya pemahaman kritis. Pendekatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk memahami makna dasar, tetapi juga untuk menguji ulang asumsi-asumsi fundamental yang membentuk

[93]Maulida, "The Deconstruction in the Short Story Jimat Sero by Eka Kurniawan," 27.

prinsip tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan ruang bagi interpretasi baru dan perspektif yang lebih dinamis dalam studi akuntansi. Adapun tahapan-tahapan yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi prinsip dasar akuntansi
2. Analisis oposisi biner
3. Pembalikan hierarki
4. Integrasi nilai tasawuf dalam prinsip dasar akuntansi
5. Rekomendasi prinsip dasar akuntansi berdasarkan hasil dekonstruksi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika riset ini terdiri atas enam bab, di mana bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tentang prinsip dasar akuntansi yang terdiri atas *grand theory* ilmu akuntansi, elemen struktur teori akuntansi, pengertian prinsip dasar akuntansi, sumber prinsip dasar akuntansi, prinsip dasar akuntansi, dan keterbatasan prinsip dasar akuntansi.

Bab ketiga tentang dampak pengabaian etika dan spiritualitas dalam pelaporan keuangan. Bab ini menguraikan pengertian etika, moral, spiritual, dan akhlak. Selain itu, bab ini juga menyajikan beberapa contoh skandal akuntansi yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia, seperti skandal Enron, Toshiba, Merrill Lynch, Lehman Brothers, Worldcom, Xerox Corporation, Carilion, HealthSouth, Kimia

Farma, Garuda Indonesia, Jiwasraya, Envy, serta skandal di industri perbankan syariah.

Bab keempat tentang nilai-nilai tasawuf dalam kitab-kitab Syāżiliyyah yang terkait dengan prinsip dasar akuntansi antara lain meliputi kejujuran (*ṣidq*), kemudahan (*yusrā*), rasa takut kepada Allah (*khasyah*), semangat hijrah (*hijrah*), persahabatan (*ṣuḥbah*), kesungguhan (*ijtihād*), pengawasan terus-menerus (*murāqabah*), dan semangat tidak berhenti dalam mencari kebenaran (*lā taqif*).

Bab kelima tentang dekonstruksi prinsip dasar akuntansi dengan nilai-nilai tasawuf, yang meliputi identifikasi prinsip dasar akuntansi, pengamatan terhadap kelemahan atau ketidakkonsistenan, pembalikan hierarki, integrasi nilai tasawuf dalam prinsip dasar akuntansi, rekomendasi prinsip dasar akuntansi setelah dekonstruksi

Bab keenam adalah penutup, berisi tentang kesimpulan, implikasi, saran, dan keterbatasan penelitian.

BAB II
PRINSIP DASAR AKUNTANSI

A. *Grand Theory* Ilmu Akuntansi

Menurut Mills, *grand theory* adalah bentuk abstraksi tertinggi dalam tataran teori yang menjadi sumber bagi kelahiran teori-teori baru.[1] Sebagai contoh *grand theory* dalam ilmu akuntansi, teori *agency* dan teori *stewardship* memberikan landasan bagi perkembangan teori-teori akuntansi yang lebih spesifik. Secara konseptual, prinsip dasar akuntansi dipengaruhi oleh kedua teori tersebut.[2] Teori *agency* menekankan hubungan kontraktual antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*), di mana konflik kepentingan sering muncul akibat perbedaan tujuan.

Informasi akuntansi, dalam konteks ini, menjadi alat untuk mengurangi asimetri informasi dan memastikan akuntabilitas manajer kepada pemilik melalui pelaporan yang transparan dan dapat dipercaya.[3] Di sisi lain, teori *stewardship* memiliki pandangan yang lebih optimis terhadap peran manajer. Menurut Davis dkk., teori tersebut mengasumsikan bahwa manajer bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas sumber daya organisasi, dengan tujuan yang selaras dengan kepentingan pemegang saham. Laporan keuangan, dalam

---

[1]Hoesada, *Teori Akuntansi dalam Hampiran*, 178.

[2]Imam Ghozali, *25 Grand Theory, 25 Teori Besar Ilmu Manajemen Akuntansi dan Bisnis (Untuk Landasan Teori Skripsi, Tesis, dan Disertasi)* (Semarang: Yoga Pratama, 2021), 86–89.

[3]Hoesada, *Teori Akuntansi dalam Hampiran*, 179–80.

perspektif itu, dirancang untuk menunjukkan kinerja manajer sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan profesional, sekaligus mendukung optimalisasi nilai bagi pemegang saham.[4]

Prinsip dasar akuntansi saat ini didominasi oleh pengaruh teori *agency*, yang menekankan pengawasan dan kontrol terhadap manajer untuk mengurangi risiko yang dapat merugikan pemegang saham. Baik teori *agency* maupun *stewardship* pada intinya berorientasi pada optimalisasi kapital bagi pemegang saham, tanpa memberikan perhatian yang memadai pada nilai-nilai moral, sosial, atau lingkungan. Dalam pendekatan ini, laporan keuangan lebih difokuskan pada pelaporan kinerja finansial yang mendukung pertumbuhan dan akumulasi kapital. Akibatnya, aspek-aspek nonfinansial, seperti tanggung jawab sosial dan lingkungan, sering dianggap kurang relevan atau hanya menjadi tambahan. Padahal, mengintegrasikan elemen-elemen ini ke dalam laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang kinerja perusahaan sekaligus dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan.[5]

B. Perkembangan Teori Akuntansi

Teori akuntansi telah mengalami evolusi yang signifikan, bergerak dari pendekatan tradisional yang berpusat pada prinsip-prinsip

[4]Alni Rahmawati dkk., "How Do Agency Theory, Stewardship Theory and Intellectual Capital as a Solution for Agency Conflict?," *Journal of Management Research* 10, no. 2 (17 April 2018): 100, doi:10.5296/jmr.v10i2.12843.

[5]Risky Soleman, *Akuntansi Menyerupai Manusia dan Syaitan (Iblis)* (Bogor: Guepedia, 2023), 47–51.

dasar pelaporan keuangan menuju pendekatan yang lebih kompleks dan multidimensional. Perjalanan itu dimulai dengan dominasi teori normatif, yang menekankan aturan dan standar untuk menciptakan keseragaman dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Meskipun pendekatan tersebut memberikan struktur yang kuat, ia sering kali mengabaikan dinamika sosial dan ekonomi yang lebih luas, sehingga memunculkan kebutuhan akan perspektif yang berbeda. Sebagai respons, teori positif diperkenalkan dengan pendekatan deskriptif, berfokus pada bagaimana praktik akuntansi sebenarnya dilakukan berdasarkan data empiris. Berbeda dengan teori normatif, teori ini tidak berupaya menetapkan aturan, melainkan memberikan wawasan tentang realitas praktik akuntansi.[6]

Perkembangan selanjutnya membawa teori akuntansi ke arah yang lebih beragam, sejalan dengan meningkatnya kompleksitas tantangan modern. Teori hipotesis pasar efisien menjadi salah satu teori penting, menjelaskan bagaimana informasi akuntansi memengaruhi harga saham di pasar modal dengan asumsi bahwa harga mencerminkan semua informasi publik yang tersedia. Dalam konteks yang berbeda, teori keagenan berfokus pada hubungan antara prinsipal dan agen, yang sering kali diwarnai oleh konflik kepentingan. Untuk mengatasi konflik ini, diperlukan sistem pelaporan dan kontrol yang efektif.

Sementara itu, dimensi psikologis dan sosial dalam pengambilan keputusan akuntansi diungkapkan oleh teori keperilakuan akuntansi,

[6]Muhammad Al Amin, *Filsafat Teori Akuntansi* (Magelang: Unimma Press, 2018), 102–4.

yang menjelaskan bagaimana emosi, tekanan sosial, dan bias kognitif dapat memengaruhi keputusan akuntansi. Selain itu, teori akuntansi sumber daya manusia (SDM) memperkenalkan pendekatan baru dengan melihat manusia sebagai aset yang berkontribusi signifikan pada organisasi dan layak dihargai serta dilaporkan dalam laporan keuangan. Lebih jauh lagi, teori akuntansi sosial memperluas cakupan akuntansi dengan memasukkan dampak sosial dan lingkungan aktivitas perusahaan, sehingga akuntansi tidak lagi hanya berfungsi untuk melaporkan keuangan tetapi juga sebagai alat untuk menunjukkan tanggung jawab kepada masyarakat. Dengan berkembangnya berbagai teori ini, akuntansi telah berevolusi menjadi instrumen strategis yang tidak hanya menciptakan nilai tetapi juga mengelola konflik dan mencerminkan akuntabilitas sosial serta etis.[7]

Seiring dengan perubahan teori, paradigma dalam akuntansi juga mengalami transformasi yang signifikan. Pada awalnya, paradigma positivisme menjadi landasan utama, menekankan pendekatan objektif dan empiris dalam memahami data akuntansi. Namun, pendekatan ini mulai dianggap kurang memadai karena tidak mempertimbangkan aspek sosial dan budaya yang memengaruhi praktik akuntansi. Hal ini membuka jalan bagi paradigma interpretatif, yang memberikan ruang bagi pemahaman subjektif, termasuk pengaruh nilai-nilai sosial dan budaya dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, muncul

[7]Zaki Baridwan, "Perkembangan Teori dan Penelitian Akuntansi," *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)* 15, no. 4 (October 1, 2000): 486–94.

paradigma kritis, yang menyoroti ketidakadilan sosial dan ekonomi dalam praktik akuntansi. Paradigma ini menantang dominasi kepentingan tertentu, seperti pemilik modal, dan memandang akuntansi sebagai alat untuk mengungkap ketidakadilan tersebut. Tidak berhenti di situ, teori postmodern hadir dengan pendekatan yang menekankan pluralitas dan relativisme, yang mendekonstruksi narasi dominan sebelumnya dan membuka ruang bagi pendekatan multiparadigma yang lebih inklusif.[8]

Di sisi lain, perkembangan teori akuntansi tidak hanya berhenti pada pandangan sosial dan subjektif. Kemunculan akuntansi syariah menambah dimensi baru dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum syariah dalam praktik akuntansi. Penelitian dalam akuntansi syariah terus berkembang, khususnya di negara-negara dengan populasi muslim besar, seperti Indonesia, di mana topik seperti perbankan syariah, *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi fokus utama.[9] Tidak kalah pentingnya, akuntansi hijau atau *green accounting* muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan. Teori ini bertujuan untuk mengukur dan melaporkan dampak lingkungan dari aktivitas

[8]Marini Puwanto, "Peran Filsafat Ilmu Fondasi Utama Dalam Penelitian Akuntansi Multiparadigma," *Soetomo Communication and Humanities* 3, no. 2 (December 31, 2022): 69–73, doi:10.25139/sch.v3i2.5909.

[9]Dita Fauziah et al., "Tren Dan Dinamika Penelitian Akuntansi Syariah Di Indonesia: Analisis Bibliometrik," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 10, no. 1, April (April 8, 2022): 89, doi:10.35836/jakis.v10i1.275.

perusahaan, yang semakin relevan di dunia yang semakin peduli terhadap isu-isu keberlanjutan.[10]

Puncak dari perkembangan ini adalah digitalisasi akuntansi, yang membawa transformasi signifikan dengan memanfaatkan teknologi seperti *big data*, kecerdasan buatan (AI), dan otomatisasi dalam pengelolaan informasi keuangan. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memungkinkan akuntan untuk melakukan analisis data yang lebih mendalam dan lebih akurat, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih strategis. Dengan adanya digitalisasi, peran akuntan berubah dari hanya sebagai pencatat transaksi keuangan menjadi profesional yang berfokus pada analisis data untuk memberikan wawasan yang bernilai bagi pengambilan keputusan dalam organisasi.[11] Secara keseluruhan, perkembangan teori akuntansi mencerminkan perjalanan panjang dari sistem akuntansi yang berfokus pada pelaporan keuangan yang objektif dan standar, menuju akuntansi yang lebih kompleks, inklusif, dan berbasis teknologi. Perubahan ini tidak hanya disebabkan oleh dinamika ekonomi dan bisnis, tetapi juga oleh kebutuhan untuk menciptakan sistem akuntansi yang lebih etis, berkelanjutan, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

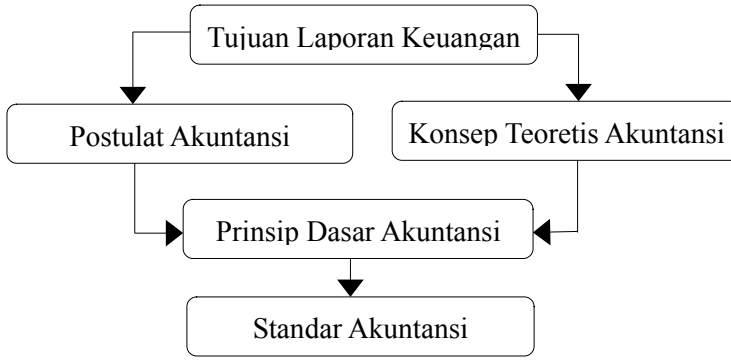
---

[10]Marannu Paledung et al., "Tren Perkembangan Penelitian Akuntansi Hijau: Systematic Literature Review," *Jurnal Akuntansi Kontemporer* 15, no. 2 (May 21, 2023): 72, doi:10.33508/jako.v15i2.4366.

[11]Arie Pradina Putri Arie, "Transformasi Akuntansi Di Era *big data* Dan Teknologi Artificial Intelligence (AI)," *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 5, no. 2 (July 4, 2024): 937, doi:10.36312/jcm.v5i2.3279.

C. Elemen Struktur Teori Akuntansi

Struktur teori akuntansi merupakan kumpulan elemen yang saling terkait dan berfungsi sebagai pedoman dalam pengembangan teori serta penyusunan teknik-teknik atau standar akuntansi. Elemen-elemen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Hierarki Elemen Struktur Teori Akuntansi

Menurut Belkaoui, struktur teori akuntansi terdiri atas elemen-elemen sebagai berikut:[12]

1. Tujuan Laporan Keuangan.

Tujuan laporan keuangan merupakan fondasi yang mendasari pembentukan struktur teori akuntansi, yang berperan penting dalam

[12]Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi, Edisi Revisi 2011* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), 70–71.

membangun pemahaman tentang bagaimana informasi keuangan seharusnya disusun dan disajikan. Laporan keuangan memiliki tujuan utama untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya kepada berbagai pihak yang memerlukannya. Informasi ini kemudian digunakan oleh para penggunanya, seperti investor, kreditor, manajer, dan regulator, sebagai dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan ekonomi yang berhubungan dengan kelangsungan dan pengelolaan suatu entitas. Dengan demikian, laporan keuangan bukan hanya alat pencatatan, melainkan juga sarana yang mendukung keputusan-keputusan strategis dan operasional yang berpengaruh luas.

2. Postulat Akuntansi.

Postulat akuntansi adalah pernyataan atau aksioma yang sangat jelas dan diterima secara luas oleh para praktisi serta teoretikus akuntansi. Penerimaannya didasarkan pada kesesuaiannya terhadap tujuan laporan keuangan, yaitu untuk menyajikan informasi yang relevan, dapat dipercaya, dan berguna bagi pengambilan keputusan. Postulat ini juga menggambarkan lingkungan yang lebih luas tempat akuntansi beroperasi, meliputi aspek ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Faktor-faktor tersebut saling memengaruhi dan membentuk konteks yang harus diperhatikan agar akuntansi dapat diterapkan secara efektif, sesuai dengan kondisi yang ada, serta memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang bergantung pada informasi keuangan.

3. Konsep Teoretis Akuntansi.

Konsep teoretis akuntansi merujuk pada pernyataan atau aksioma yang bersifat jelas, tegas, dan diterima secara luas oleh para praktisi serta akademisi, karena kesesuaiannya dengan tujuan utama laporan keuangan, yaitu menyediakan informasi yang akurat dan relevan bagi pengambil keputusan. Konsep ini menjadi dasar bagi penyusunan berbagai prinsip akuntansi yang diterapkan dalam praktik sehari-hari. Lebih lanjut, konsep teoretis akuntansi menggambarkan hakikat entitas akuntansi, yang merupakan unit ekonomi yang terpisah dan beroperasi dalam suatu perekonomian bebas. Perekonomian ini, pada gilirannya, ditandai oleh sistem kepemilikan pribadi atas properti, yang memungkinkan adanya pertukaran nilai melalui transaksi keuangan yang tercatat dalam laporan keuangan.

4. Prinsip Dasar Akuntansi.

Prinsip dasar akuntansi adalah prinsip-prinsip atau sifat-sifat mendasar yang menjadi fondasi dalam setiap aspek akuntansi serta seluruh hasil atau output yang dihasilkan dari proses tersebut. Prinsip-prinsip ini tidak muncul begitu saja, melainkan diturunkan dari beberapa elemen penting, yaitu tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi, dan konsep-konsep teoretis yang berlaku dalam bidang akuntansi. Ketiga elemen tersebut saling terkait dan memberikan dasar yang kokoh untuk pengembangan berbagai standar, teknik, dan prosedur akuntansi. Dengan adanya prinsip dasar ini, akuntansi dapat dijalankan secara sistematis dan terstruktur dalam menyusun laporan keuangan yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya.

5. Standar Akuntansi.

Standar akuntansi adalah serangkaian peraturan yang lebih rinci yang dikembangkan dari prinsip dasar akuntansi. Peraturan-peraturan ini memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana seharusnya akuntansi dilakukan dalam praktik sehari-hari. Standar ini mengatur dengan tegas bagaimana cara pencatatan dan pelaporan harus dilakukan terhadap setiap transaksi atau kejadian tertentu yang dihadapi oleh entitas akuntansi. Dengan demikian, standar akuntansi berfungsi untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dicatat dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, memberikan informasi yang konsisten, akurat, dan dapat dipercaya bagi para pengguna laporan keuangan.

Postulat akuntansi bersifat abstrak dan menjadi fondasi utama dalam praktik akuntansi, menggambarkan asumsi dasar tanpa memberikan aturan teknis. Terdapat empat postulat utama. Postulat *unit of measure* mengasumsikan bahwa transaksi ekonomi dapat diukur dalam satuan moneter yang stabil. Postulat *entity* menekankan pemisahan entitas ekonomi dari pemiliknya untuk mencerminkan kondisi entitas secara independen. Postulat periode akuntansi membagi aktivitas perusahaan ke dalam periode waktu tertentu untuk menghasilkan laporan berkala. Asumsi *going concern* menganggap entitas akan terus beroperasi dalam jangka panjang. Keempat postulat ini

menjadi dasar pengembangan prinsip dan standar akuntansi yang lebih konkret dan terstruktur.[13]

Konsep teoretis akuntansi merupakan kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antara entitas akuntansi dan pihak-pihak yang berkepentingan. Konsep ini menekankan siapa yang menjadi pemilik, pengendali, atau penerima manfaat dari informasi akuntansi, sehingga laporan keuangan disusun sesuai dengan kebutuhan mereka. *Proprietary theory* menempatkan pemilik sebagai pusat entitas, dengan aset, kewajiban, dan laba didistribusikan langsung kepada mereka. Sebaliknya, *entity theory* memandang perusahaan sebagai entitas terpisah dari pemilik, sehingga laporan keuangan mencerminkan kondisi entitas secara keseluruhan.

Untuk organisasi nirlaba, *fund theory* menekankan pengelolaan dana sesuai tujuan tertentu. *Enterprise theory* memperluas perhatian kepada pemangku kepentingan lain, seperti karyawan dan masyarakat. Menurut Harahap, Tuhan juga dianggap sebagai pemangku kepentingan, yang dituangkan dalam amanah atau ibadah *theory*. Sementara itu, *residual theory* berfokus pada pengukuran ekuitas pemegang saham, *commander theory* menekankan informasi bagi pengendali operasional, dan *investor theory* berpusat pada kebutuhan pemegang saham sebagai pengguna utama laporan keuangan. Teori-teori tersebut menjadi dasar penyajian informasi akuntansi yang relevan dan tepat guna.[14]

---

[13]Hoesada, *Teori Akuntansi dalam Hampiran*, 246–236.
[14]Harahap, *Teori Akuntansi, Edisi Revisi 2011*, 74–78.

Adapun prinsip dasar akuntansi merupakan penjabaran dari tujuan laporan keuangan dan bentuk konkret dari postulat akuntansi serta konsep teoretis akuntansi. Prinsip ini menjadi pedoman umum yang memastikan penyusunan laporan keuangan dilakukan secara konsisten, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna informasi. Prinsip dasar ini mencakup berbagai aspek, seperti pengakuan pendapatan, pengukuran biaya, dan penyajian informasi keuangan. Prinsip-prinsip ini juga memberikan kerangka kerja bagi pengembangan standar, teknik, dan prosedur akuntansi. Sementara itu, standar akuntansi adalah aturan spesifik yang diturunkan dari prinsip dasar untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi tertentu, sehingga menciptakan keseragaman dalam pelaporan.[15]

D. Pengertian Prinsip Dasar Akuntansi

Menegaskan apa yang sudah disampaikan secara ringkas pada subbab sebelumnya, bahwa prinsip dasar akuntansi adalah landasan utama yang mendasari seluruh proses akuntansi dan output yang dihasilkannya, termasuk laporan keuangan. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga dijabarkan dari tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi, serta konsep-konsep teoretis yang mendefinisikan sifat dan kualitas dasar akuntansi keuangan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi elemen penting dalam menjaga konsistensi dan keandalan laporan keuangan yang disusun oleh entitas bisnis.

[15]Harahap, *Teori Akuntansi, Edisi Revisi 2011*, 71.

Prinsip dasar tersebut membentuk kerangka untuk pengembangan standar, teknik, atau prosedur akuntansi yang diterapkan dalam proses pencatatan, pengolahan, dan penyajian informasi keuangan. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, laporan keuangan dapat disusun secara sistematis, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut berperan dalam memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan mencerminkan realitas ekonomi dengan tepat, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan ekonomi yang relevan dan akurat. Oleh karena itu, prinsip dasar akuntansi memiliki peran vital dalam menjaga integritas informasi keuangan.[16]

Menurut Hoesada, prinsip dasar akuntansi mencakup berbagai prinsip penting yang menjadi landasan dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan andal. Prinsip biaya menegaskan bahwa aset harus dicatat berdasarkan biaya perolehannya, sedangkan prinsip pendapatan mengatur pengakuan pendapatan pada saat pendapatan tersebut diperoleh. Prinsip layak temu memastikan keterkaitan antara biaya dan pendapatan dalam periode yang sama, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang komprehensif dan relevan. Selanjutnya, prinsip objektivitas mengharuskan semua informasi yang dicatat dan dilaporkan didasarkan pada bukti objektif yang dapat diverifikasi. Prinsip taat asas menekankan pentingnya konsistensi dalam penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode lainnya, sedangkan prinsip pengungkapan paripurna mengharuskan pengungkapan semua informasi relevan secara lengkap. Selain itu, prinsip konservatisme mendorong

[16]Harahap, *Teori Akuntansi, Edisi Revisi 2011*, 71.

kehati-hatian dalam pengakuan pendapatan dan keuntungan, tetapi menginstruksikan pengakuan kerugian segera jika ada potensi rugi yang teridentifikasi. Prinsip materialitas mewajibkan pengungkapan informasi yang signifikan dalam laporan keuangan, sementara prinsip keseragaman dan daya banding memastikan laporan keuangan dapat dibandingkan baik antarperiode maupun antarentitas. Semua prinsip tersebut bekerja secara bersama-sama untuk membentuk kerangka kerja yang kuat, terstandar, dan dapat diandalkan dalam penyusunan laporan keuangan yang informatif serta relevan.[17]

Menurut Belkaoui, prinsip dasar akuntansi merupakan pernyataan penting yang menjelaskan prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan dalam praktik akuntansi. Prinsip-prinsip tersebut disusun berdasarkan dalil-dalil serta konsep teoretis yang mengatur bagaimana proses pencatatan, pelaporan, dan interpretasi informasi keuangan harus dilakukan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi kerangka kerja yang memastikan praktik akuntansi berjalan secara sistematis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya prinsip-prinsip dasar tersebut, akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencatat transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen yang menyediakan informasi relevan dan andal bagi para pemangku kepentingan, seperti manajemen, investor, dan regulator. Prinsip-prinsip tersebut membantu menciptakan standar yang seragam dalam penyusunan laporan keuangan di berbagai entitas, sehingga laporan tersebut dapat dibandingkan dan diinterpretasikan dengan mudah. Dengan kata lain, prinsip dasar akuntansi memastikan

[17]Hoesada, *Teori Akuntansi dalam Hampiran*, 259.

bahwa laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan realitas ekonomi secara akurat serta memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis informasi yang valid dan dapat diandalkan.[18]

Menurut Chariri dan Ghozali, prinsip dasar akuntansi adalah seperangkat aturan umum dan universal yang dijadikan objek pengetahuan akuntansi dalam konteks teoretis. Prinsip-prinsip tersebut memberikan kerangka kerja yang esensial dalam praktik akuntansi, berfungsi sebagai landasan untuk memandu pengembangan teknik akuntansi serta metode pelaporan keuangan. Dengan adanya aturan yang bersifat universal, prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa praktik akuntansi diterapkan secara konsisten di berbagai organisasi dan industri, sehingga memungkinkan perbandingan antarentitas maupun antarperiode secara lebih akurat.

Selain itu, prinsip dasar tersebut juga berperan dalam menjaga keandalan informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan. Prinsip tersebut memastikan bahwa data keuangan disusun berdasarkan standar yang telah diterima secara global. Dalam konteks teoretis, prinsip-prinsip tersebut memberikan acuan yang jelas untuk pengembangan standar dan teknik akuntansi yang dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan ekonomi dan bisnis. Dengan berpegang pada aturan-aturan umum tersebut, akuntansi dapat terus berkembang menjadi alat yang relevan dan terpercaya dalam menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pemangku kepentingan.[19]

---

[18]Belkaoui, *Teori Akuntansi Buku Satu*, 269.

[19]Anis Chariri dan Imam Ghozali, *Teori Akuntansi, Edisi Revisi* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003), 99.

Menurut Niswonger, prinsip dasar akuntansi dikembangkan oleh individu-individu untuk memastikan bahwa data akuntansi lebih bermanfaat dalam masyarakat yang selalu berubah. Yang dimaksud dengan prinsip di sini adalah pedoman terbaik yang tersedia, yang didasarkan pada akal sehat, pengamatan, serta percobaan untuk mencapai hasil yang optimal. Pemilihan metode terbaik dari berbagai alternatif yang ada telah berkembang secara bertahap, dan dalam beberapa bidang tertentu masih terdapat area yang belum mencapai konsensus yang jelas.

Prinsip-prinsip tersebut secara berkesinambungan dikaji ulang dan direvisi agar tetap relevan dengan semakin kompleksnya operasional perusahaan. Kriteria untuk disebut prinsip dasar akuntansi adalah apabila telah disepakati bersama oleh para anggota profesi akuntansi. Tanggung jawab untuk mengembangkan prinsip dasar akuntansi terutama berada di tangan para praktisi akuntansi dan ahli akuntansi, pekerja independen, serta atas inisiatif berbagai organisasi akuntansi. Prinsip-prinsip tersebut juga dipengaruhi oleh praktik bisnis dan kebiasaan, gagasan dan kepercayaan para pemakai laporan keuangan, agen pemerintah, bursa saham, serta kelompok bisnis lainnya.[20]

Kesimpulannya, prinsip dasar akuntansi merupakan pedoman fundamental yang memiliki peran penting dalam memastikan laporan keuangan disusun dengan akurat, konsisten, dan dapat diandalkan. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai landasan untuk pengembangan standar, teknik, dan prosedur akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan ekonomi. Dengan penerapan prinsip-prinsip dasar tersebut,

[20]Niswonger, Fess, dan Warren, *Prinsip-Prinsip Akuntansi, Jilid 1*, 523.

akuntansi dapat terus berkembang menjadi instrumen yang efektif dalam menyediakan informasi keuangan yang relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi strategis oleh berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, prinsip ini mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan, yang menjadi elemen penting untuk membangun kepercayaan. Prinsip-prinsip ini juga memastikan praktik akuntansi dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis.

Selain prinsip dasar akuntansi, saat ini terdapat pula kode etik profesi akuntan yang diterbitkan oleh International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA).[21] Kode etik tersebut terhimpun dalam *Handbook of International Code of Ethics for Professional Accountants*. Di Indonesia, tiga asosiasi profesi akuntansi, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), mengadopsi sumber yang sama, yaitu *Handbook of International Code of Ethics for Professional Accountants Edisi 2018*. Namun, pengadopsian tersebut menghasilkan dua judul buku yang berbeda. IAI dan IAMI sepakat menggunakan nama Kode Etik Akuntan Indonesia, sementara IAPI memilih nama Kode Etik Profesi Akuntan Publik, dengan mengacu pada istilah yang tercantum dalam Undang-Undang Akuntan Publik.[22] Pada Kode Etik Akuntan

[21]IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants) adalah badan independen di bawah IFAC yang mengembangkan standar etika internasional bagi akuntan profesional, dengan kantor pusat di New York, Amerika Serikat.

[22]"Kode Etik Akuntan Memiliki Dua Nama, Ini Sebabnya," diakses 16 November 2024, https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/kode-etik-akuntan-memiliki-dua-nama,-ini-sebabnya.

Indonesia Tahun 2021, terdapat lima prinsip dasar etika akuntan, yaitu: integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Prinsip-prinsip dasar tersebut menjadi fondasi dalam mendukung praktik akuntansi yang baik dan bertanggung jawab.[23]

Prinsip dasar akuntansi yang diuraikan sebelumnya, pada gilirannya, saling melengkapi dengan kode etik profesi akuntan, di mana prinsip dasar akuntansi memberikan kerangka teknis dalam penyusunan laporan keuangan, sementara kode etik akuntan mengatur bagaimana prinsip-prinsip dasar akuntansi tersebut harus dilaksanakan secara etis dan sesuai dengan standar profesional yang berlaku. Namun, prinsip dasar akuntansi harus dibenahi terlebih dahulu karena merupakan fondasi teknis yang memastikan laporan keuangan disusun dengan benar. Kode etik akuntan bertumpu pada prinsip dasar untuk mengatur perilaku profesional. Tanpa prinsip yang jelas dan relevan, kode etik tidak akan memiliki acuan yang kuat, sehingga perilaku etis menjadi sulit diukur.

Prinsip dasar akuntansi menjelaskan apa yang harus dilakukan, sedangkan kode etik mengatur bagaimana melakukannya secara etis. Secara logis, fondasi teknis harus kokoh sebelum perilaku diatur. Jika prinsip dasar akuntansi salah, dampaknya bersifat sistemik, menghasilkan laporan keuangan yang tidak akurat dan merugikan berbagai pihak, seperti investor, regulator, dan masyarakat umum.

[23]Ikatan Akuntan Indonesia, “Kode Etik Akuntan Indonesia 2021,” 2021, 6.

Sebaliknya, jika kode etik akuntan salah, dampaknya lebih terbatas pada perilaku individu akuntan, yang meskipun penting, tidak secara langsung memengaruhi keakuratan laporan keuangan. Dengan demikian, penelitian ini akan fokus pada mendekonstruksi prinsip dasar akuntansi, bukan prinsip dasar etika akuntan.

E. Sumber Prinsip Dasar Akuntansi

Prinsip dasar akuntansi dapat berasal dari berbagai sumber resmi dan literatur akademik. Salah satu sumber utama adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh badan-badan yang merumuskan standar akuntansi di suatu negara, seperti Accounting Principles Board (APB) di Amerika Serikat atau Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Indonesia. Pernyataan-pernyataan tersebut menetapkan standar yang harus diikuti dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, atau *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP).

Selain itu, buku teks akuntansi yang ditulis oleh para akademisi sering menjadi referensi penting untuk memahami konsep dan prinsip dasar akuntansi. Literatur ilmiah lainnya, seperti artikel di jurnal akuntansi, juga memainkan peran signifikan dalam memperdalam pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip dasar tersebut dalam berbagai konteks. Dengan demikian, baik dokumen resmi maupun literatur akademik menjadi dasar yang kuat dalam pembentukan prinsip dasar akuntansi.[24]

[24]Accounting Principles Board, "*APB Statement No.4*, 100.

Menurut Nikolai dan Bazley, sumber prinsip dasar akuntansi di Amerika Serikat berasal dari berbagai dokumen resmi dan praktik akuntansi yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Prinsip-prinsip ini dikenal sebagai *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP), yang menjadi acuan utama dalam penyusunan laporan keuangan di Amerika Serikat. Urutan sumber prinsip dasar itu mencakup pernyataan standar dan interpretasi yang diterbitkan oleh Financial Accounting Standards Board (FASB), pendapat yang dikeluarkan oleh Accounting Principles Board (APB), dan Buletin Riset Akuntansi dari American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

Selain itu, ada buletin teknis FASB, interpretasi akuntan AICPA, serta panduan audit dan akuntansi industri yang menjadi acuan. Praktik umum yang diterapkan oleh para akuntan dalam menjalankan tugas mereka juga menjadi sumber penting. Regulasi yang ditetapkan oleh Securities and Exchange Commission (SEC) serta regulasi dari Internal Revenue Service (IRS) turut mempengaruhi penyusunan laporan keuangan. Terakhir, literatur akuntansi, yang mencakup buku teks dan jurnal akademik, memainkan peran penting dalam memperkaya pengetahuan tentang standar akuntansi dan membantu dalam penafsiran serta penerapannya dalam berbagai konteks bisnis.[25]

Sumber dari prinsip dasar akuntansi internasional, yang merupakan landasan penyusunan *International Financial Reporting Standards* (IFRS), berasal dari standar-standar akuntansi yang berkembang melalui praktik umum, regulasi nasional, serta masukan

[25]Lativa, "Philosophy of Science Perspective on Quality of Financial Statements," *International Journal Multidisciplinary Science* 3, no. 2 (16 Mei 2024): 143–44, doi:10.56127/ijml.v3i2.1528.

dari berbagai pemangku kepentingan. IFRS diterbitkan di Inggris oleh International Accounting Standards Board (IASB) sejak tahun 1973. Proses penyusunan IFRS melibatkan beberapa tahapan yang dirancang untuk menjamin kualitas dan relevansi standar tersebut. Tahap awal dimulai dengan penelitian yang dilakukan oleh IASB dan badan standar nasional lainnya. Setelah itu, makalah diskusi diterbitkan dan diikuti dengan draf eksposur untuk mengundang tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk perusahaan, investor, auditor, dan regulator. Masukan dari para pemangku kepentingan ditinjau secara menyeluruh sebelum IFRS baru diterbitkan. Proses tersebut memastikan bahwa IFRS tidak hanya mencerminkan praktik terbaik, tetapi juga dapat diimplementasikan dengan baik di berbagai sektor dan negara.[26]

Sumber prinsip dasar akuntansi di Indonesia berawal dari penerbitan *Prinsip Akuntansi Indonesia* (PAI) pada tahun 1973, yang mengadopsi standar akuntansi Amerika, yaitu *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP). PAI 1973 menjadi pedoman utama bagi praktik akuntansi di Indonesia selama periode awal tersebut. Pada tahun 1984, dilakukan revisi besar-besaran terhadap PAI 1973 untuk menyesuaikan dengan perkembangan bisnis, yang menghasilkan *Prinsip Akuntansi Indonesia 1984*. Selanjutnya, pada 1 Oktober 1994, PAI 1984 diubah menjadi *Standar Akuntansi Keuangan* (SAK), yang disusun berdasarkan pernyataan International Accounting Standards Committee (IASC), selaku pendahulu IASB. Hal tersebut menandai upaya

[26]Marta Tache dan Iustina Cristina Costea-Marcu, "A Historical Approach to the Financial Reporting Under IFRS," *International Journal of Business and Management Invention (IJBMI)*, II, 10, no. 3 (2021): 21, doi:10.35629/8028-1003021926.

konvergensi Indonesia dengan standar internasional, yaitu *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Sejak 1994, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berkomitmen untuk mengadopsi IFRS secara bertahap. Adopsi penuh IFRS dilakukan pada tahun 2012 untuk meningkatkan kualitas dan transparansi laporan keuangan.[27]

Berdasarkan uraian di atas, sumber prinsip dasar akuntansi itu mencakup dokumen resmi, seperti *Prinsip Akuntansi Indonesia* (PAI), *Standar Akuntansi Keuangan* (SAK), *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP), serta standar internasional, yaitu *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Dokumen-dokumen tersebut menjadi acuan penting dalam penyusunan laporan keuangan yang transparan, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, buku teks dan artikel dalam jurnal ilmiah juga memiliki peran signifikan sebagai sumber informasi dan panduan dalam penerapan prinsip dasar akuntansi. Sumber-sumber tersebut relevan untuk berbagai jenis bisnis serta lingkungan regulasi yang terus berkembang. Dengan demikian, profesional akuntansi dapat mengikuti perkembangan praktik dan regulasi secara global, yang berdampak pada konsistensi dan harmonisasi laporan keuangan di berbagai negara.

[27]Hylian Tanre Gudio, "Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan* 1, no. 3 (17 Maret 2024): 36–37, doi:10.59407/jakpt.v1i3.474.

F. Prinsip Dasar Akuntansi

Berikut adalah prinsip dasar akuntansi yang terdapat pada berbagai sumber:

Pertama, APB Statement No. 4 berjudul *Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business Enterprises,* yang diterbitkan oleh Dewan Prinsip Akuntansi Amerika Serikat (Accounting Principles Board) pada tahun 1970.[28] Prinsip-prinsip dasar akuntansi dalam dokumen tersebut disebutkan secara berurutan sebagai keutamaan dasar akuntansi, yang isinya meliputi: kesatuan akuntansi, kontinuitas usaha, pengukuran sumber daya ekonomi dan kewajiban, periode waktu, ukuran dalam satuan uang, akrual, harga pertukaran, penaksiran, pertimbangan, informasi keuangan untuk tujuan umum, keterkaitan laporan keuangan, hakikat di atas bentuk, dan materialitas. Prinsip-prinsip dasar lainnya disebutkan secara tidak berurutan, seperti: pengungkapan yang memadai, konservatisme, keandalan, keterbandingan, dan konsistensi.[29] Penolakan penggunaan prinsip pencocokan (*matching*) terdapat pada catatan kaki dalam dokumen tersebut.[30]

[28]Dokumen tersebut memberikan landasan prinsip dan konsep akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan di Amerika Serikat, sesuai dengan Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).

[29]Accounting Principles Board, *"APB Statement No.4*,10–47.

[30]Accounting Principles Board, *"APB Statement No.4*, 57.

Kedua, buku *Prinsip Akuntansi Indonesia Tahun 1973*.[31] Prinsip-prinsip dasar akuntansi dalam buku tersebut dituangkan dalam sifat dan keterbatasan laporan keuangan, yaitu: bahwa laporan keuangan bersifat historis, bersifat umum, terdapat penaksiran dan pertimbangan, bersifat konservatif, lebih berpegang pada sisi ekonomi daripada formalnya, dan menggunakan istilah-istilah teknis, prinsip entitas ekonomi dijelaskan sebagai tanggung jawab manajemen terhadap para pemangku kepentingan. Selanjutnya, prinsip periode waktu dan keterbandingan dikemukakan bahwa laporan keuangan yang tersusun secara berurutan waktu lebih informatif dibandingkan laporan untuk satu periode saja, karena memfasilitasi perbandingan dan evaluasi terhadap perkembangan bisnis. Prinsip akrual menegaskan kebutuhan akan pengakuan pendapatan dengan batasan yang jelas. Prinsip objektivitas, kejujuran, dan keandalan termanifestasi dalam ekspektasi terhadap kualitas laporan keuangan. Akhirnya, prinsip konsistensi menetapkan bahwa perubahan metode pembukuan harus tetap mempertahankan keterbandingan laporan keuangan.[32]

[31]Buku tersebut merupakan pedoman resmi yang diadopsi oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk standar pelaporan keuangan di Indonesia. Prinsip ini diadaptasi dari Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) yang berlaku di Amerika Serikat, namun disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal.

[32]Ikatan Akuntan Indonesia, *Prinsip Akuntansi Indonesia*, 2–45.

Ketiga, buku *Prinsip Akuntansi Indonesia Tahun 1984*.[33] Prinsip-prinsip dasar yang diuraikan dalam buku tersebut mencakup sifat laporan keuangan yang: historis, konservatif, serta menekankan pentingnya keterbandingan, objektivitas, keandalan, dan konsistensi dalam penyajian laporan keuangan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa laporan keuangan dapat diandalkan oleh para pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Prinsip-prinsip dasar akuntansi dituangkan dalam konsep-konsep dasar akuntansi yang terdiri dari: kesatuan akuntansi, kesinambungan, periode akuntansi, pengukuran dalam nilai uang, harga petukaran, penetapan beban dan pendapatan.[34] Dalam buku tersebut, prinsip-prinsip dasar akuntansi juga tertuang dalam sifat dan keterbatasan laporan keuangan, yaitu: bersifat historis, bersifat umum, tidak luput dari berbagai taksiran dan pertimbangan, hanya melaporkan sesuatu yang material, bersifat konservatif, makna ekonomis lebih penting daripada makna hukumnya, menggunakan istilah teknis, adanya banyak metode yang menimbulkan variasi pengukuran, serta informasi kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan.[35]

Keempat, buku *Prinsip-prinsip Akuntansi Jilid 1*, karya C. Rollin Niswonger dkk., memuat sepuluh konsep dan prinsip dasar akuntansi

[33]Buku tersebut adalah pedoman resmi yang diadopsi oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menetapkan standar pelaporan keuangan di Indonesia. Buku tersebut juga mengadaptasi prinsip-prinsip dari Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) yang digunakan di Amerika Serikat, namun menyesuaikannya dengan kebutuhan dan kondisi lokal di Indonesia.

[34]Ikatan Akuntan Indonesia, *Prinsip Akuntansi Indonesia 1984*, 4–6.

[35]Ikatan Akuntan Indonesia, *Prinsip Akuntansi Indonesia 1984*, 7.

yang menjadi panduan utama dalam praktik akuntansi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kesatuan usaha, yang memisahkan entitas bisnis dari pemiliknya; perusahaan berjalan, yang mengasumsikan keberlanjutan operasi; bukti objektif, yang menekankan penggunaan data yang dapat diverifikasi; serta unit pengukuran dan periode akuntansi, yang membantu pelaporan dalam satuan moneter dan periode waktu tertentu. Selain itu, konsep seperti penandingan pendapatan dan biaya, pengungkapan memadai, konsistensi, materialitas, dan konservatisme memastikan laporan keuangan disusun dengan akurat, transparan, dan relevan bagi penggunanya.[36]

Kelima, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan* yang diterbitkan oleh IAI pada tanggal 7 September 1994 menjelaskan bahwa prinsip dasar akuntansi terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu asumsi dasar dan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Asumsi dasar terdiri dari dasar akrual dan kelangsungan usaha, sedangkan karakteristik kualitatif laporan keungan terdiri dari dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, penyajian jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, keseimbangan biaya dan manfaat, keseimbangan di antara karakter kualitatif, dan penyajian wajar.[37]

Keenam, buku *Teori Akuntansi Buku Satu* karya Ahmad Riahi Belkaoui menguraikan berbagai prinsip dasar akuntansi yang menjadi

[36]Niswonger, Fess, dan Warren, *Prinsip-Prinsip Akuntansi, Jilid 1*, 526–44.

[37]Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan, Buku Satu,1 Oktober 1994* (Jakarta: Salemba Empat, 1994), 8–16.

pedoman utama dalam praktik dan teori akuntansi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi dalil entitas, yang memisahkan entitas bisnis dari pemiliknya, dan dalil kelangsungan usaha, yang mengasumsikan perusahaan akan beroperasi secara berkelanjutan. Dalil unit pengukuran dan periode akuntansi memastikan transaksi dicatat dalam satuan moneter dan periode tertentu. Prinsip biaya dan pendapatan menekankan perlakuan transaksi secara historis dan akurat, sementara prinsip pengaitan, objektivitas, konsistensi, dan pengungkapan penuh menjamin informasi keuangan yang relevan dan dapat dipercaya. Prinsip konservatisme, materialitas, keseragaman dan komparabilitas, serta ketepatan waktu dari laba menambah dimensi penting dalam menghasilkan laporan yang mendukung pengambilan keputusan yang strategis dan akuntabel.[38]

Ketujuh, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah* (KDPPLKS) yang diterbitkan pada 27 Juni 2007. Prinsip-prinsip dasar akuntansi dalam dokumen tersebut tidak disajikan secara berurutan, melainkan tersebar di berbagai bagian dokumen. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: entitas ekonomi, unit moneter, periode waktu, prinsip biaya, pengungkapan paripurna, kesinambungan usaha, prinsip mempertemukan, pengakuan pendapatan, materialitas, konservatisme, substansi mengungguli bentuk, objektivitas, memiliki daya banding, konsisten, dan netral.[39] Hal yang membedakan dokumen

[38]Belkaoui, *Teori Akuntansi Buku Satu*, 270–92.

[39]Ikatan Akuntan Indonesia, *"Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian*, 19.

ini dari yang lain adalah adanya penyebutan prinsip kejujuran secara eksplisit.[40]

Kedelapan, *Conceptual Framework for Financial Reporting* (CFFR) yang dikeluarkan oleh IASB pada September 2010 dan direvisi Maret 2018. Prinsip-prinsip dasar akuntansi dalam CFFR tidak disebutkan secara berurutan, tetapi tersebar di berbagai bagian dokumen. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: entitas ekonomi, unit moneter, periode waktu, prinsip biaya, pengungkapan paripurna, kesinambungan usaha, prinsip mempertemukan, pengakuan pendapatan, materialitas, konservatisme, substansi mengungguli bentuk, objektivitas, memiliki daya banding, konsisten, dan netral.[41] Dalam dokumen tersebut, prinsip kejujuran tidak disebutkan secara eksplisit. Selain itu, terdapat pernyataan bahwa ketepatan dalam laporan keuangan tidak selalu berarti akurat, melainkan dibatasi oleh materialitas. Kerangka konseptual yang disusun oleh IASB ini menjadi dasar dalam penyusunan IFRS.

Kesembilan, *Draft Exposure Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan* (DE KKPK) memuat prinsip-prinsip dasar akuntansi yang menjadi panduan penting dalam penyusunan laporan keuangan yang andal dan relevan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup entitas ekonomi, yang memisahkan entitas dari pemiliknya, dan unit moneter, yang mengukur aktivitas dalam satuan yang stabil. Periode waktu, prinsip biaya, dan pengungkapan paripurna mendukung pelaporan berkala yang

[40]Ikatan Akuntan Indonesia, *"Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian*, 3–42.

[41]International Accounting Standards Board, *"Conceptual Framework for Financial Reporting"* (IFRS Foundation, 2018), A22–68.

transparan. Prinsip kesinambungan usaha, mempertemukan, dan pengakuan pendapatan memastikan laporan keuangan mencerminkan realitas operasi. Selain itu, materialitas, konservatisme, substansi mengungguli bentuk, objektivitas, daya banding, konsistensi, dan netralitas berfungsi menjaga keakuratan, transparansi, dan keseragaman dalam pelaporan, menjadikannya alat pengambilan keputusan yang efektif.[42] Setelah sesi *public sharing* pada 27 Agustus 2019 dan penutupan periode komentar pada 31 Oktober 2019, DE KKPK disahkan tanpa perubahan dari versi *draft*-nya.[43]

Terakhir, buku *Teori Akuntansi dalam Hampiran Historiografis Taksonomis* karya Jan Hoesada menguraikan tiga belas prinsip dasar akuntansi yang menjadi landasan penting dalam penyusunan laporan keuangan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip entitas ekonomi, yang memisahkan antara entitas dan pemiliknya; prinsip unit moneter, yang mengukur aktivitas ekonomi dalam mata uang; dan prinsip periode waktu, yang membagi aktivitas ke dalam interval pelaporan tertentu. Selain itu, prinsip biaya, pengungkapan paripurna, dan kesinambungan usaha memastikan laporan keuangan mencerminkan realitas bisnis secara transparan. Prinsip lainnya, seperti mempertemukan, pengakuan pendapatan, materialitas, konservatisme, objektivitas, konsistensi, dan

[42]Ikatan Akuntan Indonesia, *"Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan"* (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2019), 6–47.

[43]Ikatan Akuntan Indonesia, "Pengesahan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Tahun 2019," 2019, https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/pengesahan-kerangka-konseptual-pelaporan-keuangan-tahun-2019#gsc.tab=0.

berdaya banding, bertujuan untuk menghasilkan informasi yang relevan, akurat, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi yang strategis.[44]

Berdasarkan tinjauan dari berbagai referensi terkait prinsip dasar akuntansi di atas, terdapat prinsip-prinsip yang memiliki kesamaan konsep, meskipun istilah yang digunakan mungkin berbeda. Proses pengelompokan ini dilakukan untuk menghindari duplikasi dan mengkategorikan prinsip-prinsip yang memiliki makna serupa ke dalam satu kelompok. Pengelompokan ini tidak hanya membantu menyederhanakan pemahaman, tetapi juga memastikan bahwa setiap prinsip yang diidentifikasi mencakup aspek mendasar dari akuntansi. Dengan demikian, jumlah prinsip yang diidentifikasi dari berbagai referensi dapat diringkas menjadi 16 prinsip inti yang mewakili esensi akuntansi secara menyeluruh. Tabel berikut menyajikan pengelompokan prinsip-prinsip tersebut untuk mempermudah analisis dan perbandingan antarreferensi.

[44]Hoesada, *Teori Akuntansi dalam Hampiran*, 259–60.

Tabel 2.1
Prinsip Dasar Akuntansi dalam Berbagai Referensi

No.	Basic Accounting Principles	APB Statement No.4 1970	Prinsip Akuntansi Indonesia 1974	Prinsip Akuntansi Indonesia 1984	Prinsip Akuntansi Jilid 1, C. Rollin Niswonger et al.1992	KDPPLK 1994	Accounting Theory Buku 1, Ahmad Riahi Belkaoi, 2006	KDPPLKS 2007	CFFR IFRS (2010, revisi 2018)	KKPK 2019	Teori Akuntansi dalam Hampiran Historiografis Taksonomis, Jan Hoesada,2022
1	Prinsip entitas ekonomi	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√
2	Prinsip unit moneter	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√
3	Prinsip periode waktu	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√
4	Prinsip biaya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

5	Prinsip pengungkapan paripurna	√	-	-	√	√	√	√	√	√	√
6	Prinsip kesinambungan usaha entitas	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√
7	Prinsip mempertemukan	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√
8	Prinsip pengakuan pendapatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Prinsip materialitas	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√
10	Prinsip konservatisme	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√
11	Prinsip substansi mengungguli bentuk	√	√	√	-	√	-	√	√	√	-
12	Obyejtif	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
13	Memiliki daya banding	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√

14	Konsisten	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√
15	Netral	√	√	√	-	√	-	√	√	√	-
16	Tepat waktu	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-

Description:

√ = disebutkan secara eksplisit

- = tidak disebutkan secara eksplisit

Tabel tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar akuntansi ada yang tercantum secara eksplisit dan ada yang tidak dalam berbagai dokumen. Beberapa dokumen mungkin hanya menyoroti prinsip-prinsip yang relevan dengan konteks atau topik yang dibahas. Sementara itu, dokumen lain dapat menganggap bahwa prinsip-prinsip tersebut sudah tersirat atau tidak perlu dijabarkan secara rinci. Perbedaan tersebut tidak mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip tersebut kurang penting, melainkan mencerminkan fokus yang berbeda dari masing-masing dokumen.

Adapun pengertian dari masing-masing prinsip dasar akan dijelaskan sebagai berikut. Prinsip entitas ekonomi memisahkan perusahaan dari pemiliknya, memastikan aset, kewajiban, pendapatan,

dan pengeluaran perusahaan dicatat terpisah dari keuangan pribadi pemilik.[45] Hal ini menciptakan transparansi dan mencegah pencampuran aset. Misalnya, laporan keuangan toko hanya mencatat transaksi toko, bukan aset pribadi pemilik. Jika toko mengambil pinjaman, tanggung jawabnya tetap pada toko, bukan pemilik. Pemisahan ini mendukung kejelasan keuangan dan mempermudah pengambilan keputusan.[46]

Prinsip unit moneter menyatakan bahwa semua transaksi dicatat dalam satuan uang untuk memudahkan analisis.[47] Informasi non keuangan disajikan secara kualitatif sebagai pelengkap. Prinsip ini mengasumsikan stabilitas nilai uang, namun inflasi atau deflasi dapat memengaruhi daya beli dan mengaburkan interpretasi data. Misalnya, pendapatan Rp100 juta tahun ini akan bermakna berbeda jika inflasi mencapai 10% tahun depan, sehingga konteks ekonomi penting untuk pemahaman yang akurat.[48]

Prinsip periode waktu mengatur penyusunan laporan keuangan untuk mencerminkan kinerja dan posisi keuangan dalam periode tertentu.[49] Laporan laba rugi mencatat pendapatan dan beban selama periode tersebut, sedangkan neraca menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode. Sebagai contoh, laporan keuangan

[45]Putu Riesty Masdiantini dkk., *Panduan Komperehensif Akuntansi dan Keuangan: Menguasai Dasar-Dasar dan Praktik Terbaik* (Bantul: Green Pustaka Indonesia, 2024), 14.

[46]Belkaoui, *Teori Akuntansi Buku Satu*, 275.

[47]Hery, *Intisari Konsep Dasar Akuntansi* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2021), 211.

[48]Niswonger, Fess, dan Warren, *Prinsip-Prinsip Akuntansi, Jilid 1*, 529.

[49]Adrian Radiansyah dkk., *Teori & Konsep Dasar Akuntansi di Berbagai Sektor* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 13.

tahunan perusahaan yang berakhir pada 31 Desember 2024 akan mencatat semua pendapatan dan beban tahun 2024 di laporan laba rugi, sementara neraca mencerminkan posisi keuangan pada tanggal tersebut. Prinsip tersebut membantu pemangku kepentingan mengevaluasi kinerja dan perubahan keuangan antarperiode.[50]

Prinsip biaya historis menyatakan bahwa aset, barang, dan jasa dicatat berdasarkan harga perolehan awalnya, tanpa memperhitungkan perubahan nilai di masa depan.[51] Misalnya, jika sebuah perusahaan membeli gedung seharga 1 miliar rupiah, nilai tersebut dicatat di laporan keuangan meskipun harga pasar gedung berubah. Prinsip tersebut memastikan laporan keuangan tetap objektif dan dapat diverifikasi, karena harga perolehan lebih stabil dibanding fluktuasi nilai pasar. Sebagai contoh lain, mesin yang dibeli seharga Rp500 juta akan dicatat dengan nilai tersebut, dikurangi penyusutan, hingga masa kegunaannya habis atau dijual.[52]

Prinsip pengungkapan paripurna menyatakan bahwa informasi penting dalam laporan keuangan harus disajikan secara lengkap dan jelas untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pengguna, seperti investor dan kreditor. Informasi ini disampaikan pada bagian yang relevan, seperti laporan laba rugi, neraca, atau catatan laporan keuangan. Sebagai contoh, kewajiban jangka panjang yang signifikan harus diungkapkan dalam neraca agar pengguna dapat menilai kondisi

[50]Hoesada, *Teori Akuntansi dalam Hampiran*, 259–60.

[51]Jayesh Upadhyay dkk., *Financial Accounting Concepts & Application* (Delhi: RK Publication, 2024), 121–22.

[52]Belkaoui, *Teori Akuntansi Buku Satu*, 277.

keuangan perusahaan secara akurat. Jika tidak diungkapkan, pengguna mungkin salah menilai risiko perusahaan dan membuat keputusan yang keliru, seperti investasi yang terlalu berisiko.[53]

Prinsip kesinambungan usaha mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus beroperasi tanpa batas waktu, sehingga laporan keuangan disusun dengan asumsi kelangsungan usaha.[54] Aset dicatat berdasarkan harga perolehan dan disesuaikan melalui penyusutan selama masa manfaatnya, tanpa mempertimbangkan fluktuasi nilai pasar. Sebagai contoh, mesin yang dibeli seharga Rp500 juta akan dicatat pada harga perolehan dan disusutkan selama 10 tahun, terlepas dari perubahan nilai pasarnya. Namun, jika perusahaan berhenti beroperasi, prinsip ini tidak lagi berlaku. Dalam kondisi tersebut, laporan keuangan harus mencerminkan nilai pasar aset untuk persiapan likuidasi atau penghentian operasi.[55]

Prinsip mempertemukan (*matching principle*) dalam akuntansi berbasis akrual mengharuskan biaya dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan.[56] Basis akrual merupakan syarat utama dalam penerapan prinsip tersebut. Dalam akuntansi berbasis akrual, pendapatan dan biaya diakui pada saat terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan

---

[53]Hoesada, *Teori Akuntansi dalam Hampiran*, 260.

[54]S. K. Singh, *Corporate Financial Accounting* (Agra: SBPD Publications, 2022), 17.

[55]Niswonger, Fess, dan Warren, *Prinsip-Prinsip Akuntansi, Jilid 1*, 527–28.

[56]Nabil Baydoun dkk., *Principles of Islamic Accounting* (Hoboken: John Wiley & Sons, 2018), 24.

menjual barang pada bulan Oktober tetapi baru menerima pembayaran pada bulan November, pendapatan dan biaya terkait penjualan tersebut tetap harus dicatat di bulan Oktober. Prinsip tersebut memungkinkan laporan keuangan mencerminkan kinerja perusahaan secara akurat dalam periode yang relevan.[57]

Terdapat tiga dasar penandingan yang mendukung syarat akuntansi berbasis akrual tersebut. Pertama, hubungan sebab akibat, di mana biaya langsung dikaitkan dengan pendapatan, seperti komisi penjualan yang dibayarkan saat terjadi penjualan. Kedua, alokasi sistematis dan rasional, seperti penyusutan aset tetap yang dialokasikan secara bertahap. Ketiga, pembebanan segera, yang digunakan untuk mencatat biaya yang tidak dapat dihubungkan langsung dengan pendapatan tertentu, seperti biaya penelitian dan pengembangan. Ketiga dasar tersebut memastikan bahwa biaya dan pendapatan ditandingkan dengan tepat, sehingga mendukung akurasi laporan keuangan.[58]

Prinsip pengakuan pendapatan dalam akuntansi berbasis akrual menyatakan bahwa pendapatan harus diakui ketika produk atau layanan telah diserahkan kepada pelanggan, tanpa memperhatikan kapan pembayaran diterima. Prinsip tersebut mengharuskan perusahaan mencatat pendapatan pada saat transaksi terjadi, bukan saat kas diterima.[59] Pendekatan ini memungkinkan laporan keuangan mencerminkan kinerja bisnis yang sebenarnya, karena pendapatan diakui

[57]Hoesada, *Teori Akuntansi dalam Hampiran*, 260.

[58]Chariri dan Ghozali, *Teori Akuntansi, Edisi Revisi*, 100.

[59]Nur Hidayati dkk., *Teori Akuntansi : Teori, Implementasi dan Perkembangannya* (Bantul: Green Pustaka Indonesia, 2024), 21.

ketika aktivitas ekonomi berlangsung, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang operasi bisnis perusahaan. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan menjual barang pada bulan Oktober dengan pembayaran yang akan diterima pada bulan Desember, pendapatan tetap akan diakui pada bulan Oktober, ketika barang telah dikirimkan kepada pelanggan. Meskipun uangnya baru diterima dua bulan kemudian, pencatatan dilakukan saat transaksi terjadi. Dengan cara tersebut, laporan keuangan lebih mencerminkan performa bisnis perusahaan, menyoroti seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan penjualan, terlepas dari waktu penerimaan kas.[60]

Prinsip materialitas menyatakan bahwa prinsip-prinsip dasar akuntansi lainnya dapat dikecualikan jika informasi tersebut tidak signifikan bagi pengambilan keputusan. Dengan kata lain, jika suatu informasi tidak cukup penting untuk memengaruhi pemahaman pengguna laporan keuangan, perusahaan dapat mengabaikan penerapan prinsip akuntansi secara mendetail.[61] Tujuan dari prinsip tersebut adalah untuk memfokuskan laporan keuangan pada informasi yang benar-benar relevan dan signifikan, sehingga pengguna laporan dapat membuat keputusan yang tepat tanpa terbebani oleh detail yang tidak penting.

Friskol mendefinisikan materialitas sebagai angka atau informasi dalam laporan keuangan yang cukup penting bagi pengguna dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan

[60]Hoesada, *Teori Akuntansi dalam Hampiran*, 260.

[61]Carolina Machado dan J. Paulo Davim, *Circular Economy and Manufacturing* (Amsterdam: Elsevier, 2024), 67.

memiliki aset kecil seperti peralatan kantor dengan nilai rendah, perusahaan dapat mengabaikan pencatatan detail penyusutan aset tersebut jika nilai aset tersebut tidak signifikan. Dalam hal ini, prinsip akuntansi lainnya, seperti pencatatan penyusutan secara ketat, dapat dikecualikan tanpa memengaruhi kualitas laporan keuangan atau keputusan yang diambil oleh para pengguna laporan.[62]

Prinsip konservatisme dalam akuntansi menyarankan agar perusahaan lebih berhati-hati dalam melaporkan keuntungan dan cenderung segera mengakui potensi kerugian. Ketika perusahaan dihadapkan pada dua metode akuntansi, mereka dianjurkan untuk memilih metode yang kurang menguntungkan bagi ekuitas pemegang saham. Hal tersebut berarti perusahaan harus menggunakan metode yang menghasilkan nilai pendapatan yang lebih rendah atau utang dan biaya yang lebih tinggi. Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari optimisme berlebihan dalam pelaporan keuangan, yang berpotensi memberikan gambaran yang tidak akurat.[63]

Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa jika ada potensi kerugian atau utang, perusahaan harus segera mengakuinya. Sebaliknya, jika ada potensi keuntungan atau peningkatan nilai aktiva, hal tersebut tidak boleh langsung diakui sampai keuntungan atau kenaikan tersebut benar-benar terealisasi. Sebagai contoh, jika perusahaan memperkirakan akan mengalami penurunan nilai aset, nilai tersebut harus dicatat segera.

---

[62]Harahap, *Teori Akuntansi, Edisi Revisi 2011*, 91.

[63]Kenneth MacNeal, *Truth in Accounting* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016), 50.

Namun, jika ada kemungkinan pendapatan dari investasi, perusahaan hanya akan mencatatnya setelah pendapatan tersebut benar-benar diterima.[64]

Prinsip substansi mengungguli bentuk menekankan bahwa transaksi dan peristiwa ekonomi harus dilaporkan sesuai dengan realitas ekonomi, bukan hanya berdasarkan bentuk hukumnya. Prinsip tersebut penting untuk memastikan informasi yang disajikan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan memberikan gambaran yang jujur mengenai posisi serta kinerja keuangan entitas.[65] Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan menjual aset kepada pihak lain tetapi masih memiliki hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari aset tersebut, pelaporan penjualan aset tersebut seharusnya tidak hanya didasarkan pada aspek hukum yang mengalihkan kepemilikan, melainkan juga mempertimbangkan substansi ekonomi di balik transaksi tersebut.

Dalam kasus seperti ini, jika perusahaan masih mendapatkan manfaat dari aset yang dijual, pelaporan yang hanya menyebutkan penjualan berdasarkan dokumen hukum akan menyesatkan. Hal tersebut terjadi karena perusahaan sesungguhnya belum kehilangan kontrol ekonomis atas aset tersebut. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang akurat, laporan keuangan harus mencatat transaksi berdasarkan kenyataan bahwa perusahaan masih memiliki hak atas

[64]Chariri dan Ghozali, *Teori Akuntansi, Edisi Revisi*, 102.

[65]V.K. Goyal dan Ruchi Goyal, *Financial Accounting* (Delhi: PHI Learning, 2023), 30–31.

manfaat ekonomi dari aset, meskipun secara hukum kepemilikannya telah dialihkan.[66]

Prinsip objektivitas dalam akuntansi menyatakan bahwa pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan harus didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi dan diukur secara objektif. Sebagai contoh, penggunaan faktur untuk mencatat pembelian, rekening koran bank untuk mengonfirmasi saldo kas, dan penghitungan fisik untuk mencatat persediaan adalah penerapan prinsip tersebut. Bukti-bukti tersebut memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.[67] Jika prinsip tersebut tidak diterapkan, kepercayaan pengguna laporan keuangan akan terancam karena tidak ada jaminan bahwa data yang dilaporkan akurat dan bebas dari manipulasi.

Namun, tidak semua transaksi akuntansi dapat didasarkan sepenuhnya pada bukti objektif. Ada banyak situasi di mana akuntan harus menggunakan estimasi dan pertimbangan subjektif, seperti dalam penyisihan piutang ragu-ragu. Penyisihan tersebut adalah perkiraan kerugian dari piutang yang tidak dapat ditagih. Meskipun melibatkan estimasi, perkiraan tersebut sebaiknya didasarkan pada data objektif, seperti pengalaman masa lalu dalam menagih piutang atau proyeksi kondisi keuangan perusahaan di masa depan. Dengan demikian,

[66]Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan, Buku Satu,1 Oktober 1994*, 12.

[67]Mega D. Novita, *Buku Etika dan Komunikasi Bisnis* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024), 117.

meskipun melibatkan estimasi, prinsip objektivitas tetap penting untuk meminimalkan risiko kesalahan atau penyimpangan yang disengaja.[68]

Prinsip daya banding bertujuan agar laporan keuangan dapat dibandingkan, baik antarperiode dalam satu perusahaan maupun antarperusahaan dalam industri yang sama. Dengan laporan keuangan yang konsisten, pemakai dapat mengidentifikasi tren posisi dan kinerja keuangan dari waktu ke waktu.[69] Sebagai contoh, pemakai dapat melihat peningkatan atau penurunan laba bersih perusahaan selama beberapa tahun terakhir dan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan strategis. Prinsip tersebut membantu pemakai mengamati perkembangan keuangan perusahaan secara lebih jelas.

Selain itu, prinsip daya banding juga penting untuk membandingkan kinerja antarperusahaan. Pemakai dapat menilai perusahaan mana yang lebih unggul dalam hal efisiensi atau profitabilitas di industri yang sama. Sebagai contoh, jika dua perusahaan otomotif menggunakan kebijakan akuntansi yang sama, pemakai dapat membandingkan kinerja keuangan mereka secara lebih adil. Oleh karena itu, informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan harus diungkapkan secara jelas agar perbandingan tersebut dapat dilakukan dengan tepat dan akurat.[70]

---

[68]Niswonger, Fess, dan Warren, *Prinsip-Prinsip Akuntansi, Jilid 1*, 528–29.

[69]Dian Efriyenty Efriyenty, *Teori Akuntansi* (Batam: Batam Publisher, 2022), 58–59.

[70]Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan, Buku Satu,1 Oktober 1994*, 14–15.

Prinsip konsistensi dalam akuntansi menyatakan bahwa kejadian ekonomi yang serupa harus dicatat dan dilaporkan dengan cara yang sama dari satu periode ke periode berikutnya. Prinsip tersebut bertujuan untuk menjaga keseragaman dalam pelaporan, sehingga pengguna laporan keuangan dapat membandingkan kinerja perusahaan secara akurat dari tahun ke tahun. Dengan penerapan prinsip tersebut, perusahaan tidak diperbolehkan mengubah metode pelaporan tanpa alasan yang kuat dan jelas, misalnya perubahan dalam standar akuntansi atau perubahan signifikan dalam bisnis perusahaan.[71]

Sebagai contoh, penerapan prinsip konsistensi dapat dilihat dalam metode penyusutan aset tetap. Jika sebuah perusahaan memilih menggunakan metode penyusutan garis lurus pada tahun pertama, maka perusahaan tersebut diharapkan untuk tetap menggunakan metode yang sama pada tahun-tahun berikutnya. Hal tersebut memastikan bahwa laporan keuangan dari periode yang berbeda dapat dibandingkan secara adil, sehingga para pemangku kepentingan dapat menilai pertumbuhan atau penurunan kinerja perusahaan dengan tepat.[72]

Prinsip netralitas dalam akuntansi menekankan bahwa informasi harus disajikan secara objektif, tanpa memihak kepada kepentingan tertentu. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran yang akurat dan dapat dipercaya bagi semua pihak yang berkepentingan, seperti investor, kreditor, atau pengguna lainnya. Informasi yang disajikan tidak

[71]M. Suresh, R. Santhi, dan C. Hariharan, *Basics of Business Accounting* (Madurai: Leilani Katie Publication, 2024), 57.

[72]Belkaoui, *Teori Akuntansi Buku Satu*, 286.

boleh dirancang untuk menguntungkan satu pihak sambil merugikan pihak lain. Prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pelaporan keuangan, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut dapat dilakukan dengan bijak.[73]

Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan melaporkan keuntungan, laporan tersebut harus mencerminkan kondisi sebenarnya tanpa upaya untuk melebih-lebihkan atau menyembunyikan informasi. Jika perusahaan sengaja memanipulasi laporan keuangan untuk menaikkan harga saham demi keuntungan pemegang saham mayoritas, hal tersebut akan melanggar prinsip netralitas. Keputusan yang diambil oleh investor potensial berdasarkan laporan yang tidak netral tersebut dapat berakhir merugikan mereka, karena informasi yang disajikan tidak mencerminkan realitas.[74]

Prinsip tepat waktu dalam pelaporan keuangan menekankan pentingnya menyajikan informasi secepat mungkin agar tetap relevan untuk pengambilan keputusan. Jika terjadi penundaan yang tidak perlu, informasi tersebut kehilangan kegunaannya karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.[75] Manajemen harus menyeimbangkan manfaat antara pelaporan cepat dan keandalan informasi. Pelaporan yang terlalu cepat dapat menghasilkan data yang belum sepenuhnya akurat, tetapi tetap berguna untuk keputusan yang mendesak.

---

[73]Risky Soleman, *Akuntansi Sebuah Ulasan Sejarah, Manajemen, Psikologi, Teknik dan Hukum* (Bogor: Guepedia, 2022), 53–54.

[74]Ikatan Akuntan Indonesia, *Prinsip Akuntansi Indonesia 1984*, 3.

[75]Roshima Said dkk., *State-of-the-Art Theories and Empirical Evidence: Selected Papers from the 6th International Conference on Governance, Fraud, Ethics, and Social Responsibility* (Singapura: Springer, 2017), 94.

Sebaliknya, jika pelaporan ditunda hingga semua aspek transaksi diketahui secara lengkap, informasi yang dihasilkan mungkin sangat akurat tetapi bisa saja terlambat untuk digunakan. Manajemen harus mempertimbangkan keseimbangan antara relevansi waktu dan kebutuhan informasi yang akurat. Sebagai contoh, perusahaan dapat melaporkan pendapatan kuartalan sebelum audit selesai, agar informasi tersebut tetap bermanfaat bagi investor yang membutuhkan data segera.[76]

[76]Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan, Buku Satu,1 Oktober 1994*, 15.

BAB III
KETERKAITAN ANTARA KELEMAHAN PRINSIP DASAR AKUNTANSI DAN TERJADINYA SKANDAL KORPORASI

A. Celah Prinsip Dasar Akuntansi

Skandal korporasi sering kali muncul akibat kombinasi antara perilaku tidak etis praktisi akuntansi dan kelemahan dalam prinsip dasar akuntansi itu sendiri. Meskipun seseorang berperilaku baik dan memiliki integritas, celah dalam prinsip dasar akuntansi yang berlaku tetap memungkinkan terjadinya manipulasi. Prinsip dasar akuntansi yang dominan saat ini, seperti IFRS dan GAAP, berkembang dalam lingkungan kapitalis yang mengutamakan efisiensi pasar dan pencapaian keuntungan.[1] Sistem ini, meskipun bertujuan untuk menciptakan transparansi, masih memberi ruang bagi interpretasi yang dapat disalahgunakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun individu memiliki etika yang baik, celah yang ada dalam prinsip dasar akuntansi tetap membuka peluang terjadinya *fraud*.[2]

Kelemahan dalam prinsip dasar akuntansi, yang berakar pada praktik kapitalis, harus diperbaiki terlebih dahulu, karena ini adalah titik

[1]Yeterina Widi Nugrahanti, "Perangkap Kapitalisme dalam Adopsi International Financial Reporting Standards (IFRS)," *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan* 5, no. 1 (2016): 95–104, https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/5574.

[2]Nur Ainiyah, Marisha Khanida, dan Yuyun Ristiani, "Potensi Fraud pada Laporan Keuangan Berbasis Fair Value," *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 2 (30 September 2021): 59–60, doi:10.36815/prive.v4i2.1341.

awal dari potensi skandal korporasi. Meskipun individu memiliki perilaku etis, jika prinsip dasar akuntansi yang digunakan memiliki celah untuk manipulasi, maka skandal tetap dapat terjadi. Sebagaimana yang sering dikatakan, kejahatan bisa muncul bukan karena keinginan, tetapi karena kesempatan. Jika sistem dan prinsip dasar akuntansi tidak menutup celah untuk manipulasi, maka siapapun, bahkan orang yang baik sekalipun, bisa tergoda untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Sebagai ilustrasi, sebuah rumah yang tidak digembok bisa menjadi sasaran pencurian, meskipun pelaku awalnya bukanlah orang yang memiliki niat jahat.[3]

Oleh itu, perbaikan prinsip dasar akuntansi menjadi langkah yang lebih penting daripada hanya mengandalkan perubahan perilaku individu. Tanpa memperbaiki celah dalam sistem akuntansi, potensi manipulasi akan selalu ada, meskipun pelaku tidak berniat untuk berbuat curang. Prinsip dasar akuntansi yang lemah memberi kesempatan bagi terjadinya *fraud*, bahkan pada individu yang memiliki integritas. Untuk mencegah skandal korporasi, langkah pertama yang harus diambil adalah memperbaiki prinsip dasar akuntansi yang berlaku, bukan hanya berfokus pada etika atau perilaku individu. Evaluasi dan perbaikan pada prinsip dasar akuntansi akan membantu menciptakan praktik yang lebih transparan dan bertanggung jawab di dunia korporasi.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang contoh-contoh skandal korporasi, penting untuk terlebih dahulu memahami pengertian etika,

[3]Pascal Caya Khrisna Wicaksana dan Lucky Nurhadiyanto, "Analisis Criminal Profiling terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Berbasis General Theory Of Crime," *UNES Law Review* 6, no. 4 (7 Juni 2024): 9865, doi:10.31933/unesrev.v6i4.1842.

moral, spiritual, dan akhlak. Keempat konsep ini memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk praktik akuntansi yang berintegritas, di mana nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kesejahteraan sosial harus selalu diutamakan. Etika, moral, spiritual, dan akhlak bukan hanya sekadar norma sosial, tetapi juga pedoman yang dapat membimbing praktisi akuntansi dalam menjalankan tugas mereka dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai keempat konsep ini, kita dapat memahami bagaimana pengabaian terhadap nilai-nilai tersebut berpotensi membuka peluang terjadinya skandal korporasi. Oleh karena itu, subbab berikut nya akan membahas pengertian etika, moral, spiritual, dan akhlak secara lebih rinci sebelum melanjutkan pada contoh-contoh skandal korporasi yang terjadi.

B. Pengertian Etika, Moral, Spiritual, dan Akhlak

Etika, moral, spiritualitas, dan akhlak memiliki perbedaan mendasar namun saling berkaitan dalam kehidupan manusia. Etika, menurut Suyatno, adalah ilmu yang membahas perilaku manusia dari sudut pandang baik dan buruk, dengan fokus pada evaluasi moral secara kritis.[4] Reksiana juga menegaskan bahwa etika adalah teori tentang perbuatan manusia yang ditimbang menurut baik dan buruknya, yang juga merupakan inti sari atau sifat dasar manusia: baik dan buruk manusia.[5] Di sisi lain, moral berhubungan dengan aturan perilaku yang

[4]Suyatno, "Nilai, Norma, Moral, Etika dan Pandangan Hidup Perlu Dipahami oleh Setiap Warga Negara dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara," *PKn Progresif* 7, no. 1 (2012): 42.

[5]Reksiana, "Kerancuan Istilah Karakter, Akhlak, Moral dan Etika," *Thaqafiyyat : Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam* 19, no. 1 (13

diterima oleh masyarakat. Suyatno mendefinisikan moral sebagai standar yang diatur oleh adat kebiasaan dan norma sosial.[6]

Etika dan moral memiliki perbedaan mendasar yang penting untuk dipahami. Etika, menurut KBBI, adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip tentang apa yang dianggap baik atau buruk, dan lebih bersifat teoretis serta normatif. Ia menawarkan kerangka konseptual yang digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap benar dalam konteks tertentu.[7] Sementara itu, moral berkaitan langsung dengan perilaku dan tindakan nyata seseorang yang dipandu oleh ajaran atau norma yang diterima umum tentang baik dan buruk. Moral lebih praktis dan berfokus pada penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.[8]

Spiritualitas berfokus pada hubungan batin manusia dengan Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi. Faizah menyatakan bahwa spiritualitas membantu manusia menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk Ilahi, terutama dalam konteks kepemimpinan.[9] Ardian menyatakan bahwa spiritualitas merupakan sebuah konsep yang mencakup berbagai dimensi dan pandangan, ditandai oleh perasaan

---

Agustus 2018): 11, doi:10.14421/thaq.2018.%x.

[6]Suyatno, "Nilai, Norma, Moral, Etika dan Pandangan Hidup Perlu Dipahami oleh Setiap Warga Negara dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara," 41.

[7]"Arti kata etika - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 22 Oktober 2024, https://kbbi.web.id/etika.

[8]"Arti kata moral - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 22 Oktober 2024, https://kbbi.web.id/moral.

[9]Kurniyatul Faizah, "Spiritualitas dan Landasan Spiritual (Modern and Islamic Values); Definisi dan Relasinya dengan Kepemimpinan Pendidikan," *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 19, no. 1 (22 April 2021): 70, doi:10.29062/ar-risalah.v19i1.957.

keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar daripada diri sendiri. Hal tersebut juga melibatkan usaha untuk mencari makna dalam kehidupan, yang dapat dipahami sebagai pengalaman yang bersifat universal dan mendalam.[10] Akhlak, menurut Reksiana, adalah kombinasi moral dan spiritualitas dalam ajaran Islam, di mana perilaku baik didasari oleh niat tulus untuk mendapatkan rida Allah.[11]

Dengan demikian, etika lebih teoretis, moral bersifat sosial, spiritualitas berfokus pada hubungan batin, dan akhlak menggabungkan ketiga aspek tersebut dalam kerangka ajaran agama. Spiritualitas dan akhlak merupakan dua aspek fundamental yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia. Menurut KBBI, spiritualitas didefinisikan sebagai keadaan atau hal yang bersifat rohani, mencakup pencarian makna yang lebih dalam dalam hidup serta hubungan individu dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Hal ini mengarah pada kesadaran akan tujuan hidup dan nilai-nilai yang lebih tinggi.[12] Sementara itu, akhlak, sebagai budi pekerti atau moral, mencerminkan perilaku seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain.[13]

Secara keseluruhan, etika, moral, spiritualitas, dan akhlak adalah komponen penting yang membentuk perilaku dan karakter manusia. Etika menyediakan dasar teoretis untuk menilai tindakan, sementara

[10]Iwan Ardian, "Spiritual and Religion Concept in Nursing for Diabetic Melitus Patients," *NURSCOPE: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ilmiah Keperawatan* 2, no. 2 (1 Desember 2016): 7–9, doi:10.30659/nurscope.2.2.40-48.

[11]Reksiana, "Kerancuan Istilah Karakter, Akhlak, Moral dan Etika," 26.

[12]"Arti kata spiritual - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 22 Oktober 2024, https://kbbi.web.id/spiritual.

[13]"Arti kata akhlak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 22 Oktober 2024, https://kbbi.web.id/akhlak.

moral mengarahkan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Spiritualitas memberikan makna yang lebih dalam, menghubungkan individu dengan tujuan hidupnya. Akhlak, yang berakar pada ajaran Islam, menggabungkan moral dan spiritualitas untuk membimbing perilaku yang tulus dan mencari rida Allah.

Integrasi keempatnya membantu menciptakan masyarakat yang berintegritas dan peduli, di mana setiap individu dapat memberikan kontribusi positif. Untuk menjadikan penelitian ini lebih universal dan diterima luas, fokus diarahkan pada konsep etika, moral, dan spiritualitas, tanpa menekankan akhlak dalam ajaran Islam secara khusus. Meskipun berbagai tradisi budaya dan agama memiliki pandangan berbeda tentang etika, moral, dan spiritualitas, ketiganya pada dasarnya membimbing manusia menuju perilaku yang lebih baik dan berintegritas.

Dengan menyoroti prinsip-prinsip yang bersifat umum dan tidak terikat pada satu sistem kepercayaan tertentu, penelitian ini menjadi lebih inklusif dan relevan dalam berbagai konteks. Pendekatan ini memperkaya pembahasan dan memungkinkan penerapan nilai-nilai tersebut dalam berbagai praktik profesional, termasuk akuntansi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mencerminkan integritas dan tanggung jawab yang diterima oleh semua pihak, tanpa memandang latar belakang agama atau budaya.

Meskipun prinsip dasar akuntansi seperti yang terkandung dalam IFRS dan GAAP telah diterima secara luas karena memberikan konsistensi, komparabilitas, dan keandalan dalam penyusunan laporan keuangan, implementasi etika, moral, dan spiritualitas sering kali

diabaikan dalam praktiknya.[14] Prinsip-prinsip dasar tersebut memang membantu dalam pengambilan keputusan dan memungkinkan laporan keuangan dapat diterima secara global. Namun, karena proses akuntansi melibatkan estimasi dan asumsi, hal ini memberikan ruang bagi penyalahgunaan interpretasi yang bertentangan dengan prinsip etika dan moral.

Akibatnya, manipulasi data sering kali terjadi untuk mencapai tujuan ekonomi jangka pendek, mengabaikan integritas yang seharusnya dijaga. Dengan demikian, meskipun standar akuntansi mungkin telah dipatuhi secara teknis, pelaporan yang mengorbankan nilai-nilai etika dan spiritualitas tetap menjadi masalah.[15] Bab ini akan membahas berbagai kasus di mana kepatuhan formal terhadap prinsip dasar akuntansi terjadi, tetapi nilai-nilai moral dan spiritual diabaikan, menunjukkan pentingnya penerapan etika, moral, dan spiritualitas yang kokoh untuk menjaga kepercayaan dan akuntabilitas di dunia bisnis.

Dalam sejarah akuntansi, berbagai skandal yang timbul akibat mengabaikan etika, moral, dan spiritual telah terjadi di seluruh dunia. Skandal dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma moral yang sering kali dilakukan secara tersembunyi hingga akhirnya terungkap dan memicu reaksi negatif dari masyarakat.[16] Salah satu bentuk pelanggaran yang paling umum dalam dunia bisnis adalah *fraud*

---

[14]Kaevan Gazdar, *Reporting Nonfinancials* (Hoboken: John Wiley & Sons, 2007), 11.

[15]Sri Sulistyanto, *Manajemen Laba (Teori & Model Empiris)* (Jakarta: Grasindo, 2008), 1–12.

[16]I Ketut Surajaya, "Scandal in Japan Transgression, Performance and Ritual," *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 14, no. 2 (31 Agustus 2024): 375, doi:10.17510/paradigma.v14i2.1508.

atau kecurangan. *Fraud* dapat didefinisikan sebagai kesalahan penyajian laporan keuangan yang dilakukan secara sengaja, atau penghilangan informasi tertentu dengan tujuan memanipulasi atau menipu pengguna serta penerima laporan keuangan.[17]

Skandal-skandal besar akibat *fraud* tidak hanya berdampak pada perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga memberikan pengaruh signifikan terhadap sektor keuangan global. Beberapa contoh skandal akuntansi terbesar yang melibatkan perusahaan multinasional adalah Enron, Toshiba, Merrill Lynch, Lehman Brothers, WorldCom, Xerox Corporation, Carillion, dan HealthSouth. Pelanggaran-pelanggaran tersebut umumnya melibatkan manipulasi laporan keuangan dengan berbagai tujuan, seperti menutupi kerugian atau memberikan gambaran yang tidak akurat tentang kondisi keuangan perusahaan. Hal ini menciptakan ilusi kestabilan atau keuntungan yang lebih besar dari kenyataannya, sehingga menyesatkan pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Di Indonesia, praktik-praktik serupa juga terjadi, seperti yang terlihat dalam skandal akuntansi di perusahaan-perusahaan besar, termasuk PT Kimia Farma, PT Garuda, PT Jiwasraya, dan PT Envy. Tidak hanya terbatas pada perusahaan-perusahaan konvensional, pelanggaran tersebut juga terjadi dalam sektor perbankan syariah, menunjukkan bahwa masalah *fraud* dan pelanggaran akuntansi dapat terjadi di berbagai jenis industri. Kasus-kasus yang terjadi dalam berbagai sektor menunjukkan bahwa kelemahan prinsip dasar akuntansi

[17]Natalis Christian dan Piere Ricardo, "Kajian Impact of Fraud: Nasional dan Internasional," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 6, no. 2 (15 Mei 2022): 102, doi:10.31955/mea.v6i2.1978.

yang dapat menyebabkan *fraud*, tidak mengenal batas geografis atau jenis industri. Dari perusahaan-perusahaan besar hingga lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah, skandal-skandal ini menggambarkan masalah yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian global.

Setiap skandal mengungkapkan bagaimana manipulasi laporan keuangan dan pelanggaran etika akuntansi dapat mengancam stabilitas ekonomi dan merusak kepercayaan publik. Dampak dari pelanggaran ini tidak hanya terbatas pada kerugian finansial yang dialami oleh perusahaan, tetapi juga merembet pada ketidakstabilan pasar serta hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, memahami kelemahan-kelemahan prinsip dasar akuntansi menjadi sangat penting guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Tabel berikut ini menyajikan kelemahan prinsip dasar akuntansi yang ditemukan dalam berbagai kasus tersebut.

Tabel 3.1
Kelemahan Prinsip Dasar Akuntansi pada Berbagai Kasus

No.	Kasus	Prinsip Dasar Akuntansi yang Lemah
1	Enron	- Substansi mengungguli bentuk - Pengakuan pendapatan - Pengungkapan paripurna - Netralitas - Objektivitas - Kesinambungan usaha
2	Toshiba	- Kesinambungan usaha - Pengungkapan paripurna
3	Merrill Lynch	- Pengakuan pendapatan

		- Substansi mengungguli bentuk
4	Lehman Brothers	- Substansi mengungguli bentuk - Pengungkapan paripurna
5	WorldCom	- Pengakuan pendapatan - Pengungkapan paripurna
6	Fuji Xerox	- Pengakuan pendapatan - Pengukuran biaya
7	Carillion	- Pengakuan pendapatan - Pengungkapan paripurna
8	HealthSouth	- Pengakuan pendapatan - Pengungkapan paripurna
9	Kimia Farma	- Pengakuan pendapatan - Pengungkapan paripurna
10	Garuda	- Pengakuan pendapatan - Pengungkapan paripurna
11	Jiwasraya	- Prinsip konservatisme - Pengakuan pendapatan
12	Envy	- Pengakuan pendapatan - Konservatisme
13	Dubai Islamic Bank (DIB)	- Substansi mengungguli bentuk - Pengungkapan paripurna
14	Islamic Bank of South Africa (IBL)	- Substansi mengungguli bentuk - Pengungkapan paripurna
15	Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bogor	- Pengakuan pendapatan - Pengungkapan paripurna
16	Bank Mega Syariah dan BJB Syariah	- Pengakuan pendapatan - Substansi mengungguli bentuk
17	BTPN Syariah	- Pengungkapan paripurna - Pengakuan pendapatan

Selanjutnya, penjelasan lebih mendalam mengenai kelemahan prinsip dasar akuntansi dalam kasus-kasus tersebut akan dibahas secara rinci pada subbab berikutnya hingga akhir bab ini. Analisis ini akan mencakup identifikasi area yang rentan terhadap kesalahan penerapan

atau interpretasi, serta dampaknya terhadap keandalan dan relevansi laporan keuangan. Adapun dekonstruksi terhadap seluruh prinsip dasar akuntansi yang ada pada dokumen resmi prinsip dasar akuntansi akan dibahas di Bab V dalam penelitian ini. Bab tersebut akan menguraikan kritik konseptual dan alternatif pendekatan yang dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam penerapan prinsip, sekaligus mempertahankan integritas dan akuntabilitas pelaporan keuangan.

C. Skandal Enron

Enron Corporation, didirikan pada 1985 melalui penggabungan Houston Natural Gas dan InterNorth, awalnya dikenal sebagai pelopor inovatif di sektor energi, khususnya distribusi gas alam dan listrik. Namun, di balik kesuksesannya, Enron terlibat dalam praktik akuntansi curang, seperti metode *mark-to-market* untuk mencatat pendapatan proyeksi dan penggunaan Special Purpose Entities (SPE) untuk menyembunyikan utang, menciptakan ilusi keuntungan besar.[18] Masalah Enron membesar saat mereka masuk ke perdagangan energi, memanfaatkan deregulasi pasar untuk spekulasi harga energi.

Risiko tinggi dan penurunan harga energi menyebabkan kerugian besar yang disembunyikan melalui SPE. Pada 2001, skandal ini terungkap saat harga saham anjlok, memicu krisis besar.[19] Arthur

[18]Alifah Ghina Sukarya, Muhammad Sheva Mufsyi Salam, dan Naila Anindita Yudiantoro, "Enron Corporation: Studi Kasus tentang Peran Etika Bisnis dalam Pandangan Etika Terapan," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (31 Juli 2024): 117–18, doi:10.5281/zenodo.13360166.

[19]Elisa S Moncarz dkk., "The Rise and Collapse of Enron: Financial Innovation, Errors and Lessons," *Contaduría y Administración*, no. 218 (2006): 27–28.

Andersen, auditor eksternal Enron, turut bertanggung jawab dalam skandal ini. Firma tersebut gagal mendeteksi penipuan akuntansi dan terlibat dalam penghancuran dokumen audit saat skandal terungkap. Andersen dinyatakan bersalah atas *obstruction of justice*, yang menyebabkan kehancurannya.[20]

Kejatuhan Enron dan Arthur Andersen menjadi pelajaran penting tentang tata kelola perusahaan dan akuntabilitas keuangan. Dorongan Enron untuk keuntungan jangka pendek memicu tindakan tidak etis, sementara Arthur Andersen, yang seharusnya menjaga kepentingan publik, gagal menjaga independensi dan malah menutupi pelanggaran tersebut.[21] Skandal Enron mengungkap pelanggaran serius terhadap etika bisnis dan prinsip akuntansi. Dengan praktik curang seperti *mark-to-market* dan SPE, Enron mencatat pendapatan spekulatif dan menyembunyikan utang, melanggar transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan menyesatkan publik dengan ilusi profitabilitas, meski perusahaan sebenarnya merugi, mencerminkan pengabaian terhadap integritas profesional.

Selain itu, skandal tersebut mencerminkan pelanggaran moral serius. Manajemen Enron mengutamakan keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang, sementara Arthur Andersen, yang seharusnya independen, berkolusi dengan

[20]Donald Buresh, "The Fall of Arthur Andersen, LLP and Enron Corporation, and the Rise of the Sarbanes-Oxley Act of 2002," *International Journal of Social Science and Human Research* 6, no. 10 (1 Januari 2023): 6319–21, doi:10.47191/ijsshr/v6-i10-71.

[21]Muhammad Mustafa Rashid, "Case Analysis: Enron; Ethics, Social Responsibility, and Ethical Accounting as Inferior Goods?," *Journal of Economics Library* 7, no. 2 (12 Juli 2020): 100, doi:10.1453/jel.v7i2.2072.

menghancurkan dokumen audit. Tindakan ini mengabaikan tanggung jawab moral, merusak kepercayaan publik, serta mengorbankan integritas dan tanggung jawab sosial demi keuntungan pribadi.

Lebih jauh, skandal Enron juga mengungkap kelemahan sistemik dalam prinsip dasar akuntansi. Salah satu kelemahan terbesar tampak pada prinsip substansi mengungguli bentuk, di mana entitas tujuan khusus digunakan untuk menyembunyikan utang. Secara hukum, SPE dianggap terpisah, tetapi secara substansi ekonomi, utang tersebut tetap menjadi tanggung jawab Enron. Penilaian subjektif yang diperlukan dalam penerapan prinsip ini memungkinkan manipulasi yang menciptakan gambaran keuangan yang tidak akurat. Prinsip pengakuan pendapatan juga gagal diterapkan dengan baik, karena metode *mark-to-market* mengakui pendapatan berdasarkan proyeksi masa depan yang sangat spekulatif, bukan hasil aktual, sehingga menciptakan laporan keuangan yang tidak jujur.

Kelemahan lainnya terlihat pada prinsip pengungkapan paripurna, di mana laporan keuangan Enron tidak secara transparan mengungkapkan risiko fluktuasi harga energi maupun dampak SPE. Ketidaknetralan laporan keuangan juga menunjukkan kelemahan prinsip netralitas, karena laporan digunakan untuk menarik investor, bukan menyajikan informasi yang jujur. Bahkan, prinsip objektivitas, yang mengandalkan estimasi nilai kontrak dalam metode *mark-to-market*, disalahgunakan untuk memperbesar keuntungan yang tidak riil.

Laporan tersebut juga disusun berdasarkan prinsip kesinambungan usaha (*going concern*), meskipun perusahaan sudah mendekati kebangkrutan, menciptakan ilusi stabilitas yang menyesatkan

investor. Pada akhirnya, kasus Enron membuktikan bahwa kelemahan dalam prinsip prinsip substansi mengungguli bentuk, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip pengungkapan paripurna, netralitas, objektivitas, dan *going concern* menjadi celah yang dapat dieksploitasi untuk manipulasi. Skandal ini tidak hanya menunjukkan pelanggaran etika, tetapi juga menggambarkan bahwa kelemahan sistemik dalam prinsip dasar akuntansi itu sendiri memainkan peran besar dalam memfasilitasi kecurangan yang merugikan banyak pihak.

D. Skandal Toshiba

Toshiba, didirikan pada 1939 dari penggabungan Shibaura Engineering Works dan Tokyo Electric Company, awalnya menjadi pelopor peralatan listrik di Jepang, menciptakan lampu fluoresen dan radar pertama di negara itu. Pada 2000-an, Toshiba berkembang sebagai produsen *chip* terbesar keempat dan laptop terbesar ketiga dunia, kemudian berfokus pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Namun, sejak 2008, Toshiba terjerat skandal akuntansi selama tujuh tahun, memanipulasi keuntungan hingga ¥150 miliar melalui transaksi di empat divisi utama untuk memenuhi target agresif dan menjaga citra perusahaan.[22]

Masalah *fraud* di Toshiba bermula pada 2008, saat krisis keuangan global menekan profitabilitas perusahaan. Di bawah kepemimpinan tiga CEO berturut-turut, Atsutoshi Nishida, Norio Sasaki, dan Hisao Tanaka, karyawan menghadapi tekanan besar untuk mencapai

[22]Dennis Caplan, Saurav Dutta, dan David Marcinko, "Unmasking the Fraud at Toshiba," *Issues in Accounting Education* 34 (25 April 2019): 3–4, doi:10.2308/iace-52429.

target keuntungan yang tidak realistis. Meskipun tidak ada perintah langsung, lingkungan kerja yang menekankan kesetiaan kepada atasan mendorong praktik akuntansi tidak etis. Selama tujuh tahun, manipulasi keuntungan mencapai $1,2 miliar untuk menjaga citra perusahaan di mata pemegang saham dan publik.[23]

Kegagalan auditor Ernst & Young ShinNihon LLC dalam mendeteksi *fraud* Toshiba selama lebih dari tujuh tahun mencerminkan kurangnya skeptisisme profesional. Auditor terlalu mengandalkan data dari manajemen tanpa pemeriksaan mendalam, meski alat seperti Benford's Law tersedia untuk mendeteksi anomali. Tekanan memenuhi target tidak realistis dan budaya kesetiaan buta memperburuk situasi, merusak kredibilitas laporan keuangan serta reputasi auditor dalam menjaga integritas informasi.[24] Pada skandal akuntansi Toshiba menyebabkan delapan pejabat senior, termasuk Presiden Direktur Hisao Tanaka, mundur setelah terungkapnya kecurangan senilai $1,2 miliar untuk menutupi kegagalan target keuangan. Meski Ernst & Young (EY) sebagai auditor eksternal tidak terlibat langsung, mereka dikritik karena gagal mendeteksi kecurangan sistematis. Pelajaran dari skandal ini adalah pentingnya integritas, transparansi, target realistis, serta

[23]Aisyah Bunga Chaidir dkk., "Analisis Peran Kepemimpinan terhadap Kinerja Perusahaan dalam Perspektif Budaya Organisasi: Studi Kasus pada Skandal Perusahaan Toshiba," *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 1 (4 Juli 2024): 736–39, doi:10.54783/jser.v6i1.446.

[24]Radiah Othman, Rashid Ameer, dan Fawzi Laswad, "Uncovering Toshiba's Fraudulent Financial Statements: An Audit Perspective," *Journal of Forensic and Investigative Accounting* 12, no. 2 (t.t.): 213–28, http://web.nacva.com/JFIA/Issues/JFIA-2020-No2-3.pdf.

pengawasan internal dan eksternal yang efektif untuk mencegah manipulasi keuangan yang merusak reputasi dan kepercayaan.[25]

Skandal akuntansi Toshiba mencerminkan pengabaian terhadap prinsip etika bisnis. Manipulasi laporan keuangan selama tujuh tahun untuk memenuhi target yang tidak realistis melanggar transparansi dan kejujuran. Eksekutif perusahaan, yang menekan karyawan untuk memalsukan keuntungan, menunjukkan kurangnya tanggung jawab etis. Tindakan ini mengkhianati kepercayaan pemegang saham dan publik, dan menunjukkan bahwa etika harus menjadi dasar keputusan bisnis untuk menjaga kredibilitas. Selain itu, skandal ini mencerminkan pengabaian moral oleh manajemen Toshiba. Manipulasi keuntungan untuk memenuhi target finansial mengabaikan tanggung jawab kepada pemegang saham dan masyarakat.

Meskipun eksekutif tidak memerintahkan langsung kecurangan, mereka menciptakan tekanan bagi karyawan untuk mengutamakan angka daripada keadilan dan kebenaran. Pengabaian ini merusak nilai-nilai moral seperti kejujuran dan integritas. Skandal ini juga menunjukkan hilangnya dimensi spiritual dalam pengelolaan perusahaan. Spiritualitas, yang mencakup nilai-nilai yang lebih tinggi, diabaikan dalam lingkungan kerja yang terfokus pada target finansial. Alih-alih mendorong integritas, manajemen menciptakan budaya takut dan kepatuhan buta, mengabaikan nilai-nilai spiritual yang seharusnya

[25]Wyler Pakpahan dan Jasmansyah, "Prinsip Kejujuran dalam Perusahaan (Studi Kasus Skandal Penyimpangan Akuntansi PT Toshiba)," *Seniman Transactions on Management and Business* 1, no. 2 (2020): 3–9, https://seniman.nusaputra.ac.id/index.php/seniman/article/view/16/4.

mendorong tujuan yang lebih besar. Akibatnya, perusahaan kehilangan arah moral, yang merusak reputasi dan hubungan dengan masyarakat.

Lebih jauh, skandal akuntansi di Toshiba, yang berlangsung lebih dari tujuh tahun, menggambarkan bagaimana kelemahan dalam prinsip dasar akuntansi dapat menjadi celah yang memungkinkan terjadinya *fraud* (penipuan) yang merusak reputasi perusahaan dan integritas laporan keuangan. Salah satu kelemahan terbesar adalah penerapan prinsip kesinambungan usaha yang tidak realistis, di mana perusahaan terus menampilkan laporan keuangan yang optimistis meskipun sudah jelas tertekan oleh krisis keuangan global. Prinsip ini memerlukan penilaian yang jujur mengenai kemampuan perusahaan untuk bertahan, namun dalam kasus Toshiba, perusahaan terus menunjukkan keuntungan yang dibesar-besarkan untuk menjaga citra di mata investor, meskipun secara substansi ekonomi mereka sudah kesulitan. Manipulasi keuntungan untuk memenuhi target yang tidak realistis menyesatkan para pemangku kepentingan dan menciptakan gambaran yang jauh dari kenyataan. Selain itu, kelemahan dalam prinsip pengungkapan paripurna juga terlihat jelas dalam skandal ini. Toshiba gagal mengungkapkan dengan transparan bahwa mereka terlibat dalam manipulasi keuntungan selama bertahun-tahun. Akibatnya, para investor dan publik tidak dapat mengakses informasi yang akurat dan relevan mengenai kondisi keuangan perusahaan. Tidak ada pengungkapan yang memadai terkait risiko-risiko yang dihadapi oleh Toshiba, termasuk dampak dari pencapaian target yang tidak realistis.

Kurangnya pengungkapan ini menciptakan ilusi kestabilan dan profitabilitas, yang membuat investor dan auditor tidak mempertanyakan

validitas laporan keuangan yang ada. Pengungkapan yang tidak memadai adalah salah satu faktor penting yang memungkinkan manipulasi ini terus berlanjut tanpa terdeteksi. Pada akhirnya, kasus Toshiba membuktikan bahwa kelemahan dalam prinsip kesinambungan usaha dan prinsip pengungkapan paripurna menjadi celah yang dapat dieksploitasi untuk manipulasi. Skandal ini tidak hanya menunjukkan pelanggaran etika, tetapi juga menggambarkan bahwa kelemahan sistemik dalam prinsip dasar akuntansi itu sendiri memainkan peran besar dalam memfasilitasi kecurangan yang merugikan banyak pihak. Manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen Toshiba serta kegagalan auditor untuk mendeteksi penyimpangan ini mengungkapkan pentingnya reformasi dalam prinsip dasar akuntansi guna mencegah terulangnya kasus serupa.

E. Skandal Merrill Lynch

Merrill Lynch didirikan pada 1914 oleh Charles E. Merrill, Merrill Lynch tumbuh menjadi salah satu lembaga keuangan terbesar di dunia, menawarkan layanan investasi, perbankan, dan manajemen kekayaan. Simbol bantengnya melambangkan optimisme Wall Street, dengan divisi manajemen kekayaan mengelola lebih dari $1,4 triliun aset. Namun, investasi besar dalam sekuritas berbasis hipotek subprime menyebabkan kerugian besar selama krisis keuangan 2007-2008, memaksa Merrill Lynch diakuisisi oleh Bank of America pada September 2008 senilai $50 miliar untuk menghindari kebangkrutan.[26]

[26]Yu-Ho Chi dan David A. Ziebart, "The Need for Due Diligence and Financial Statement Analysis – The Bank of America-Merrill Lynch Case," *Journal of Accounting and Finance* 23, no. 1 (15 Februari 2023): 2–4,

Pada awal 2007, Merrill Lynch menghadapi masalah besar setelah mereka terlibat dalam perdagangan obligasi yang didukung oleh hipotek *subprime*.

Masalah mulai muncul ketika pasar hipotek mulai runtuh, mengakibatkan penurunan drastis pada nilai aset berbasis hipotek tersebut.[27] Pada akhir 2007, Merrill Lynch terpaksa menulis kerugian sebesar $8,4 miliar untuk mencerminkan penurunan nilai sekuritas, akibat penurunan harga properti dan meningkatnya jumlah penyitaan. Situasi semakin memburuk, dan E. Stanley O'Neal, CEO saat itu, dipaksa untuk mengundurkan diri setelah kerugian besar tersebut, digantikan oleh John Thain. Meskipun Thain mencoba memperbaiki situasi dengan menjual $31 miliar sekuritas dengan harga diskon besar, hal ini tidak cukup untuk menutupi kerugian. Pada September 2008, dengan pasar yang semakin tidak stabil dan Lehman Brothers di ambang kebangkrutan, Merrill Lynch memilih untuk dijual kepada Bank of America demi menyelamatkan diri dari kehancuran total.[28]

Dalam konteks masalah yang dihadapi Merrill Lynch dan akuisisi oleh Bank of America, beberapa pihak dianggap bertanggung jawab. Bank of America, di bawah kepemimpinan Ken Lewis, berpotensi melebih-lebihkan nilai Merrill Lynch dan tidak sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dalam akuisisi tersebut. Lewis juga

---

doi:10.33423/jaf.v23i1.5829.

[27]Priye Werigbelegha Andabai dan Stephen Ebifemo-ere, "A Theoretical Study on The Failure of Lehman Brothers and Merril Lynch: A Lesson for Banking Institutions in Nigeria," *BW Academic Journal*, 30 November 2023, 42–45.

[28]Chi dan Ziebart, "The Need for Due Diligence and Financial Statement Analysis – The Bank of America-Merrill Lynch Case," 3–4.

menghadapi kritik karena tidak mengikuti protokol yang tepat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, auditor seharusnya melakukan pemeriksaan mendalam terhadap catatan keuangan Merrill Lynch untuk mendeteksi liabilitas tersembunyi. Kegagalan tersebut mencerminkan kurangnya manajemen risiko yang memadai dalam organisasi.[29]

Kesimpulannya, kegagalan Merrill Lynch memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya manajemen risiko yang baik, diversifikasi aset, dan kesiapan menghadapi perubahan pasar. Keterlibatan mereka dalam perdagangan sekuritas *subprime* tanpa pengelolaan risiko yang tepat menyebabkan kerugian besar, yang memaksa perusahaan menulis kerugian signifikan. Meskipun ada upaya penyelamatan, seperti penjualan aset dan pergantian CEO, langkah-langkah tersebut tidak cukup untuk menghentikan krisis. Pelajaran lain yang diambil adalah perlunya kepemimpinan yang kuat dan transparansi dalam mengelola situasi kritis, serta pemeriksaan mendalam sebelum akuisisi. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran dan reputasi perusahaan tidak menjamin stabilitas jika manajemen risiko diabaikan.

Pengabaian etika terlihat jelas dalam kasus Merrill Lynch, terutama dalam pengelolaan sekuritas subprime yang berisiko tinggi. Meski prinsip etika keuangan menuntut tanggung jawab untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan, Merrill Lynch mengabaikan hal tersebut demi keuntungan jangka pendek. Keputusan ini mengabaikan dampak jangka panjang dan risiko besar, yang berujung pada kerugian dan kebangkrutan. Moralitas, seperti analisis risiko yang bijak, terabaikan karena fokus pada pertumbuhan dan keuntungan.

[29]Chi dan Ziebart, "The Need for Due Diligence and Financial Statement Analysis, 2.

Selain itu, spiritualitas yang seharusnya memberikan kedalaman dalam keputusan etis juga hilang dalam pengejaran laba. Kegagalan manajemen dalam menghormati prinsip etika menyebabkan keruntuhan Merrill Lynch dan menegaskan pentingnya nilai-nilai etis, moral, dan spiritual dalam pengambilan keputusan bisnis yang berkelanjutan.

Lebih jauh, Skandal Merrill Lynch menunjukkan bagaimana kelemahan prinsip dasar akuntansi dapat menyebabkan manipulasi keuangan yang mengarah pada *fraud* yang merugikan banyak pihak. Salah satu prinsip yang lemah dalam kasus ini adalah prinsip pengakuan pendapatan yang tidak diterapkan secara tepat. Merrill Lynch terlibat dalam perdagangan sekuritas berbasis hipotek *subprime*, yang sangat spekulatif dan bergantung pada proyeksi masa depan yang tidak pasti. Metode akuntansi yang digunakan untuk mengakui pendapatan dari sekuritas ini mengabaikan realitas pasar yang fluktuatif, menciptakan gambaran yang tidak realistis mengenai kinerja perusahaan. Proyeksi yang berbasis pada nilai yang bisa berubah dengan cepat mengarah pada pengakuan pendapatan yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang pada akhirnya memperburuk krisis keuangan yang terjadi pada 2007-2008.

Prinsip substansi mengungguli bentuk juga menunjukkan kelemahan dalam praktik akuntansi Merrill Lynch. Perusahaan ini tidak cukup memperhatikan dampak ekonomi jangka panjang dari sekuritas yang mereka perdagangkan. Meskipun sekuritas berbasis hipotek *subprime* diperdagangkan secara legal, substansi dari investasi tersebut sangat berisiko, dan krisis pasar perumahan mulai mempengaruhi nilai aset tersebut. Namun, laporan keuangan yang disusun tetap mencatatkan nilai yang lebih tinggi dari yang seharusnya, mengaburkan potensi

kerugian yang akan datang. Dengan tidak mengungkapkan risiko secara transparan dan mengandalkan estimasi yang tidak objektif, perusahaan ini menciptakan citra stabilitas yang salah, yang akhirnya menyebabkan kerugian besar.

Pada akhirnya, kasus Merrill Lynch membuktikan bahwa kelemahan dalam prinsip dasar akuntansi seperti pengakuan pendapatan yang tidak realistis dan substansi mengungguli bentuk menjadi celah yang dieksploitasi untuk manipulasi laporan keuangan. Skandal ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran etika, tetapi juga menunjukkan bahwa kelemahan sistemik dalam prinsip dasar akuntansi memainkan peran besar dalam memfasilitasi kecurangan yang merugikan banyak pihak. Kegagalan dalam mengelola risiko dan kurangnya transparansi dalam pengakuan pendapatan dan penilaian aset menyoroti betapa pentingnya perbaikan dalam prinsip akuntansi untuk mencegah terulangnya skandal serupa di masa depan.

F. Skandal Lehman Brothers

Lehman Brothers didirikan pada 1850 oleh Henry, Emanuel, dan Mayer Lehman di New York, awalnya bergerak di perdagangan kapas sebelum berkembang menjadi raksasa jasa keuangan global. Perusahaan ini bertahan melalui berbagai krisis, termasuk Depresi Besar dan Perang Dunia, hingga menjadi salah satu bank investasi terbesar. Setelah dipisahkan dari American Express pada 1994, Lehman tumbuh pesat, tetapi keputusannya berinvestasi di pasar *subprime mortgage* menjadi bumerang. Ketika harga properti jatuh pada 2007, Lehman menderita kerugian besar dan menyatakan kebangkrutan pada 15 September 2008,

memicu krisis keuangan global.[30] Kejatuhan Lehman Brothers dipicu oleh penggunaan transaksi Repo 105, metode akuntansi untuk menghapus sementara aset dari neraca.

Dengan mengklasifikasikan transaksi sebagai penjualan, bukan pembiayaan, Lehman menyembunyikan hingga $50 miliar aset pada kuartal kedua 2008, membuat neraca terlihat lebih baik dan rasio leverage lebih rendah. Ilusi kekuatan finansial ini runtuh ketika skema terungkap, menghancurkan kepercayaan pasar dan menyebabkan kebangkrutan pada September 2008.[31] Pada 15 September 2008, Lehman Brothers secara resmi mengajukan kebangkrutan sukarela akibat tekanan keuangan dari aset bermasalah, terutama terkait krisis pasar perumahan dan hipotek subprime. Langkah ini bertujuan melikuidasi aset yang membebani neraca perusahaan. Meskipun sukarela, keputusan ini memicu dampak besar pada pasar keuangan global dan lembaga keuangan lainnya.[32]

Kebangkrutan Lehman Brothers pada 15 September 2008 menjadi pelajaran penting di dunia keuangan. Berdiri sejak 1850, perusahaan ini tumbuh menjadi raksasa jasa keuangan, namun kesalahan strategis seperti investasi di subprime mortgage dan penggunaan Repo 105 untuk memperindah laporan keuangan berujung pada kehancuran. Kejadian ini memicu krisis global, menegaskan pentingnya transparansi

[30]Anjala Kalsie, "Downfall of Lehman Brothers: Impact on the US and India," *Journal of Business Thought*, 2014, 4.

[31]Rosalind Z Wiggins, Rosalind L Bennett, dan Andrew Metrick, "The Lehman Brothers Bankruptcy D: The Role of Ernst & Young," t.t., 109–13.

[32]Andrey Zahariev dkk., "The Bank Insolvency: From Lehman Brothers to COVID-19 (International Remarks and National Peculiarities)," *SSRN Electronic Journal*, 1 Januari 2020, 3, doi:10.2139/ssrn.3688961.

dan akuntabilitas dalam bisnis serta dampak sistemik keputusan perusahaan besar. Lehman Brothers menghadapi krisis etika serius melalui penggunaan Repo 105, yang menyembunyikan aset untuk menciptakan ilusi kesehatan keuangan, melanggar prinsip transparansi. Investasi di pasar *subprime mortgage* mencerminkan kegagalan moral, mengutamakan keuntungan jangka pendek dan mengabaikan dampak sosial, seperti kehilangan rumah bagi banyak keluarga.

Kasus ini menegaskan pentingnya moralitas dalam bisnis untuk menjaga tanggung jawab sosial. Pengejaran keuntungan maksimal juga membuat perusahaan melupakan nilai-nilai seperti tanggung jawab sosial dan keberlanjutan, yang seharusnya menjadi inti visi mereka. Tanpa mengaitkan tujuan bisnis dengan kontribusi positif, Lehman Brothers kehilangan makna yang lebih dalam dalam operasional mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada kejatuhan perusahaan. Keterkaitan antara etika, moral, dan spiritualitas sangat penting untuk keberlanjutan dan kesuksesan perusahaan.

Lebih jauh lagi, kasus kebangkrutan Lehman Brothers pada tahun 2008 mengungkapkan kelemahan prinsip dasar akuntansi yang dimanfaatkan untuk melakukan manipulasi yang akhirnya menyebabkan *fraud*. Salah satu kelemahan terbesar yang terlihat adalah penerapan prinsip substansi mengungguli bentuk, yang terbukti dimanfaatkan melalui penggunaan transaksi Repo 105. Meskipun secara teknis transaksi ini dapat dikategorikan sebagai penjualan, dalam kenyataannya itu lebih merupakan pembiayaan jangka pendek yang tidak mencerminkan posisi keuangan riil perusahaan. Lehman menggunakan Repo 105 untuk menghapus sementara aset dari neraca mereka,

menciptakan ilusi kondisi keuangan yang lebih sehat, sementara rasio *leverage* mereka sebenarnya lebih tinggi daripada yang tercatat. Penerapan prinsip ini secara subjektif membuka celah bagi manipulasi laporan keuangan yang sangat merugikan integritas akuntansi. Selain itu, prinsip pengungkapan paripurna dan netralitas juga mengalami kegagalan yang sangat fatal dalam kasus ini.

Lehman tidak mengungkapkan sepenuhnya risiko terkait dengan reposisi aset dan kewajiban yang tersembunyi dalam transaksi Repo 105. Hal ini mengarah pada ketidaktransparanan yang menyembunyikan kondisi keuangan yang sebenarnya dari para pemangku kepentingan, terutama investor dan regulator. Laporan keuangan yang disajikan perusahaan menunjukkan gambaran yang sangat optimis, padahal pada kenyataannya, perusahaan berada dalam kondisi yang sangat tertekan. Keputusan manajerial untuk menggunakan transaksi ini tidak hanya melanggar prinsip pengungkapan, tetapi juga prinsip netralitas, karena laporan tersebut lebih dimaksudkan untuk mengelabui pasar dan menjaga citra perusahaan tetap stabil di tengah krisis yang semakin mendalam. Pada akhirnya, kasus kebangkrutan Lehman Brothers ini membuktikan bahwa kelemahan dalam prinsip substansi mengungguli bentuk, pengungkapan paripurna, dan netralitas tersebut menjadi celah yang dapat dieksploitasi untuk manipulasi. Skandal ini tidak hanya menunjukkan pelanggaran etika oleh pelaku, tetapi juga menggambarkan bahwa kelemahan sistemik dalam prinsip dasar akuntansi itu sendiri memainkan peran besar dalam memfasilitasi kecurangan yang merugikan banyak pihak.

G. Skandal Worldcom

WorldCom, perusahaan komunikasi terbesar kedua di Amerika, terjerat skandal keuangan pada awal 2000-an akibat memalsukan pendapatan sebesar $3,8 miliar. Skandal ini terungkap setelah pengunduran diri auditor senior David Myers dan pemecatan CFO Scott Sullivan. Kebangkrutan WorldCom, dengan aset $103,9 miliar, menjadi yang terbesar di Amerika saat itu, menyoroti pentingnya pengendalian internal dan sistem whistleblowing yang efektif untuk mencegah kecurangan.[33] Skandal akuntansi WorldCom terungkap pada 2002, mengungkap manipulasi laporan keuangan sebesar $11 miliar. Perusahaan yang didirikan pada 1983 ini tumbuh pesat melalui akuisisi, namun di balik kesuksesan itu, CEO Bernard Ebbers dan manajemennya memalsukan data keuangan dengan mencatat pengeluaran sebagai investasi untuk menutupi kerugian dan mempertahankan nilai saham. Akibatnya, WorldCom mengajukan kebangkrutan pada Juli 2002, menyebabkan lebih dari 20.000 karyawan kehilangan pekerjaan. Kasus ini menjadi contoh buruknya tata kelola perusahaan, di mana kepentingan pribadi mengalahkan tanggung jawab kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan.[34]

Kasus pelanggaran etika di WorldCom melibatkan CEO Bernard Ebbers dan manajemen yang memanipulasi akuntansi dengan mencatat pengeluaran rutin sebagai belanja modal untuk meningkatkan

[33]Catherine Melania Malewa, Muhammad Achyar Ibrahim, dan Abdul Rahman, "Pengaruh Internal Control dan Whistleblowing System terhadap Tingkat Kecurangan," *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, 31 Januari 2023, 62, doi:10.26487/akrual.v16i1.24268.

[34]Kaan Ramazan Çakalı, "Agency Problem in Corporate Governance: Worldcom Case," *İşletme* 3, no. 1 (18 Maret 2022): 23–25.

pendapatan bersih dan aset. Laporan keuangan yang menyesatkan memperdaya investor dan pemangku kepentingan. Auditor eksternal, Arthur Andersen, juga dianggap bersalah karena memberikan opini audit tanpa catatan meskipun ada kecurangan. Skandal ini menyebabkan kebangkrutan WorldCom, menurunkan kepercayaan publik terhadap auditor, dan merusak reputasi Arthur Andersen secara serius.[35] Kasus WorldCom memberikan pelajaran penting mengenai perlunya pengendalian internal yang kuat dan penerapan sistem pelaporan yang efektif untuk mencegah kecurangan. Manipulasi laporan keuangan oleh manajemen WorldCom menyebabkan kebangkrutan terbesar dalam sejarah AS pada saat itu. Pentingnya integritas akuntansi dan audit dalam melindungi kepentingan pemangku kepentingan juga ditekankan.

Pengabaian etika dalam kasus WorldCom terlihat pada manipulasi akuntansi yang dilakukan oleh manajemen, termasuk CEO Bernard Ebbers. Mereka mengubah pengeluaran operasional menjadi belanja modal untuk memperindah laporan keuangan, melanggar standar pelaporan dan mengurangi transparansi. Keputusan ini lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek dibandingkan tanggung jawab etis terhadap investor dan pemangku kepentingan. Bahkan auditor eksternal, Arthur Andersen, gagal mendeteksi kecurangan, semakin memperburuk keadaan.

Pengabaian moral muncul saat manajemen memalsukan pendapatan untuk menjaga harga saham, mengutamakan kepentingan

[35]Dwi Faradiba Siregar, Annisa Rizki Pratiwi, dan Iskandar Muda, "Was Accountant/Auditor Behavior Leading Op to Enron, Worldcom, and 2007-2008 Market Meltdowns Episodes Ethical?," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 2 (3 Juni 2024): 1260–61, doi:10.30651/jms.v9i2.22799.

pribadi di atas kesejahteraan karyawan dan investor. Akibatnya, lebih dari 20.000 karyawan kehilangan pekerjaan setelah kebangkrutan. Kepercayaan publik terhadap integritas bisnis runtuh, menunjukkan dampak serius dari keputusan yang mementingkan keuntungan pribadi. Secara spiritual, tindakan penipuan ini mengabaikan nilai-nilai tanggung jawab sosial dan keadilan. Sebuah organisasi seharusnya termotivasi oleh integritas dan empati, namun di sini, kepentingan pribadi mengalahkan nilai-nilai moral dan tujuan yang lebih tinggi, menghilangkan makna sejati dari tindakan mereka.

Lebih jauh, Skandal keuangan yang melibatkan WorldCom pada awal 2000-an mencerminkan bagaimana kelemahan prinsip dasar akuntansi dapat dieksploitasi untuk melakukan *fraud* yang merugikan banyak pihak. Salah satu prinsip yang paling jelas terbukti lemah dalam kasus ini adalah prinsip pengakuan pendapatan. WorldCom melaporkan pendapatan yang jauh lebih besar daripada kenyataan dengan mencatat pengeluaran operasional sebagai investasi. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan ilusi keuntungan yang tidak nyata dan menyembunyikan kerugian yang sebenarnya. Dalam hal ini, prinsip pengakuan pendapatan yang harusnya berdasarkan pada transaksi nyata dan dapat diverifikasi malah digunakan untuk menciptakan laporan yang menyesatkan. Selain itu, prinsip pengungkapan paripurna juga terbukti lemah. WorldCom tidak mengungkapkan secara transparan selisih besar antara pendapatan yang dilaporkan dan kenyataannya, yang mencapai $11 miliar.

Dalam konteks ini, kegagalan untuk mengungkapkan informasi yang material dan relevan menggambarkan ketidakpatuhan terhadap prinsip dasar akuntansi yang seharusnya menjamin transparansi dan

akurasi dalam laporan keuangan. Kegagalan ini memperburuk manipulasi yang dilakukan, karena pihak luar seperti investor dan regulator tidak bisa mengidentifikasi risiko yang tersembunyi. Pada akhirnya, kasus WorldCom membuktikan bahwa kelemahan dalam prinsip dasar akuntansi, terutama dalam penerapan prinsip pengakuan pendapatan dan pengungkapan paripurna, memberikan celah yang dapat dimanfaatkan untuk manipulasi. Skandal ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran etika manajerial, tetapi juga menggambarkan betapa prinsip dasar akuntansi yang lemah memainkan peran besar dalam memfasilitasi kecurangan yang merugikan banyak pihak, termasuk pemegang saham, karyawan, dan publik secara keseluruhan

H. Skandal Xerox Corporation

Xerox Corporation, didirikan pada 1906 sebagai The Haloid Company di Rochester, New York, awalnya memproduksi kertas fotografi. Terobosan besar terjadi pada 1938 ketika Chester Carlson menciptakan teknologi xerografi untuk pencetakan kering. Teknologi ini dikomersialisasikan pada 1949 dengan peluncuran Model A Copier. Perusahaan berganti nama menjadi Haloid Xerox pada 1958 dan Xerox Corporation pada 1961. Peluncuran Xerox 914 pada 1959 sebagai fotokopi kantor pertama dan printer laser Xerox 9700 pada 1977 menjadikannya pemimpin inovasi di dunia pencetakan. Xerox terus berinovasi, termasuk memperkenalkan DocuTech untuk pemrosesan dokumen digital.[36]

[36]Amy Butala dan Zafar U. Khan, "Accounting Fraud at Xerox Corporation: Ethical Considerations," *Journal of Leadership, Accountability and Ethics* 16, no. 5 (30 Desember 2019): 81–82, doi:10.33423/jlae.v16i5.2657.

Kasus penipuan Fuji Xerox melibatkan manipulasi akuntansi di Fuji Xerox New Zealand, dengan pencatatan pendapatan yang terlalu awal dan penundaan laporan biaya depresiasi untuk memperindah kinerja keuangan. Investigasi Deloitte mengungkap peran Neil Whittaker, Managing Director, yang mengendalikan pelaporan secara terpusat, menghindari deteksi dewan direksi. Kasus ini menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik, pengawasan internal yang efektif, dan budaya transparansi. Sistem insentif harus dirancang bijak untuk mencegah kecurangan, sementara mekanisme *whistleblowing* yang kuat dapat menjadi alat penting untuk mengungkap penipuan.[37]

Kasus Fuji Xerox mencerminkan pengabaian etika, moral, dan spiritualitas dalam tata kelola perusahaan. Praktik akuntansi curang di Fuji Xerox New Zealand, seperti pencatatan pendapatan yang terlalu dini dan penundaan biaya depresiasi, jelas melanggar prinsip etika dengan memberikan informasi keuangan yang menyesatkan demi keuntungan jangka pendek. Dari sisi moral, tindakan ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab sosial, di mana integritas dikorbankan demi kepentingan pribadi dan organisasi. Neil Whittaker, sebagai Managing Director, menghindari pengawasan untuk mempertahankan kekuasaan, melanggar prinsip kejujuran dan transparansi. Secara spiritual, pengabaian nilai-nilai seperti tanggung jawab sosial dan kebenaran tercermin dalam kegagalan perusahaan untuk terhubung dengan tujuan yang lebih tinggi. Fuji Xerox terjebak dalam dorongan materialistik, mengabaikan dampak

[37]Petter Gottschalk, "Evaluation of Fraud Examinations: The Case of Inappropriate Accounting Practices at Fuji Xerox," *Deviant Behavior* 40, no. 11 (2 November 2019): 8–12, doi:10.1080/01639625.2018.1559640.

lebih luas dari tindakannya, dan kehilangan makna sejati dari kesuksesan yang berkelanjutan.

Lebih jauh, kasus penipuan di Fuji Xerox New Zealand mengungkapkan kelemahan mendalam dalam prinsip dasar akuntansi yang memberi celah bagi manipulasi laporan keuangan. Salah satu kelemahan yang paling jelas adalah penerapan prinsip pengakuan pendapatan yang tidak tepat. Di sini, pendapatan dicatat terlalu awal, yaitu sebelum jasa atau produk benar-benar diberikan atau diserahkan kepada pelanggan. Hal ini memungkinkan Fuji Xerox untuk melaporkan pendapatan yang tidak sesuai dengan realitas bisnis, menciptakan ilusi kinerja yang lebih baik dari yang sebenarnya. Penerapan prinsip ini yang lemah membuka peluang bagi manipulasi waktu pengakuan pendapatan, yang merupakan praktek yang bisa dieksploitasi untuk mencapai tujuan jangka pendek, seperti memenuhi target keuntungan yang tidak realistis. Selain itu, prinsip pengukuran biaya juga tampak bermasalah, khususnya dalam hal depresiasi aset yang dilaporkan terlalu terlambat. Penundaan dalam pengakuan biaya ini berpotensi menciptakan gambaran keuangan yang menyesatkan, di mana laba terlihat lebih besar dari yang sebenarnya, karena beban depresiasi yang seharusnya dikurangi dari pendapatan tidak tercatat pada waktu yang tepat.

Penerapan prinsip pengukuran yang tidak akurat ini memberikan jalan bagi manipulasi laporan yang tidak mencerminkan nilai riil perusahaan, yang akhirnya memperburuk kualitas informasi yang diterima oleh investor dan pemangku kepentingan. Pada akhirnya, kasus Fuji Xerox ini menunjukkan bagaimana kelemahan dalam prinsip dasar akuntansi, seperti pengakuan pendapatan yang tidak tepat dan

pengukuran biaya yang terlambat, menciptakan celah besar yang dapat dieksploitasi untuk manipulasi. Skandal ini bukan hanya memperlihatkan pelanggaran etika oleh pelaku, tetapi juga menggambarkan bahwa kelemahan sistemik dalam prinsip dasar akuntansi itu sendiri memungkinkan manipulasi yang merugikan banyak pihak. Tanpa perbaikan dalam penerapan prinsip dasar akuntansi, *fraud* semacam ini akan terus terjadi, merusak kredibilitas laporan keuangan dan mengorbankan kepentingan pemangku kepentingan.

I. Skandal Carillion

Carillion PLC, perusahaan konstruksi dan manajemen fasilitas yang berbasis di Inggris, didirikan pada 1999 setelah pemisahan dari Tarmac. Sebagai salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Inggris, Carillion mempekerjakan 43.000 orang pada 2016. Namun, akumulasi kewajiban sebesar £7 miliar menyebabkan likuidasi wajib pada 15 Januari 2018 setelah gagal mendapatkan dana talangan, dengan dampak besar bagi para pemangku kepentingan.[38] Carillion dinyatakan bangkrut pada 15 Januari 2018 dan mulai dilikuidasi. Kejatuhannya disebabkan oleh kegagalan manajemen risiko dan praktik akuntansi agresif. Beroperasi di industri dengan margin rendah, Carillion mengadopsi strategi ekspansi agresif melalui akuisisi, menciptakan beban utang besar. Praktik akuntansi optimisnya, seperti mengakui pendapatan

[38]Fadi Alkaraan dkk., "Big Four 'Rhetorical' Strategies: Carillion's Collapse," *Journal of Accounting and Management Information Systems* 23 (1 Juli 2024): 301, doi:10.24818/jamis.2024.02001.

sebelum terealisasi, memperburuk kerugian saat proyek mengalami keterlambatan atau pembengkakan biaya.[39]

Dalam runtuhnya Carillion, beberapa pihak dinilai bersalah. Eksekutif, seperti CEO Richard Howson dan Direktur Keuangan Richard Adam, bertanggung jawab atas kebijakan akuntansi agresif yang menyesatkan, termasuk melebih-lebihkan pendapatan dan meremehkan utang. Adam bahkan menjual sahamnya sebelum nilai saham anjlok, menunjukkan kesadarannya akan masalah tersebut. KPMG, sebagai auditor, gagal mendeteksi dan memperingatkan praktik akuntansi bermasalah meskipun telah mengaudit Carillion selama hampir dua dekade. Selain itu, kelemahan dalam regulasi Inggris, termasuk dominasi empat besar firma akuntansi, turut dianggap memperburuk situasi akibat kurangnya pengawasan memadai.[40] Pelajaran dari kasus Carillion adalah pentingnya manajemen risiko yang hati-hati dan transparansi akuntansi dalam bisnis. Strategi ekspansi yang agresif tanpa memperhitungkan beban utang dapat menghancurkan perusahaan besar. Selain itu, pengawasan ketat dari auditor dan regulator sangat dibutuhkan untuk mencegah praktik akuntansi yang menyesatkan.

Pengabaian etika dalam kasus Carillion terlihat jelas melalui keputusan eksekutif yang mengabaikan transparansi dan kejujuran. Praktik akuntansi agresif digunakan untuk melebih-lebihkan pendapatan dan menyembunyikan kewajiban, menyesatkan pemangku kepentingan

---

[39]Robert Chapman, "Ineffective Risk Management and the Collapse of Carillion," *PM World Journal* VII, no. XII (30 Desember 2018): 1–3.

[40]Paul M. Clikeman dan Jen Zimmerman, "Journal of Forensic and Investigative Accounting," *Journal of Forensic and Investigative Accounting* 12, no. 3 (2020): 519–20, https://s3.amazonaws.com/web.nacva.com/JFIA/Issues/JFIA-2020-No3-11.pdf.

demi keuntungan jangka pendek. Akibatnya, perusahaan runtuh, menyebabkan kerugian besar bagi karyawan dan pemasok yang bergantung pada Carillion. Secara moral, eksekutif Carillion mendahulukan kepentingan pribadi, seperti yang terlihat pada tindakan Richard Adam yang menjual saham sebelum nilai perusahaan anjlok, mengabaikan dampak negatif pada investor lain. Ini menunjukkan pengabaian prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam pengambilan keputusan perusahaan. Pengabaian spiritualitas tercermin dalam kurangnya kesadaran akan tanggung jawab terhadap masyarakat dan nilai-nilai seperti integritas. Dengan fokus pada keuntungan finansial, Carillion mengabaikan kesejahteraan pekerja dan pemangku kepentingan, menciptakan keruntuhan yang mencerminkan hilangnya visi yang lebih luhur dan keseimbangan dalam bisnis.

Lebih jauh, kasus kehancuran Carillion PLC mengungkapkan betapa lemahnya prinsip dasar akuntansi yang membuka celah bagi manipulasi dan akhirnya menyebabkan *fraud*. Salah satu kelemahan yang sangat mencolok adalah prinsip pengakuan pendapatan yang memberi ruang bagi pengakuan pendapatan sebelum keuntungan benar-benar terealisasi. Carillion mengakui pendapatan dari proyek-proyek yang belum selesai, yang meskipun secara akuntansi dibolehkan dengan metode tertentu, namun menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan.

Prinsip tersebut, yang memungkinkan pendapatan diakui berdasarkan estimasi, tidak mencerminkan kondisi keuangan riil dan memperburuk gambaran kinerja perusahaan. Ini adalah contoh dari bagaimana prinsip dasar akuntansi yang lemah, seperti pengakuan

pendapatan berbasis estimasi, dapat digunakan untuk membenarkan keputusan yang akhirnya merugikan perusahaan dan pemangku kepentingan. Selain itu, prinsip pengungkapan paripurna juga terbukti memiliki kelemahan yang signifikan dalam kasus Carillion. Perusahaan gagal memenuhi kewajibannya untuk mengungkapkan secara transparan kewajiban besar dan risiko keuangan yang dapat mengancam kelangsungan usaha. Meskipun prinsip ini dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, kenyataannya masih ada celah dalam penerapannya yang memungkinkan perusahaan untuk menyembunyikan masalah keuangan yang substansial, sementara laporan keuangan yang disajikan tetap terlihat sehat dan menguntungkan.

Pada akhirnya, kasus Carillion membuktikan bahwa kelemahan dalam prinsip pengakuan pendapatan dan pengungkapan paripurna membuka celah untuk manipulasi yang merugikan banyak pihak. Skandal ini menunjukkan bahwa prinsip dasar akuntansi, meskipun tampaknya sah secara teknis, memberikan ruang untuk tindakan yang merugikan dengan dalih prinsip tersebut membolehkan tindakan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa bukan hanya perilaku individu yang bermasalah, tetapi prinsip dasar akuntansi itu sendiri yang memungkinkan manipulasi besar dalam laporan keuangan.

J. Skandal HealthSouth

HealthSouth Corporation, didirikan pada 1984 oleh Richard Scrushy, berkembang pesat menjadi salah satu penyedia layanan kesehatan terbesar di AS, mengoperasikan lebih dari 1.700 fasilitas pada 2002. Namun, pada 2003, perusahaan didakwa memalsukan laporan

keuangan untuk menggelembungkan pendapatan hingga $2,7 miliar, dengan penipuan berlangsung dari 1986 hingga 2002. Meskipun Scrushy dibebaskan, banyak eksekutif lain mengaku bersalah. HealthSouth berhasil menghindari kebangkrutan, merestrukturisasi operasinya, dan membangun kembali reputasinya di bawah kepemimpinan baru.[41]

Penipuan di HealthSouth Corporation dipicu oleh tekanan untuk memenuhi ekspektasi Wall Street. Richard Scrushy dan eksekutif lainnya memanipulasi laporan keuangan untuk mempertahankan ilusi profitabilitas, menciptakan lingkungan kerja yang mendorong kecurangan. Praktik ini menjadi sistemik, melebih-lebihkan pendapatan hingga $2,7 miliar. Kurangnya kontrol internal dan akuntabilitas memungkinkan penipuan berlangsung selama lebih dari satu dekade.[42] Dalam skandal HealthSouth, CEO Richard Scrushy memimpin penggelembungan laba hingga $2,7 miliar antara 1986 dan 2002. Selain Scrushy, 16 eksekutif terlibat, dengan 15 mengaku bersalah dan satu dinyatakan bersalah di pengadilan. Mereka bersama-sama memanipulasi data keuangan untuk memenuhi ekspektasi Wall Street. Auditor independen, Ernst & Young, juga dianggap bersalah karena gagal mendeteksi manipulasi ini selama 17 tahun. Celah dalam sistem akuntansi memungkinkan kecurangan di berbagai tingkat manajemen.

[41]Zhemin Wang, Zhijun Lin, dan Sophia Ju, "Healthsouth Corporation: The First Case Against A Company under The Sarbanes-Oxley Act," *Journal of Business Case Studies (JBCS)* 5, no. 1 (1 Januari 2009): 9–11, doi:10.19030/jbcs.v5i1.4689.

[42]B. Anthony Billings, D. Larry Crumbley, dan Cedric L. Knott, "Tangible and Intangible Costs of White-Collar Crime," *Journal of Forensic and Investigative Accounting* 13, no. 2 (2021): 292–93.

Meski Scrushy dibebaskan dari tuduhan kriminal, ia tetap menghadapi tuntutan hukum dari investor dan kreditor.[43]

Pelajaran dari kasus HealthSouth adalah pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Tekanan untuk memenuhi ekspektasi keuntungan dapat mendorong individu untuk melakukan praktik curang. Kurangnya kontrol internal yang memadai juga memperparah situasi, memungkinkan penipuan terjadi dalam jangka panjang. Kasus tersebut menyoroti perlunya regulasi yang ketat dan tanggung jawab perusahaan untuk memastikan integritas keuangan dan melindungi kepentingan publik. Pengabaian etika, moral, dan spiritualitas dalam kasus HealthSouth tercermin dalam manipulasi laporan keuangan oleh eksekutif perusahaan. Secara etis, mereka melanggar prinsip akuntabilitas dengan memalsukan pendapatan sebesar $2,7 miliar, menunjukkan kelalaian terhadap tanggung jawab profesional dan fokus pada keuntungan finansial semata. Secara moral, tindakan ini mencerminkan pengorbanan kejujuran dan transparansi demi kepentingan pribadi dan ekspektasi Wall Street, mengabaikan kewajiban moral kepada pemegang saham dan masyarakat. Secara spiritual, tindakan tersebut menunjukkan hilangnya koneksi dengan nilai-nilai yang lebih dalam, dengan mengabaikan tanggung jawab terhadap kesejahteraan perusahaan dan komunitas, serta tujuan hidup yang lebih tinggi. Fokus pada keserakahan materi mengabaikan dampak jangka panjang yang lebih bermakna.

Lebih jauh, kasus HealthSouth mengungkapkan bahwa penyebab utama penipuan yang terjadi bukan hanya akibat penerapan

[43]Wang, Lin, dan Ju, “Healthsouth Corporation,” 9–11.

etika yang buruk atau perilaku individu, tetapi lebih karena adanya celah dalam prinsip dasar akuntansi yang memungkinkan manipulasi laporan keuangan secara sistemik. Salah satu prinsip yang lemah dalam kasus ini adalah prinsip pengakuan pendapatan. HealthSouth menggelembungkan pendapatan hingga $2,7 miliar untuk memenuhi ekspektasi pasar, yang memperlihatkan bahwa prinsip ini memberikan celah untuk mencatat pendapatan yang belum terealisasi dan memanipulasi angka secara spekulatif.

Celah ini memungkinkan perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang tampak sehat, meskipun kenyataannya perusahaan mengalami masalah keuangan yang serius. Dengan demikian, prinsip pengakuan pendapatan tidak cukup melindungi dari risiko manipulasi, karena tidak mengharuskan pengakuan yang lebih konservatif atas pendapatan yang belum pasti. Selain itu, prinsip pengungkapan paripurna juga menunjukkan kelemahan signifikan. Dalam kasus HealthSouth, laporan keuangan perusahaan tidak mengungkapkan informasi yang cukup mengenai risiko yang dihadapi perusahaan, serta ketidaksesuaian antara pendapatan yang diakui dan kinerja riil perusahaan. Meskipun laporan keuangan tampak sehat di permukaan, risiko yang sebenarnya tidak terungkap dengan jelas, memberikan kesan stabilitas yang menyesatkan. Ketidakmampuan dalam mengungkapkan secara transparan masalah yang mendasar di perusahaan memperburuk situasi, karena pihak eksternal, termasuk investor dan auditor, tidak dapat melihat potensi kerugian atau masalah yang tersembunyi di dalam laporan.

Pada akhirnya, kasus HealthSouth membuktikan bahwa celah dalam prinsip dasar akuntansi yang lemah, seperti pengakuan pendapatan dan pengungkapan paripurna, memungkinkan manipulasi yang merugikan banyak pihak. Laporan keuangan yang tampak sehat di permukaan tidak selalu mencerminkan kondisi riil perusahaan, dan masalah yang seharusnya diungkapkan dengan jelas disembunyikan. Kelemahan sistemik dalam prinsip dasar akuntansi ini menjadi celah yang dapat dieksploitasi untuk penipuan, menunjukkan bahwa bukan hanya pelanggaran etika individu, tetapi juga kelemahan dalam sistem akuntansi itu sendiri yang berperan besar dalam menciptakan situasi yang merugikan banyak pihak.

K. Skandal Kimia Farma

PT Kimia Farma, perusahaan farmasi tertua di Indonesia, didirikan pada 1917 sebagai NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co. Sebagai pelopor di industri farmasi nasional, Kimia Farma berperan penting dalam penyediaan obat dan layanan kesehatan. Pada 2011–2014, perusahaan ini dikenal dengan kinerja keuangannya yang stabil. Selama pandemi Covid-19, Kimia Farma semakin relevan sebagai produsen utama produk kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.[44] *Fraud* dalam perusahaan sering terjadi karena dorongan untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik, seperti yang terjadi di PT Kimia Farma pada 2001.

Perusahaan terlibat manipulasi laporan keuangan dengan melebihkan penjualan dan persediaan untuk meningkatkan laba. Audit

[44]Eko Prasetyo, Arnadi Chairunnas, dan Niken Argaheni, "Studi Komparatif Kecurangan di Negara Barat dengan Negara Timur," *Jurnal Proaksi* 8, no. 2 (26 Juli 2021): 324, doi:10.32534/jpk.v8i2.1813.

ulang menemukan laba bersih yang sebenarnya hanya 99,56 miliar rupiah, jauh di bawah angka awal 132 miliar rupiah, akibat inflasi data. Kasus ini merusak kepercayaan publik, menyebabkan kerugian bagi pemegang saham, dan mengungkap kelemahan pengawasan internal. Hal ini menegaskan pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran dalam laporan keuangan.[45] Persamaan dalam kasus *fraud* PT Kimia Farma dan Enron adalah keterlibatan banyak pihak. Di PT Kimia Farma, *fraud* dilakukan oleh direksi lama bersama KAP Hans Tuanakota dan Mustofa melalui penggelembungan penjualan dan persediaan. Sementara di Enron, *fraud* melibatkan manajemen, auditor, konsultan hukum, regulator, dan pasar keuangan. Perbedaannya terletak pada penyebab dan skala kerugian. *Fraud* PT Kimia Farma disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pelaporan keuangan, sedangkan Enron didorong oleh *moral hazard*, keinginan menarik investor, dan kurangnya pengawasan. *Fraud* Enron bertujuan menyembunyikan utang dan melebihkan pendapatan untuk menciptakan ilusi kesehatan keuangan yang lebih baik.[46]

Pelajaran yang dapat diambil dari kasus PT Kimia Farma adalah pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan. Manipulasi laporan keuangan untuk menampilkan kinerja yang lebih baik dapat merusak kepercayaan publik dan menyebabkan kerugian finansial bagi pemegang saham. Penting bagi perusahaan untuk

[45]Natalis Christian dkk., "Analisis Manipulasi Laporan Keuangan oleh PT Kimia Farma pada Tahun 2001 menggunakan Teori Fraud," *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 2 (10 Juni 2024): 113–15.

[46]Prasetyo, Chairunnas, dan Argaheni, "Studi Komparatif Kecurangan di Negara Barat dengan Negara Timur," 326.

menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* guna mencegah terjadinya *fraud* dan menjaga integritas bisnis. Pengabaian etika, moral, dan spiritualitas pada PT Kimia Farma dalam kasus fraud 2001 mencerminkan pelanggaran prinsip dasar bisnis yang sehat. Secara etika, manipulasi laporan keuangan dengan melebih-lebihkan laba dan persediaan bertentangan dengan norma kejujuran dan transparansi yang harus dijaga oleh perusahaan untuk memberikan informasi akurat kepada pemangku kepentingan.

Secara moral, perusahaan bertindak tidak jujur dengan memberikan gambaran palsu tentang kondisi keuangan, yang merugikan investor dan pemegang saham yang bergantung pada laporan keuangan untuk keputusan mereka. Perusahaan gagal memenuhi kewajiban moralnya dalam menjaga kesejahteraan sosial melalui pengelolaan yang bertanggung jawab. Dari sisi spiritualitas, pelanggaran ini mencerminkan hilangnya kesadaran akan tanggung jawab sosial, terutama dalam sektor kesehatan. Spiritualitas menuntut nilai-nilai seperti kepedulian dan pemahaman dampak jangka panjang, namun Kimia Farma lebih fokus pada keuntungan jangka pendek, mengabaikan nilai-nilai pelayanan masyarakat. Secara keseluruhan, pengabaian etika, moral, dan spiritualitas merusak reputasi perusahaan dan menunjukkan bahwa tanpa integritas, perusahaan dapat tergelincir dalam skandal yang membahayakan keberlanjutan bisnis.

Lebih jauh, Kasus PT Kimia Farma pada tahun 2001 mengungkapkan celah serius dalam prinsip dasar akuntansi yang memberikan peluang terjadinya *fraud* dalam laporan keuangan. Salah satu kelemahan utama terletak pada prinsip pengakuan pendapatan.

Dalam kasus ini, perusahaan memanipulasi laporan keuangan dengan melebih-lebihkan penjualan dan persediaan untuk menunjukkan laba yang lebih besar daripada yang sebenarnya. Prinsip pengakuan pendapatan yang memberi ruang bagi subjektivitas dalam pencatatan pendapatan, tanpa menekankan pada realisasi transaksi yang sesungguhnya, menciptakan celah bagi manipulasi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip tersebut yang terlalu fleksibel memungkinkan perusahaan untuk mencatatkan pendapatan yang belum terealisasi, yang akhirnya merusak keandalan laporan keuangan. Selain itu, kelemahan lain terlihat pada prinsip pengungkapan paripurna, yang tidak dijalankan dengan baik dalam kasus ini. Pengungkapan yang tidak lengkap mengenai inflasi persediaan dan penjualan yang tidak nyata menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Meskipun laporan awal menunjukkan laba bersih sebesar 132 miliar rupiah, audit ulang mengungkapkan bahwa laba tersebut hanya sekitar 99,56 miliar rupiah. Kurangnya pengungkapan yang jelas dan transparan mengenai kondisi keuangan perusahaan membuka peluang bagi manipulasi informasi. Ini menunjukkan bahwa prinsip pengungkapan yang lemah memberi kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menyembunyikan fakta penting dari investor dan regulator.

Pada akhirnya, kasus PT Kimia Farma ini membuktikan bahwa kelemahan dalam prinsip dasar akuntansi, seperti pengakuan pendapatan yang tidak terkontrol dengan baik dan pengungkapan paripurna yang tidak transparan, memungkinkan terjadinya manipulasi yang merugikan banyak pihak. Meskipun etika individu terlibat dalam praktik *fraud* ini,

masalah yang lebih mendalam terletak pada prinsip dasar akuntansi itu sendiri, yang memberi celah untuk manipulasi laporan keuangan. Celah-celah ini menyebabkan laporan yang tampak sehat namun sebenarnya tidak mencerminkan kondisi riil perusahaan. Oleh karena itu, kelemahan dalam prinsip dasar akuntansi menjadi faktor utama yang memfasilitasi terjadinya fraud dalam kasus ini.

L. Skandal Garuda Indonesia

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, maskapai nasional Indonesia yang didirikan pada 1949, beroperasi dengan konsep layanan penuh untuk transportasi udara dan pengiriman barang. Dengan pangkalan utama di Jakarta, Denpasar, dan Makassar, Garuda menjangkau rute domestik dan internasional. Namun, pada 2018, perusahaan terlibat dalam skandal laporan keuangan dengan pelaporan pendapatan yang tidak akurat. Skandal ini merusak reputasi, memicu sanksi otoritas, dan menurunkan kepercayaan investor. Kasus ini menegaskan pentingnya transparansi dan integritas dalam praktik akuntansi perusahaan.[47] Kasus *fraud* PT Garuda Indonesia Tbk terungkap pada 2019 ketika komisaris Chairul Tanjung dan Dony Oskaria menolak menandatangani laporan keuangan 2018, karena ada kejanggalan yang bertentangan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Kejanggalan tersebut berkaitan dengan pengakuan pendapatan dari kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi, di mana

[47]Saridawati Saridawati, Rotua Tiofanta Simamora, dan Rhenda Basya Sembiring, "Analisis Pelanggaran Etika dalam Praktik Akuntansi Keuangan: Studi Kasus PT. Maskapai Garuda Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (14 Juni 2024): 1365–70, doi:10.31004/innovative.v4i3.11459.

pendapatan yang belum diterima telah dicatat dalam laporan keuangan. Akibatnya, Garuda melaporkan keuntungan sebesar USD 809.850 pada 2018, padahal sebelumnya mengalami kerugian USD 216,5 juta.

Investigasi lebih lanjut mengungkap manipulasi pendapatan dengan memasukkan nilai kerja sama sebagai pendapatan lain-lain, yang melonjak hampir 14 kali lipat dari tahun sebelumnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan pelanggaran terhadap peraturan Nomor 29/PJOK.04/2016 terkait laporan tahunan emiten, dan PT Garuda Indonesia dijatuhi sanksi administratif sebesar Rp 100 juta.[48] Dalam kasus *fraud* PT Garuda Indonesia, beberapa pihak dinilai bersalah. Manajemen Garuda, bekerja sama dengan PT Mahata, diduga memanipulasi laporan keuangan dengan mencatat pendapatan yang belum terealisasi sebagai laba bersih, yang melanggar prinsip akuntansi yang berlaku dan memberikan gambaran keuangan yang tidak akurat kepada pemegang saham serta publik. Selain itu, Kasner Sirumapea, akuntan publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan, yang bertanggung jawab atas audit laporan keuangan, dianggap lalai dalam tugasnya. Ia gagal menemukan bukti yang cukup untuk mendukung pendapatan yang diakui dan memberikan opini audit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pelanggaran ini berdampak besar, menurunkan kepercayaan investor, pemerintah, dan masyarakat terhadap Garuda Indonesia, serta merugikan negara secara signifikan.[49]

[48]Citra Amalia dkk., "Etika dalam Praktik Akuntansi Keuangan (Studi Kasus PT Garuda Indonesia Tbk)," *Journal Sains Student Research* 2, no. 3 (27 Mei 2024): 744–46, doi:10.61722/jssr.v2i3.1476.

[49]Ika Oktaviana Dewi dkk., "Fraud Ditinjau dari Etika Profesi dan Etika Bisnis Kasus PT Garuda Indonesia," *Media Komunikasi Ilmu Ekonomi* 40, no.

Dari kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, pelajaran penting yang bisa diambil adalah pentingnya transparansi dan integritas dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Manipulasi data keuangan yang dilakukan Garuda merusak reputasi perusahaan dan menimbulkan sanksi berat dari otoritas terkait. Pelanggaran tersebut juga berdampak buruk pada kepercayaan investor dan masyarakat, mengingat pentingnya akuntabilitas dalam bisnis agar perusahaan tetap dipercaya dan beroperasi dengan baik. Kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mencerminkan pengabaian serius terhadap etika bisnis. Manipulasi laporan keuangan, di mana pendapatan yang belum diterima dilaporkan sebagai keuntungan, melanggar prinsip transparansi dan kejujuran.

Etika bisnis seharusnya menjadi dasar keputusan perusahaan, namun prinsip ini diabaikan demi hasil yang menyesatkan, yang merugikan investor dan menurunkan kepercayaan publik. Secara moral, tindakan ini menunjukkan pengabaian terhadap nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial. Garuda, sebagai perusahaan milik negara, memiliki kewajiban untuk bertindak dengan integritas, tetapi justru menunjukkan hal yang sebaliknya dengan membohongi pemegang saham. Dari sisi spiritualitas, perusahaan seharusnya mengedepankan kebajikan dan integritas dalam setiap tindakannya. Spiritualitas dalam bisnis mengharuskan kesadaran akan dampak terhadap masyarakat dan kesejahteraan jangka panjang. Namun, Garuda mengutamakan keuntungan jangka pendek, yang merusak reputasi dan kepercayaan publik serta pemangku kepentingan.

---

1 (30 Juni 2023): 42–43, doi:10.58906/melati.v40i1.101.

Lebih jauh, kasus *fraud* yang terjadi pada PT Garuda Indonesia pada 2018 menunjukkan kelemahan mendalam dalam penerapan prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengungkapan paripurna, yang memungkinkan manipulasi laporan keuangan. Dalam kasus ini, perusahaan mencatatkan pendapatan yang seharusnya belum diterima sebagai laba, dengan memasukkan pendapatan dari kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi sebelum transaksi tersebut terealisasi. Prinsip pengakuan pendapatan yang tidak memadai memberikan ruang untuk mencatatkan pendapatan spekulatif yang sebenarnya belum terjadi. Hal ini menciptakan gambaran yang keliru tentang kondisi keuangan perusahaan, yang seharusnya lebih transparan.

Manipulasi semacam ini memperlihatkan kelemahan prinsip dasar akuntansi yang membiarkan subjektivitas dalam pengakuan pendapatan, memfasilitasi pencatatan laba yang tidak sesuai dengan realitas. Selain itu, prinsip pengungkapan paripurna juga terganggu dalam kasus ini. Garuda Indonesia gagal memberikan informasi yang cukup tentang pengakuan pendapatan yang tidak terealisasi, sehingga laporan keuangan menjadi menyesatkan. Ketika komisaris mulai menyoroti kejanggalan tersebut, terungkap bahwa laporan keuangan yang menunjukkan keuntungan USD 809.850 pada 2018 adalah hasil dari manipulasi, sementara perusahaan sebenarnya mengalami kerugian sebesar USD 216,5 juta pada tahun sebelumnya. Kurangnya transparansi dalam pengungkapan informasi material terkait transaksi yang belum terealisasi ini memperburuk kualitas laporan keuangan dan menambah potensi manipulasi.

Pada akhirnya, kasus PT Garuda Indonesia membuktikan bahwa kelemahan dalam prinsip dasar akuntansi, seperti pengakuan pendapatan dan pengungkapan paripurna, menjadi celah yang dapat dieksploitasi untuk manipulasi laporan keuangan. Meskipun tindakan *fraud* ini melibatkan pihak-pihak tertentu, akar masalah terletak pada penerapan prinsip dasar akuntansi yang tidak cukup kuat untuk mengatur pengakuan pendapatan dan kewajiban dengan tepat. Kelemahan sistemik dalam prinsip dasar akuntansi ini memberi ruang bagi manipulasi yang dapat merugikan banyak pihak, dari investor hingga masyarakat umum.

M. Skandal Jiwasraya

PT Asuransi Jiwasraya adalah perusahaan BUMN Indonesia yang bergerak di sektor asuransi jiwa, didirikan pada tahun 1859. Perusahaan ini menawarkan berbagai produk asuransi, termasuk asuransi individu, asuransi kumpulan, dan program pensiun. Namun, Jiwasraya terjerat dalam skandal keuangan besar yang mulai terungkap pada 2018, terkait dengan manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang telah berlangsung bertahun-tahun. Masalah keuangan Jiwasraya pertama kali terdeteksi pada awal 2000-an, namun semakin memburuk pada 2018, saat perusahaan mengalami kesulitan membayar polis asuransi, terutama produk JS Saving Plan. Laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan pelanggaran dalam penempatan dana nasabah yang berisiko tinggi untuk mendapatkan imbal hasil besar, yang akhirnya menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan dan pemegang polis. Skandal ini menarik perhatian publik

dan menjadi salah satu contoh besar kecurangan di sektor keuangan Indonesia.[50]

Fraud yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia, terutama terkait produk investasi JS *Saving Plan*. Produk tersebut menawarkan imbal hasil tinggi hingga 13% per tahun, yang awalnya menarik minat banyak nasabah. Namun, pada tahun 2018, Jiwasraya mulai mengalami kesulitan membayar klaim nasabah akibat pengelolaan investasi yang buruk. Manajemen menempatkan dana nasabah pada saham dan reksa dana berkualitas rendah tanpa analisis yang memadai, yang akhirnya menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Pada akhir 2019, Jiwasraya menghadapi kewajiban klaim sebesar Rp 12,4 triliun yang belum dibayarkan, dan skandal tersebut membuka praktik manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen untuk menutupi kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

Kerugian total yang dialami Jiwasraya mencapai sekitar Rp 16,8 triliun pada tahun 2018 dan semakin memburuk dengan total utang yang mencapai Rp 49,6 triliun pada tahun 2019. Selain itu, defisit modal perusahaan mencapai Rp 38,6 triliun pada tahun 2020. Skandal tersebut melibatkan manipulasi pencatatan laba palsu dan pengabaian prinsip kehati-hatian dalam investasi. Akhirnya, PT Asuransi Jiwasraya resmi ditutup pada tahun 2021, dan nasabah yang tersisa dialihkan ke PT Asuransi Jiwa IFG, menunjukkan dampak besar *fraud* tersebut terhadap

[50]Annisa Aglamia dkk., "Analisis Kecurangan Laporan Keuangan : (Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya)," *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2, no. 5 (28 Mei 2024): 582–86.

nasabah dan negara.[51] Dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), kecurangan yang terjadi melibatkan beberapa pihak, termasuk direksi perusahaan dan akuntan.

Berdasarkan laporan, enam orang terdakwa telah dipidanakan, termasuk mantan direktur utama dan direktur keuangan. Mereka melakukan manipulasi laporan keuangan, salah satunya dengan menginvestasikan dana pada saham yang berisiko tinggi. Tekanan finansial yang dihadapi oleh perseroan, ditambah dengan tindakan korupsi, mendorong para pelaku untuk memanipulasi data keuangan guna menutupi kerugian besar yang terjadi. Akuntan yang bertugas juga turut bertanggung jawab karena gagal mendeteksi dan melaporkan ketidakwajaran dalam laporan tersebut, yang seharusnya dapat diketahui melalui audit internal. Peran pengawasan internal yang lemah memungkinkan terjadinya kecurangan tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian hingga Rp 16 triliun bagi negara dan nasabah.[52]

Pelajaran dari kasus PT Asuransi Jiwasraya adalah pentingnya pengelolaan risiko yang hati-hati dan transparansi dalam laporan keuangan. Pengawasan internal yang kuat dan audit yang akurat harus diterapkan untuk mencegah kecurangan, serta manajemen harus fokus pada investasi yang aman demi melindungi nasabah dan integritas perusahaan. Pengabaian etika, moral, dan spiritualitas di PT Asuransi Jiwasraya menunjukkan dampak signifikan terhadap perusahaan dan industri secara keseluruhan. Etika, yang seharusnya menjadi panduan

[51]Rizka Haryanti, "Analisis Kecurangan Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya dengan Analisis Fraud Pentagon," *Sanskara Akuntansi dan Keuangan* 1, no. 02 (31 Januari 2023): 92–98, doi:10.58812/sak.v1i02.70.

[52]Farhan Ananda Sahrul dan Gunardi Lie, "Analisis mengenai Kasus Jiwasraya," *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 3, no. 1 (2024): 758–60.

utama, diabaikan melalui manipulasi laporan keuangan yang merusak kepercayaan nasabah dan masyarakat. Ketidakmampuan manajemen untuk mempertahankan integritas ini mencerminkan kegagalan penerapan etika bisnis.

Dari sisi moralitas, keputusan untuk mengutamakan keuntungan jangka pendek dengan investasi berisiko tinggi menunjukkan kurangnya tanggung jawab terhadap nasabah. Keputusan ini merugikan banyak orang, terutama nasabah dari kalangan menengah ke bawah, dan mencerminkan pengabaian nilai-nilai moral dalam pengambilan keputusan. Aspek spiritualitas juga terabaikan, di mana seharusnya perusahaan berfokus pada layanan yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya mengejar keuntungan. Pengelolaan yang buruk dan manipulasi informasi menunjukkan kurangnya visi yang lebih tinggi dalam operasional perusahaan. Hal ini menegaskan pentingnya etika, moral, dan spiritualitas dalam praktik bisnis untuk mencegah skandal serupa di masa depan.

Lebih lanjut, Kasus *fraud* yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya menunjukkan bahwa kelemahan dalam penerapan prinsip dasar akuntansi, terutama dalam prinsip konservatisme dan prinsip pengakuan pendapatan, memberi celah yang dapat dimanfaatkan untuk manipulasi. Salah satu masalah utama adalah pengelolaan dana yang tidak hati-hati, di mana manajemen menempatkan dana nasabah pada saham dan reksa dana berkualitas rendah dengan imbal hasil tinggi tanpa analisis yang memadai. Ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, yang seharusnya mengharuskan pengelolaan risiko yang lebih hati-hati dan konservatif. Akibatnya, perusahaan mengalami kerugian besar, yang

tidak tercermin dalam laporan keuangan yang dimanipulasi. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa penerapan prinsip kehati-hatian yang kuat, perusahaan dapat terjerumus dalam praktik kecurangan untuk menutupi kerugian.

Selain itu, prinsip pengakuan pendapatan juga mengalami penyalahgunaan dalam kasus ini. Jiwasraya mencatatkan laba palsu untuk menutupi kerugian yang sebenarnya, sebuah pelanggaran serius terhadap prinsip pengakuan pendapatan yang tepat. Sebagai contoh, meskipun perusahaan mengalami kesulitan membayar klaim nasabah dan menghadapi kewajiban klaim sebesar Rp 12,4 triliun pada 2019, laporan keuangan yang dipublikasikan tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Manipulasi pencatatan laba ini memberi gambaran yang keliru kepada pemegang saham dan regulator, yang mengarah pada kerugian lebih lanjut ketika kebenaran akhirnya terungkap.

Pada akhirnya, kasus PT Asuransi Jiwasraya membuktikan bahwa kelemahan dalam prinsip dasar akuntansi, khususnya prinsip konservatisme dan pengakuan pendapatan, menjadi celah yang dieksploitasi untuk manipulasi. Skandal ini tidak hanya menunjukkan pelanggaran etika, tetapi juga mengungkap bahwa kelemahan sistemik dalam prinsip dasar akuntansi memainkan peran besar dalam memfasilitasi kecurangan yang merugikan banyak pihak. Dengan prinsip dasar akuntansi yang lemah, perusahaan dapat menyembunyikan kerugian dan menciptakan gambaran yang tidak akurat, yang pada akhirnya merugikan nasabah, investor, dan bahkan negara.

N. Skandal Envy

PT Envy Technologies Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang memiliki perjalanan cukup menarik dalam dunia keuangan dan teknologi. Perusahaan tersebut didirikan pada tahun 2004 dan terjun dalam bidang jasa teknologi informasi dan telekomunikasi. PT Envy melakukan penawaran saham perdana (IPO) pada tahun 2019 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ENVY. Namun, perjalanan bisnis mereka tidak selalu mulus. Pada tahun 2020, PT Envy Technologies Indonesia Tbk tersandung kasus dugaan manipulasi laporan keuangan, yang akhirnya menyebabkan suspensi perdagangan saham mereka selama dua tahun. Kasus tersebut menyoroti masalah pada pelaporan pendapatan perusahaan, yang meningkat signifikan secara tidak wajar sebelum akhirnya mengalami penurunan drastis.

Beberapa indikasi menunjukkan bahwa perusahaan terlibat dalam *earnings manipulation* atau *financial shenanigans*, sebuah teknik untuk memanipulasi laporan keuangan guna memberikan kesan kinerja yang lebih baik daripada kenyataan.[53] Kasus kecurangan laporan keuangan PT Envy Technologies Indonesia Tbk menarik perhatian karena melibatkan manipulasi signifikan pada laporan keuangan mereka. Pada tahun 2019, perusahaan tersebut mencatat peningkatan pendapatan dan laba bersih yang sangat tinggi, yang kemudian mencurigakan bagi Bursa Efek Indonesia (BEI). Investigasi BEI mengungkap bahwa PT Envy mungkin terlibat dalam manipulasi laporan keuangan dengan

[53]Natalis Christian dkk., "Pendeteksian Fraudulent Financial Reporting dengan Earnings Manipulation Financial Shenanigans: Studi Kasus PT Envy Technologies Indonesia Tbk," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 7, no. 1 (25 Juni 2022): 14–20, doi:10.38043/jiab.v7i1.3543.

menggunakan laporan anak perusahaannya, PT Ritel Global Solusi, yang tidak menyusun laporan keuangan secara mandiri.

Pada tahun 2020, kejanggalan mencolok terlihat dalam laporan keuangan kuartal ketiga PT Envy, termasuk penurunan drastis kas sebesar 99% dan berbagai perubahan besar pada liabilitas mereka. BEI kemudian memberlakukan suspensi perdagangan saham PT Envy mulai 1 Desember 2020. Hal tersebut mengakibatkan potensi *delisting* jika manipulasi tersebut terbukti. Tekanan dari investor dan kurangnya pengawasan internal mendorong manajemen untuk melakukan kecurangan demi mempertahankan citra keuangan yang baik.[54] Dalam kasus manipulasi laporan keuangan PT Envy Technologies Indonesia Tbk, beberapa pihak terlibat dalam praktik kecurangan yang terjadi dari tahun 2018 hingga 2020. Pihak manajemen PT Envy Technologies diduga melakukan manipulasi pendapatan dan penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam laporan keuangan yang diaudit, PT Envy menunjukkan peningkatan laba yang tidak realistis dengan menggunakan berbagai teknik manipulasi, seperti pencatatan pendapatan palsu dan tidak konservatif.

Selain itu, auditor eksternal PT Envy juga dianggap turut bertanggung jawab karena gagal mendeteksi adanya indikasi manipulasi laporan keuangan tersebut. Pihak auditor tidak memberikan respons terhadap dugaan manipulasi laporan keuangan konsolidasian yang melibatkan anak perusahaan PT Ritel Global Solusi. Kementerian Keuangan sempat memberikan sanksi kepada auditor eksternal yang

[54]Felicia Nathania, "Unveiling the Motivation of Fraudulent Financial Statement in ENVY: Fraud Triangle Theory," *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 8, no. 1 (1 Januari 2024): 284–87, doi:10.33395/owner.v8i1.1923.

terlibat dalam manipulasi laporan keuangan pada kasus serupa, seperti yang terjadi pada PT Garuda Indonesia.[55] Pelajaran penting dari kasus PT Envy Technologies Indonesia Tbk adalah bahwa pengawasan keuangan yang ketat dan transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor dan keberlanjutan bisnis. Manipulasi laporan keuangan membawa risiko besar, termasuk suspensi saham dan hilangnya reputasi.

Kasus manipulasi laporan keuangan PT Envy Technologies Indonesia Tbk mencerminkan pengabaian terhadap etika bisnis. Etika mengharuskan perusahaan untuk beroperasi secara jujur dan transparan, terutama dalam penyajian laporan keuangan. Namun, PT Envy justru memalsukan data keuangan untuk menciptakan kesan kinerja yang lebih baik dari kenyataan, mengabaikan prinsip kejujuran yang menjadi dasar kepercayaan investor dan pasar. Dari sisi moral, tindakan manajemen PT Envy merugikan banyak pihak. Dengan menyajikan laporan palsu, mereka mengabaikan tanggung jawab moral untuk memberikan informasi yang akurat kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Keputusan ini lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak negatif bagi investor dan reputasi perusahaan. Dari aspek spiritualitas, nilai-nilai yang seharusnya mendorong tanggung jawab sosial dan makna dalam setiap tindakan bisnis tampak terabaikan. PT Envy memilih keuntungan material jangka pendek melalui cara curang, yang menghancurkan reputasi perusahaan dan memperburuk keberlanjutan bisnisnya.

[55]Christian dkk., "Pendeteksian Fraudulent Financial Reporting dengan Earnings Manipulation Financial Shenanigans," 19–20.

Lebih jauh, kasus manipulasi laporan keuangan yang melibatkan PT Envy Technologies Indonesia Tbk menunjukkan kelemahan mendalam dalam beberapa prinsip dasar akuntansi, terutama pada prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip konservatisme. Perusahaan ini mencatatkan pendapatan dan laba bersih yang sangat tinggi pada tahun 2019, yang ternyata tidak realistis dan merupakan hasil dari manipulasi. Teknik manipulasi yang digunakan, seperti pencatatan pendapatan palsu dan pengakuan pendapatan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata, menunjukkan bahwa prinsip pengakuan pendapatan dalam akuntansi tidak cukup ketat untuk mencegah penyimpangan ini. Dalam hal ini, prinsip pengakuan pendapatan yang tidak konservatif memungkinkan perusahaan untuk mencatatkan pendapatan yang belum terealisasi, memberi gambaran yang keliru tentang kinerja finansial mereka.

Selain itu, prinsip konservatisme juga menjadi faktor utama dalam terjadinya manipulasi ini. Sebagai perusahaan yang baru terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Envy sangat bergantung pada citra yang baik di mata investor. Tekanan untuk memenuhi ekspektasi pasar dan mempertahankan harga saham yang tinggi mendorong manajemen untuk mengabaikan prinsip kehati-hatian dan mengambil langkah-langkah manipulatif. Laporan keuangan yang seharusnya mencerminkan kondisi keuangan yang jujur dan akurat, justru disusun untuk menciptakan gambaran positif yang tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini mengarah pada ketidakakuratan yang akhirnya terungkap setelah dilakukannya audit oleh BEI.

Pada akhirnya, kasus PT Envy Technologies Indonesia Tbk membuktikan bahwa kelemahan dalam prinsip dasar akuntansi, seperti pengakuan pendapatan yang terlalu liberal dan penerapan prinsip konservatisme, membuka celah bagi manipulasi. Skandal ini tidak hanya menunjukkan pelanggaran etika, tetapi juga menggambarkan bahwa kelemahan sistemik dalam prinsip dasar akuntansi itu sendiri memainkan peran besar dalam memfasilitasi kecurangan yang merugikan banyak pihak. Manipulasi ini mengarah pada suspensi saham dan merusak reputasi perusahaan, memperlihatkan bahwa kelemahan dalam sistem akuntansi bisa memberikan jalan bagi perilaku yang merugikan pemegang saham, investor, dan publik.

O. Skandal di Industri Perbankan Syariah

Bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan transparansi, keadilan, dan pelarangan riba. Namun, seperti halnya bank konvensional, skandal dan penipuan juga dapat terjadi di bank syariah. Skandal tersebut tidak hanya merugikan nasabah, tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap integritas sistem perbankan syariah, yang seharusnya beroperasi dengan etika yang lebih tinggi. Kasus Dubai Islamic Bank (DIB) yang terjadi antara tahun 2007-2010 merupakan salah satu skandal keuangan terbesar di sektor perbankan syariah. Dalam kasus tersebut, DIB mengalami kerugian sebesar USD 501 juta akibat konspirasi antara enam pelaku dari berbagai negara, termasuk eksekutif senior bank dan pihak eksternal. Mereka memalsukan dokumen dan melakukan kolaborasi untuk menipu bank. Kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun didukung oleh

pemerintah dan menerapkan prinsip syariah, perbankan Islam tidak kebal terhadap *fraud*. Studi tersebut menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat dan implementasi tata kelola yang baik di sektor perbankan.[56]

Kasus Islamic Bank of South Africa (IBL) yang terjadi pada 1997, juga merupakan contoh kegagalan bank syariah yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk manajemen kredit yang buruk, disfungsi operasional, dan pelanggaran regulasi. IBL mengalami masalah likuiditas yang serius karena pengelolaan risiko kredit yang tidak efektif dan praktik operasional yang tidak transparan. Kepercayaan nasabah mulai menurun setelah terungkap bahwa bank terlibat dalam transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti utang berbasis riba. Laporan dari South African Reserve Bank (SARB) menunjukkan bahwa manajemen bank gagal melindungi dana nasabah, dan auditor eksternal tidak melaporkan ketidakteraturan material yang terjadi. Kesalahan tersebut diperburuk oleh fakta bahwa meskipun regulator telah melakukan intervensi dini, kebangkrutan bank tidak dapat dihindari karena adanya kebocoran likuiditas yang signifikan. Kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun bank syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa pengawasan yang kuat dan kepatuhan yang ketat, mereka tetap rentan terhadap kegagalan seperti halnya bank konvensional.[57]

---

[56]Khairul Mukminin, "How Close Islamic Banks are to Global Fraud-Learnings from Dubai Islamic Bank in the Time of Sub-Prime Crisis," *European Journal of Islamic Finance*, no. 11 (4 Desember 2018): 1–6, doi:10.13135/2421-2172/2762.

[57]Mahmood Nathie, "Islamic Bank Failure: A Case Study," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 2, no. 1 (15 Juni 2010): 7–10, doi:10.55188/ijif.v2i1.77.

Kasus *fraud* yang terjadi di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bogor pada tahun 2013 melibatkan penyaluran kredit fiktif untuk pembelian lahan dan pembangunan perumahan di kawasan Bogor, yang mengakibatkan kerugian hingga Rp102 miliar. Modus operandi yang digunakan adalah dengan membuat 197 nasabah fiktif, di mana hanya 84 nasabah yang nyata, sementara sisanya adalah identitas palsu yang dipakai untuk mengajukan kredit. Pegawai internal BSM, bekerja sama dengan pengusaha properti, memalsukan dokumen utama seperti KTP dan persyaratan administrasi, sehingga dana kredit bisa dicairkan tanpa hambatan. Mereka, termasuk kepala cabang dan *accounting officer*, menerima imbalan berupa uang dan hadiah lainnya, yang mendorong mereka melanggar prosedur internal bank. Setelah kecurigaan muncul mengenai laporan cabang yang mencurigakan, BSM segera mengambil tindakan dengan melakukan audit internal. Audit tersebut mengungkap adanya *mark-up* nilai kredit serta penyimpangan dalam penyaluran pembiayaan. Selanjutnya, BSM melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian dan memberhentikan tiga pejabat bank yang terlibat. Meski demikian, dana sebesar Rp59 miliar belum sepenuhnya pulih karena sebagian besar telah dialihkan ke rekening lain oleh pelaku utama. Kasus tersebut menjadi peringatan akan pentingnya pengawasan ketat dan sistem audit yang efektif untuk mencegah penyelewengan di lembaga perbankan syariah.[58]

Penipuan dalam perbankan syariah bukanlah fenomena baru. Sebagai contoh, kasus penipuan di Bank Mega Syariah pada tahun 2021

[58]Edy Junaedi dan Irwan Maulana, "Fraud Perbankan Syariah dan Moralitas Keislaman," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 13, no. 1 (22 Desember 2014): 50–52.

melibatkan penyalahgunaan dana nasabah sebesar Rp20 miliar. Dalam kasus tersebut, dana deposito nasabah secara ilegal dialihkan ke rekening pihak ketiga tanpa sepengetahuan nasabah. Meski pimpinan cabang dinyatakan bersalah oleh pengadilan, kasus tersebut semakin menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam perbankan syariah. Selain itu, kasus serupa terjadi di Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah) pada tahun 2018, yang melibatkan pembuatan rekening fiktif dan pengajuan kredit palsu. Akibatnya, perusahaan merugi hingga Rp548 miliar.

Dari kedua kasus tersebut, jelas bahwa lemahnya pengendalian internal membuka celah bagi penipuan terstruktur, meskipun bank-bank tersebut beroperasi dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penegakan sistem pengawasan internal yang kuat serta kebijakan *anti-fraud* yang lebih ketat menjadi keharusan untuk menjaga integritas perbankan syariah.[59] Contoh lainnya adalah kasus fraud di PT BTPN Syariah Indonesia, yang melibatkan berbagai modus operandi oleh pegawai di beberapa cabang. Di cabang Binuang, Kalimantan Selatan, pada tahun 2022, mantan pegawai terlibat dalam penyelewengan dana nasabah melalui penggunaan data fiktif dan manipulasi dana pembiayaan serta tabungan. Meskipun kerugian yang ditimbulkan per transaksi berkisar antara Rp.1.000.000,00 hingga Rp.6.000.000,00, dampaknya cukup signifikan terhadap kepercayaan nasabah. Kasus tersebut akhirnya terungkap melalui audit internal. Namun, seperti kasus di Bali yang

[59]Syahraeni Syahraeni, Nur Hikmah, dan Sitti Nikmah Marzuki, "Kasus Penipuan di Perbankan Syariah: Analisis Fraud Internal dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Nasabah," *Jurnal Lan Tabur* 6, no. 1 (30 September 2024): 128–29.

melibatkan pegawai BTPN Syariah dengan modus pemalsuan dokumen dan penggelapan dana, jelas bahwa meskipun kebijakan *anti-fraud* sudah ada, pengawasan internal yang lebih ketat dan audit yang menyeluruh tetap sangat diperlukan.[60]

Pelajaran penting dari kasus-kasus *fraud* di perbankan syariah adalah bahwa meskipun bank-bank tersebut beroperasi dengan prinsip syariah, mereka tidak kebal terhadap penipuan dan kegagalan manajemen. Kelemahan dalam pengawasan internal, manajemen risiko, dan implementasi tata kelola yang baik membuka peluang terjadinya penyelewengan. Kasus-kasus seperti DIB, IBL, dan BSM menegaskan perlunya sistem audit yang efektif dan pengendalian internal yang ketat untuk menjaga integritas, kepercayaan nasabah, dan keberlangsungan perbankan syariah. Meskipun bank syariah diharapkan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip etika Islam, pelajaran dari berbagai kasus penipuan menunjukkan bahwa kepatuhan pada sistem regulasi syariah saja tidak cukup untuk menjamin integritas. Prinsip-prinsip syariah yang diimplementasikan di bank sering kali hanya mencakup aspek hukum, seperti menghindari *riba*, *maisir*, dan *garar*, yang berfokus pada struktur produk dan proses bisnis. Aspek-aspek tersebut memastikan bahwa produk keuangan yang ditawarkan sesuai dengan regulasi syariah, tetapi kurang menekankan aspek spiritual dan etis pada individu yang menjalankan sistem tersebut. Akibatnya, *fraud* dan kegagalan manajemen tetap mungkin terjadi karena ada celah yang tidak terjangkau oleh regulasi yang berbasis kepatuhan hukum saja.

[60]Salamatus Saadah, "Fraud pada PT BTPN Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (21 Maret 2024): 897, doi:10.29040/jiei.v10i1.12340.

Kasus seperti di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bogor atau Dubai Islamic Bank (DIB) menunjukkan bahwa kelemahan dalam pengawasan internal dan manajemen risiko membuka peluang bagi individu untuk menyalahgunakan sistem, bahkan ketika produk dan layanan bank secara teknis telah sesuai syariah. Ketiadaan sistem pengawasan yang komprehensif dan pengendalian internal yang ketat menjadi salah satu penyebab utama mengapa bank syariah masih rentan terhadap penipuan. Hal tersebut mencerminkan bahwa tanpa pengawasan yang kuat, aspek syariah dalam bentuk aturan tertulis saja tidak cukup efektif untuk mengatasi kejahatan internal. Selain itu, budaya organisasi yang tidak mendukung spiritualitas dalam bekerja turut menjadi faktor penyebab lemahnya integritas dalam perbankan syariah. Bank syariah sering kali beroperasi dalam lingkungan yang serupa dengan bank konvensional, dengan fokus pada target bisnis dan keuntungan. Budaya tersebut tidak mendorong individu untuk terhubung dengan nilai-nilai spiritual yang lebih dalam, yang seharusnya menjadi dasar utama bank berbasis syariah. Dengan mengabaikan aspek spiritualitas dalam budaya kerja, bank syariah kehilangan elemen penting yang bisa mendorong karyawan untuk berperilaku dengan integritas tinggi dan menolak kesempatan untuk melakukan *fraud*.

Di samping itu, motivasi individu yang terlibat dalam korupsi di perbankan syariah mungkin tidak selaras dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang seharusnya menjadi landasan operasional institusi tersebut. Banyak pegawai mungkin bergabung dengan bank syariah karena alasan profesional atau ekonomi tanpa memiliki keterikatan mendalam pada prinsip-prinsip syariah. Akibatnya, meskipun prinsip

etis dan moral ada dalam aturan kerja, tidak semua karyawan merasa terdorong untuk menerapkannya secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat ada peluang untuk mendapat keuntungan pribadi. Oleh karena itu, penting bagi bank syariah untuk tidak hanya fokus pada kepatuhan syariah dari segi regulasi, tetapi juga memperkuat pengembangan dan pembinaan spiritual dalam budaya kerja mereka. Dengan adanya pelatihan yang menekankan penguatan etika dan nilai-nilai spiritual, bank syariah dapat membangun budaya yang mengurangi risiko korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. Pembinaan yang mendalam tersebut bisa menjadi langkah preventif yang efektif untuk menjaga integritas karyawan serta memelihara kepercayaan nasabah, sehingga tujuan bank syariah untuk beroperasi sesuai nilai Islam dapat tercapai secara utuh.

Lebih jauh, kasus Dubai Islamic Bank (DIB) menunjukkan bahwa prinsip dasar akuntansi, khususnya substansi mengungguli bentuk dan pengungkapan paripurna, memiliki kelemahan yang memungkinkan manipulasi legal dalam konteks akuntansi, tetapi merugikan secara substansial. Prinsip substansi mengungguli bentuk seharusnya memprioritaskan esensi ekonomi dari suatu transaksi dibandingkan bentuk hukumnya. Namun, dalam kasus DIB, transaksi yang secara hukum sah ternyata menyembunyikan kerugian besar dan risiko signifikan yang seharusnya terlihat dalam laporan keuangan. Celah ini terjadi karena prinsip tersebut tidak cukup tegas dalam mewajibkan pengungkapan informasi relevan yang mencerminkan kenyataan ekonomi. Dengan demikian, manipulasi data dapat dilakukan tanpa melanggar aturan akuntansi formal. Kondisi ini menciptakan laporan

keuangan yang tampak legal secara hukum tetapi menyesatkan secara substansi.

Prinsip pengungkapan paripurna juga menunjukkan kelemahan serupa. Prinsip ini mengharuskan laporan keuangan mencakup informasi yang relevan, termasuk risiko yang memengaruhi kinerja keuangan. Namun, dalam kasus DIB, laporan keuangan gagal mengungkapkan potensi kerugian akibat konspirasi dan pemalsuan dokumen. Ketidakcukupan pengungkapan ini memungkinkan pihak tertentu memanipulasi data tanpa melanggar aturan, sehingga merugikan pemangku kepentingan. Kasus ini menggarisbawahi bahwa kelemahan dalam prinsip dasar akuntansi dapat memungkinkan manipulasi legal yang berujung pada informasi yang tidak mencerminkan kenyataan ekonomi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini perlu diperbaiki agar laporan keuangan mencerminkan keadaan ekonomi yang sebenarnya, bukan sekadar formalitas hukum.

Kasus Islamic Bank of South Africa (IBL) pada 1997 juga menyoroti kelemahan serius dalam penerapan prinsip dasar akuntansi, terutama substansi mengungguli bentuk dan pengungkapan paripurna. Meskipun transaksi bank tersebut melibatkan utang berbasis riba yang bertentangan dengan prinsip syariah, transaksi tersebut tetap dianggap sah secara akuntansi karena memenuhi syarat formal. Prinsip substansi mengungguli bentuk gagal mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, karena transaksi yang merugikan nasabah tetap tercatat valid dalam laporan keuangan.

Celah ini dimanfaatkan untuk mencatat transaksi yang tampak legal tetapi secara substansi bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip

pengungkapan paripurna dalam kasus ini juga menunjukkan kelemahan besar. Informasi terkait ketidakteraturan material dalam pengelolaan risiko kredit dan transaksi berbasis riba tidak diungkapkan secara transparan. Laporan keuangan tampak sehat secara legal tetapi gagal mencerminkan kondisi riil bank. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip pengungkapan yang lemah memungkinkan manipulasi informasi yang sah secara formal tetapi menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, kasus IBL mengungkapkan bahwa prinsip dasar akuntansi memerlukan perbaikan agar dapat mencegah manipulasi yang merugikan para pemangku kepentingan.

Sementara itu, kasus *fraud* di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bogor pada 2013 memperlihatkan kelemahan prinsip pengakuan pendapatan dan pengungkapan paripurna. Dalam kasus ini, kredit fiktif diajukan melalui identitas palsu, memungkinkan pencairan dana tidak sah. Sistem akuntansi bank yang seharusnya mencatat transaksi berdasarkan identitas valid gagal mendeteksi penyimpangan ini. Prinsip pengakuan pendapatan diterapkan pada data yang tidak akurat, sehingga mencatat pendapatan yang sebenarnya tidak ada. Prinsip pengungkapan paripurna juga diabaikan dalam kasus ini. Informasi terkait penyimpangan kredit tidak diungkapkan dengan jelas dalam laporan keuangan, sehingga regulator dan pihak lain tidak mendapatkan gambaran transparan tentang risiko dan *fraud* yang terjadi. Akibatnya, kerugian sebesar Rp59 miliar tidak sepenuhnya dipulihkan meskipun telah dilakukan audit internal. Kasus ini menunjukkan bahwa pengungkapan yang tidak memadai memberikan peluang manipulasi,

yang merugikan banyak pihak dan mengancam integritas sistem akuntansi.

Kasus Bank Mega Syariah pada 2021 dan BJB Syariah pada 2018 menunjukkan kelemahan serupa dalam prinsip pengakuan pendapatan dan substansi mengungguli bentuk. Rekening fiktif dan kredit palsu dicatat dalam laporan keuangan meskipun tidak ada transaksi riil. Prinsip pengakuan pendapatan seharusnya mengharuskan pendapatan dicatat hanya pada aliran kas nyata, tetapi penerapan longgar memungkinkan pencatatan pendapatan dari kredit fiktif. Prinsip substansi mengungguli bentuk juga gagal dalam memastikan laporan keuangan mencerminkan kenyataan ekonomi. Transaksi ilegal, seperti pengalihan dana nasabah ke rekening pihak ketiga, tetap tampak sah karena tidak ada pengungkapan memadai. Kasus ini menyoroti kelemahan prinsip dasar akuntansi dalam mencegah manipulasi yang merugikan nasabah dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah.

Kasus PT BTPN Syariah Indonesia pada 2022 menunjukkan kelemahan signifikan dalam prinsip pengungkapan paripurna. Manipulasi data nasabah dan pemalsuan dokumen tidak terdeteksi dalam laporan keuangan, yang seharusnya mencerminkan keadaan keuangan secara transparan. Prinsip pengakuan pendapatan juga tidak diterapkan dengan baik, sehingga memungkinkan pencatatan transaksi yang tidak sah sebagai pendapatan. Akibatnya, laporan keuangan menjadi tidak akurat meskipun terlihat sah secara formal. Pada akhirnya, semua kasus tersebut mengungkapkan bahwa prinsip dasar akuntansi, jika tidak diperbaiki, dapat menjadi celah yang memungkinkan manipulasi yang

legal tetapi merugikan banyak pihak. Reformasi mendalam diperlukan agar akuntansi tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mencerminkan substansi ekonomi yang sebenarnya dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan.

BAB IV
NILAI-NILAI TASAWUF YANG MENDEKONSTRUKSI PRINSIP DASAR AKUTANSI

A. Pedoman Dasar Akuntansi dalam Islam

Pedoman dasar dalam Islam tentang akuntansi adalah al-Qur'ān surat al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن

تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah

kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.[1]

Al-Qur'an adalah sumber hukum utama dan panduan hidup bagi umat Islam, yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi. Surah Al-Baqarah ayat 282 menegaskan prinsip-prinsip dasar yang mengarah pada akuntansi yang adil dan transparan. Ayat tersebut memberikan petunjuk rinci mengenai cara mencatat transaksi utang-piutang dengan adil dan benar, yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam. Dalam ayat tersebut, pencatatan harus dilakukan oleh pencatat yang adil, yang diharapkan dapat mencatat transaksi tanpa mengurangi atau memanipulasi informasi. Jika yang berutang tidak mampu mendiktekan karena kelemahan fisik atau mental, maka dia berhak meminta bantuan dari walinya untuk mendiktekan dengan benar. Hal ini memastikan bahwa pencatatan tetap dilakukan dengan akurat meskipun pihak yang berutang tidak mampu melakukannya sendiri.

Lebih lanjut, ayat tersebut menekankan pentingnya kehadiran saksi yang adil dan jujur dalam setiap transaksi. Saksi-saksi ini harus dipanggil jika diperlukan, dan tidak boleh menolak untuk memberikan kesaksian yang benar. Jika saksi tidak hadir, pencatatan tidak bisa dianggap sah. Hal ini menjamin kebenaran dan keandalan dalam setiap transaksi yang dicatat, serta menghindari potensi manipulasi atau kesalahan yang bisa merugikan pihak manapun. Ayat tersebut juga

[1]"Qur'an Kemenag," diakses 25 Desember 2024, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=282&to=282.

mengingatkan agar pencatatan tidak dipersulit, baik oleh pencatat maupun oleh saksi. Kemudahan dan keadilan dalam mencatat transaksi adalah prinsip yang harus dijaga untuk memastikan transaksi dapat berlangsung dengan adil, transparan, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kemudahan ini menunjukkan bahwa akuntansi dalam Islam menekankan pentingnya proses yang sederhana, efisien, dan transparan, serta tidak boleh ada unsur kesulitan yang menghambat keadilan. Selain itu, Allah juga mengingatkan agar tidak ada rasa bosan dalam melakukan pencatatan transaksi, baik yang kecil maupun besar, hingga waktu yang telah ditentukan. Pencatatan yang dilakukan dengan kesabaran dan ketelitian akan lebih mendekatkan pada keadilan di sisi Allah, memperkuat kesaksian, dan mengurangi potensi keraguan. Kecuali dalam kasus perniagaan tunai, yang tidak memerlukan pencatatan formal, maka hal itu tidak dianggap dosa.

Jika pencatatan atau kesaksian dipersulit atau disembunyikan, itu akan menjadi suatu kefasikan, yang sangat dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, ayat ini mengajarkan umat Islam untuk bertakwa kepada Allah dalam segala transaksi ekonomi, serta menjaga prinsip integritas, keadilan, dan transparansi dalam setiap aspek kehidupan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar yang kokoh bagi sistem akuntansi dalam Islam, yang mengutamakan keseimbangan, keadilan, dan transparansi.[2] Lebih jauh lagi, Surah al-Baqarah ayat 282 juga dapat dipandang sebagai pengantar

[2]Nimatul Fitria Mukaromah and Amin Wahyudi, "Etika Bisnis Dalam Akuntansi Menurut Perspektif Surat Al-Baqarah Ayat 282," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 10 (October 27, 2024): 7366–68, doi:10.47467/alkharaj.v6i10.2935.

terhadap nilai-nilai tasawuf yang berperan penting dalam mendekonstruksi prinsip dasar akuntansi yang ada saat ini. Tasawuf, yang mengutamakan aspek spiritualitas, kesadaran diri, dan keadilan moral, memandang setiap transaksi ekonomi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah, dengan menekankan pentingnya niat, kejujuran, dan transparansi dalam setiap tindakan. Ayat ini mengajarkan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan dalam pencatatan transaksi, perlunya transparansi dalam setiap interaksi, dan integritas yang tinggi—nilai-nilai yang selaras dengan ajaran tasawuf yang menekankan pembersihan hati dan niat yang tulus. Dengan demikian, ayat ini bisa dilihat sebagai pintu gerbang yang menghubungkan akuntansi konvensional dengan nilai-nilai spiritual tasawuf, yang mengajak umat Islam untuk melihat dunia ekonomi tidak hanya sebagai urusan materi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kedamaian batin dan hubungan yang lebih dekat dengan Allah.

Menurut Sayyed Hossein Nasr, tasawuf merupakan sisi esoteris dalam ajaran Islam yang menekankan kedalaman spiritual dalam setiap aspek kehidupan. Nilai-nilai tasawuf, yang sumber utamanya berasal dari al-Qur'ān, mengajarkan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilandasi oleh ketulusan hati dan keikhlasan, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan.[3] Dalam konteks ini, akuntansi yang didasarkan pada prinsip-prinsip tasawuf akan lebih mengedepankan keseimbangan

[3]Rahabistara Bistara, "Tariqah Dimensi Esoteris Dalam Islam (Studi Pemikiran Sayyed Hossein Nasr)," *Journal of Islamic Civilization* 2, no. 2 (29 Agustus 2020): 73, doi:10.33086/jic.v2i2.1704.

antara hak dan kewajiban, keadilan sosial, serta tanggung jawab moral. Dengan demikian, akuntansi tidak hanya dilihat dari segi keuntungan material dan efisiensi, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan yang adil dan harmonis.

Pendekatan akuntansi berbasis tasawuf dapat mendekonstruksi paradigma akuntansi modern yang cenderung fokus pada keuntungan semata. Prinsip tasawuf mengajarkan bahwa setiap transaksi ekonomi, pada hakikatnya, adalah bentuk pengabdian kepada Allah dan manifestasi dari nilai-nilai spiritual yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Surah al-Baqarah ayat 282, yang mengatur tentang pentingnya pencatatan transaksi yang adil dan transparan, tidak hanya menjadi pedoman untuk akuntansi yang adil, tetapi juga sebagai jembatan yang mengarahkan pemahaman akuntansi menuju prinsip-prinsip tasawuf yang lebih mendalam. Dalam pandangan tasawuf, akuntansi bukan hanya tentang perhitungan untung dan rugi, melainkan tentang menjaga keseimbangan antara dimensi material dan spiritual dalam setiap transaksi. Dengan demikian, akuntansi yang berlandaskan tasawuf dapat menjadi jalan untuk mencapai keadilan dan keharmonisan dalam kehidupan ekonomi, yang pada akhirnya mengarahkan umat manusia lebih dekat kepada Allah dan nilai-nilai moral yang lebih tinggi.

B. Nilai-nilai Pokok Tasawuf

Nilai-nilai pokok dalam tasawuf mencakup tiga tahapan utama: *takhallī* , *taḥallī*, dan *tajallī*.[4] Menurut Imam al-Gazālī dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn.*, langkah pertama yang harus dilalui oleh seorang sālik adalah taubat, yang menjadi inti dari fase *takhallī*. Pada tahap ini, *sālik* berusaha membersihkan diri dari dosa-dosa, baik terhadap Allah maupun terhadap sesama, yang berpotensi mengotori hati.[5] Setelah menyelesaikan fase *takhallī*, *sālik* memasuki fase *taḥallī*, yaitu menghiasi diri dengan akhlak mulia. Fase ini melibatkan perjalanan melalui tingkatan-tingkatan penting seperti sabar dan syukur, takut dan harap, fakir dan zuhud, tauhid dan tawakal, cinta dan rida, ikhlas dan benar, *murāqabah* dan *muḥāsabah*, tafakur, serta ingat mati dan kehidupan sesudah mati. Tahapan ini merupakan proses pembentukan karakter spiritual yang mendalam, memperkuat hubungan *sālik* dengan Allah. Puncak dari perjalanan tasawuf adalah fase *tajallī*, di mana seorang *sālik* mencapai penghayatan spiritual yang mendalam. Pada fase ini, cahaya Ilahi terbuka dalam hati, memberikan kedamaian dan pemahaman hakiki, sekaligus menjadi tujuan akhir dari perjalanan seorang *sālik* menuju Allah.[6]

---

[4]Rohman, Abdul Aziz Wahab, and Muhammad Hifdil Islam, "Konsep Tasawuf Imam Al-Ghazali Dari Aspek Moral Dalam Kitab Bidayatul Hidayah," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (13 September 2022): 1509, doi:10.31004/jpdk.v4i5.6804.

[5]Imam Ghazali, *Ihya' Ulumiddin Jilid 3* (Singapura: Pustaka Nasional, 1992), 928.

[6]Ghazali, 1089–1321; Ghazali, *Ihya' Ulumiddin Jilid 4* (Singapura: Pustaka Nasional, 1998), 8–1109.

Dengan mempelajari dan mengamalkan ilmu tasawuf yang berlandaskan konsep *takhallī*, *taḥallī*, dan *tajallī*., seseorang dapat mencapai kebeningan hati dan kejernihan jiwa. Proses ini membantu membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan menggantikannya dengan sifat-sifat terpuji, sehingga jiwa menjadi sehat dan bersih. Jiwa yang sehat ini membawa seseorang pada tujuan utama kehidupan, yaitu mengharap rida Allah Swt. Sifat-sifat akhlak mulia yang terbentuk dari proses ini akan terpancar dalam setiap interaksi dan muamalah dengan sesama, termasuk dalam dunia kerja. Akhlak ini menciptakan etos kerja yang positif, seperti disiplin, akuntabilitas, kejujuran, amanah, kecerdasan, integritas, dan kemampuan bekerja sama.[7]

Dalam konteks bisnis, *takhallī*, atau pembersihan diri dari sifat buruk, diterapkan dengan menghilangkan praktik-praktik tidak etis seperti korupsi, manipulasi, atau diskriminasi, yang merusak kepercayaan dan keberlanjutan organisasi. *Taḥallī*, atau menghiasi diri dengan sifat mulia, mendorong pengadopsian sikap-sikap seperti kesabaran dalam menghadapi tantangan, syukur atas keberhasilan, dan cinta dalam membangun hubungan positif dengan karyawan, pelanggan, serta mitra bisnis. *Tajallī,* yang merupakan penghayatan spiritual yang mendalam, diwujudkan dalam bisnis melalui visi yang melampaui keuntungan semata, dengan memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

[7]Azizah Zumrotul and Muhammad Nurkholis Kholik, "Implementasi Ilmu Taswawuf dalam Dunia Kerja Wahyu Aditama, Muhammad Nurkholis Kholik," *AN-NIBRAAS* 2, no. 01 (30 Juni 2023): 60.

C. Prinsip Muamalah dalam Tasawuf

Prinsip muamalah dalam tasawuf, dijelaskan oleh al-Gazhali dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* sebagai berikut:[8]

1. Keutamaan Usaha:

   Prinsip ini mendorong umat Islam untuk berusaha secara halal dalam memenuhi kebutuhan hidup, menjauhi meminta-minta, serta berorientasi pada kecukupan dan keberkahan. Muamalah yang dijalankan dengan niat tulus dan cara yang benar akan mendatangkan manfaat dunia dan akhirat.

2. Keutamaan Ilmu dalam Berusaha

   Prinsip ini menekankan pentingnya ilmu muamalah, mencakup syarat sah dalam transaksi seperti jual beli, riba, penyewaan, dan lain-lain. Transparansi dan keadilan menjadi landasan agar setiap interaksi ekonomi sesuai syariat dan menjauhkan dari keraguan atau syubhat.

3. Penjagaan Keadilan dan Penjauhan Kezaliman

   Prinsip ini melarang praktik yang merugikan pihak lain, seperti penimbunan barang dan manipulasi mata uang, serta memastikan setiap pihak mendapatkan haknya. Selain itu, muamalah diarahkan untuk menjaga keadilan, menghindari syubhat, dan menegakkan kejujuran dalam setiap transaksi.

4. Tindakan Ihsan dalam Muamalah

   Prinsip ini menekankan pentingnya berbuat kebaikan yang melebihi kewajiban, menjaga kejujuran dalam setiap tindakan, menghindari segala bentuk penipuan, serta senantiasa menolong orang yang

[8]Ghazali, *Ihya' Ulumiddin Jilid 2*, 7–65.

membutuhkan dengan tulus, sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang tinggi.

5. Kasih Sayang kepada Agama

   Prinsip ini mengutamakan niat yang benar dalam berbisnis untuk kebaikan dunia dan akhirat, menjadikan usaha sebagai sarana menegakkan agama, serta menjauhi pekerjaan yang merugikan masyarakat, dengan selalu menjaga integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.

D. Pembaharuan Tasawuf oleh Syekh Abū al-Ḥasan al-Syāżilī

Syekh Abū al-Ḥasan al-Syāżilī pada awalnya mengikuti corak tasawuf Timur yang dipraktikkan oleh Imam al-Gazālī, yang mengedepankan ibadah seperti puasa, salat, dan begadang malam sebagai sarana untuk mencapai penyingkapan spiritual. Namun, ia menerima teguran dari Abdul Malik, seorang wali Allah, yang menganggap metode tersebut keliru. Menyadari kesalahan itu, al-Syāżilī bertobat dan memperbaiki jalannya, dengan fokus pada ibadah yang murni dan bebas dari aspek kejiwaan. Kesadaran ini mendorongnya untuk melakukan revolusi dalam dunia tasawuf.

Berbeda dengan tradisi yang diajarkan oleh al-Gazālī dan sufi lainnya, yang menekankan pengasahan jiwa melalui *takhallī* (pengosongan) dan *taḥallī* (perhiasan akhlak), al-Syāżilī tidak sepenuhnya setuju dengan kedua konsep tersebut. Ia melihatnya sebagai bentuk pelarian dari usaha duniawi yang produktif. Menurutnya,

kesempurnaan spiritual tidak hanya tercapai melalui amal lahir, tetapi melalui pengingat Allah yang ada dalam batin.

Syekh al-Syāżilī mengajarkan bahwa keburukan dalam diri seseorang tidak bisa dihilangkan hanya dengan usaha manusia, melainkan dengan pertolongan Allah yang menutupi aib dan kekurangan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu ‘Aṭā’illah al-Sakandarī, seseorang tidak akan mampu menghilangkan aibnya kecuali Allah menutupinya dengan sifat-sifat-Nya. Pemikiran ini menggambarkan pengaruh tasawuf al-Syāżiliyyah dalam ajaran spiritualnya. Pandangan ini juga mengkritik tradisi tarekat yang terlalu fokus pada pelatihan diri melalui *takhallī* dan *taḥallī*. Sebagai alternatif, Syekh al-Syāżilī mengembangkan tarekat syukur, yang lebih menekankan pada gerakan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya gerakan fisik. Tarekat ini mengajarkan bahwa seorang guru yang sempurna adalah yang mampu membawa ketenangan batin, bukan hanya melatih secara lahiriah.

Sebagai contoh nyata, Syekh al-Syāżilī mempraktikkan hidup yang memperlihatkan kemudahan, seperti menggunakan pakaian mewah dan menunggangi hewan tunggangan yang cepat. Hal ini ia lakukan sebagai contoh bagi para pengikutnya, menekankan bahwa yang terpenting adalah hati yang dekat dengan Allah, bukan banyaknya amal zahir. Bagi Syekh al-Syāżilī, baik seorang *sālik* maupun orang awam, yang terpenting adalah menghidupkan Allah dalam relung batin mereka. Menurutnya, seseorang tidak harus menjadi sufi untuk mencapai

kesempurnaan spiritual. Yang paling penting adalah kemampuan untuk menghidupkan Tuhan dalam hati.[9]

Pandangan ini lebih universal dan relevan untuk mendekonstruksi prinsip dasar akuntansi. Dalam konteks ini, nilai-nilai tasawuf dalam kitab-kitab al-Syāżiliyyah dipilih karena pendekatannya yang inklusif dan menekankan pada kesucian batin, tanpa membatasi diri pada ritual atau bentuk fisik tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan akuntansi untuk menggali esensi kebenaran dalam kehidupan ekonomi yang lebih holistik dan berkelanjutan, yang tidak hanya terfokus pada angka atau laporan formal, tetapi juga pada integritas dan keseimbangan batin yang murni.

Sebagai kelanjutan, subbab berikutnya akan menguraikan delapan nilai tasawuf dari *turāṡ* al-Syāżiliyyah yang digunakan untuk mendekonstruksi prinsip dasar akuntansi tersebut. Nilai-nilai tersebut meliputi *ṣidq* (kejujuran), *yusrā* (kemudahan), *khasyah* (takut pada Tuhan), hijrah (perpindahan), *ṣuḥbah* (persahabatan), *ijtihād* (kesungguhan), *murāqabah* (pengawasan), dan *lā taqif,* yaitu semangat tak pernah berhenti dalam mencari kebenaran. Nilai-nilai ini memberikan landasan spiritual yang kuat bagi praktik akuntansi, yang tidak hanya menekankan pada angka atau prosedur teknis, tetapi juga pada integritas, keharmonisan, dan pencarian kebenaran yang terus-menerus. Dengan memasukkan nilai-nilai ini, akuntansi dapat menjadi

[9]Abdul Wahab Farhat and Muhammad Abdullah, *Syekh Syekh Abū Al-Ḥasan al-Syāżilī Sang Wali Penembus Batas* (Depok: Keira Publishing, 2019), 159–68.

lebih dari sekadar alat pengukuran keuangan, tetapi juga sarana untuk mencapai keberlanjutan dan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi yang penuh makna. Dengan pemahaman tersebut, pembahasan akan dilanjutkan dengan menguraikan setiap nilai tasawuf yang dapat memberikan kontribusi besar dalam mendekonstruksi prinsip dasar akuntansi. Dimulai dengan nilai *ṣidq* (kejujuran), yang menjadi landasan utama dalam membangun praktik akuntansi yang transparan dan bertanggung jawab.

E. *Ṣidq* (Kejujuran)

Menurut kamus Arab Indonesia Almaany, *ṣidq* didefinisikan sebagai kebenaran, keadaan yang sebenarnya, keabsahan, ketulusan, keterusterangan, atau kesetiaan.[10] Di dalam kitab *Risālat al-Amīn*, Syekh Abū al-Ḥasan al-Syāżilī memberikan penjelasan tentang makna mendalam dari *ṣidq* atau kejujuran sebagai berikut:

وأما الجلوس على بساط الصدق فبتحقيق أو صافك من الفقـــــر
والضعف والعجز والذل واجلس عليه ناظرا لأوصافه تعـــالى من
الغنى والقدرة والعزة والقوة فتلك من أوصاف العبودية وهذه من

[10]Almaany Team, "Terjemahan dan Arti Kata الصدق dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman," diakses 20 September 2024, https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%82/.

أوصاف الربوبية، والصدق ملازمة أو صافك ولا تنتقل عنهـــا إلى ما ليس لك فتكون من الخائبين بقلب الحقائق.[11]

> Adapun duduk di atas hamparan kejujuran adalah dengan mewujudkan sifat-sifatmu seperti kemiskinan, kelemahan, ketidakberdayaan, dan kehinaan. Duduklah di atasnya sambil memandang sifat-sifat-Nya, yaitu kekayaan, kekuasaan, kemuliaan, dan kekuatan. Karena sifat-sifat itu adalah sifat-sifat penghambaan, sedangkan ini adalah sifat-sifat ketuhanan. Kejujuran adalah tetap berada dalam sifat-sifatmu dan tidak berpindah kepada sesuatu yang bukan milikmu, sehingga kamu tidak menjadi orang-orang yang merugi dengan membalikkan kenyataan.

Dalam pandangan Syekh Abū al-Ḥasan al-Syāżilī, kejujuran tidak hanya sekadar berkata benar, tetapi juga melibatkan kesadaran diri yang mendalam terhadap kelemahan manusia dan pengakuan akan ketergantungan pada Tuhan. Kejujuran, atau *ṣidq*, menuntut seseorang untuk menerima sifat-sifatnya sendiri, seperti kelemahan, keterbatasan, dan ketidakberdayaan, sebagai bagian dari identitas sebagai makhluk yang diciptakan. Menurut al-Syāżilī, penghambaan yang sejati adalah menyadari bahwa sifat-sifat tersebut membedakan manusia dari Tuhan, yang memiliki sifat kekuatan, kemuliaan, dan kekuasaan yang sempurna.

Dengan demikian, kejujuran menjadi kesadaran diri yang menempatkan manusia pada posisinya yang benar dalam tatanan alam

[11]Syekh Abū al-Ḥasan al-Syādzilī, *Risālah al-Amīn fī al-Wuṣūl li-Rabb al-ʻĀlamīn wa yalīhi al-Waṣāyā li-Sayyidī Quṭb al-Aqṭāb wa-Gauṡ al-Agwāṡ Abī al-Ḥasan al-Syādzilī Qaddasa Allāhu Sirrah* (Kairo: Dār al-Ḥaqīqah, 2008), 10.

semesta. Ini adalah pengakuan bahwa sifat-sifat ke-Tuhanan hanya milik Tuhan, sementara manusia harus berpegang teguh pada sifat-sifat penghambaan. Menjaga kejujuran ini menghindarkan seseorang dari kebingungan atau kesombongan yang merusak. Maka, kejujuran bagi al-Syāżilī adalah fondasi untuk mencapai ketenangan dan keseimbangan dalam kehidupan spiritual, sekaligus menjadi jalan untuk mengenal Tuhan melalui penerimaan diri yang tulus.

Di dalam *Syarah al-Ḥikam al-'Aṭā'iyyah*, Syekh Aḥmad Zarrūq memberikan penjelasan tentang makna mendalam dari kejujuran sebagai berikut:

> متى طلبت عوضا عن عمل طولبت بوجود الصدق فيه. قلت : لأن الجزاء لا يكون إلا على كامل في ذاته وقصده فهو يحتـــاج إلى التخليص من الشوائب والإخلاص في القصد، وجامع ذلك كله حصول الصدق، وهو لا يتم إلا بالتبري من الحول والقـــوة والتبري لا يصح مع رؤيـــة العمـــل. فضـــلاً عن طلب ثوابـــه لاستغراقه بشهوده المئة، هـــذا وأعمالنـــا خليـــة عن الإخلاص والتخليص لما نحن عليه من النقص والتخليط ، فالأولى بنا الفرار إلى الله تعالى.[12]
>
> Apabila engkau mengharapkan imbalan atas suatu amal, engkau akan dituntut untuk memastikan adanya kejujuran

[12]Syekh Aḥmad Zarrūq, *Syarah As-Sābi'a 'Asyara 'ala al-Ḥikam al-Aṭā'iyyah* (Kairo: Maktabah at-Taufiqiyyah, 2018), 147.

> dalam amal tersebut. Aku katakan: "hal ini disebabkan karena balasan tidak diberikan kecuali kepada amal yang sempurna dalam hakikat dan niatnya. Maka, amal itu harus dimurnikan dari berbagai kotoran dan dilandasi dengan niat yang tulus. Semua ini terkandung dalam kata kejujuran (*ṣidq*), yang hanya bisa tercapai dengan berlepas diri dari daya dan kekuatan diri sendiri. Pelepasan diri ini tidaklah sempurna selama pandanganmu masih tertuju pada amal itu, apalagi jika mengharapkan pahalanya, karena hal itu sepenuhnya menyita perhatian dan kesadaranmu. Lebih jauh lagi, amal-amal sering kali kosong dari ketulusan dan kemurnian karena adanya kekurangan dan campur-aduk dalam diri manusia. Oleh sebab itu, yang paling utama adalah segera melarikan diri menuju Allah Ta'ala."

Zarrūq menyatakan bahwa ketika seseorang mengharapkan balasan atas amal, kejujuran menjadi syarat utama dalam pelaksanaannya. Kejujuran atau *ṣidq* tidak hanya terkait dengan tindakan yang terlihat, tetapi juga mencakup kesempurnaan amal dari segi hakikat dan niatnya. Amal yang bernilai di sisi Allah haruslah murni, bebas dari campuran niat duniawi atau dorongan ego, dan dilakukan semata-mata demi keridaan-Nya. Kejujuran dalam konteks ini menuntut pelepasan diri dari daya dan kekuatan pribadi, di mana seseorang tidak menggantungkan amalnya pada hasil atau balasan, melainkan mendasarkan semua tindakan pada ikhlas dan ketulusan yang mendalam. Ketulusan ini juga mengharuskan pelepasan dari pandangan yang tertuju pada amal itu sendiri, karena pengharapan akan balasan dapat mengganggu fokus utama, yaitu hanya kepada Allah.

Lebih lanjut, Zarrūq menjelaskan bahwa pelepasan diri tidaklah sempurna bila seseorang masih terikat pada amalnya sendiri dan mengharapkan pahala darinya. Pandangan yang tertuju pada amal atau pahala akan menyita perhatian hati dan mengurangi ketulusan dalam beribadah. Selain itu, amal sering kali penuh dengan kekurangan dan campuran niat yang dipengaruhi oleh sifat manusiawi, sehingga tidak mudah mencapai kejujuran yang hakiki. Kekurangan ini menunjukkan bahwa keikhlasan dan kesucian niat membutuhkan kesadaran diri yang mendalam serta usaha yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, Zarrūq menyarankan agar seseorang melarikan diri kepada Allah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada-Nya, sebagai upaya mencari keridaan-Nya secara utuh dan tanpa pamrih.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kejujuran (*ṣidq*) dalam pandangan al-Syāżilī dan Zarrūq melampaui sekadar tindakan berkata benar. Kejujuran mencakup kesadaran diri tentang kelemahan manusia serta penerimaan penuh atas posisi manusia sebagai makhluk yang bergantung pada Tuhan. Menurut al-Syāżilī, kejujuran adalah pengakuan bahwa sifat-sifat ilahi seperti kekuatan dan kemuliaan hanya milik Tuhan, sementara manusia harus memegang sifat-sifat penghambaan. Zarrūq menambahkan bahwa kejujuran dalam amal membutuhkan kemurnian niat, tanpa pamrih atau pengharapan balasan, serta fokus sepenuhnya yang tertuju kepada Allah.

Nilai kejujuran sangat relevan dalam mendekonstruksi prinsip dasar akuntansi karena mencerminkan integritas dan kesadaran diri akuntan terhadap keterbatasan serta tanggung jawab moral. Kejujuran

tidak hanya berarti menyampaikan informasi yang benar, tetapi juga melibatkan niat tulus tanpa mengharap imbalan atau melakukan manipulasi data. Dengan mengakui ketergantungan pada nilai-nilai yang lebih tinggi, akuntan terdorong untuk menjaga keakuratan dan transparansi dalam laporan keuangan. Hal ini memastikan bahwa informasi yang disajikan mencerminkan kondisi nyata perusahaan, membangun kepercayaan dengan *stakeholder*, serta menjaga kredibilitas profesi. Selain itu, kejujuran mencegah tindakan tidak etis, memperkuat akurasi dan tanggung jawab akuntansi, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan transparan.

F. *Yusrā* (Kemudahan)

Menurut kamus Arab Indonesia Almaany, *yusrā* artinya menjadi mudah, dimudahkan, menggampangkan, atau digampangkan. [13] Dalam *Laṭā'if al-Minan*, Syekh Ibnu 'Aṭā'illah al-Sakandarī menjelaskan nilai *yusrā* atau kemudahan yang menjadi salah satu prinsip penting dalam tarekatnya al-Syāżilī. Penekanan pada kemudahan ini menunjukkan betapa ajaran tarekat tersebut mengutamakan keringanan dalam beribadah tanpa memberatkan para murid, dengan tetap menjaga esensi spiritualitas. Berikut adalah teks dari kitab tersebut yang menggambarkan konsep ini secara mendalam:

[13]Almaany Team, "Terjemahan dan Arti Kata يسرى dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman," diakses 25 Oktober 2024, https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%89/.

وطريقه رضى الله عنه طريق الغنى الأكبر، والتوصـــــيل العظيم، حتى أنه كان يقول : ليس الشيخ من دلـــك على تعبـــك، إنما الشيخ من دلك على راحتك.[14]

> Dan jalan (metode) beliau, semoga Allah meridainya, adalah jalan kekayaan yang terbesar, dan pencapaian (kedekatan) yang agung, hingga beliau berkata: "Bukanlah seorang guru (syekh) itu yang mengharuskanmu berlelah-lelah, sesungguhnya guru itu adalah yang mengantarkanmu dengan ketenangan (kenyamanan)."

Al-Sakandarī menekankan bahwa prinsip kemudahan merupakan aspek utama dalam ajaran al-Syāżilī, yang menawarkan pendekatan spiritual tanpa membebani murid dengan kesulitan atau beban yang berlebihan. Prinsip ini menempatkan kemudahan dan ketenangan sebagai kunci utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Syāżilī, seorang guru sejati bukanlah yang membebani murid dengan tuntutan berat, melainkan yang membimbingnya dengan kelembutan dan ketenangan. Melalui metode ini, al-Syāżilī menciptakan sebuah jalan kekayaan terbesar dan pencapaian yang agung, yang memungkinkan murid untuk mendalami spiritualitas dengan perasaan tenang dan nyaman. Pendekatan ini tidak hanya mengedepankan ketekunan dalam ibadah, tetapi juga

[14]Aḥmad ibn 'Aṭā'illāh al-Sakandarī, *Laṭā'if al-Minan* (Kairo: Dār al-Maʿārif, 2006), 88.

menggarisbawahi pentingnya keseimbangan batin dalam perjalanan spiritual.

Masih dalam *Laṭā'if al-Minan*, al-Sakandarī menyatakan Syekh Abū al-'Abbās al-Mursī pernah mengutip pernyataan al-Syāżilī sebagai berikut:

> وكان ينهى أن يعوق المريد إذا جاءه ويقول : المريد يأتي بشعلة همته، فإذا قيل له : قف ساعة طفيت ما جاء به. وكان لا يدل المريد على المتاعب والمشقات ولا يلزمه ذلك. وكان يقول عن شيخه أبي الحسن : ليس الرجل من دلك على تعبك، إنما الرجل من دلك على راحتك.[15]

> Dia (Syekh Abū al-'Abbās al-Mursī) melarang orang menahan atau menghalangi murid yang datang kepadanya untuk belajar, dengan mengatakan bahwa seorang murid datang membawa semangat dan antusiasme. Jika ia diminta untuk berhenti sejenak, maka semangat yang ia bawa itu bisa meredup atau padam. Dia juga tidak menunjukkan kepada muridnya jalan yang penuh kesulitan dan kelelahan, serta tidak memaksanya untuk menempuh jalur tersebut. Mengenai gurunya, Abū al-Ḥasan, dia mengatakan bahwa bukanlah guru pembimbing bila menyulitkan. Guru pembimbing itu memudahkan dan membuat nyaman.

Nilai kemudahan sangat penting dalam perjalanan menuju Allah, seperti yang ditegaskan oleh al-Mursī. Dengan melarang menghalangi

[15]al-Sakandarī, *Laṭā'if al-Minan*, 120.

murid yang datang dengan semangat dan antusiasme, ia memastikan bahwa niat suci untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak teredam oleh hambatan. Meminta murid untuk berhenti sejenak dapat mengurangi semangat yang membawa mereka lebih dekat kepada-Nya. Pendekatan ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga momentum spiritual murid untuk terus berjalan di jalan kebenaran tanpa terhalang oleh keraguan atau kelelahan yang tidak perlu.

Selain itu, dengan tidak menunjukkan jalan yang penuh kesulitan dan kelelahan, guru menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung, memungkinkan murid fokus pada ibadah dan pengembangan spiritual. Al-Mursī mengutip perkataan gurunya, yaitu al-Syāżilī yang menekankan bahwa seorang guru spiritual seharusnya memudahkan perjalanan murid, bukan menyulitkan mereka. Pendekatan ini mencerminkan kasih sayang dan dedikasi dalam membimbing murid menuju pencapaian spiritual yang optimal, memperkuat hubungan antara guru dan murid dalam mencari keridaan Allah. Pernyataan al-Syāżilī itu juga dikutip oleh Syekh Ibnu Ṣabbāg dalam kitab *Durrat al-'Asrār* sebagai berikut:

الشيخ من دلك على راحتك، لا من دلك عن تعبك.[16]

[16]Muḥammad bin Abī al-Qāsim al-Ḥumairī Syekh Ibnu Ṣabbāg, *Durrat al-Asrār wa Tuḥfat al-Abrār fī Aqwāl wa Afʿāl wa Aḥwāl wa Maqāmāt wa Nasab wa Karāmāt wa Ażkār wa Daʿawāt Sayyidī Abū al-Ḥasan al-Syāżilī* (Kairo: Maktabah al-Azhariyah lit-Turāts, 2001), 112.

Syekh itu orang yang menunjukkanu dengan kemudahan, bukan menunjukkanmu pada kelelahan.

Selaras dengan penjelasan di atas, dalam *Syarah al-Ḥikam al-'Aṭā'iyyah*, Zarrūq menjelaskan nilai kemudahan pada konteks percakapan al-Syāżilī dengan gurunya ketika membahas arti *ḥadīṡ* Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

وقال الشيخ أبو الحسن ، رضى الله عنه : سألت أســـــتاذى من قوله عليه السلام : ا يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ، قال : يعنى دلوهم على الله ولا تدلوهم على غيره ، فإن من دلـــــك على الدنيا فقد غشك ، ومن دلك على العمل فقد أتعبك ، ومن ذلك على الله فقد نصحك و انتهى.[17]

Syekh Abū al-Ḥasan berkata,"Aku bertanya pada guruku tentang sabda Nabi Saw.: permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira, jangan menakut-nakuti." Guruku mengatakan tunjukkanlah mereka kepada Allah dan jangan menunjukkan mereka kepada selain Allah. Sesungguhnya orang yang menunjukkanmu pada dunia, ia telah menipumu, dan orang yang menunjukkanmu pada amal, ia akan membuatmu lelah , dan orang yang menunjukkanmu pada Allah, sungguh ia telah menasihatimu.

[17]Zarrūq, *Syarah As-Sābi'a 'Asyara 'ala al-Ḥikam*, 81.

Nilai kemudahan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari menurut al-Syāżilī, yang mengutip sabda Nabi Muhammad Saw.: "Permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira, jangan menakut-nakuti." Ajaran tersebut menekankan pentingnya penyederhanaan dalam praktik keagamaan dan interaksi sosial agar dapat lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh semua orang. Al-Syāżilī menegaskan bahwa menyampaikan kabar gembira lebih efektif dalam membangun motivasi positif dibandingkan menakut-nakuti, yang justru menimbulkan ketakutan dan kebingungan.

Selain itu, beliau mengingatkan untuk selalu fokus kepada Allah daripada terjebak dalam urusan dunia yang menipu dan melelahkan. Orang yang mengejar kesuksesan duniawi semata sering kali kehilangan arah, sementara mereka yang beramal tanpa tujuan akhir cenderung merasa lelah tanpa pencapaian spiritual. Dengan mengarahkan perhatian kepada Allah, seseorang dapat memperoleh bimbingan autentik dan nasihat murni, menjadikan kemudahan sebagai dasar utama untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Nilai kemudahan juga sangat relevan dalam mendekonstruksi prinsip dasar akuntansi karena mendorong penyederhanaan proses dan peningkatan efisiensi.

Dalam konteks akuntansi, *yusrā* (kemudahan) berarti menyusun laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami, sehingga semua *stakeholder* dapat mengakses informasi tanpa hambatan yang berlebihan. Pendekatan ini menghindarkan akuntan dari praktik yang rumit dan tidak efisien, memastikan setiap langkah pencatatan dan pelaporan dilakukan

secara sederhana namun tetap akurat. Selain itu, nilai kemudahan mendorong pemanfaatan teknologi dan metode terbaru yang mempermudah proses akuntansi, sehingga transparansi dan kecepatan dalam penyampaian informasi finansial dapat meningkat. Dengan demikian, penerapan nilai kemudahan memperkuat transparansi, efisiensi, dan akurasi, serta memastikan bahwa praktik akuntansi tetap dapat diakses dan diandalkan oleh semua pihak terkait.

G. *Khasyah* (Rasa Takut kepada Allah)

Menurut kamus Arab Indonesia Almaany, definisi dari *khasyah* adalah ketakutan, perasaan ngeri, atau kagum.[18] Selain itu takut juga disebut dengan istilah *khauf*.[19] Mengenai *khasyah* atau rasa takut dalam *Risālat al-Amīn*, al-Syāżilī menyatakan hal berikut:

> وكل خوف يردك إلى الله رد الرضا فصاحبه محمـــود، وكـــل خوف يردك إلى غيره فصاحبه مذموم أو ناقص ملوم.[20]
>
> Setiap ketakutan yang mengembalikanmu kepada Allah adalah keridaan, dan pemiliknya terpuji. Sedangkan setiap

[18]Team, "Terjemahan dan Arti Kata الخشية," diakses 20 September 2024, https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D9%8A%D8%A9/.

[19]Almaany Team, "Terjemahan dan Arti Kata خوف dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman," diakses 30 Oktober 2024, https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%AE%D9%88%D9%81/.

[20]al-Syādzilī, *Risālah al-Amīn fī al-Wuṣūl* , 77.

ketakutan yang mengembalikanmu kepada selain-Nya, maka pemiliknya hina dan tercela.

Masih dalam *Risālat al-Amīn*, al-Syāżilī menyatakan:

إذا أردت جهاد النفس فاحكم عليها بالعلم في كـــل حركـــه، واضربها بالخوف عند كل خطرة.[21]

Jika engkau ingin berjihad melawan diri (nafsu), maka kendalikanlah diri dengan ilmu dalam setiap gerak, dan pukullah (nafsu) dengan rasa takut di setiap bisikan.

Melawan nafsu dengan ilmu berarti menjadikan ilmu sebagai alat utama dalam mengendalikan dorongan nafsu yang sering kali membawa manusia pada jalan yang keliru. Nafsu adalah dorongan alami manusia untuk memenuhi keinginan fisik dan emosional, namun memerlukan panduan agar tidak berlebihan atau menimbulkan kerugian. Di sinilah ilmu berperan sebagai panduan yang membimbing seseorang dalam memahami dampak dan konsekuensi dari tindakan yang diambil. Melalui ilmu, seseorang dapat mengetahui batasan-batasan yang tepat dalam memenuhi keinginan diri, memeriksa mana yang benar atau salah, dan menentukan arah yang sesuai dengan tujuan hidup yang lebih tinggi. Ilmu menjadi cahaya yang menerangi jalan, menjauhkan dari perilaku

[21]al-Syādzilī, *Risālah al-Amīn fī al-Wuṣūl* , 67.

yang merugikan, serta memelihara kesadaran diri agar tetap berada dalam batasan yang sehat.

Selanjutnya, pernyataan bahwa ilmu perlu dipukul dengan rasa takut kepada Allah menegaskan bahwa ilmu harus selalu diiringi dengan ketakwaan. Rasa takut ini bukan sekadar ketakutan akan hukuman, melainkan bentuk penghormatan yang mendalam dan pengakuan bahwa semua ilmu berasal dari Allah. Ketika ilmu dimiliki tanpa disertai rasa takut kepada Allah, ilmu tersebut dapat menjadi sumber kesombongan, membuat seseorang merasa cukup dan mungkin menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Dengan menanamkan rasa takut kepada Allah, ilmu yang dimiliki tetap terjaga dalam kerendahan hati dan tanggung jawab, serta digunakan untuk tujuan yang bermanfaat. Rasa takut kepada Allah memastikan bahwa ilmu tidak menjadi alat dominasi, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya dan menegakkan kebaikan. Dalam *Durrat al-'Asrār*, Ibnu Ṣabbāg mengutip pernyataan al-Syāżilī sebagai berikut:

وقال رضى الله عنه : أوصاني أستاذى رضى الله عنه أن أخـــاف من الله خوفاً آمن به من كل شيء، فلا معنى للخوف من شيء لأنه عند كل شيء ومع كل شيء، وفوق كل شيء، وتحت كل شيء، وقريب من كل شيء، ومحيط بكل شـــيء، تعـــالى عن

الحدوث والأماكن، وعن الجهات وعن المحبة والقربة بالمســـافة، وعن الدور بالمخلوقات.[22]

Dan ia berkata, semoga Allah meridhoinya: Guruku, semoga Allah meridhoinya, berpesan kepadaku agar aku takut kepada Allah dengan rasa takut yang membuatku merasa aman dari segala sesuatu, sebab tidak ada makna rasa takut terhadap sesuatu apa pun, karena Dia ada bersama segala sesuatu, di atas segala sesuatu, di bawah segala sesuatu, dekat dengan segala sesuatu, dan meliputi segala sesuatu. Maha Suci Dia dari peristiwa yang terjadi, dari tempat, dari arah, dari cinta dan kedekatan dengajarak, dan dari keterlibatan dengan makhluk.

Pentingnya rasa takut kepada Allah yang dijelaskan dalam kutipan di atas menggarisbawahi konsep ketundukan dan keyakinan penuh seorang hamba kepada Tuhannya. Rasa takut yang dianjurkan di sini bukanlah rasa takut yang melemahkan, melainkan rasa takut yang membawa ketenangan dan ketenteraman, karena ia bersumber dari keyakinan bahwa Allah senantiasa menyertai, melindungi, dan meliputi setiap ciptaan-Nya. Dengan rasa takut yang demikian, seorang hamba akan merasa aman dari segala sesuatu yang dapat membahayakannya, baik secara fisik maupun spiritual.

Selain itu, pemahaman bahwa Allah berada di atas segala sesuatu, tanpa terikat oleh ruang, waktu, maupun jarak, mempertegas kemahakuasaan-Nya. Allah tidak terbatas pada tempat, arah, atau kedekatan dalam arti fisik, sebab keberadaan-Nya meliputi dan berada di luar batasan-batasan makhluk. Konsep ini menggambarkan

[22]Ṣabbāg, *Durrat al-Asrār wa Tuḥfat* , 152.

kesempurnaan Allah, di mana kekuasaan dan kehadiran-Nya melampaui segala sesuatu yang dapat dipikirkan oleh manusia. Rasa takut yang tulus kepada Allah tidak hanya memperkuat hubungan spiritual, tetapi juga melahirkan kepasrahan total dalam segala situasi. Kesadaran bahwa segala kekuasaan dan perlindungan mutlak hanya milik Allah menginspirasi seseorang untuk menyerahkan segala urusan kepada-Nya, tanpa kecemasan yang berlebihan terhadap duniawi. Dengan demikian, rasa takut ini menjadi pendorong untuk hidup dalam ketaatan dan kebajikan, membawa hamba lebih dekat kepada Allah dan melindungi dari kesalahan serta penyimpangan. Dalam *Syarah al-Ḥikam al-'Aṭā'iyyah*, Zarrūq menekankan pentingnya rasa takut kepada Allah sebagai berikut:

> خير علم ما كانت الخشية معه. قلت : لأنه مصحوب بمعرفة الله ، دال على العبودية الله ، فهو شريف الأصل والفرع ، والأشياء تشرف بشرف مقاصدها ، ولذلك قيل : فضل العلم لفضل من عليم به والله تعالى أجل المعلوم ، فالمعرفة به أفضل العلوم ، وإذا كان الله هو غاية الغايات فالمعرفة بـــه أجـــل العبـــادات نعم ، وحقيقة الخشية مهابة يصحبها تعظيم، وذلك يفضـــى لحســـن الأدب والمراقبة.[23]

> Ilmu yang terbaik adalah ilmu yang disertai dengan rasa takut (khusyuk). Aku berkata: karena ilmu tersebut diiringi

[23]Zarrūq, *Syarah As-Sābi'a 'Asyara 'ala al-Ḥikam*, 238.

> dengan pengenalan terhadap Allah, menunjukkan pengabdian kepada Allah, maka ia mulia dalam asal-usul dan cabangnya. Segala sesuatu menjadi mulia dengan kemuliaan tujuannya, dan oleh karena itu dikatakan: keutamaan ilmu adalah karena keutamaan yang diketahui dengannya, sedangkan Allah Ta'ala adalah Yang Paling Agung di antara yang diketahui, maka mengenal-Nya adalah ilmu yang paling utama. Dan jika Allah adalah tujuan dari segala tujuan, maka mengenal-Nya adalah ibadah yang paling agung. Ya, dan hakikat dari rasa takut adalah kewibawaan yang disertai dengan pengagungan, dan itu mengantarkan pada akhlak yang baik dan pengawasan diri.

Rasa takut kepada Allah merupakan unsur penting dalam ilmu yang paling utama. Ilmu yang disertai dengan rasa takut ini tidak hanya menjadi sekadar pengetahuan, tetapi juga membawa hamba kepada pengenalan yang mendalam tentang Allah dan pengabdian penuh kepada-Nya. Hal ini karena tujuan tertinggi dari ilmu adalah mengenal Allah yang Maha Agung, dan pengetahuan yang mengarahkan seseorang kepada-Nya memberikan nilai kemuliaan tersendiri. Rasa takut kepada Allah yang disertai pengagungan menghasilkan ketundukan dan penghormatan, yang pada akhirnya memperbaiki akhlak serta menguatkan pengawasan diri dalam setiap perilaku. Dengan demikian, ilmu yang diiringi rasa takut kepada Allah tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk hamba yang saleh, menjaga adab, dan senantiasa berada dalam pengawasan-Nya.

Nilai rasa takut kepada Tuhan sangat relevan dalam mendekonstruksi prinsip dasar akuntansi karena menanamkan motivasi

moral yang kuat pada akuntan. Kesadaran bahwa setiap tindakan diawasi oleh Tuhan mendorong akuntan untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran dalam pencatatan serta pelaporan keuangan. Rasa takut ini menjadi penghalang bagi manipulasi data dan kecurangan, memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara akurat dan transparan. Selain itu, rasa takut kepada Tuhan memperkuat komitmen akuntan untuk mematuhi standar etika dan regulasi yang berlaku, meningkatkan tanggung jawab moral mereka.

Dengan demikian, nilai rasa takut kepada Tuhan memperkokoh kejujuran, akurasi, dan tanggung jawab dalam akuntansi, sekaligus membangun kepercayaan *stakeholder* terhadap kredibilitas profesi akuntan. Rasa takut kepada Tuhan memastikan bahwa akuntan bertindak secara etis meskipun menghadapi tekanan eksternal, menjaga reputasi dan integritas profesi dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Hal ini menjadikan rasa takut kepada Tuhan sebagai elemen penting dalam menciptakan praktik akuntansi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan keadilan.

H. *Hijrah* (Perpindahan)

Menurut kamus Arab Indonesia Almaany, definisi dari *hijrah* adalah perpindahan, imigrasi, atau meninggalkan daerah asal.[24] Menurut

[24]Almaany Team, "Terjemahan dan Arti Kata هجرة," diakses 20 September 2024, https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9/.

al-Syāżilī dalam *Risālat al-Amīn*, hakikat *hijrah* atau perpindahan dijelaskan sebagai berikut:

حقيقة الهجران نسيان المهجور.[25]

> Hakikat dari *hijrah* (meninggalkan) adalah melupakan yang ditinggalkan.

Hakikat *hijrah* atau meninggalkan sesuatu adalah melupakan apa yang telah ditinggalkan, yang berarti tidak hanya beranjak secara fisik tetapi juga melepaskan ikatan emosional atau mental terhadap hal yang ditinggalkan. *Hijrah* sejati melibatkan keberanian untuk mengabaikan apa yang sebelumnya dianggap penting demi meraih kebaikan atau keadaan yang lebih baik. Dengan melupakan apa yang ditinggalkan, seseorang dapat sepenuhnya terbuka untuk menerima perubahan dan perbaikan dalam hidupnya. Proses ini menuntut keteguhan hati dan kesadaran penuh bahwa fokus pada masa depan lebih utama daripada terjebak dalam kenangan atau kebiasaan lama yang dapat menghambat perkembangan diri. Dalam *Syarah al-Ḥikam al-'Aṭā'iyyah*, Zarrūq menjelaskan *hijrah* sebagai berikut:

فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله قلت : يعنى : واعمل على ذلك يـــأن تهاجر إلى الله ورســـوله ؛ فلا

[25]al-Syādzilī, *Risālah al-Amīn fī al-Wuṣūl*, 62.

تتوجه إلى غيره ، إذ هو الله ورسوله ، إذ هو عبد الله ورســـوله ومن كان فى الله تلفه كان على الله خلفه ومن يخرج من بيتـــــه مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجـــــره على الله ، حسب فقير ذليل يقع أجره على فى عزيز كبير.[26]

Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya: hendaklah engkau bertekad untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah mengarahkan tujuan kepada selain-Nya, sebab Dia adalah Allah dan Rasul-Nya, yakni hamba Allah dan utusan-Nya. Barang siapa yang rela kehilangan di jalan Allah, maka Allah akan menggantikannya. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu maut menjemputnya, maka pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Cukuplah bagi seorang fakir yang lemah bahwa pahalanya berada di sisi Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung.

Hijrah dalam Islam memiliki makna yang mendalam, tidak hanya sebatas perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain, tetapi lebih kepada perpindahan niat, tujuan, dan keikhlasan hati. Sebagaimana dijelaskan dalam sumber di atas, *hijrah* kepada Allah dan Rasul-Nya berarti mengarahkan seluruh niat dan tujuan hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan meninggalkan segala sesuatu yang dapat menghalangi kedekatan dengan-Nya. Seseorang yang ber-*hijrah* dengan ketulusan dan tekad, meskipun menghadapi berbagai kehilangan di jalan

[26]Zarrūq, *Syarah As-Sābi'a 'Asyara 'ala al-Ḥikam*, 78.

Allah, dijanjikan penggantian dari Allah. Dalam konteks ini, hijrah mencerminkan pengorbanan dan komitmen total terhadap keyakinan, di mana seseorang rela meninggalkan apa pun demi meraih rida Allah. Bahkan jika ajal menjemput di tengah proses *hijrah*, Allah telah menetapkan pahalanya sebagai ganjaran bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam mencapai tujuan mulia tersebut.

Nilai *hijrah* sangat relevan dalam mendekonstruksi prinsip dasar akuntansi karena mendorong akuntan untuk terus bertransformasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis serta regulasi yang dinamis. *Hijrah*, yang berarti meninggalkan keadaan lama untuk mencapai yang lebih baik, mengajarkan akuntan untuk tidak terjebak dalam praktik yang usang atau tidak efisien. Dengan semangat hijrah, akuntan didorong untuk melepaskan metode lama yang mungkin tidak lagi relevan dan mengadopsi teknologi serta standar akuntansi terbaru yang meningkatkan akurasi dan transparansi.

Selain itu, hijrah mengajarkan pentingnya melepaskan kebiasaan negatif seperti manipulasi data atau kurangnya integritas, sehingga memperkuat etika profesional. Proses *hijrah* ini juga mencerminkan komitmen akuntan untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas kerja, memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan selalu mencerminkan kondisi nyata perusahaan. Dengan demikian, nilai *hijrah* memperkuat akurasi, transparansi, dan etika dalam akuntansi, memastikan profesi akuntan tetap relevan dan terpercaya dalam menghadapi tantangan zaman.

I. *Ṣuḥbah* (Persahabatan)

Menurut kamus Arab Indonesia Almaany, *ṣuḥbah* didefinisikan sebagai pertemanan, persahabatan, asosiasi, atau perusahaan.[27] Dalam *Risālat al-Amīn*, al-Syāżilī menekankan nilai *ṣuḥbah* atau persahabatan dalam panduan memilih sahabat sebagai berikut:

> لا تصحب من يؤثر نفسه عليك فإنه لئيم، ولا من يـــؤثرك على نفسه فإنه لا يدوم، واصحب من إذا ذكر ذكر الله والله ينـــوب عنه إذا فقد ويغني به إذا شهد ذكره نور القلـــوب و شـــهوده مفتاح الغيوب، وليكن قصدك الله وحب الموت مع كل قـــدم، ولا تطول أملك ولا تصحب من هو بهذا الوصف، وإن صحبته فلا تعول عليه وارفضه بأول قدم وعامله بالمعروف مدة الصحبة معك.[28]
>
> Jangan bersahabat dengan orang yang lebih mengutamakan dirinya atas dirimu, karena dia adalah orang yang rendah. Dan jangan pula bersahabat dengan orang yang mengutamakan dirimu atas dirinya, karena persahabatan tersebut tidak akan bertahan lama. Bersahabatlah dengan orang yang ketika disebut, dia mengingat Allah; Allah menggantikan keberadaannya saat dia tak ada dan mencukupimu dengan kehadirannya ketika dia hadir. Sebutannya menjadi cahaya bagi hati, dan kehadirannya

[27]Almaany Team, "Terjemahan dan Arti Kata صحبة," diakses 20 September 2024, https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%A9/.

[28]al-Syādzilī, *Risālah al-Amīn fī al-Wuṣūl*, 64.

> menjadi kunci untuk membuka hal-hal yang tersembunyi. Jadikanlah tujuanmu adalah Allah dan cintailah kematian dengan setiap langkahmu. Jangan panjangkan angan-anganmu, dan jangan bersahabat dengan orang yang memiliki sifat seperti ini. Namun, jika engkau berteman dengannya, jangan bergantung padanya. Jauhilah dia di langkah pertama, dan perlakukanlah dia dengan kebaikan selama masa persahabatan kalian.

Persahabatan sejati merupakan hubungan yang tidak sekadar berdasarkan kepentingan diri atau egoisme. Persahabatan ideal adalah ikatan yang terjalin tanpa adanya keinginan untuk lebih diutamakan atau merasa lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Dalam konteks ini, seseorang yang selalu mengutamakan dirinya atas orang lain dianggap sebagai pribadi yang rendah, karena tidak menghargai nilai keadilan dalam hubungan. Sebaliknya, persahabatan dengan seseorang yang selalu mendahulukan kebutuhan sahabatnya daripada dirinya sendiri, meskipun terlihat baik, juga tidak dapat bertahan lama. Ketidakseimbangan tersebut berpotensi menimbulkan beban emosional yang merusak hubungan, karena keberlanjutan persahabatan yang harmonis memerlukan keseimbangan dalam memberi dan menerima.

Lebih dari sekadar hubungan sosial, persahabatan yang didasari nilai-nilai spiritual mampu memberi cahaya bagi hati dan membuka pintu kearifan yang tersembunyi. Sahabat sejati adalah sosok yang, ketika namanya disebut, mengingatkan kita pada nilai-nilai ketuhanan dan kebaikan. Kehadirannya membawa ketenangan dan menjadi jalan bagi pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Persahabatan ideal tidak didasari oleh kepentingan sesaat atau harapan yang panjang;

ia lahir dari niat tulus untuk saling mendukung tanpa ketergantungan yang berlebihan. Dalam persahabatan ini, setiap langkah adalah wujud pendekatan kepada Allah, menjadikan hubungan tersebut sebagai sarana mendekatkan diri kepada-Nya, sekaligus memperkaya jiwa dengan kebijaksanaan yang luhur. Dalam *Laṭā'if al-Minan*, al-Sakandarī mengemukakan pernyataan al-Mursī yang mengutip al-Syāżilī mengenai persahabatan sebagai berikut:

> وكان يدل المريدين على الانجماع في حبه، ولا يلزم المريد أن لا يرى غيره. وكان يقول عن شيخه رضى الله عنه : أصحبونى ولا أمنعكم أن تصحبوا غيري، فإن وجدتم منهلا أعذب من هـــــذا المنهل فردوا.[29]

> Ia mengajarkan para muridnya untuk berhimpun dalam cinta kepadanya serta tidak melarang muridnya untuk menjumpai ulama lain. Ia mengutip pernyataan Syekh Abū al-Ḥasan al-Syāżilī R.A.,"Bersahabatlah denganku. Aku tidak melarang kalian bersahabat dengan orang lain. Apabila kalian menemukan mata air yang lebih segar dari matya air ini, ambillah!"

Nilai persahabatan tanpa fanatik sangat ditekankan dalam ajaran para ulama. Dalam teks tersebut, seorang guru mengajarkan murid-muridnya untuk berkumpul dalam cinta dan kasih sayang, namun tidak melarang mereka menjalin hubungan dengan ulama lain. Hal tersebut

[29]al-Sakandarī, *Laṭā'if al-Minan*, 120.

menunjukkan bahwa persahabatan yang sehat didasarkan pada saling menghormati dan kebebasan individu untuk mencari ilmu serta pengalaman baru. Dengan demikian, persahabatan tidak menjadi beban atau pembatasan, melainkan menjadi sumber kekuatan dan inspirasi yang memperkaya kehidupan setiap individu. Sikap terbuka ini mendorong pertumbuhan pribadi dan intelektual tanpa adanya tekanan atau eksklusivitas yang berlebihan.

Selain itu, kutipan dari al-Syāżilī menggarisbawahi pentingnya fleksibilitas dalam persahabatan. Dengan mengatakan, "Bersahabatlah denganku. Aku tidak melarang kalian bersahabat dengan orang lain. Apabila kalian menemukan mata air yang lebih segar dari mata air tersebut, ambillah!," beliau menunjukkan bahwa persahabatan sejati harus memungkinkan perubahan dan pencarian kebaikan yang lebih baik. Sikap ini mengajarkan bahwa tidak ada kedekatan yang harus dipaksakan secara fanatik, melainkan harus berdasarkan pilihan bebas dan keinginan untuk terus berkembang. Persahabatan tanpa fanatik tersebut menciptakan hubungan yang harmonis dan saling mendukung, di mana setiap pihak merasa dihargai dan diberdayakan untuk mencapai potensi terbaik mereka. Dalam *Syarah al-Ḥikam al-'Aṭā'iyyah*, Zarrūq menyatakan paduan dalam memilih sahabat sebagai berikut:

لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله . قلت
: الذي لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله هو الـــذي لم

ينازل الحقائق ، ولا همته عن الخلائق ، بل هو الراضي عن نفسه المترفع على أبناء جنسه ، الذي يعتد بعلومه اله ويحمد نفســـه في إدباره وإقباله ، وإن كثرت أعماله وعلومه ، واتسعت أنظـــــاره وفهومه ن ينهض حاله ويدل على الله مقاله : هو الذي رفع همته عن الخلائق ، وامتلأ قلبه مشاهدة ائق ، فإذا نظرت إليه وجدته مشغولا بالله ، وإذا تكلم فإنما يدلك على الله.[30]

Janganlah bersahabat dengan orang yang tidak membangkitkanmu dengan kondisinya dan tidak membimbingmu kepada Allah dengan ucapannya. Aku berkata: Orang yang tidak membangkitkanmu dengan kondisinya dan tidak membimbingmu kepada Allah dengan ucapannya adalah orang yang tidak menegakkan kebenaran, dan ambisinya tidak mengarah kepada makhluk. Sebaliknya, dia puas dengan dirinya sendiri, sombong terhadap sesama umatnya, yang membanggakan ilmunya dan memuji dirinya dalam mengatur serta menghadapi masalah. Meskipun perbuatannya dan ilmunya banyak, serta pandangan dan pemahamannya luas, dia tetap tidak membangkitkan kondisinya dan tidak membimbingmu kepada Allah dengan ucapannya. Dia adalah orang yang telah membangkitkan ambisinya dari makhluk, dan hatinya dipenuhi dengan pengamatan iman. Jika kamu melihatnya, kamu akan menemukannya sibuk dengan Allah, dan jika dia berbicara, maka dia hanya membimbingmu kepada Allah.

Persahabatan yang baik merupakan anugerah yang mampu membimbing seseorang menuju kehidupan yang lebih bermakna dan

[30]Zarrūq, *Syarah As-Sābi'a 'Asyara 'ala al-Ḥikam*, 85.

mendekatkan diri kepada Allah. Memilih teman yang dapat membangkitkan semangat melalui perilaku dan memberikan bimbingan spiritual melalui nasihat sangatlah penting. Teman seperti tersebut tidak hanya menegakkan kebenaran, tetapi juga memiliki ambisi yang mengarah pada hal-hal mulia di luar kepentingan duniawi semata. Mereka senantiasa mendorong untuk menjadi pribadi yang lebih baik, meningkatkan keimanan, dan menjalani kehidupan yang penuh nilai. Dengan keberadaan teman yang mendukung dan membimbing, tantangan hidup dapat dihadapi dengan lebih kuat, sehingga istiqamah dalam menjalankan ajaran agama menjadi lebih terjaga.

Sebaliknya, bersahabat dengan orang yang tidak memberikan pengaruh positif dapat menghambat pertumbuhan spiritual dan moral. Teman yang sombong, puas dengan dirinya sendiri, dan lebih membanggakan ilmu atau prestasinya tanpa tujuan yang jelas tidak akan membantu memperbaiki diri. Meskipun mereka mungkin memiliki pengetahuan yang luas dan kemampuan menghadapi masalah, ketidakmampuan mereka untuk membimbing kepada Allah menjadikan persahabatan tersebut kurang bernilai. Oleh karena itu, penting untuk selektif dalam memilih teman, memastikan bahwa mereka memiliki niat yang tulus serta hati yang dipenuhi dengan iman. Dengan demikian, persahabatan yang terjalin akan menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Masih dalam *Syarah al-Ḥikam al-‘Aṭā’iyyah*, Zarrūq menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالماً يرضى عن نفسه. قلت : سواء كان شيخاً أو قريناً أو تابعاً ، لأن الذي لا يرضى عن نفسه قد جمع مناقب ثلاثاً وإن كان جاهلا ، وهى : الانصاف من نفسه ، والتواضع لعباد الله ، وطلب الحق بالصدق.[31]

Sahabat bodoh yang tidak rela terhadap nafsunya jauh lebih baik dibanding alim yang rela terhadap nafsuya. Sahabat yang dimaksud bisa seoarang guru, pendamping, atau pengikut. Sebab orang yang tidak rela terhadap nafsunya memiliki tiga keistimewaan meski ia bodoh: ia selalu bersikap adil terhadap dirinya, ia selalu bersikap rendah hati kepada hamba-haba Allah, serta terus mencari al Haq dengan jujur.

Hubungan yang dibangun berdasarkan kualitas moral seseorang lebih bernilai dibandingkan yang didasarkan pada kecerdasan. Seorang sahabat yang mungkin dianggap bodoh tetapi tidak puas dengan dirinya sendiri memiliki keunggulan moral yang tinggi. Kedisiplinan diri tersebut mencerminkan keadilan terhadap diri sendiri, memastikan bahwa ia selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan bertindak adil dalam setiap situasi. Selain itu, sifat rendah hati yang dimilikinya menciptakan hubungan yang harmonis, karena ia menghargai orang lain tanpa merasa lebih superior. Kerendahan hati ini juga memupuk rasa saling menghormati dan kerja sama yang baik dalam hubungan tersebut.

[31]Zarrūq, *Syarah As-Sābi'a 'Asyara 'ala al-Ḥikam*, 70.

Lebih lanjut, sahabat yang tidak rela terhadap nafsunya menunjukkan komitmen yang kuat dalam mencari kebenaran dengan kejujuran. Kejujuran tersebut penting dalam membangun kepercayaan, yang merupakan fondasi utama dalam setiap hubungan yang sehat. Meskipun mungkin kurang cerdas, keinginan tulus untuk mencari dan memahami kebenaran menciptakan dinamika hubungan yang jujur dan transparan. Ketiga keistimewaan tersebut, yaitu keadilan, kerendahan hati, dan kejujuran, menjadikan hubungan lebih kokoh dan bermakna dibandingkan hubungan yang hanya didasarkan pada kecerdasan atau pengetahuan semata.

Nilai persahabatan sangat relevan dalam mendekonstruksi prinsip dasar akuntansi karena mempromosikan lingkungan kerja yang etis dan suportif. Persahabatan yang sehat mendorong akuntan untuk saling menjaga integritas dan kejujuran, menghindari praktik manipulasi atau penyalahgunaan data. Dengan memiliki rekan kerja yang dapat dipercaya, akuntan merasa lebih bertanggung jawab dalam menyajikan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Selain itu, persahabatan memungkinkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman, yang meningkatkan kompetensi profesional serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan regulasi. Hubungan persahabatan yang harmonis juga mengurangi tekanan dan stres, menciptakan suasana kerja yang kondusif untuk pengambilan keputusan yang objektif. Dengan demikian, nilai persahabatan memperkuat integritas, transparansi, dan tanggung jawab dalam akuntansi, menjaga kepercayaan *stakeholder* dan kredibilitas profesi akuntan.

J. *Ijtihād* (Kesungguhan)

Menurut kamus Arab Indonesia Almaany, *ijtihād* didefinisikan sebagai bekerja, berusaha keras, atau bersusah-payah.[32] Dalam *Risālat al-Amīn*, al-Syāżilī mengungkapkan mengenai *ijtihād* atau kesungguhan sebagai berikut:

خير الاجتهاد ما قارنه التوفيق.[33]

> Sebaik-baik kesungguhan adalah yang disertai dengan petunjuk.

Kesungguhan dalam mencapai tujuan hidup adalah pondasi dari pencapaian yang bermakna. Namun, sebagaimana dinyatakan dalam kalimat di atas, kesungguhan yang ideal tidak hanya bergantung pada tekad dan kerja keras semata. Sikap tersebut juga memerlukan petunjuk yang benar agar setiap langkah yang diambil sejalan dengan tujuan hakiki. Petunjuk, atau *taufīq* dalam pengertian spiritual, merupakan bimbingan ilahi yang mengarahkan seseorang pada jalan yang benar sekaligus menjauhkan dari kesalahan. Kesungguhan yang disertai petunjuk adalah usaha yang selaras dengan nilai kebenaran dan kebaikan. Usaha tersebut mampu menghasilkan manfaat nyata yang berjangka panjang.

---

[32]Team, "Terjemahan dan Arti Kata اجتهاد ," diakses 21 September 2024, https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF/.

[33]al-Syādzilī, *Risālah al-Amīn fī al-Wuṣūl*, 95.

Dalam proses ini, manusia diingatkan untuk terus mencari petunjuk dari Tuhan agar terhindar dari usaha yang sia-sia atau ambisi yang keliru. Dengan demikian, kesungguhan yang didukung oleh petunjuk ilahi akan lebih mantap, membawa kebahagiaan, dan memberikan dampak positif, baik bagi individu maupun lingkungan sekitarnya. Dalam *Syarah al-Ḥikam al-'Aṭā'iyyah,* Zarrūq menjelaskan makna kesungguhan sebagai berikut:

> اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليـــل على انطماس البصيرة منك. قلت : لأنك أتيت بالشـــيء على غـــير وجهه ووضعته في غير محلـــه ؛ إذ عكســـت ماحقـــك أن لا تعكسه ، فتركت ما أمرت بالقيام به وقمت بما كفيت أمره وهو المضمون.[34]

> Usahamu pada sesuatu yang sudah dijamin bagimu dan kelalaianmu pada sesuatu yang dituntut darimu adalah bukti kebutaan hati dari dirimu. Aku berkata: sebab engkau mendatangkan sesuatu tidak pada tempatnya dan meletakkannya tidak pada posisinya; karena engkau telah membalikkan apa yang seharusnya tidak dibalik, sehingga engkau meninggalkan apa yang diperintahkan untuk dijalankan dan malah mengerjakan apa yang telah dijamin bagimu.

Nilai kesungguhan dalam menjalankan tugas merupakan fondasi penting dalam mencapai tujuan hidup yang bermakna. Sebagaimana

[34]Zarrūq, *Syarah As-Sābi'a 'Asyara 'ala al-Ḥikam*, 29.

diuraikan dalam pernyataan tersebut, kesungguhan yang benar terletak pada fokus individu untuk menyelesaikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya, bukan pada aspek yang telah dijamin keberadaannya. Mengalihkan perhatian pada hal-hal yang sudah pasti, seperti rezeki atau nasib, yang telah dijamin oleh Tuhan, mencerminkan kurangnya pemahaman serta ketajaman hati.

Sebaliknya, mengabaikan tanggung jawab pribadi hanya akan menyebabkan ketidakseimbangan dan kekacauan hidup. Oleh sebab itu, kesungguhan sejati terlihat ketika seseorang mampu memilah dan fokus pada tugas yang harus dijalankan, bukannya terjebak pada hal-hal di luar kendalinya. Seseorang yang memahami nilai kesungguhan akan menempatkan usahanya secara tepat dan bijak, berusaha optimal dalam menjalankan tanggung jawab, tanpa mempersoalkan hal-hal yang telah dijamin. Sikap ini mencerminkan kedalaman hati sekaligus menunjukkan kematangan dalam menyikapi hidup.

Nilai kesungguhan juga sangat relevan dalam mendekonstruksi prinsip dasar akuntansi. Kesungguhan mendorong akuntan untuk berkomitmen penuh terhadap tugasnya dengan tekun dan fokus. Sikap ini mengajarkan pentingnya usaha yang disertai petunjuk yang benar serta konsentrasi pada tanggung jawab yang ditetapkan. Dalam profesi akuntansi, nilai ini memastikan bahwa akuntan tidak hanya bekerja keras, tetapi juga memastikan setiap langkahnya sesuai dengan standar etika dan regulasi yang berlaku. Dengan kesungguhan, akuntan menghindari pengalihan perhatian pada hal-hal yang sudah pasti atau di luar kendali, seperti asumsi yang tidak berdasar. Akuntan yang

bersungguh-sungguh tetap fokus pada pencatatan yang akurat serta pelaporan yang transparan. Selain itu, kesungguhan mendorong peningkatan kompetensi dan adaptasi terhadap perubahan regulasi dan teknologi, sehingga relevansi serta efektivitas profesi akuntansi tetap terjaga. Dengan demikian, nilai kesungguhan memperkuat integritas, akurasi, dan tanggung jawab dalam praktik akuntansi, memastikan laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh semua *stakeholder*.

K. *Murāqabah* (Pengawasan Terus-menerus)

Menurut kamus Arab Indonesia Almaany, definisi dari *murāqabah* adalah kontrol, pengawasan, inspeksi, peninjauan, atau pengamatan.[35] Dalam *Risālat al-Amīn,* al-Syāżilī menerangkan *murāqabah* atau pengawasan sebagai berikut:

قال له: عليك أيها السالك بطريق الآخرة بتحصيل ما أمرت به في ظاهرك فإذا فعلت ذلك فاجلس على بساط المراقبة وخذ بتخليص باطنك حتى لا يبقى فيه شيء مما عنه نهاك، وأعطي الجد حقه، وأقلل النظر إلى ظاهرك إن أردت فتح باطنك الأسرار ملكوت ربك فما ورد عليك من خطرات قصدك عن مرادك فاعلم أولاً قرب ربك منك علما تباشر قلبك بتكرار النظر في

[35]Team, "Terjemahan dan Arti Kata المراقبة," diakses 21 September 2024, https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9/.

جلب منافعك ودفع مضارك وانظر هـــل من خـــالق غـــير الله يرزقكم من الســـماء والأرض؟ وإن من الأرض نفســـك ومن السماء قلبك، فإذا نزل من السماء إلى الأرض شيء من ذا الذي يصرفه عنك غير الله : (يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ [الحديد: ٤] فأعط المعية حقها بلزوم العبودية له.[36]

Dia berkata kepadanya: "Wahai pencari jalan menuju akhirat, wajib bagimu untuk mengamalkan apa yang telah diperintahkan secara lahiriah. Setelah engkau melakukannya, duduklah di atas 'hamparan' pengawasan dan berusahalah membersihkan batinmu sehingga tidak ada yang tersisa dari apa pun yang dilarang-Nya di dalamnya. Berikan kesungguhan haknya, dan kurangi perhatianmu terhadap lahiriah jika engkau menginginkan terbukanya rahasia-rahasia batin dan kerajaan Tuhanmu. Maka, apa pun lintasan pikiran yang mendatangimu dan menjauhkanmu dari tujuanmu, ketahuilah terlebih dahulu kedekatan Tuhanmu denganmu. Ketahuilah dalam hati bahwa Dia selalu mengarahkan pandangan untuk mendatangkan manfaat bagimu dan menghindarkanmu dari bahaya. Pikirkanlah, apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan rezeki bagimu dari langit dan bumi? Bumi di sini adalah nafsumu, dan langit adalah hatimu. Jika sesuatu turun dari langit ke bumi, siapakah yang dapat mencegahnya darimu selain Allah? 'Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, serta apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kalian di mana pun kalian

[36]al-Syādzilī, *Risālah al-Amīn fī al-Wuṣūl*, 22–23.

berada' (Q.S. al-Hadīd: 4). Maka, berikan hak pertemuan ini dengan tetap berpegang pada penghambaan kepada-Nya."

Pengawasan dalam konteks spiritual memiliki nilai yang mendalam, sebagaimana dijelaskan dalam teks tersebut. Pengawasan tidak hanya sekadar memantau tindakan lahiriah, tetapi juga mencakup pemeliharaan batin. Seorang pencari kebenaran dianjurkan untuk menjalankan kewajiban lahiriah terlebih dahulu, kemudian beralih ke pengawasan batin dengan membersihkan segala hal yang tidak diridai. Nilai pengawasan di sini melibatkan kesungguhan dalam menyelaraskan antara yang lahir dan batin, agar setiap tindakan tidak hanya tampak benar di luar, tetapi juga murni di dalam. Dengan pemahaman bahwa Tuhan senantiasa dekat, seseorang diarahkan untuk menyadari bahwa setiap manfaat dan bahaya bergantung pada kehendak-Nya. Q.S. al-Hadīd ayat 4 menegaskan bahwa Tuhan mengetahui setiap peristiwa di langit dan bumi, sehingga pengawasan diri hendaknya disertai dengan rasa penghambaan kepada-Nya yang terus-menerus. Dalam *Syarah al-Ḥikam al-'Aṭā'iyyah*, Syekh Zarrūq menjelaskan pengawasan sebagai berikut:

لا تترقب فروع الأخيار فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه . قلت : لاننتظر بعملك فراغاً من الأغيـــار والأفكار فإن ذلك التوقف قاطع لك عن عبودية الوقت وحكمه ، ولكن قم له ما تقدر عليه كما أنت من غير التفات إلى فراغ

ولا غيره، فقد قيل : سيروا إلى الله عُرجاً ومكاسير ولا تنتظروا الصحة ؛ فإن انتظار الصحة بطالة.[37]

> Jangan menunggu kondisi orang-orang saleh, karena itu hanya akan memutuskanmu dari pengawasan kepada-Nya dalam keadaan yang telah Dia tetapkan untukmu." Aku berkata: jangan menunggu hingga engkau benar-benar bebas dari gangguan dan pikiran yang mengalihkan, sebab penantian seperti itu akan memutusmu dari penghambaan pada waktu yang tengah engkau jalani dan ketetapan yang berlaku. Lakukanlah segala yang mampu engkau lakukan untuk-Nya sesuai dengan kondisimu saat ini, tanpa menanti keadaan yang lebih bebas atau sempurna. Telah dikatakan: "Berjalanlah menuju Allah, meski dengan keadaan pincang atau terluka, dan jangan menunggu hingga sehat sempurna; sebab menunggu kesempurnaan hanya akan menjadi bentuk kemalasan.

Nilai pengawasan atau *murāqabah* mengandung kesadaran mendalam bahwa Allah selalu mengawasi seseorang setiap saat, di mana pun dan dalam kondisi apa pun. Pengawasan ini mengajarkan agar seseorang tidak menunda ibadah atau amal hanya karena menunggu kondisi yang lebih baik atau bebas dari gangguan pikiran. Menunda dengan alasan menunggu suasana yang sempurna justru akan memutus rasa kehadiran Allah dalam hidupnya, yang seharusnya justru diperkuat. Dengan terus merasa diawasi, seseorang tergerak untuk tetap berbuat kebaikan meski dihadapkan pada tantangan, gangguan, atau kekurangan.

[37]Zarrūq, *Syarah As-Sābi'a 'Asyara 'ala al-Ḥikam*, 57.

Seperti ungkapan, "Berjalanlah menuju Allah meski pincang atau terluka, dan jangan menunggu kesempurnaan," nilai *murāqabah* mengajarkan bahwa berusaha di segala situasi merupakan bentuk penghambaan sejati. Kesadaran ini membuat seseorang tidak bergantung pada kondisi luar, tetapi selalu berpegang pada keyakinan bahwa Allah senantiasa hadir, sehingga setiap amal dilakukan dalam pengawasan penuh dari-Nya.

Nilai pengawasan atau *murāqabah* juga sangat relevan dalam mendekonstruksi prinsip dasar akuntansi karena menekankan pentingnya integritas dan kesadaran diri yang terus-menerus. *Murāqabah* mendorong akuntan untuk selalu mengawasi tindakan mereka, memastikan bahwa setiap pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan dengan jujur dan akurat tanpa menunggu kondisi yang sempurna. Dengan menyadari bahwa setiap tindakan diawasi, akuntan termotivasi untuk proaktif dalam mencegah kesalahan dan manipulasi data. Selain itu, nilai ini mengajarkan pentingnya menyelaraskan antara tindakan eksternal dan kebersihan batin, sehingga laporan keuangan tidak hanya benar secara teknis, tetapi juga etis. Pengawasan diri ini memastikan bahwa praktik akuntansi tetap transparan, terpercaya, dan responsif terhadap perubahan, menjaga kredibilitas profesi serta kepercayaan *stakeholder*.

L. *Lā Taqif* (Tidak Pernah Berhenti Mencari Kebenaran)

Menurut kamus Arab Indonesia Almaany, *lā taqif* diartikan jangan diam atau jangan berhenti.[38] Nilai *lā taqif* atau tidak pernah berhenti dalam mencari kebenaran berasal dari *Syarah al-Ḥikam al-'Aṭā'iyyah* karya Zarrūq sebagai berikut:

> ما أرادت همه سالك أن تقف عندما ما كشف لها إلا ونادته هواتف الحقيقة : الذي تطلبه أمامك. قلت : يقول متى أراد المريد أن يقف همته عندما كشف له من العلوم والمعارف ونحوها تو دى من بساط الحقيقة بلسان حال ما كشف له : الذي تطلبه من معرفة الحق أمامك ، ولا يزال أمامك أبداً فجد في الطلب ولا تعود نفسك الكسل ؛ لأن ما كشف لك إن كان من علوم الأفعال ومعانى النسب الظاهرة فيها فقد فاتك موقف الأسماء والتحقق بمعانيها على ما يليق بك وما يبدو لك منها ، وإن كان ما كشف لك من معانى الصفات وحقائقها فقد فاتك كشف عظمة الذات وجلالتها ، ثم كذلك في كل مرتبة إلى مالانهاية له ، لأن المعروف لايتناهى ، فالمعرفة به لا تتناهى في دار الآخرة الابدية فضلا عن الدار الدنيوية.[39]

---

[38]Almaany Team, "Terjemahan dan Arti Kata لا تقف dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman," diakses 21 September 2024, https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%81/.

[39]Zarrūq, *Syarah As-Sābi'a 'Asyara 'ala al-Ḥikam*, 54–55.

> Setiap kali seorang pencari kebenaran ingin berhenti pada sesuatu yang telah tersingkap baginya, suara-suara kebenaran memanggilnya: "Apa yang engkau cari masih ada di depanmu." Artinya, ketika seorang murid berniat menghentikan usahanya pada pengetahuan atau pemahaman yang telah diperolehnya, ia seakan diingatkan oleh apa yang telah tersingkap itu: "Yang engkau cari, yaitu mengenal Kebenaran sejati, masih ada di depanmu dan akan selalu di depanmu, maka teruslah berusaha dan jangan biarkan dirimu malas." Sebab, jika yang tersingkap itu hanya ilmu perbuatan atau pemahaman lahiriah, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk memahami Nama-Nama Allah yang lebih mendalam dan sesuai baginya. Jika yang tersingkap adalah makna sifat-sifat Tuhan, maka ia kehilangan kesempatan menyaksikan keagungan Zat-Nya. Demikianlah pada setiap tingkatan hingga tak terbatas, karena pengetahuan tentang-Nya tidak akan berakhir, dan tiada batas akhir bagi sesuatu yang diketahui tentang-Nya, baik di akhirat yang kekal maupun di dunia yang sementara.

Zarrūq mengartikan frase tersebut sebagai larangan bagi pencari kebenaran untuk merasa puas atau berhenti pada capaian pengetahuan tertentu. Pesan ini menegaskan ketekunan dalam perjalanan spiritual, di mana seorang murid dituntut untuk terus melangkah maju tanpa terikat pada karomah atau penyingkapan yang telah dialaminya. Kebenaran hakiki selalu berada di depan, dan perjalanan menuju makrifat atau pengetahuan Ilahi tidak memiliki batas akhir. Berhenti di tengah jalan justru menjadi penghalang yang menutup pintu menuju tujuan puncak. Karena itu, *lā taqif* berisi anjuran untuk terus mencari, tanpa henti, karena setiap capaian hanyalah bagian dari perjalanan yang lebih luas.

Dalam perjalanan ini, seorang pencari diingatkan bahwa penyingkapan yang diterima bukanlah titik akhir, melainkan langkah menuju pemahaman yang lebih dalam. Jika hanya bertumpu pada ilmu perbuatan atau aspek lahiriah, maka ia akan kehilangan peluang untuk menggali makna Nama-Nama Allah yang lebih mendalam. Ketika yang tersingkap hanya makna sifat-sifat Tuhan, kesempatan untuk menyaksikan keagungan Zat-Nya pun belum teraih. Setiap tingkatan adalah bagian dari proses yang harus dilampaui, karena pengetahuan tentang Tuhan tidak memiliki akhir. Pemahaman tentang-Nya bersifat tanpa batas, baik di dunia yang fana maupun di akhirat yang kekal. Oleh karena itu, perjalanan menuju makrifat terus berlanjut tanpa batas waktu atau akhir.

Nilai tidak pernah berhenti mencari kebenaran sangat relevan dalam mendekonstruksi prinsip dasar akuntansi karena mendorong akuntan untuk selalu menguji dan meningkatkan praktik mereka. Dengan semangat pencarian kebenaran yang tiada henti, akuntan tidak hanya mengikuti standar yang ada tetapi juga mencari metode inovatif untuk meningkatkan kualitas informasi finansial. Hal ini membantu mengidentifikasi dan mencegah potensi kesalahan atau manipulasi lebih awal, memastikan bahwa data yang disajikan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Selain itu, nilai ini mendorong akuntan untuk terus mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi, menjaga relevansi dan efektivitas praktik akuntansi. Dengan demikian, nilai ini memperkuat integritas dan keandalan akuntansi, memastikan bahwa

profesi akuntan tetap kredibel dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis.

BAB V
DEKONSTRUKSI PRINSIP DASAR AKUNTANSI DENGAN MENGGUNAKAN NILAI-NILAI TASAWUF

A. Identifikasi Prinsip Dasar Akuntansi

Prinsip dasar akuntansi merupakan fondasi penting dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat, objektif, dan konsisten. Identifikasi prinsip-prinsip ini tidak hanya memperkuat kualitas laporan, tetapi juga memudahkan proses dekonstruksi untuk analisis yang lebih mendalam. Adapun prinsip-prinsip dasar akuntansi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Entitas Ekonomi

Menurut Suwardjono, prinsip ini menetapkan bahwa perusahaan dianggap sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. Dengan kata lain, transaksi perusahaan dicatat secara terpisah dari keuangan pribadi pemilik untuk menjaga akurasi dan transparansi dalam laporan keuangan.[1] Prinsip pemisahan antara urusan pribadi pemilik dan bisnis bertujuan untuk menjaga kejelasan dalam pelaporan keuangan. Namun, dalam praktik UMKM, prinsip tersebut sering diabaikan. Pemilik kerap mencampurkan aset pribadi dengan aset bisnis, seperti menggunakan uang bisnis untuk kebutuhan keluarga tanpa pencatatan yang jelas. Hal tersebut menyebabkan laporan keuangan menjadi

[1]Salampessy dan Juneferstina, "Menyelami Konsep Kesatuan Usaha Dalam Teori-Teori Akuntansi," 220.

kacau, sehingga sulit untuk menilai kinerja bisnis dengan akurat.

Selain itu, ketika bisnis menghadapi masalah likuiditas, pencampuran tersebut memperumit pemisahan antara keuangan pribadi dan bisnis, yang pada akhirnya memperburuk situasi keuangan perusahaan. Kegagalan tersebut mengungkap kelemahan prinsip entitas, yang memisahkan hak dan tanggung jawab antara pemilik dan perusahaan. Canfield menyoroti bahwa prinsip tersebut sering menyebabkan ketidakadilan, karena tanggung jawab hukum dibebankan pada perusahaan, sementara keputusan diambil oleh individu.[2] Zulfikar dkk. juga menyatakan bahwa prinsip tersebut kurang cocok di Indonesia, di mana hubungan antara pemilik dan manajemen seharusnya lebih harmonis.[3] Setiabudi dan Triyuwono menambahkan bahwa prinsip entitas sering digunakan untuk menyembunyikan masalah etika dalam kapitalisme. Pemilik berada di luar perusahaan dan tidak menanggung tanggung jawab etis, sementara manajemen hanya fokus menghasilkan laba bagi pemilik.

Oleh karena itu, meskipun secara ekonomi keputusan tersebut tampak rasional, sering kali aspek etika bisnis diabaikan.[4] Secara

---

[2]George F. Canfield, "The Scope and Limits of the Corporate Entity Theory," *Columbia Law Review* 17, no. 2 (1917): 128–29, doi:10.2307/1111674.

[3]Zulfikar dkk., "The Social Interpretation of Accounting Entity in the Perspective of the Semar's Philosophy," *International Journal of Business, Economics and Law* 12, no. 1 (2017): 34–35, https://ijbel.com/wp-content/uploads/2017/05/ACC-47.pdf.

[4]Zulkarim Salampessy dan Maria Juneferstina, "Menyelami Konsep Kesatuan Usaha dalam Teori-Teori Akuntansi," Jurnal Administrasi Terapan 2, no. 1 (31 Maret 2023): 222, doi:10.31959/jat.v2i1.1789.

keseluruhan, prinsip entitas menunjukkan kelemahan yang mendalam ketika diterapkan pada UMKM dan konteks bisnis di Indonesia. Meskipun prinsip ini bertujuan untuk menjaga kejelasan pelaporan keuangan, penerapannya sering kali tidak realistis, terutama ketika pencampuran aset pribadi dan bisnis terjadi. Hal ini mengarah pada ketidakakuratan laporan keuangan dan kesulitan dalam penilaian kinerja bisnis.

Selain itu, prinsip ini menciptakan ketidakadilan struktural, di mana tanggung jawab hukum dibebankan pada perusahaan, sementara pengambilan keputusan tetap berada di tangan pemilik, menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan. Dalam konteks budaya Indonesia yang lebih kolaboratif, prinsip ini juga cenderung kaku dan membatasi fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, merusak hubungan harmonis antara pemilik dan manajemen. Lebih penting lagi, prinsip entitas mengabaikan aspek etika, karena pemilik tidak menanggung tanggung jawab etis, sementara manajemen hanya fokus pada laba tanpa memperhitungkan dampak sosial atau lingkungan. Dengan demikian, meskipun prinsip ini memiliki landasan yang baik dalam teori, penerapannya dapat merugikan baik dari segi keadilan, efisiensi, maupun etika dalam pengelolaan bisnis.

2. Prinsip Unit Moneter

Semua transaksi dicatat dalam satuan uang, dengan asumsi bahwa nilai satuan uang bersifat stabil. Prinsip ini memudahkan pencatatan dan analisis keuangan, meskipun terdapat keterbatasan,

seperti dampak inflasi yang dapat memengaruhi stabilitas nilai uang.[5] Prinsip bahwa uang dianggap sebagai unit yang stabil sering kali tidak mencerminkan kenyataan karena inflasi memengaruhi nilai uang. Ketika inflasi terjadi, daya beli uang menurun, sehingga laporan keuangan yang menggunakan angka nominal tanpa penyesuaian inflasi tidak menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Sebagai contoh, pendapatan Rp100.000.000 di tahun 2024 mungkin terlihat sama di tahun 2025, tetapi dengan inflasi 10%, daya beli jumlah tersebut berkurang.

Hal ini menyebabkan angka nominal dalam laporan keuangan tidak mencerminkan nilai riil dan dapat mengaburkan informasi penting bagi pengambilan keputusan. Menurut Kramarova, menjaga stabilitas unit moneter semakin sulit dalam ekonomi global yang tertekan inflasi. Ketika inflasi tidak terkendali, seperti di negara dengan hiperinflasi seperti Venezuela dan Sudan, nilai mata uang bisa turun drastis dalam waktu singkat, membuat laporan keuangan tidak relevan. Hal ini semakin diperburuk oleh ketidakseimbangan ekonomi global pascakrisis COVID-19, yang menyebabkan lonjakan harga yang cepat. Tanpa penyesuaian inflasi, laporan keuangan kehilangan relevansi dan akurasi dalam menggambarkan kondisi keuangan perusahaan.[6]

[5]Oday Tamimi dan Ildikó Orbán, "Hyperinflation and Its Impact on the Financial Results," *Intellectual Economics* 14, no. 2 (2020): 13–14, doi:10.13165/IE-20-14-2-01.

[6]Kramarova Katarina, "The Global Problem of Inflation and Need for Inflation Adjusted-Financial Reporting," *SHS Web of Conferences*, 2021, 2–3, doi:https://doi.org/10.1051/shsconf/202112909010.

Kesimpulannya, prinsip unit moneter, yang menganggap uang sebagai unit stabil, gagal mencerminkan realitas ekonomi yang dinamis. Inflasi mempengaruhi nilai uang secara signifikan, sehingga laporan keuangan yang hanya menggunakan angka nominal tanpa penyesuaian inflasi tidak lagi akurat. Dalam situasi hiperinflasi, nilai uang dapat terdevaluasi cepat, mengaburkan gambaran keuangan perusahaan dan menyulitkan pengambilan keputusan. Ditambah ketidakstabilan ekonomi global pascakrisis COVID-19, prinsip ini semakin tidak relevan. Tanpa penyesuaian inflasi, laporan keuangan kehilangan relevansi dan dapat menyesatkan pemangku kepentingan, memperburuk ketidakpastian dan kesalahan analisis keuangan.

3. Prinsip Periode Waktu

Laporan keuangan disusun untuk periode tertentu (seperti tahunan atau kuartalan), sehingga memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan secara akurat. Hal tersebut juga meningkatkan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi melalui dokumentasi kegiatan yang sistematis dan terstruktur.[7] Prinsip pelaporan keuangan berdasarkan periode tertentu, seperti tahunan atau triwulanan, bisa mengabaikan tren jangka panjang atau peristiwa penting di luar periode tersebut. Misalnya, perusahaan dengan investasi jangka panjang yang belum

[7]Haeruddin Haeruddin dan Lina Mariana, "Analisis Sistem Akuntansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (bum Desa) (studi Kasus: Bum Desa Di Kec. Galesong Utara Kabupaten Takalar)," *AkMen JURNAL ILMIAH* 18, no. 1 (1 April 2021): 40, doi:10.37476/akmen.v18i1.1351.

menguntungkan bisa terlihat kurang menguntungkan jika hanya dilihat dari laporan tahunan. Pembatasan waktu ini memberikan gambaran singkat yang tidak selalu mencerminkan kinerja berkelanjutan, sehingga pengguna laporan keuangan kehilangan konteks untuk memahami potensi pertumbuhan atau kerugian.

Prinsip pelaporan berdasarkan periode waktu juga mendorong praktik *window dressing*, di mana manajer reksa dana atau portofolio menjual aset buruk dan membeli aset dengan potensi keuntungan jangka pendek untuk memperbaiki penampilan laporan keuangan. Praktik ini bertujuan membuat laporan lebih menarik bagi pemegang saham dan investor, meskipun tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya.[8] Kesimpulannya, kelemahan prinsip pelaporan keuangan berdasarkan periode waktu tertentu terletak pada pembatasan pandangan terhadap kinerja jangka panjang perusahaan.

Pembatasan tersebut hanya memberikan gambaran sesaat yang sering kali tidak mencerminkan kondisi keuangan secara menyeluruh, mengabaikan potensi pertumbuhan atau kerugian di luar periode tersebut. Selain itu, prinsip ini membuka peluang bagi praktik window dressing, di mana manajer dapat mempercantik laporan keuangan dengan strategi manipulatif untuk meningkatkan penampilan sementara. Akibatnya, laporan keuangan berbasis periode waktu tertentu dapat menyesatkan pengguna, terutama investor dan

[8]Odogu Laime Isaac, Okpobo Timinipre Joseph, dan Obalakumo Anderson Pereowei, "Effect of Window Dressing Accounting and Quality of Corporate Reporting of Quoted Banks In Nigeria," *International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)* 7, no. 2 (2023): 383.

pemegang saham, yang mungkin kehilangan konteks penting mengenai keberlanjutan dan realitas keuangan perusahaan.

4. Prinsip Biaya (Biaya Historis)

Aset dicatat berdasarkan biaya perolehannya tanpa memperhatikan perubahan nilai pasar. Tujuan dari prinsip tersebut adalah untuk menjaga objektivitas dengan menggunakan angka yang dapat diverifikasi.[9] Meskipun mencatat aset berdasarkan harga perolehan memberikan kepastian dan kemudahan verifikasi, pendekatan ini sering mengabaikan perubahan nilai pasar yang lebih relevan. Sebagai contoh, sebuah gedung yang dibeli seharga 1 miliar rupiah pada tahun 2000 akan tetap dicatat pada harga tersebut, meskipun nilai pasarnya pada tahun 2024 mungkin sudah meningkat menjadi 5 miliar rupiah. Kesenjangan ini menciptakan perbedaan antara nilai tercatat dan nilai pasar aktual, yang dapat memengaruhi penilaian pemangku kepentingan, seperti investor dan kreditor, terhadap solvabilitas dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.

Menurut Tkachuk, kelemahan utama dari *historical cost* adalah nilainya yang menjadi tidak relevan seiring waktu. Karena didasarkan pada harga pembelian awal, nilai tersebut tidak mencerminkan nilai pasar saat ini. Selain itu, ada subjektivitas dalam pembentukan biaya historis, terutama terkait biaya tambahan seperti pengiriman atau

[9]Any Eliza dan Rahmat Fajar Ramdani, "Perbandingan Historical Cost Dan Current Cost Sebagai Dasar Penilaian Zakat Perbankan Syariah," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 8, no. 1, April (25 April 2020): 56, doi:10.35836/jakis.v8i1.126.

pemasangan yang bervariasi sesuai kebijakan perusahaan. Penggunaan *historical cost* juga tidak menggambarkan nilai *real-time* perusahaan, karena aset yang dibeli pada waktu berbeda dijumlahkan tanpa memperhitungkan perubahan nilai pasar. Akibatnya, laporan keuangan berbasis *historical cost* menjadi kurang dapat diandalkan untuk analisis atau penilaian kondisi keuangan perusahaan saat ini.[10]

Kesimpulannya, meskipun biaya historis memberikan kemudahan dalam verifikasi dan kepastian, pendekatan ini memiliki kelemahan mendalam dalam mencerminkan nilai pasar yang relevan. Pencatatan aset berdasarkan harga perolehan yang tetap, tanpa memperhitungkan perubahan nilai pasar, menyebabkan kesenjangan antara nilai tercatat dalam laporan keuangan dan nilai wajar aset di pasar. Hal ini mengurangi akurasi informasi yang diterima oleh pemangku kepentingan, seperti investor dan kreditor, yang memerlukan gambaran yang lebih realistis tentang solvabilitas dan kinerja perusahaan. Selain itu, subjektivitas dalam penentuan biaya historis, terutama terkait biaya tambahan yang dapat bervariasi, semakin memperburuk keterbatasan pendekatan ini. Dengan demikian, meskipun biaya historis memberikan kestabilan dalam pelaporan, ia tidak dapat diandalkan untuk memberikan gambaran yang tepat dan relevan tentang kondisi keuangan perusahaan saat ini.

[10]Natalia V. Tkachuk, "Historical Cost and Fair Value: Advantages, Disadvantages, Application," *Journal of History Culture and Art Research* 8, no. 1 (1 April 2019): 176–77, doi:10.7596/taksad.v8i1.2052.

5. Prinsip Pengungkapan Paripurna

Aset dicatat berdasarkan biaya perolehannya tanpa memperhatikan perubahan nilai pasar. Tujuan dari prinsip tersebut adalah untuk menjaga objektivitas dengan menggunakan angka yang dapat diverifikasi.[11] Salah satu kelemahan utama pengungkapan paripurna adalah interpretasi subjektifnya. Informasi yang diungkapkan cenderung terbatas pada hal-hal yang dianggap material atau relevan bagi pemilik modal, seperti investor dan kreditor, sementara isu-isu sosial dan lingkungan sering diabaikan. Padahal, isu-isu tersebut dapat berdampak signifikan pada reputasi dan keberlanjutan perusahaan di masa depan. Akibatnya, pengungkapan paripurna yang seharusnya memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi perusahaan menjadi bias, hanya fokus pada aspek finansial, dan mengabaikan aspek nonfinansial yang penting bagi pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Susanto dan Meiryani, interpretasi subjektif prinsip pengungkapan paripurna menyebabkan perusahaan hanya mengungkapkan informasi yang dianggap material, tanpa mempertimbangkan kebutuhan informasi berbagai pihak. Informasi terkait tanggung jawab sosial dan dampak lingkungan, yang penting bagi karyawan, pelanggan, dan masyarakat, sering dianggap sekunder. Hal ini menciptakan kesenjangan informasi, sehingga pengguna

[11]Zesmi Kusmila dan Adek IrmaRosi, "Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementrian Agama Kabupaten Kerinci: Zesmi Kusmila, Adek Irma Rosi," *Jurnal Administrasi Nusantara* 6, no. 2 (29 Desember 2023): 104.

laporan keuangan tidak mendapatkan gambaran lengkap tentang risiko dan potensi jangka panjang perusahaan. Akibatnya, pengungkapan paripurna gagal memberikan informasi yang transparan dan holistik.[12]

Kesimpulannya, meskipun prinsip pengungkapan paripurna bertujuan menyediakan informasi transparan dan menyeluruh, ia memiliki kelemahan konseptual yang signifikan. Interpretasi subjektif membuat pengungkapan terbatas pada informasi yang dianggap material bagi pemilik modal, sementara isu sosial dan lingkungan sering diabaikan. Hal ini menciptakan kesenjangan informasi yang merugikan pemangku kepentingan nonfinansial, seperti karyawan, pelanggan, dan masyarakat, yang peduli terhadap keberlanjutan perusahaan. Akibatnya, pengungkapan paripurna gagal memberikan gambaran holistik, dengan fokus berlebihan pada aspek finansial yang mengaburkan risiko jangka panjang dan potensi nonfinansial perusahaan. Dengan memprioritaskan kepentingan investor dan kreditor, prinsip ini mengesampingkan kebutuhan informasi yang lebih luas, sehingga mengurangi efektivitasnya dalam mendukung pengambilan keputusan yang berkelanjutan.

6. Prinsip Kesinambungan Usaha

Prinsip tersebut mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus beroperasi dalam jangka panjang, sehingga aset dicatat berdasarkan harga perolehan, tanpa terpengaruh fluktuasi nilai pasar jangka

[12]Azhar Susanto Meiryani, "Full Disclosure in Financial Reporting," *International Journal of Scientific & Technology Research*, 25 Juni 2019, 340–42, https://www.semanticscholar.org/paper/Full-Disclosure-in-Financial-Reporting-Meiryani/c0f430cbdf8ae56ebc94761fa545ec6d8467d038.

pendek.[13] Prinsip *going concern* mengasumsikan perusahaan akan terus beroperasi dalam jangka panjang, namun asumsi ini tidak selalu realistis, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Ketika perusahaan menunjukkan tanda-tanda kebangkrutan, laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip ini bisa menyesatkan. Nilai aset seharusnya disesuaikan dengan nilai likuidasi, bukan nilai perolehan, untuk mencerminkan situasi keuangan yang sebenarnya. Jika tidak, laporan keuangan bisa menyembunyikan risiko kebangkrutan dan memberikan informasi yang tidak akurat kepada pemangku kepentingan, seperti investor dan kreditor.

Menurut Zdolšek dkk., auditor sering kali mengabaikan tanda-tanda keraguan terkait *going concern* karena khawatir akan dampak negatif terhadap perusahaan yang diaudit.[14] Hal tersebut sejalan dengan pandangan Chasan, yang menyatakan bahwa auditor terkadang memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan perusahaan yang akhirnya bangkrut beberapa bulan kemudian.[15] Kegagalan auditor dalam menilai kelangsungan usaha tersebut menimbulkan risiko bagi pengguna laporan keuangan yang

[13]Tries Handriman Jamain Universitas Sahid, "Opini Audit Going Concern:Faktor-Faktor Penyebabnya," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing* 7, no. 2 (31 Juli 2020): 44.

[14]Daniel Zdolšek, Timotej Jagrič, dan Iztok Kolar, "Auditor's Going-Concern Opinion Prediction: The Case of Slovenia," *Economic Research-Ekonomska Istraživanja* 35, no. 1 (31 Desember 2022): 112, doi:10.1080/1331677X.2021.1888766.

[15]Mahir Proho, "Going Concern Assessment: A Literature Review," *Journal of Forensic Accounting Profession* 3 (26 Januari 2024): 52, doi:10.2478/jfap-2023-0009.

mungkin salah memahami kondisi keuangan perusahaan.

Kesimpulannya, prinsip *going concern* memiliki kelemahan konseptual karena mengasumsikan keberlanjutan perusahaan tanpa mempertimbangkan kondisi yang dinamis dan tidak menentu. Dalam situasi perusahaan yang mendekati kebangkrutan, penerapan prinsip ini dapat menyesatkan karena nilai aset tidak disesuaikan dengan nilai likuidasi yang lebih mencerminkan kenyataan. Akibatnya, laporan keuangan menjadi kurang relevan dan berisiko menyembunyikan potensi kerugian dari pemangku kepentingan, seperti investor dan kreditor. Kelemahan ini semakin diperburuk oleh kecenderungan auditor untuk mengabaikan tanda-tanda keraguan terhadap kelangsungan usaha, baik karena tekanan profesional maupun untuk melindungi reputasi perusahaan. Ketika auditor tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada perusahaan yang sebenarnya tidak mampu bertahan, kepercayaan terhadap laporan keuangan dan mekanisme pengawasan pun tergerus. Oleh karena itu, meskipun prinsip *going concern* penting secara teoretis, penerapannya harus lebih hati-hati agar tidak menjadi sumber disinformasi yang merugikan.

7. Prinsip Mempertemukan (*Matching Principle*)

Menurut Suwardjono, prinsip *matching* mengakui biaya dan pendapatan dalam periode yang sama untuk mencerminkan kinerja perusahaan secara akurat.[16] Penerapan prinsip *matching* pada basis

[16]Cikita Rizki Pradana dan Tjandra Wasesa, "Perbandingan Penerapan Pengakuan Pendapatan Metode Persentase Penyelesaian Fisik Dan Cost to Cost

akrual memungkinkan perusahaan mencatat pendapatan dan biaya pada periode yang sama. Namun, tantangan muncul ketika biaya tidak dapat langsung dihubungkan dengan pendapatan tertentu, seperti biaya penelitian dan pengembangan (R&D) yang manfaatnya baru terasa di masa depan. Hal ini dapat menyebabkan misalokasi biaya, yang merusak akurasi pelaporan laba dan evaluasi kinerja perusahaan. Pendekatan *asset/liability* dalam IFRS justru mengurangi keefektifan prinsip tersebut. Dalam pendekatan ini, biaya sering kali dikapitalisasi sebagai aset dan disusutkan secara merata, alih-alih dicocokkan langsung dengan pendapatan yang dihasilkan. Hal ini menyebabkan biaya tidak mencerminkan kontribusinya terhadap pendapatan pada periode tersebut, sehingga mengurangi keakuratan informasi keuangan.

Sebagai perbandingan, Italian GAAP lebih mengutamakan pendekatan *revenue/expense*, di mana biaya dicocokkan langsung dengan pendapatan, sehingga lebih mencerminkan kontribusi biaya terhadap pendapatan yang dihasilkan.[17] Kesimpulannya, prinsip *matching* dalam akuntansi memiliki kelemahan konseptual dan praktis. Meskipun bertujuan mencocokkan pendapatan dengan biaya, tantangan muncul ketika biaya seperti R&D tidak dapat dihubungkan langsung dengan pendapatan, menyebabkan misalokasi yang merusak

Pada Pt Interkon Cipta Persada Di Surabaya," *AKUNTANSI 45* 1, no. 1 (15 Mei 2020): 40, doi:10.30640/akuntansi45.v1i1.93.

[17]Pietro Fera, "The Effectiveness of the Matching Principle in Different Financial Reporting Systems and Its Impact on the Quality of Earnings," *Corporate Ownership and Control* 16, no. 3 (2019): 130–33.

akurasi laba. Pendekatan *asset/liability* dalam IFRS memperburuk masalah ini, karena biaya dikapitalisasi sebagai aset dan disusutkan secara merata, tanpa mencerminkan kontribusi sebenarnya terhadap pendapatan. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian temporal dalam pelaporan keuangan, menyulitkan pengguna laporan dalam menilai kinerja perusahaan. Sebaliknya, pendekatan *revenue/expense* seperti dalam Italian GAAP memberikan kejelasan yang lebih baik, menunjukkan bahwa prinsip *matching* perlu direvisi agar relevan dan akurat dalam konteks standar pelaporan keuangan modern.

8. Prinsip Pengakuan Pendapatan

Menurut Rahayu, pengakuan pendapatan berbasis akrual berarti pendapatan dicatat ketika produk atau layanan telah diserahkan kepada pelanggan, meskipun pembayaran belum diterima. Prinsip tersebut bertujuan untuk mencerminkan aktivitas ekonomi perusahaan secara lebih objektif dan realistis, sesuai dengan periode terjadinya transaksi.[18] Pengakuan pendapatan saat transaksi terjadi, bukan saat kas diterima, dapat menimbulkan risiko salah interpretasi terkait likuiditas perusahaan. Misalnya, perusahaan bisa mengakui pendapatan besar dari penjualan kredit, namun jika piutang tidak tertagih, arus kas terganggu. Akibatnya, laporan laba rugi bisa terlihat positif, sementara kas yang tersedia tidak cukup untuk operasional

[18]Zaelza Abdanadillah, M. Ali Fikri, dan Adhitya Bayu Suryantara, "Analisis Rasio Keuangan Accrual Basis Dan Cash Basis Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Dagang Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2020," *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 2 (22 Juni 2022): 278, doi:10.29303/risma.v2i2.215.

sehari-hari. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan diakui secara akrual, penilaian kesehatan finansial perusahaan perlu mempertimbangkan realisasi kas.

Menurut Sulistyanto, metode akrual memang lebih kompleks dan mahal dibandingkan dengan metode kas. Penerapan metode tersebut membutuhkan sistem akuntansi yang lebih canggih serta tenaga kerja yang lebih terampil, yang dapat meningkatkan biaya administrasi. Sebaliknya, metode kas lebih sederhana dan mudah diimplementasikan, sehingga sering menjadi pilihan bagi usaha kecil dan organisasi nirlaba.[19] Kesimpulannya, prinsip pengakuan pendapatan metode akrual memiliki kelemahan mendasar yang dapat memengaruhi penilaian kesehatan keuangan perusahaan.

Dengan mengakui pendapatan saat transaksi terjadi, bukan saat kas diterima, prinsip ini berisiko menyesatkan pemangku kepentingan tentang likuiditas perusahaan, terutama pada penjualan kredit. Ketidaksesuaian antara laba akuntansi dan arus kas dapat mengganggu operasional dan meningkatkan risiko kegagalan keuangan. Selain itu, metode akrual memerlukan infrastruktur akuntansi yang lebih kompleks dan biaya implementasi yang lebih tinggi, menjadikannya kurang praktis untuk usaha kecil. Meskipun memberikan gambaran kinerja lebih komprehensif, kelemahan konsep dan operasional metode ini menunjukkan pentingnya

[19]Lusi Elviani Rangkuti dan Amerruddin Shah Suboh, "Comparative Analysis of Accrual and Cash Accounting Methods in Financial Reporting," *East Asian Journal of Multidisciplinary Research* 3, no. 6 (27 Juni 2024): 2171, doi:10.55927/eajmr.v3i6.9953.

mempertimbangkan konteks dan kebutuhan spesifik perusahaan dalam penerapannya.

9. Prinsip Materialitas

Prinsip tersebut membolehkan pengecualian terhadap prinsip akuntansi lain jika informasi dianggap tidak cukup signifikan untuk pengambilan keputusan, sehingga laporan tetap fokus pada informasi yang penting. Menurut Bernstein, materialitas membedakan hal-hal yang signifikan dari yang sepele, dan mengarahkan tindakan serta sumber daya untuk menyelesaikan isu-isu yang penting.[20] Prinsip materialitas memungkinkan pengabaian prinsip lain jika suatu item dianggap tidak material, namun batasan materialitas sering kali bersifat subjektif dan bervariasi antar entitas. Sebagai contoh, perusahaan besar mungkin menganggap aset kecil seperti peralatan kantor tidak signifikan, sementara perusahaan kecil bisa menganggapnya material dan perlu dicatat secara rinci.

Ketidakpastian mengenai batas materialitas ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pengambilan keputusan, tergantung pada kebijakan dan persepsi penyusun laporan keuangan. Tidak adanya batas materialitas yang jelas dalam penerapannya memperburuk kerentanannya. Ambang batas materialitas sering kali bergantung pada penilaian profesional yang mempertimbangkan variabel kualitatif dan kuantitatif, seperti laba bersih, omzet, atau total

[20]Yining Zhou, Geoff Lamberton, dan Michael B. Charles, "An Explanatory Model of Materiality in Sustainability Accounting: Integrating Accountability and Stakeholder Heterogeneity," *Sustainability* 15, no. 3 (Januari 2023): 2, doi:10.3390/su15032700.

aset. Menurut Chong, kurangnya panduan atau tolok ukur yang spesifik menyebabkan penerapan materialitas bisa bervariasi dalam laporan keuangan dan audit. Hal ini menciptakan tantangan bagi pemangku kepentingan, auditor, dan pengadilan dalam menilai dampak kelalaian atau kesalahan penyajian, yang meningkatkan risiko inkonsistensi dan perbedaan interpretasi.[21] Kesimpulannya, prinsip materialitas, meskipun bertujuan menyederhanakan penyusunan laporan keuangan, memiliki kelemahan konseptual yang signifikan.

Ketidakjelasan dalam menentukan ambang batas materialitas membuat penerapannya bergantung pada subjektivitas dan penilaian profesional, yang sering kali tidak konsisten. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam pelaporan, terutama ketika standar berbeda diterapkan untuk item yang sama oleh perusahaan besar dan kecil. Kurangnya panduan atau tolok ukur baku juga meningkatkan risiko salah tafsir dan konflik dalam audit serta pengambilan keputusan hukum. Akibatnya, prinsip materialitas rentan disalahgunakan untuk mengabaikan item penting, menyulitkan pemangku kepentingan dalam menilai transparansi dan keandalan laporan keuangan. Kelemahan ini terletak pada kurangnya ketegasan dan kejelasan dalam penerapannya, yang dapat merusak kualitas dan kredibilitas laporan keuangan.

[21]H Gin Chong, "A Review on The Evolution of The Definitions of Materiality," *International Journal of Economics and Accounting* 6 (1 Januari 2015): 27–28.

10. Prinsip Konservatisme

Prinsip tersebut mendukung kehati-hatian dengan segera mengakui potensi kerugian dan menunda pengakuan keuntungan hingga terealisasi, guna menjaga agar laporan keuangan tidak terlalu optimistis. Menurut Basu, konservatisme akuntansi adalah metode yang bereaksi berbeda terhadap informasi negatif dan positif. Dalam metode ini, kerugian segera diakui dalam laporan keuangan, sementara pengakuan keuntungan ditunda hingga terdapat kepastian lebih lanjut.[22] Prinsip konservatisme dalam akuntansi mengharuskan perusahaan untuk lebih cepat mengakui kerugian dibandingkan dengan keuntungan. Meskipun tujuan dari prinsip tersebut adalah untuk mencegah pelaporan yang terlalu optimis, sering kali hal tersebut menyebabkan laporan keuangan menjadi terlalu pesimis dan tidak mencerminkan nilai sebenarnya.

Sebagai contoh, ketika ada potensi kerugian dari piutang yang sulit tertagih, kerugian tersebut segera dicatat meskipun belum pasti terjadi, sementara keuntungan dari peningkatan nilai investasi tidak diakui sampai benar-benar terealisasi. Pendekatan tersebut dapat memengaruhi persepsi tentang profitabilitas dan kinerja perusahaan secara tidak akurat. Beberapa teoretikus akuntansi telah mengkritik konservatisme tersebut. Paton menggambarkan prinsip tersebut

[22]Marziyeh Hejranijamil, Afsane Hejranijamil, dan Javad Shekarkhah, "Accounting conservatism and uncertainty in business environments; using financial data of listed companies in the Tehran stock exchange," *Asian Journal of Accounting Research* 5 (28 Agustus 2020): 181, doi:10.1108/AJAR-04-2020-0027.

sebagai sesuatu yang tidak logis dan menghambat perkembangan pelaporan keuangan. Sterling bahkan menyebut konservatisme sebagai tradisi yang paling tidak dapat diterima dalam akuntansi, sementara Hatfield menyebutnya sebagai pemikiran yang tidak solid.

Menurut para kritikus ini, konservatisme akuntansi terlalu menekankan sikap pesimis, yang mendorong *understatement* terhadap aset dan laba. Hal tersebut bertentangan dengan tujuan dasar akuntansi, yaitu menyajikan informasi yang jujur, akurat, dan dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan.[23] Kesimpulannya, prinsip konservatisme dalam akuntansi, meskipun dimaksudkan untuk mencegah optimisme berlebihan dalam pelaporan keuangan, justru menimbulkan sejumlah kelemahan mendasar. Dengan memprioritaskan pengakuan kerugian yang belum pasti dan menunda pengakuan keuntungan yang nyata, prinsip ini cenderung menghasilkan laporan keuangan yang tidak seimbang dan terlalu pesimis.

Akibatnya, persepsi terhadap kinerja dan profitabilitas perusahaan menjadi tidak akurat, yang dapat merugikan pengambilan keputusan oleh investor dan pemangku kepentingan lainnya. Kritik yang menyebut prinsip ini sebagai tradisi tidak logis dan bertentangan dengan tujuan akuntansi menggarisbawahi bahwa konservatisme sering kali mengorbankan transparansi dan keandalan

[23]David S. Christensen, "The Seeds of Accounting Conservatism," *European Journal of Business and Management Research* 8, no. 2 (27 Maret 2023): 181–82, doi:10.24018/ejbmr.2023.8.2.1897.

informasi keuangan. Oleh karena itu, pendekatan ini perlu dievaluasi ulang agar lebih sesuai dengan kebutuhan informasi yang jujur dan relevan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

11. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk

Transaksi dilaporkan berdasarkan realitas ekonomi, bukan hanya aspek hukum, agar laporan keuangan lebih mencerminkan kondisi aktual perusahaan. Dengan kata lain, transaksi diatur lebih oleh alasan komersialnya daripada bentuk hukumnya.[24] Prinsip tersebut menuntut agar transaksi dilaporkan berdasarkan substansi ekonominya daripada bentuk hukumnya, yang dalam praktiknya sering kali membutuhkan penilaian subjektif. Sebagai contoh, jika aset telah dijual secara hukum tetapi manfaat ekonominya masih dinikmati oleh perusahaan, laporan harus mencerminkan substansi ekonomi bahwa perusahaan masih memperoleh manfaat dari aset tersebut.

Namun, pendekatan tersebut menghadapi tantangan karena menuntut penilaian profesional yang bisa berbeda-beda antar akuntan, sehingga menciptakan potensi inkonsistensi dalam pelaporan. Agar substansi lebih penting daripada bentuk, substansi ekonomi harus jelas dan dapat diidentifikasi dengan pasti. Namun, hal tersebut sulit dilakukan karena substansi ekonomi sering kali

[24]Peter Marshall Kapojos dkk., "Penerapan Sebuah Prinsip Dalam Laporan Keuangan Pemerintah: 'Substansi Mengungguli Bentuk Formal' Atau 'Bentuk Formal Mengungguli Substansi'?," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 10, no. 2 (20 Juni 2022): 1084, doi:10.35794/emba.v10i2.41385.

bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh interpretasi manusia. Akuntansi sendiri adalah konstruksi sosial, sehingga konsep seperti aset, kewajiban, atau pendapatan dapat berubah makna tergantung pada konvensi sosial yang berlaku. Selain itu, dalam praktiknya, bentuk laporan akuntansi juga sering kali menentukan bagaimana substansi ekonomi suatu transaksi dilaporkan. Sebagai contoh, dalam kasus sewa, akuntan dapat mengklasifikasikan sewa sebagai pembelian berdasarkan aturan yang berlaku, meskipun arus kas bisnis tetap sama.

Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntansi tidak hanya mencerminkan realitas ekonomi tetapi juga membentuknya melalui aturan dan praktik pelaporan.[25] Karena itu, penting untuk mencapai keseimbangan antara substansi dan bentuk dalam pelaporan keuangan. Substansi ekonomi memang memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang realitas transaksi, tetapi bentuk pelaporan yang konsisten dan standar juga diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan komparabilitas antarperusahaan. Dengan adanya keseimbangan tersebut, laporan keuangan dapat mencerminkan realitas ekonomi yang akurat sambil tetap mematuhi standar yang dapat diterima secara luas, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan pemangku kepentingan. Kesimpulannya, prinsip Substansi Mengungguli Bentuk

[25]Paul F. Williams, "The Decline of Substance over Form in Accounting: A Problematic Dichotomy," *Accounting, Economics, and Law: A Convivium* 13, no. 3 (1 Agustus 2023): 393–98, doi:10.1515/ael-2021-0119.

menghadirkan kelemahan mendasar dalam pelaporan keuangan karena menuntut penilaian subjektif yang berpotensi menghasilkan inkonsistensi antarpraktisi.

Meskipun bertujuan mencerminkan realitas ekonomi secara mendalam, prinsip ini sering menghadapi tantangan ketika substansi ekonomi sulit diidentifikasi secara pasti dan terpengaruh oleh interpretasi yang bervariasi. Selain itu, karena akuntansi merupakan konstruksi sosial, konsep-konsep inti seperti aset, kewajiban, dan pendapatan dapat berubah makna tergantung pada konteks dan konvensi sosial, menciptakan ambiguitas dalam penerapan prinsip ini. Di sisi lain, ketergantungan pada bentuk hukum sebagai kerangka pelaporan sering kali tetap memengaruhi bagaimana substansi ekonomi diinterpretasikan, sehingga menimbulkan potensi ketidaksesuaian antara substansi dan bentuk. Oleh karena itu, meskipun prinsip ini menawarkan keunggulan dalam merefleksikan realitas ekonomi, kelemahannya terletak pada subjektivitas dan kurangnya kepastian yang dapat mengurangi komparabilitas dan konsistensi laporan keuangan antarperusahaan. *Balance* antara substansi dan bentuk diperlukan untuk memastikan laporan keuangan tidak hanya realistis tetapi juga dapat diandalkan oleh pemangku kepentingan.

12. Prinsip Objektivitas

Pencatatan harus dilakukan berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi untuk menjaga kepercayaan dan keandalan data keuangan, serta menghindari pencatatan yang hanya berdasarkan

asumsi atau estimasi yang sulit diverifikasi.[26] Tidak semua transaksi akuntansi dapat diukur secara objektif. Banyak transaksi yang melibatkan estimasi, seperti penyisihan piutang ragu-ragu atau penyusutan aset tetap, yang meskipun didasarkan pada data historis dan pengalaman, tetap mengandung unsur subjektivitas. Subjektivitas tersebut dapat memengaruhi tingkat objektivitas laporan keuangan. Jika estimasi tidak akurat atau bias, laporan keuangan mungkin tidak memberikan gambaran yang tepat tentang kondisi keuangan perusahaan.

Sebagai contoh, jika penyisihan piutang ragu-ragu dilakukan secara berlebihan, laba perusahaan dapat dilaporkan lebih rendah daripada yang seharusnya, sehingga menciptakan gambaran yang tidak proporsional. Kritik terhadap pendekatan objektivitas juga diangkat oleh Hopper dan Powell. Mereka menyoroti bahwa pendekatan objektivis dalam akuntansi sering kali mengabaikan pengaruh sosial yang lebih luas dalam organisasi. Meskipun objektivisme memandang manusia sebagai makhluk rasional yang dapat diprediksi dan dikendalikan, pendekatan tersebut cenderung mengabaikan kompleksitas interaksi sosial dan dinamika organisasi yang terjadi dalam praktik nyata.

Akibatnya, pendekatan tersebut tidak dapat sepenuhnya menangkap realitas sosial yang ada di dalam dunia akuntansi, yang

[26]Niswonger, Fess, dan Warren, *Prinsip-Prinsip Akuntansi, Jilid 1*, 528–29.

bersifat lebih dinamis dan kontekstual.[27] Pratiwi juga mengkritik prinsip objektivitas yang terdapat dalam Kode Etik Akuntan. Ia berpendapat bahwa prinsip tersebut, meskipun bertujuan untuk memastikan akuntan bertindak berdasarkan fakta tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas atau konflik kepentingan, masih memberikan ruang untuk penyalahgunaan. Akuntan sering kali menggunakan penilaian profesional mereka untuk membenarkan tindakan yang mungkin didorong oleh kepentingan pribadi.

Hal tersebut dapat terjadi dalam situasi seperti rotasi audit atau perencanaan pajak, di mana aturan objektivitas justru dimanfaatkan untuk melindungi kepentingan subjektif, sehingga berpotensi membuka peluang bagi kecurangan yang dilegalkan.[28] Kesimpulannya, prinsip objektivitas dalam akuntansi, meskipun dirancang untuk memastikan laporan keuangan bebas dari bias, memiliki kelemahan mendasar yang sulit diabaikan. Tidak semua transaksi dapat diukur secara objektif, terutama yang melibatkan estimasi seperti penyisihan piutang ragu-ragu atau penyusutan aset. Subjektivitas dalam estimasi ini berpotensi memengaruhi akurasi laporan keuangan, menciptakan gambaran yang tidak proporsional dan berisiko menyesatkan pemangku kepentingan.

---

[27]Achchi Mohamed Inun Jariya dan Thirunavukkarsu Velnampy, "Management Accounting Research Approaches: A Critical Review," *International Journal of Financial Research* 12, no. 1 (2021): 132–33.

[28]Ananta Dian Pratiwi, "Kritik atas Prinsip Objektivitas dalam Kode Etik Akuntan menurut Pemikiran Martin Luther," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 4, no. 2 (2015): 20–21, https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2772.

Lebih jauh, pendekatan objektivis dalam akuntansi cenderung mengabaikan kompleksitas sosial dan dinamika organisasi, yang tidak dapat sepenuhnya direpresentasikan dalam kerangka rasional dan mekanistik. Selain itu, prinsip objektivitas dalam praktik juga rawan disalahgunakan, dengan akuntan menggunakan penilaian profesional untuk membenarkan keputusan yang mungkin didorong oleh kepentingan pribadi. Situasi ini, seperti dalam rotasi audit atau perencanaan pajak, menunjukkan bagaimana aturan yang dirancang untuk menjamin integritas justru dapat dimanfaatkan untuk melindungi tindakan yang sarat konflik kepentingan. Oleh karena itu, prinsip objektivitas, meskipun esensial, memerlukan pendekatan yang lebih kritis untuk mengatasi kelemahannya dan mencegah penyalahgunaan dalam praktik.

13. Prinsip Daya Banding

Laporan keuangan disusun sedemikian rupa agar dapat dibandingkan baik antar periode maupun antar perusahaan, sehingga memudahkan pengguna dalam mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan.[29] Prinsip daya banding (*comparability*) dalam akuntansi menuntut konsistensi penggunaan kebijakan akuntansi antarperiode untuk memudahkan perbandingan. Namun, penerapan standar yang berbeda antarperusahaan dapat mengurangi daya banding laporan keuangan. Sebagai contoh, jika dua perusahaan dalam industri yang sama menggunakan metode penyusutan yang berbeda, seperti garis

[29]Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan, Buku Satu,1 Oktober 1994*, 14–15.

lurus dan saldo menurun, perbandingan efisiensi penggunaan aset antarperusahaan menjadi tidak seimbang.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa meskipun konsistensi internal dalam perusahaan sudah tercapai, standar antarentitas tetap perlu distandarkan untuk memastikan daya banding yang lebih efektif dan adil di seluruh industri. Kesulitan mencapai *comparability* terutama disebabkan oleh penerapan *uniformity* yang kurang memadai dalam pencatatan transaksi kompleks. Transaksi seperti sewa guna usaha atau akuisisi saham sering kali dipengaruhi oleh kondisi restriksi dan kontingensi yang berbeda, sehingga sulit mencapai pencatatan yang seragam antarperusahaan.

Selain itu, fleksibilitas dalam standar akuntansi, yang mengizinkan penggunaan metode penilaian yang berbeda seperti FIFO, LIFO, atau berbagai metode depresiasi, menciptakan ruang untuk ketidakkonsistenan antarperusahaan dalam pelaporan. Motivasi manajerial untuk memaksimalkan laba atau menciptakan stabilitas keuangan juga turut memengaruhi pilihan metode akuntansi, yang pada akhirnya memperlemah tingkat *comparability* dalam laporan keuangan antarperusahaan.[30] Kesimpulannya, prinsip daya banding dalam akuntansi, meskipun bertujuan untuk memfasilitasi perbandingan laporan keuangan, memiliki kelemahan mendasar yang memengaruhi keefektifannya. Perbedaan penerapan

[30]Rustam Hanafi, "Uniformity Jalan Menuju Comparability : (Studi Terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia)," *Akses* 3, no. 6 (2008): 89–92, doi:10.31942/akses.v3i6.503.

standar antarperusahaan dalam industri yang sama, seperti penggunaan metode penyusutan atau penilaian persediaan yang berbeda, menciptakan ketidakseimbangan dalam evaluasi kinerja.

Selain itu, fleksibilitas dalam standar akuntansi, meskipun memberikan keleluasaan, justru membuka peluang ketidakkonsistenan yang melemahkan daya banding antarentitas. Kompleksitas transaksi seperti sewa guna usaha atau akuisisi saham semakin memperburuk situasi, karena pencatatan sering kali bergantung pada kondisi spesifik masing-masing perusahaan. Ditambah lagi, motivasi manajerial yang berorientasi pada laba cenderung memanfaatkan kelonggaran ini untuk kepentingan tertentu, sehingga mengurangi keadilan dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Dengan demikian, prinsip daya banding memerlukan perbaikan dalam harmonisasi standar untuk memastikan perbandingan yang lebih objektif, adil, dan relevan di seluruh industri.

14. Prinsip Konsistensi

Metode yang digunakan dalam laporan keuangan harus diterapkan secara konsisten antar periode untuk memastikan perbandingan data yang adil dan akurat.[31] Prinsip konsistensi dalam akuntansi membatasi fleksibilitas perusahaan dalam mengubah kebijakan akuntansi, meskipun perubahan tersebut lebih relevan dengan kondisi bisnis saat ini. Sebagai contoh, jika pola

[31]Ahmed Riahi Belkaoui, *Accounting Theory* (Singapore: South-Western, 2006), 286.

pemanfaatan aset berubah dan perusahaan ingin mengganti metode penyusutan, perubahan tersebut harus didukung oleh alasan yang kuat dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan.[1] Keterbatasan tersebut dapat mengakibatkan laporan keuangan kurang mencerminkan realitas kondisi bisnis jika perusahaan dipaksa untuk terus menggunakan kebijakan akuntansi yang tidak lagi relevan.

Prinsip tersebut mengedepankan stabilitas dalam penyajian laporan keuangan, namun terkadang fleksibilitas yang diperlukan untuk mencerminkan kondisi terkini menjadi terhambat. Kendala terkait konsistensi dalam akuntansi seringkali lebih terasa pada perusahaan yang sedang berkembang atau menghadapi perubahan signifikan, dibandingkan dengan perusahaan mapan.[3] Perusahaan yang sudah mapan biasanya memiliki sistem akuntansi yang stabil, terstruktur, dan telah teruji selama bertahun-tahun, sehingga kebijakan akuntansinya cenderung lebih konsisten. Namun, jika perusahaan mapan menghadapi perubahan besar, seperti perubahan regulasi, akuisisi, atau ekspansi ke pasar baru, mereka mungkin perlu mengubah kebijakan atau metode akuntansi untuk mencerminkan kondisi bisnis baru. Perubahan tersebut dapat berbenturan dengan prinsip konsistensi yang digunakan sebelumnya, sehingga menimbulkan potensi inkonsistensi dalam laporan keuangan jika tidak dikelola dengan baik.[32]

[32]Hartinowati Soewelo, "Pentingnya Penerapan Prinsip Konsistensi dalam Pengakuan Pendapatan dan Pengaruhnya terhadap Kewajiban Penyajian Laporan Laba/Rugi," Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi 2, no. 5 (2004): 137, doi:10.30742/equilibrium.v2i5.189.

Kesimpulannya, prinsip konsistensi dalam akuntansi, meskipun bertujuan untuk menjaga stabilitas laporan keuangan, memiliki kelemahan yang signifikan dalam menghadapi perubahan kondisi bisnis. Prinsip ini membatasi fleksibilitas perusahaan dalam mengubah kebijakan akuntansi, meskipun perubahan tersebut mungkin lebih relevan dengan situasi terkini dan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja perusahaan. Pada perusahaan yang berkembang atau mengalami perubahan signifikan, keterbatasan ini dapat menyebabkan laporan keuangan yang tidak mencerminkan realitas bisnis, menghambat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat. Meskipun perusahaan mapan cenderung lebih konsisten dalam kebijakan akuntansinya, perubahan besar seperti perubahan regulasi atau ekspansi ke pasar baru dapat memerlukan penyesuaian metode akuntansi yang bertentangan dengan prinsip konsistensi. Oleh karena itu, meskipun prinsip konsistensi penting untuk menjaga keseragaman laporan keuangan, dalam beberapa kasus, prinsip ini justru dapat menghalangi fleksibilitas yang diperlukan untuk mencerminkan kondisi bisnis yang lebih dinamis dan relevan.

15. Prinsip Netralitas

Informasi keuangan disajikan secara netral agar semua pengguna laporan mendapatkan informasi yang objektif dan dapat dipercaya.[33] Menjaga netralitas dalam pelaporan sering kali menjadi tantangan, terutama ketika manajemen memiliki insentif untuk menyajikan

[33]Ikatan Akuntan Indonesia, *Prinsip Akuntansi Indonesia 1984*, 3.

laporan yang menguntungkan diri mereka sendiri atau pihak tertentu, seperti investor. Sebagai contoh, manajemen mungkin tergoda untuk menyajikan angka keuntungan yang lebih tinggi demi menarik investor baru atau mempertahankan harga saham yang tinggi. Ketika informasi tidak disajikan secara netral, keputusan yang diambil oleh investor dan kreditor bisa menjadi tidak tepat karena didasarkan pada informasi yang tidak objektif.

Dalam konteks akuntansi, netralitas seharusnya berarti bahwa standar akuntansi seperti IFRS dapat digunakan secara adil oleh semua pemangku kepentingan, baik pemilik modal, pemerintah, kreditor, maupun masyarakat luas. Dengan kata lain, informasi keuangan yang disajikan seharusnya tidak memihak salah satu pihak. Namun, dalam praktiknya, IFRS ternyata lebih berorientasi pada kepentingan pemilik modal dan investor, sehingga tidak benar-benar netral. Hal tersebut terlihat jelas di Selandia Baru, di mana standar tersebut dianggap kurang relevan untuk sektor publik yang memiliki tanggung jawab sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, Selandia Baru akhirnya mengembangkan standar multisektor yang lebih inklusif, memungkinkan setiap sektor, baik yang berorientasi profit maupun sektor publik, untuk memiliki standar pelaporan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.[34]

[34]Bruno Marsigalia dan Renato Giovannini, "Sector Neutrality: A Possible Improvement of the Accounting Standards. Evidence from Nz Model," *Corporate Ownership and Control* 16, no. 2 (2019): 77.

Kesimpulannya, prinsip netralitas dalam pelaporan keuangan sering kali terhambat oleh insentif manajerial yang cenderung memihak, baik untuk menarik investor maupun mempertahankan posisi pasar. Ketika informasi disajikan dengan tujuan tertentu, seperti meningkatkan angka keuntungan untuk menarik perhatian investor, maka netralitas yang seharusnya dijaga dalam pelaporan keuangan menjadi terdistorsi. Hal ini berisiko menghasilkan keputusan yang salah dari pihak yang bergantung pada laporan tersebut, seperti investor atau kreditor, karena informasi yang diterima tidak objektif. Meskipun standar akuntansi seperti IFRS bertujuan untuk bersikap adil dan tidak memihak, dalam praktiknya, standar ini seringkali lebih menguntungkan pemilik modal dan investor, sementara sektor publik dan masyarakat luas sering kali terabaikan. Contoh dari ketidaksesuaian ini dapat dilihat di Selandia Baru, di mana standar akuntansi yang diterapkan kurang relevan untuk sektor publik dengan tanggung jawab sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, meskipun prinsip netralitas memiliki dasar yang penting, praktik pelaporannya sering kali gagal untuk mempertimbangkan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan secara adil dan inklusif.

16. Prinsip Tepat Waktu

    Informasi keuangan disajikan secepat mungkin agar tetap relevan untuk pengambilan keputusan, dengan menjaga

keseimbangan antara kecepatan pelaporan dan keakuratan data.[35] Pelaporan keuangan yang tepat waktu sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan relevan dan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Namun, pelaporan yang terlalu cepat tanpa melalui proses verifikasi yang memadai dapat mengurangi kualitas informasi yang diberikan. Sebagai contoh, laporan keuangan kuartalan yang dipublikasikan sebelum audit selesai mungkin mengandung kesalahan yang berpotensi memengaruhi persepsi investor.

Sebaliknya, jika pelaporan terlalu lama ditunda, informasi yang disajikan bisa menjadi usang dan tidak lagi relevan bagi pengguna yang membutuhkan data terkini untuk membuat keputusan strategis. Keterlambatan dalam pelaporan keuangan sering disebabkan oleh berbagai faktor penting. Salah satu faktor utama yang diidentifikasi dalam penelitian Yunita dkk. adalah situasi global yang tidak terduga, seperti pandemi COVID-19, yang memicu tantangan operasional besar bagi banyak perusahaan, sehingga memengaruhi ketepatan waktu pelaporan. Selain itu, perusahaan yang lebih kecil cenderung memiliki keterbatasan sumber daya, baik dalam hal keuangan maupun tenaga kerja, yang menyulitkan mereka untuk memproses laporan keuangan secara tepat waktu. Tekanan eksternal, seperti perubahan regulasi dan pelonggaran tenggat waktu pelaporan selama pandemi, juga memengaruhi kepatuhan perusahaan dalam

[35]Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan, Buku Satu,1 Oktober 1994*, 15.

pelaporan keuangan. Semua faktor tersebut secara kolektif berkontribusi pada hambatan yang dihadapi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pelaporan yang tepat waktu.[36] Kesimpulannya, prinsip pelaporan keuangan yang tepat waktu mengandung kelemahan signifikan yang dapat memengaruhi kualitas informasi yang disajikan. Meskipun penting untuk memastikan relevansi data bagi pemangku kepentingan, pelaporan yang terburu-buru tanpa verifikasi yang memadai dapat menghasilkan informasi yang kurang akurat dan menyesatkan, seperti laporan keuangan kuartalan yang dipublikasikan sebelum audit selesai.

Di sisi lain, keterlambatan pelaporan dapat membuat informasi menjadi usang dan tidak berguna bagi pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Keterlambatan ini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya pada perusahaan kecil dan tantangan operasional yang tak terduga, termasuk situasi global seperti pandemi. Selain itu, perubahan regulasi dan pelonggaran tenggat waktu juga memengaruhi ketepatan waktu pelaporan. Dengan demikian, meskipun ketepatan waktu pelaporan keuangan sangat penting, perusahaan harus menyeimbangkan antara kecepatan dan kualitas informasi untuk memastikan bahwa data

[36]Sella Yunita, Agrianti Komalasari, dan Saring Suhendro, "The Effect of Timeliness of Financial Reporting on Abnormal Return during the Covid-19 Period with Profitability and Company Size as Moderating Variables (Study on the Food and Beverages Sector Companies Listed on the IDX in 2020-2021)," *International Journal of Business and Applied Economics* 2, no. 3 (27 Mei 2023): 392–94, doi:10.55927/ijbae.v2i3.4304.

yang disampaikan tetap relevan dan akurat bagi pemangku kepentingan.

B. Analisis Oposisi Biner

Analisis oposisi biner diawali dengan mengidentifikasi kelemahan dan ketidakkonsistenan prinsip dasar akuntansi, yang kemudian dibandingkan dengan dokumen resmi sebagai acuan. Oposisi biner disusun untuk menggali ketegangan atau ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip yang diterima dan kenyataan praktis di lapangan. Tujuannya adalah untuk mengungkap ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip tersebut, serta menunjukkan bagaimana ketegangan ini dapat mempengaruhi keandalan dan relevansi informasi keuangan yang dihasilkan. Dengan demikian, oposisi biner membantu mengidentifikasi bias atau ketidakadilan dalam struktur akuntansi yang ada, serta membuka ruang untuk pemikiran alternatif yang lebih adil dan efisien.

1. Prinsip Entitas Ekonomi

Kelemahan prinsip entitas ekonomi terletak pada pemisahan yang tegas antara keuangan perusahaan dan pribadi pemilik, yang dalam praktiknya, terutama pada usaha kecil, sering kali tercampur. Hal ini menyebabkan pencatatan keuangan menjadi kurang akurat, karena sulit memisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Selain itu, keputusan keuangan pribadi pemilik sering memengaruhi kondisi perusahaan, namun prinsip ini tidak mempertimbangkannya. Ketidakkonsistenan ini dapat menyebabkan kesalahan interpretasi pada laporan keuangan,

terutama jika pengguna laporan tidak mengetahui sejauh mana keuangan pribadi pemilik memengaruhi kondisi bisnis.[37]

Oposisi biner dalam Prinsip Entitas Ekonomi terletak antara pemisahan mutlak dan keterkaitan keuangan. Di satu sisi, prinsip ini menuntut pemisahan total antara keuangan perusahaan dan pribadi pemilik, yang menciptakan kesan objektivitas dan independensi dalam laporan keuangan perusahaan. Namun, dalam kenyataannya, terutama pada usaha kecil, keuangan pribadi dan bisnis seringkali saling terkait, di mana keputusan pribadi pemilik dapat langsung memengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Pemisahan yang tegas ini tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya, karena keterkaitan finansial antara pemilik dan bisnis dapat menjadi faktor penting dalam stabilitas usaha yang sering diabaikan dalam laporan keuangan resmi.

2. Prinsip Unit Moneter

Kelemahan dan ketidakkonsistenan dalam prinsip unit moneter muncul karena asumsi bahwa nilai uang bersifat stabil, padahal dalam kenyataannya, nilai uang sering terpengaruh oleh inflasi dan deflasi. Inflasi, misalnya, dapat mengurangi daya beli uang, sehingga nilai transaksi yang tercatat di masa lalu menjadi kurang relevan atau akurat jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi saat ini. Ketidakkonsistenan ini menciptakan masalah dalam laporan keuangan jangka panjang, di mana nilai historis tidak mencerminkan nilai riil. Selain itu, prinsip ini

[37]Santi Rahma Dewi, "Upgrading Tata Kelola Keuangan bagi UMKM Terintegrasi dengan Financial Digital," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (9 Mei 2023): 139, doi:10.32815/jpm.v4i1.1144.

tidak memperhitungkan fluktuasi mata uang dalam transaksi internasional. Akibatnya, laporan keuangan bisa memberi gambaran yang tidak lengkap tentang kondisi keuangan perusahaan, terutama jika tidak disesuaikan dengan faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi nilai uang.[38]

Oposisi biner dalam prinsip unit moneter terletak pada asumsi penggunaan satuan uang yang stabil versus kebutuhan akan satuan ukur yang lebih stabil. Prinsip ini menganggap bahwa nilai uang tetap stabil, memudahkan pencatatan dan perbandingan data keuangan antar periode. Namun, dalam kenyataannya, nilai uang sering tidak stabil karena inflasi, deflasi, dan fluktuasi mata uang, terutama dalam transaksi internasional. Ketidakkonsistenan ini membuat laporan keuangan yang didasarkan pada nilai historis tidak selalu mencerminkan nilai riil aset dan liabilitas. Akibatnya, laporan keuangan yang mengandalkan asumsi stabilitas uang bisa memberikan gambaran yang kurang akurat, terutama bagi pengguna yang tidak memperhitungkan perubahan nilai uang di pasar.

3. Prinsip Periode Waktu

Kelemahan dan ketidakkonsistenan dalam prinsip periode waktu muncul dari asumsi bahwa pelaporan berkala, seperti tahunan atau kuartalan, cukup untuk mencerminkan kinerja perusahaan. Namun, bisnis beroperasi secara berkelanjutan, sehingga pemisahan waktu secara

[38]Oday Tamimi dan Ildikó Orbán, "Hyperinflation and Its Impact on the Financial Results," *Intellectual Economics* 14, no. 2 (2020): 13–14, doi:10.13165/IE-20-14-2-01.

artifisial sering kali tidak sejalan dengan dinamika perusahaan. Ketidakkonsistenan ini membuka peluang untuk praktik *window dressing*, yaitu manipulasi laporan keuangan agar terlihat lebih baik menjelang akhir periode pelaporan. Praktik semacam ini, seperti mempercepat pendapatan atau menunda pengeluaran, dapat menyesatkan pemangku kepentingan mengenai kinerja sebenarnya. Misalnya, menurut Kapugu & Wardhani, manajer investasi bisa melakukan *window dressing* dengan menjual atau membeli saham tepat sebelum penutupan periode pelaporan untuk menyamarkan kinerja perusahaan. Akibatnya, laporan keuangan pada periode tertentu hanya memberikan gambaran parsial yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi perusahaan sepanjang waktu.[39]

Oposisi biner dalam prinsip periode waktu terletak pada pembatasan waktu tetap versus periode fleksibel. Di satu sisi, prinsip ini mengatur pelaporan pada interval tetap, seperti tahunan atau kuartalan, yang memudahkan pemangku kepentingan menilai kinerja perusahaan secara konsisten. Namun, realitas bisnis sering memerlukan periode fleksibel karena kinerja perusahaan bisa sangat bervariasi di luar periode tetap tersebut. Periode fleksibel memungkinkan pelaporan yang lebih responsif terhadap perubahan pasar atau operasional yang mendadak, yang tidak selalu tercermin dalam pelaporan berkala. Ketegangan ini berisiko menciptakan laporan keuangan yang tidak akurat, karena

[39]Wanda Destina Putri dan Shinta Permata Sari, "Fenomena Sell in May,Window Dressing, December Effect, dan January Effect terhadap Dinamika Harga Saham Perbankan," *UMMagelang Conference Series*, 1 Agustus 2022, 615–16.

pembatasan waktu tetap dapat menghasilkan gambaran yang tidak lengkap, apalagi jika perusahaan menggunakan *window dressing* untuk menyesuaikan hasil pada akhir periode pelaporan.

4. Prinsip Biaya (Biaya Historis)

Kelemahan dan ketidakkonsistenan dalam prinsip biaya historis muncul karena aset dicatat berdasarkan biaya perolehan awal tanpa mempertimbangkan perubahan nilai pasar. Meskipun bertujuan menjaga objektivitas dengan menggunakan nilai yang dapat diverifikasi, prinsip ini sering kali tidak mencerminkan nilai ekonomi aktual aset pada saat laporan disusun. Seiring waktu, nilai pasar aset bisa meningkat atau menurun, dan pencatatan berdasarkan biaya awal menjadi kurang relevan, terutama untuk aset yang mengalami apresiasi signifikan, seperti properti. Ketidakkonsistenan ini bisa membuat laporan keuangan kurang akurat, karena nilai riil aset tidak tercermin. Akibatnya, pengguna laporan bisa salah menilai kondisi keuangan perusahaan jika tidak memperhitungkan perubahan nilai pasar setelah pembelian aset. Menurut Sokolov, kelemahan prinsip biaya historis adalah tidak mencerminkan nilai pasar terkini, mengabaikan inflasi, perubahan pasar, dan fluktuasi aset, sehingga kurang akurat menggambarkan posisi keuangan perusahaan.[40]

Oposisi biner dalam prinsip biaya historis terletak antara pencatatan biaya tetap (biaya perolehan), penyesuaian nilai pasar (nilai wajar), dan konsep nilai riil (true value). Di satu sisi, biaya perolehan menjaga objektivitas dan verifikasi dengan memberikan angka yang

[40]Tkachuk, "Historical Cost and Fair Value," 178.

pasti dan mudah diverifikasi. Di sisi lain, nilai pasar mencerminkan kondisi ekonomi saat ini dan dapat memberikan gambaran lebih akurat tentang nilai aset yang sebenarnya. Sementara itu, nilai riil (true value) mencoba menggambarkan nilai aktual aset berdasarkan potensi keuntungan dan risiko yang ada, yang lebih holistik dan relevan dalam konteks ekonomi jangka panjang. Ketegangan ini menunjukkan bahwa biaya tetap sering kali tidak mencerminkan realitas ekonomi, sementara nilai pasar, meskipun lebih relevan, berisiko kurang stabil atau kurang dapat diverifikasi. Di sisi lain, nilai riil yang lebih luas dapat memberikan gambaran lebih komprehensif namun sering sulit diukur dengan tepat. Dengan demikian, ada konflik antara kebutuhan akan objektivitas dan kepastian dalam pencatatan dengan keakuratan dan relevansi nilai aset dalam konteks ekonomi yang dinamis serta nilai riil yang lebih kompleks namun memberikan gambaran lebih utuh tentang kondisi aset tersebut.

5. Prinsip Pengungkapan Paripurna

Kelemahan dan ketidakkonsistenan dalam prinsip pengungkapan paripurna muncul dari kewajiban untuk mengungkapkan semua informasi yang relevan dalam laporan keuangan, agar pengguna dapat membuat keputusan yang tepat. Meskipun prinsip ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh, pada kenyataannya hanya informasi material yang sering kali diungkapkan, sementara informasi non-material yang juga dapat memengaruhi keputusan tetap disembunyikan. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip pengungkapan paripurna dirancang untuk memastikan transparansi

penuh, penerapannya tidak selalu mencerminkan gambaran lengkap dari kondisi perusahaan. Pembatasan pada informasi material dapat mengabaikan aspek-aspek kecil yang mungkin memiliki dampak signifikan, yang akhirnya mengurangi keakuratan dan komprehensivitas laporan keuangan. Sebagai akibatnya, transparansi yang dijanjikan oleh prinsip ini tidak sepenuhnya tercapai, sehingga berlawanan dengan tujuannya untuk menyediakan informasi yang lengkap dan dapat dipercaya.[41]

Oposisi biner dalam prinsip pengungkapan paripurna terletak pada pengungkapan yang hanya mencakup informasi material versus pengungkapan penuh yang mencakup informasi material dan non-material. Di satu sisi, pengungkapan terbatas pada aspek material membuat laporan lebih ringkas dan fokus pada informasi yang dianggap paling relevan bagi pemangku kepentingan. Namun, di sisi lain, pengungkapan penuh yang juga mencakup informasi non-material memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kondisi perusahaan, termasuk aspek-aspek yang mungkin memengaruhi perusahaan secara tidak langsung. Ketegangan ini mencerminkan dilema antara efisiensi dalam penyampaian informasi dan kebutuhan akan transparansi menyeluruh, di mana pengungkapan penuh bisa menambah kompleksitas, sementara pengungkapan hanya informasi material dapat mengabaikan elemen-elemen penting yang mendukung akuntabilitas dan kepercayaan publik.

[41]Hoesada, *Teori Akuntansi dalam Hampiran*, 260.

6. Prinsip Kesinambungan Usaha

Kelemahan dan ketidakkonsistenan dalam prinsip kesinambungan usaha muncul dari asumsi bahwa perusahaan akan terus beroperasi dalam jangka panjang. Prinsip ini mendorong perusahaan untuk mencatat aset berdasarkan harga perolehan tanpa memperhitungkan fluktuasi nilai pasar jangka pendek. Namun, asumsi ini mengabaikan kemungkinan likuidasi atau penghentian operasi yang bisa terjadi akibat krisis keuangan atau perubahan drastis dalam lingkungan bisnis. Jika perusahaan berada di ambang likuidasi, pencatatan berdasarkan biaya historis tidak akan mencerminkan nilai riil aset yang dapat diperoleh dari penjualan cepat, sehingga laporan keuangan menjadi tidak akurat dan kurang relevan untuk menggambarkan kondisi perusahaan sesungguhnya.

Ketidakonsistenan opini *going concern* juga muncul karena auditor ragu mengungkapkan status penuh keberlangsungan hidup perusahaan karena khawatir bahwa opini tersebut dapat mempercepat kemunduran perusahaan yang memang memiliki permasalahan. Meskipun demikian, opini *going concern* harus tetap disampaikan agar perusahaan dapat segera melakukan perbaikan keuangan.[42] Ketidakkonsistenan ini dapat menyesatkan pemangku kepentingan yang bergantung pada laporan untuk menilai kesehatan perusahaan, padahal

[42]I. Dewa Made Endiana dan Ni Nyoman Ayu Suryandari, "Opini Going Concern: Ditinjau dari Agensi Teori dan Pemicunya," *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 5, no. 2 (30 Juni 2021): 225, doi:10.24034/j25485024.y2021.v5.i2.4490.

ada risiko signifikan bahwa perusahaan mungkin tidak dapat melanjutkan operasinya.

Oposisi biner dalam Prinsip Kesinambungan Usaha terletak pada asumsi keberlanjutan operasi versus kemungkinan likuidasi. Di satu sisi, prinsip ini mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus beroperasi dalam jangka panjang, sehingga aset dicatat berdasarkan biaya perolehan, memberikan stabilitas dan konsistensi dalam pelaporan. Di sisi lain, kenyataan bisnis menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghadapi kondisi yang mengarah pada likuidasi atau penghentian operasi, di mana aset seharusnya dinilai berdasarkan nilai pasar yang mencerminkan kondisi penjualan cepat. Ketegangan ini menciptakan konflik antara pencatatan berbasis keberlanjutan, yang memberikan gambaran stabil, dan kebutuhan akan pelaporan yang realistis dalam situasi krisis. Akibatnya, pemangku kepentingan mungkin menerima informasi yang kurang akurat jika laporan tidak memperhitungkan risiko penghentian operasi.

7. Prinsip Mempertemukan (*Matching Principle*)

Kelemahan dan ketidakkonsistenan dalam prinsip mempertemukan (*matching principle*) muncul dari keharusan untuk mengakui biaya dan pendapatan dalam periode yang sama agar kinerja perusahaan tercermin secara akurat. Meskipun prinsip ini bertujuan memberikan gambaran yang komprehensif, penerapannya sering kali sulit, terutama ketika ada biaya yang tidak dapat langsung dihubungkan dengan pendapatan tertentu, seperti biaya penelitian atau pemasaran. Prinsip matching juga menghadapi tantangan dalam konteks pajak pada

manfaat tambahan (*fringe benefits*), karena kompleksitas dalam mencocokkan pendapatan dan pengeluaran. Tantangan ini semakin besar jika perusahaan memberikan berbagai jenis manfaat tambahan non-tunai, yang memerlukan sistem pelaporan efisien untuk memastikan pencocokan yang akurat antar periode.[43]

Ketidakkonsistenan lainnya muncul ketika pendapatan dan biaya tidak terjadi secara alami dalam periode yang sama, misalnya, ketika pendapatan diterima di awal atau akhir periode sementara biaya terjadi di periode lain. Hal ini dapat membuat laporan keuangan menjadi kurang akurat atau memerlukan estimasi serta alokasi yang subjektif, sehingga memengaruhi keandalan dan objektivitas data yang disajikan. Sebagai contoh, biaya riset sering kali tidak menghasilkan manfaat pada periode yang sama saat biaya tersebut dikeluarkan, karena manfaatnya bersifat jangka panjang dan baru dirasakan di masa mendatang. Ini memerlukan perhitungan yang cermat agar biaya riset tersebut dapat dicocokkan dengan pendapatan secara akurat, sehingga laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.[44]

Oposisi biner dalam prinsip mempertemukan (*matching principle*) terletak pada penyelarasan biaya dan pendapatan dalam periode yang sama versus ketidaksesuaian alami antara biaya dan

[43]Heriantonius Silalahi dan Budi Kurnia, "Fringe Benefits in Tax Law: Matching Principle and Tax Justice Perspective," *Ilomata International Journal of Tax and Accounting* 4, no. 4 (20 Oktober 2023): 685, doi:10.52728/ijtc.v4i4.870.

[44]Erkki Kalervo Laitinen, "Matching of Expenses in Financial Reporting: A Matching Function Approach," *Journal of Financial Reporting and Accounting* 18, no. 1 (17 Januari 2020): 46, doi:10.1108/JFRA-01-2019-0009.

pendapatan. Di satu sisi, prinsip ini menekankan pentingnya mengakui biaya dan pendapatan dalam periode yang sama untuk memberikan gambaran kinerja yang akurat dan konsisten. Di sisi lain, kenyataan bisnis sering kali menunjukkan bahwa biaya dan pendapatan tidak selalu terjadi dalam periode yang sama secara alami, seperti biaya riset yang mungkin menghasilkan pendapatan di masa depan atau pendapatan diterima sebelum biaya terkait muncul. Ketegangan ini menunjukkan konflik antara pencatatan berbasis penyelarasan yang ideal dan kebutuhan untuk mencatat transaksi sesuai waktu kejadian nyata. Akibatnya, laporan keuangan bisa bergantung pada estimasi atau alokasi yang subjektif, mengurangi objektivitas dan akurasi informasi yang disajikan.

8. Prinsip Pengakuan Pendapatan

Kelemahan dan ketidakkonsistenan dalam prinsip pengakuan pendapatan timbul karena pendapatan diakui saat produk atau layanan diserahkan kepada pelanggan, tanpa mempertimbangkan apakah pembayaran telah diterima. Prinsip ini bertujuan untuk mencerminkan aktivitas ekonomi secara objektif, namun kenyataannya, pengakuan pendapatan tanpa penerimaan kas berisiko menyebabkan ketidaksesuaian antara pendapatan yang diakui dan arus kas aktual. Menurut Simamora, metode pencatatan ini membuka peluang bagi manajer untuk melakukan manipulasi demi menunjukkan kondisi perusahaan yang lebih baik daripada kenyataannya.[45]

[45]Elyanti Rosmanidar dan Youdhi Prayogo, "Problematika Penerapan Accrual Accounting pada Lembaga Keuangan Syariah," *Iltizam Journal of*

Ketidakkonsistenan ini menjadi semakin nyata jika pelanggan mengalami kesulitan pembayaran atau terjadi penundaan signifikan dalam pelunasan, yang pada gilirannya dapat merugikan likuiditas perusahaan. Dengan demikian, laporan keuangan bisa saja menampilkan posisi pendapatan yang tampak kuat, sementara kondisi kas sebenarnya tidak mendukung kinerja tersebut. Hal ini berpotensi menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam menilai stabilitas dan kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan.

Oposisi biner dalam prinsip pengakuan pendapatan terletak pada pengakuan pendapatan saat penyerahan produk atau layanan versus pengakuan pendapatan saat penerimaan kas. Di satu sisi, prinsip ini menuntut pengakuan pendapatan ketika produk atau layanan diserahkan kepada pelanggan, yang mencerminkan aktivitas ekonomi perusahaan secara objektif dan memberikan gambaran kinerja operasional. Di sisi lain, pengakuan pendapatan saat penerimaan kas lebih mencerminkan kondisi likuiditas nyata perusahaan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ketegangan ini menunjukkan konflik antara kebutuhan untuk mencatat pendapatan yang menggambarkan aktivitas bisnis dengan kebutuhan untuk mencerminkan kondisi kas yang sebenarnya, yang penting bagi pemangku kepentingan dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan.

Shariah Economics Research 6, no. 2 (11 Desember 2022): 226, doi:10.30631/iltizam.v6i2.1526.

9. Prinsip Materialitas

Kelemahan dan ketidakkonsistenan dalam prinsip materialitas muncul dari fleksibilitas yang diberikan untuk mengecualikan prinsip akuntansi lain jika informasi dianggap tidak signifikan bagi pengambilan keputusan. Meskipun prinsip ini memungkinkan laporan keuangan tetap fokus pada informasi yang penting, penerapannya bisa menjadi subjektif, karena apa yang dianggap material dapat bervariasi antara perusahaan atau pemangku kepentingan. Ketidakkonsistenan ini berisiko menyebabkan informasi yang seharusnya relevan untuk beberapa pengguna laporan justru diabaikan. Selain itu, fleksibilitas ini dapat disalahgunakan untuk mengabaikan pencatatan detail penting yang sebenarnya perlu dilaporkan, sehingga mengurangi transparansi dan akurasi laporan keuangan, serta menambah risiko kesalahan dalam penilaian kondisi keuangan perusahaan.[46]

Oposisi biner dalam prinsip materialitas terletak pada penyajian penuh semua informasi versus penyaringan informasi hanya yang signifikan. Di satu sisi, prinsip ini memungkinkan perusahaan untuk menyaring informasi, hanya menampilkan data yang dianggap penting bagi pengguna laporan untuk fokus pada elemen signifikan. Di sisi lain, penyajian penuh tanpa pengecualian memberikan transparansi maksimal, di mana semua informasi, terlepas dari tingkat signifikansinya, dilaporkan agar tidak ada data yang mungkin dianggap relevan yang

[46]Yining Zhou, Geoff Lamberton, dan Michael B. Charles, "An Explanatory Model of Materiality in Sustainability Accounting: Integrating Accountability and Stakeholder Heterogeneity," *Sustainability* 15, no. 3 (Januari 2023): 2, doi:10.3390/su15032700.

terlewat. Ketegangan ini menunjukkan konflik antara efisiensi dan relevansi, di mana pelaporan yang hanya menyajikan informasi signifikan bisa mengurangi beban analisis, tetapi berisiko menghilangkan detail yang mungkin berguna bagi sebagian pemangku kepentingan.

10. Prinsip Konservatisme

Kelemahan dan ketidakkonsistenan dalam prinsip konservatisme muncul dari pendekatan yang cenderung mengakui potensi kerugian segera dan menunda pengakuan keuntungan hingga terealisasi. Meskipun prinsip ini bertujuan menjaga kehati-hatian dan mencegah laporan keuangan yang terlalu optimistis, penerapannya bisa menghasilkan laporan yang terlalu pesimistis atau konservatif. Ketidakkonsistenan terjadi karena prinsip ini memberikan perlakuan berbeda antara keuntungan dan kerugian, yang dapat menciptakan bias dalam laporan. Pengakuan kerugian secara langsung dapat mengurangi nilai aset atau menambah beban yang mungkin belum pasti, sementara penundaan pengakuan keuntungan mengabaikan potensi profitabilitas yang seharusnya meningkatkan daya tarik perusahaan. Akibatnya, laporan keuangan mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja perusahaan secara seimbang dan dapat menyesatkan pemangku kepentingan yang menilai kondisi keuangan perusahaan.[47]

[47]Marziyeh Hejranijamil, Afsane Hejranijamil, dan Javad Shekarkhah, "Accounting Conservatism and Uncertainty in Business Environments; Using Financial Data of Listed Companies in the Tehran Stock Exchange," 181.

Oposisi biner dalam prinsip konservatisme terletak pada pendekatan konservatif versus pengakuan apa adanya. Di satu sisi, prinsip konservatisme mendukung kehati-hatian dengan mengakui kerugian secara langsung dan menunda pengakuan keuntungan hingga benar-benar terealisasi, menjaga agar laporan keuangan tidak terlalu optimistis. Di sisi lain, pendekatan pengakuan apa adanya akan mengakui baik kerugian maupun keuntungan sesuai dengan kejadian aktual tanpa penundaan, mencerminkan kondisi keuangan secara langsung dan seimbang. Ketegangan ini menunjukkan konflik antara kehati-hatian dan objektivitas penuh, di mana pendekatan konservatif dapat memberikan gambaran yang lebih berhati-hati, sementara pengakuan apa adanya memberikan refleksi yang lebih transparan dan tepat waktu tentang kinerja keuangan perusahaan.

11. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk

Kelemahan dan ketidakkonsistenan dalam prinsip substansi mengungguli bentuk muncul dari fokus pada realitas ekonomi transaksi daripada aspek hukum semata. Meskipun prinsip ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi perusahaan, penerapannya sering kali menghadapi kesulitan karena realitas ekonomi dan bentuk hukum tidak selalu mudah dipisahkan. Kelemahan ini tampak ketika terjadi perbedaan interpretasi antara substansi ekonomi dan bentuk legal suatu transaksi, yang dapat menyebabkan penilaian subjektif dalam pelaporan. Selain itu, ketidakkonsistenan muncul karena dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin tetap harus mempertimbangkan aspek hukum yang sah meskipun realitas

ekonominya berbeda, seperti dalam hal perjanjian kepemilikan atau hak kontraktual. Akibatnya, laporan keuangan bisa jadi kurang objektif atau rentan terhadap penafsiran subjektif yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi keuangan perusahaan.[48]

Oposisi biner dalam prinsip substansi mengungguli bentuk terletak pada fokus pada realitas ekonomi versus kepatuhan pada bentuk hukum. Di satu sisi, prinsip ini menekankan pelaporan transaksi berdasarkan substansi ekonomi untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi perusahaan, melampaui batasan legalitas semata. Di sisi lain, kepatuhan pada bentuk hukum memastikan bahwa transaksi dilaporkan sesuai dengan kerangka peraturan dan legalitas yang telah disepakati, terlepas dari realitas ekonominya. Ketegangan ini menciptakan konflik antara penyajian laporan yang mencerminkan kondisi ekonomi aktual dan kebutuhan akan kepatuhan hukum, di mana laporan berbasis substansi mungkin memberikan keakuratan lebih tinggi, tetapi laporan berbasis legalitas memberikan kepastian hukum yang jelas.

12. Prinsip Objektivitas

Kelemahan dan ketidakkonsistenan dalam prinsip objektivitas muncul dari fokusnya pada penyajian fakta yang bebas dari pendapat pribadi, yang sering kali dianggap dapat mencerminkan keadaan sebenarnya tanpa pengaruh subjektivitas. Meskipun prinsip ini bertujuan

[48]Peter Marshall Kapojos dkk., "Penerapan Sebuah Prinsip dalam Laporan Keuangan Pemerintah: 'Substansi Mengungguli Bentuk Formal' atau 'Bentuk Formal Mengungguli Substansi'?," 1084.

memastikan data akurat, objektivitas dapat disalahgunakan sebagai justifikasi untuk tindakan tidak etis. Dalam praktiknya, objektivitas yang murni, tanpa campuran etika, dapat mengabaikan aspek keadilan dan moralitas. Misalnya, jika hanya berpegang pada data objektif tanpa mempertimbangkan dampak moral, seseorang bisa merasa dibenarkan secara formal meskipun tindakannya merugikan. Ketergantungan pada objektivitas murni tanpa panduan etika juga berisiko menjerumuskan individu ke dalam pola pikir yang mengesampingkan dampak kemanusiaan. Oleh karena itu, keseimbangan antara objektivitas dan subjektivitas menjadi penting untuk menjaga keadilan, menghindari manipulasi, dan memastikan laporan keuangan tetap akurat serta bertanggung jawab.[49]

Oposisi biner dalam prinsip objektivitas terletak pada ketegangan antara objektivitas murni dan kebutuhan akan subjektivitas yang dilandasi etika. Di satu sisi, objektivitas murni menekankan penyajian fakta yang dapat diverifikasi tanpa pengaruh pandangan pribadi, bertujuan untuk menjaga keandalan dan keakuratan laporan keuangan. Namun, tanpa campuran unsur etika, pendekatan ini bisa mengabaikan dampak moral dan keadilan dalam penyajian data. Di sisi lain, subjektivitas yang disertai etika memungkinkan penilaian yang lebih manusiawi, mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan yang diambil, tetapi berisiko menghadirkan bias pribadi. Ketegangan ini

[49]Lucy Sri Musmini dkk., "Epistemology of Accounting Practices: Another Frame of Objectivity Claims" (International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management, and Social Science (TEAMS 19), Atlantis Press, 2019), 416, doi:10.2991/teams-19.2019.66.

menunjukkan konflik antara penyajian fakta yang dingin dan akurat dengan kebutuhan akan penilaian yang lebih fleksibel dan adil, di mana keseimbangan di antara keduanya penting agar laporan keuangan tetap akurat, relevan, dan etis.

13. Prinsip Daya Banding

Kelemahan dan ketidakkonsistenan dalam prinsip daya banding muncul dari tantangan dalam memastikan laporan keuangan benar-benar dapat dibandingkan antar periode atau antar perusahaan. Meskipun prinsip ini bertujuan memudahkan analisis kinerja, dalam praktiknya, perusahaan sering kali menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda, seperti metode penyusutan, pengakuan pendapatan, atau penilaian inventaris. Akibatnya, data yang disajikan tidak sepenuhnya sebanding. Lebih jauh lagi, satu perusahaan bahkan bisa mengubah kebijakan akuntansinya dari periode ke periode, yang pada akhirnya menyebabkan hasil keuangan menjadi tidak konsisten. Dalam konteks yang lebih luas, Zeff menyoroti empat faktor yang dapat menghambat daya banding global laporan keuangan, yaitu budaya bisnis dan keuangan, budaya akuntansi, budaya audit, serta budaya regulasi. Faktor-faktor ini semakin memperumit proses analisis, karena mengurangi keandalan data perbandingan. Hal ini berisiko menyesatkan pemangku kepentingan dalam menilai kinerja relatif perusahaan. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan mungkin kesulitan melakukan perbandingan yang

akurat, karena laporan yang tampak serupa bisa menunjukkan perbedaan signifikan dalam praktiknya.[50]

Oposisi biner dalam prinsip daya banding terletak pada bisa dibandingkan versus tidak bisa dibandingkan. Di satu sisi, prinsip ini menekankan bahwa laporan keuangan harus disusun agar memungkinkan perbandingan antar periode atau antar perusahaan, membantu pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kinerja secara konsisten. Di sisi lain, kenyataan menunjukkan bahwa laporan keuangan sering kali tidak bisa dibandingkan secara sempurna karena adanya perbedaan kebijakan akuntansi, seperti metode penyusutan atau pengakuan pendapatan, yang bervariasi antara perusahaan atau berubah dari satu periode ke periode lain dalam perusahaan yang sama. Ketegangan ini mencerminkan konflik antara keinginan untuk menciptakan laporan yang sebanding dan kendala nyata dari perbedaan praktik akuntansi, sehingga perbandingan laporan keuangan bisa menjadi tidak akurat atau menyesatkan.

14. Prinsip Konsistensi

Kelemahan dan ketidakkonsistenan dalam prinsip konsistensi muncul dari kewajiban untuk menerapkan metode akuntansi yang sama dalam laporan keuangan antar periode, guna memastikan data dapat dibandingkan dengan adil dan akurat. Meskipun prinsip ini bertujuan meningkatkan keandalan analisis tren, dalam praktiknya, perubahan

[50]Barbara Kawa, "The Problems with Comparability Among Financial Statements Prepared within Polish Entities under IFRS: English," *Journal of Management and Financial Sciences*, no. 47 (28 September 2023): 11, doi:10.33119/JMFS.2023.47.1.

kondisi bisnis atau kebijakan ekonomi sering kali menuntut penyesuaian metode akuntansi, seperti mengubah metode penyusutan atau penilaian inventaris. Ketika perusahaan melakukan perubahan metode akuntansi, perbandingan antar periode menjadi kurang relevan atau bahkan menyesatkan, karena data yang dihasilkan tidak sepenuhnya sebanding dengan periode sebelumnya. Selain itu, penerapan konsistensi tanpa fleksibilitas dapat menghambat perusahaan untuk memperbarui metode yang lebih sesuai dengan kondisi atau standar terbaru. Akibatnya, laporan keuangan mungkin tampak konsisten, tetapi gagal mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya, yang dapat membingungkan pemangku kepentingan dalam menilai kinerja perusahaan.[51]

Oposisi biner dalam prinsip konsistensi terletak pada penerapan metode yang konsisten versus kebutuhan akan fleksibilitas metode. Di satu sisi, prinsip ini menuntut agar perusahaan menggunakan metode akuntansi yang sama antar periode, sehingga laporan keuangan dapat dibandingkan secara adil dan akurat. Di sisi lain, perubahan kondisi bisnis, standar akuntansi, atau kebijakan ekonomi dapat menuntut fleksibilitas untuk mengubah metode agar lebih relevan dan sesuai dengan kondisi saat ini. Ketegangan ini menciptakan konflik antara kebutuhan untuk mempertahankan konsistensi demi keandalan data historis dan kebutuhan untuk menyesuaikan metode akuntansi agar

[51]Soewelo, "Pentingnya Penerapan Prinsip Konsistensi dalam Pengakuan Pendapatan dan Pengaruhnya terhadap Kewajiban Penyajian Laporan Laba/Rugi," 137.

laporan lebih mencerminkan realitas ekonomi yang berubah. Akibatnya, pemangku kepentingan bisa menerima laporan yang tampak konsisten tetapi mungkin tidak lagi relevan, atau laporan yang relevan tetapi sulit dibandingkan dengan periode sebelumnya.

15. Prinsip Netralitas

Kelemahan dan ketidakkonsistenan dalam prinsip netralitas muncul dari idealisme bahwa informasi keuangan disajikan tanpa memihak agar semua pengguna laporan menerima informasi yang objektif dan dapat dipercaya. Namun, dalam praktik, perusahaan sering menghadapi tekanan dari berbagai pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, atau regulator yang mungkin memiliki kepentingan berbeda. Tekanan ini dapat memengaruhi penyajian data, misalnya dengan menyusun laporan agar terlihat lebih menguntungkan atau stabil demi kepentingan investor. Ketidakkonsistenan muncul ketika laporan terlihat objektif di permukaan tetapi sebenarnya mencerminkan bias yang halus seperti melalui pilihan metode akuntansi yang menguntungkan satu pihak. Hal ini berpotensi menyesatkan pengguna laporan karena data yang disajikan mungkin tidak sepenuhnya netral dan mengaburkan kondisi riil perusahaan.[52]

Oposisi biner dalam prinsip netralitas terletak pada penyajian data yang netral versus penyajian data yang bias. Di satu sisi, prinsip ini menekankan pentingnya menyajikan informasi keuangan secara netral

[52]Bruno Marsigalia dan Renato Giovannini, "Sector Neutrality: A Possible Improvement of the Accounting Standards. Evidence from Nz Model," *Corporate Ownership and Control* 16, no. 2 (2019): 77.

tanpa keberpihakan untuk memastikan semua pengguna laporan mendapatkan gambaran yang objektif dan dapat dipercaya mengenai kondisi perusahaan. Di sisi lain, kenyataan menunjukkan bahwa tekanan dari berbagai pihak seperti investor atau kreditor dapat menciptakan bias dalam penyajian data, misalnya dengan memilih metode akuntansi yang menguntungkan pihak tertentu atau membuat laporan terlihat lebih stabil. Konflik ini mencerminkan ketegangan antara keinginan untuk mempertahankan netralitas dan kecenderungan menyajikan data yang menguntungkan pihak tertentu, yang pada akhirnya dapat mengaburkan objektivitas laporan keuangan bagi pemangku kepentingan.

16. Prinsip Tepat Waktu

Kelemahan dan ketidakkonsistenan dalam prinsip ketepatan waktu muncul dari tuntutan untuk menyajikan informasi keuangan secepat mungkin agar tetap relevan bagi pengambilan keputusan. Meskipun prinsip ini penting untuk memastikan bahwa data keuangan tersedia tepat waktu, pelaporan yang terburu-buru sering kali mengorbankan keakuratan dan keandalan data. Dalam praktiknya, penyajian yang terlalu cepat dapat mengakibatkan kesalahan atau data yang belum sepenuhnya diperiksa, yang pada akhirnya dapat menyesatkan pemangku kepentingan. Ketidakkonsistenan juga terjadi ketika perusahaan harus menyeimbangkan antara ketepatan waktu dan akurasi, yang terkadang sulit dicapai. Keputusan untuk merilis laporan lebih cepat bisa membuat laporan terlihat *up-to-date*, tetapi berisiko

mengandung ketidakakuratan yang bisa menurunkan kualitas informasi yang diterima pengguna laporan.[53]

Oposisi biner dalam prinsip ketepatan waktu terletak pada penyajian informasi secara cepat versus penyajian informasi secara akurat. Di satu sisi, prinsip ini mengutamakan penyajian informasi keuangan secara cepat agar tetap relevan dan berguna bagi pengambilan keputusan. Di sisi lain, fokus pada kecepatan berisiko mengurangi akurasi, karena proses verifikasi dan pemeriksaan mungkin tidak selesai sepenuhnya. Konflik ini menunjukkan ketegangan antara kebutuhan akan kecepatan untuk menjaga relevansi informasi dan kebutuhan akan akurasi untuk memastikan informasi dapat dipercaya. Jika terlalu cepat, laporan mungkin kurang tepat; jika terlalu akurat, informasi bisa menjadi kurang relevan karena keterlambatan.

Selain kelemahan dan ketidakkonsistenan pada prinsip dasar akuntansi yang ada, terdapat pula temuan berupa pernyataan-pernyataan dalam dokumen resmi yang menjadi sumber prinsip dasar akuntansi. Pernyataan itu antara lain terdapat pada *Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Tahun 2019* sebagai berikut:

[53]Sella Yunita, Agrianti Komalasari, dan Saring Suhendro, "The Effect of Timeliness of Financial Reporting on Abnormal Return during the Covid-19 Period with Profitability and Company Size as Moderating Variables (Study on the Food and Beverages Sector Companies Listed on the IDX in 2020-2021)," *International Journal of Business and Applied Economics* 2, no. 3 (27 Mei 2023): 392–94, doi:10.55927/ijbae.v2i3.4304.

> Laporan keuangan disusun untuk pengguna yang memiliki pengetahuan memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomik serta pengguna yang meninjau dan menganalisis informasi dengan tekun. Terkadang bahkan pengguna yang telah terinformasikan dengan baik dan tekun juga perlu mencari bantuan dari seorang penasihat untuk memahami informasi tentang fenomena ekonomik yang kompleks.[54]

Berdasarkan uraian di atas, laporan keuangan disusun untuk pengguna yang memiliki pengetahuan memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomi. Namun, tidak semua orang memiliki pemahaman tersebut, sehingga publik menghadapi hambatan dalam mengakses laporan keuangan. Padahal, keterlibatan publik sangat penting untuk mengawal kejujuran dan transparansi perusahaan. Selain itu, menganalisis informasi keuangan memerlukan ketekunan tinggi dan sering kali membutuhkan bantuan dari penasihat profesional untuk memahami fenomena ekonomi yang kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi tidak mudah dipahami oleh setiap orang, sehingga menciptakan asimetri informasi antara perusahaan dan publik. Asimetri informasi ini dapat membuka peluang bagi terjadinya *fraud*, mengingat kurangnya pemahaman dan akses yang terbatas terhadap data keuangan yang sebenarnya. Masih dalam dokumen yang sama, terdapat pernyataan sebagai berikut:

[54]Ikatan Akuntan Indonesia, "Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan" (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2019), 14.

> Informasi adalah material jika penghilangan, salah saji atau pengaburan informasi tersebut diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum (lihat paragraf 1.05.) atas dasar laporan tersebut, yang memberikan informasi keuangan tentang entitas pelapor tertentu. Dengan kata lain, materialitas adalah aspek relevansi yang spesifik untuk suatu entitas tertentu berdasarkan sifat atau besarannya, atau keduanya, dari pos-pos di mana informasi tersebut berhubungan dalam konteks laporan keuangan masing-masing entitas. Oleh karena itu, DSAK IAI tidak dapat menetapkan suatu batas kuantitatif yang sama untuk materialitas atau menentukan apa yang dapat menjadi material dalam situasi tertentu.[55]

Ketiadaan batas kuantitatif untuk materialitas dalam laporan keuangan membuka peluang bagi praktik korupsi. Karena DSAK IAI tidak menetapkan angka atau persentase yang tegas untuk menentukan apa yang dianggap material, pihak yang bertanggung jawab dapat dengan mudah menginterpretasikan batas materialitas sesuai dengan kepentingan mereka. Hal ini memungkinkan penghilangan, penyajian salah, atau pengaburan informasi penting yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna utama laporan keuangan, seperti investor dan kreditor. Fleksibilitas dalam penentuan materialitas ini menyulitkan auditor dan regulator untuk mengidentifikasi serta mencegah manipulasi data, sehingga meningkatkan risiko terjadinya korupsi. Selain itu, tanpa standar kuantitatif yang jelas, konsistensi dalam pelaporan keuangan menjadi sulit dijaga, yang pada akhirnya dapat merusak integritas

[55]Ikatan Akuntan Indonesia, "Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan", 10.

laporan keuangan dan menurunkan kepercayaan publik serta stabilitas pasar keuangan.

C. Pembalikan Hierarki

Pembalikan hierarki adalah pendekatan analitis yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengubah oposisi biner dalam prinsip dasar akuntansi. Dengan meninjau kembali pasangan oposisi, pendekatan ini mengungkap kelemahan dan inkonsistensi yang mungkin terselubung dalam struktur hierarki tradisional. Pendekatan ini memungkinkan perubahan prioritas pada prinsip dominan atau penambahan variabel baru di luar dualitas. Dengan begitu, prinsip akuntansi dapat menjadi lebih fleksibel dan adaptif, meningkatkan keandalan dan relevansi informasi keuangan yang dihasilkan, sekaligus mengatasi keterbatasan dari oposisi biner yang terlalu kaku. Berikut adalah pembalikan hierarki dari oposisi biner tersebut:

1. Prinsip Entitas Ekonomi

Pembalikan hierarki dalam prinsip entitas ekonomi berfungsi menyesuaikan prinsip ini dengan realitas usaha kecil, di mana keuangan pribadi pemilik dan bisnis sering kali sulit dipisahkan sepenuhnya. Prinsip entitas ekonomi yang berakar pada filosofi kapitalis awalnya menekankan pemisahan aset pemilik dari aset bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan objektivitas dalam pengelolaan.[56] Namun,

[56]Iwan Triyuwono, "Konsekuensi Penggunakan Entity Theory sebagai Konsep Dasar Standar Akuntansi Perbankan Syari'ah," *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 7, no. 1 (2003): 38, https://journal.uii.ac.id/JAAI/article/view/849.

pada usaha kecil, keuangan pribadi dan bisnis sering saling terkait, sehingga keputusan pribadi pemilik berdampak langsung pada kondisi perusahaan. Pembalikan hierarki mengubah dominasi pemisahan mutlak menjadi lebih fleksibel dengan mengakui keterkaitan ini. Pendekatan ini menekankan tanggung jawab bersama, selaras dengan nilai kebersamaan, dan menciptakan stabilitas dalam pengelolaan bisnis.

Di perusahaan besar, pembalikan hierarki dalam prinsip entitas ekonomi memiliki implikasi berbeda. Dengan struktur organisasi yang lebih kompleks dan pemisahan keuangan yang ketat, prinsip ini membantu menjaga objektivitas dan akurasi keuangan. Keputusan pribadi pemilik tidak langsung memengaruhi bisnis, namun pembalikan hierarki tetap penting untuk meningkatkan tanggung jawab sosial dan memperkuat keterlibatan antar departemen. Dengan mengakui keterkaitan antara perusahaan dan komunitas, perusahaan besar dapat menciptakan lingkungan kerja inklusif, meningkatkan reputasi, dan memperkuat stabilitas jangka panjang melalui keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial.

2. Prinsip Unit Moneter

Pembalikan hierarki dalam prinsip unit moneter muncul sebagai respons terhadap ketidakstabilan mata uang lokal akibat inflasi dan fluktuasi ekonomi. Akuntansi biasanya menggunakan mata uang setempat, seperti rupiah, dengan asumsi stabilitas nilai untuk memudahkan pencatatan dan perbandingan data keuangan. Namun, perubahan nilai uang sering kali menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan nilai riil aset. Oleh karena itu, muncul gagasan untuk

beralih ke satuan ukur yang lebih stabil, seperti dolar atau emas, yang lebih tahan terhadap inflasi dan perubahan nilai pasar. Penelitian Harahap menunjukkan bahwa dinar emas lebih stabil daripada dolar atau rupiah, menjadikannya alternatif yang relevan untuk menciptakan laporan keuangan yang lebih akurat di tengah fluktuasi ekonomi.[57]

3. Prinsip Periode Waktu

Pembalikan hierarki dalam prinsip periode waktu mengubah pelaporan dari interval tetap ke pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif. Pelaporan tradisional, seperti tahunan atau kuartalan, memberikan konsistensi dalam penilaian kinerja, tetapi kurang mencerminkan dinamika perusahaan. Batasan ini sering membuka peluang untuk manipulasi (*window dressing*), di mana perusahaan memperbaiki tampilan kinerja menjelang akhir periode pelaporan.[58] Dengan pendekatan pelaporan yang lebih fleksibel, laporan keuangan dapat lebih akurat mencerminkan kondisi sebenarnya perusahaan, menanggapi perubahan yang terjadi secara *real-time*. Pembalikan ini mendobrak batasan interval tetap, memberikan gambaran yang lebih menyeluruh & mengurangi potensi distorsi dalam laporan kinerja perusahaan.

---

[57]Darwis Harahap, "Analisis Stabilitas Dinar Emas dan Dolar AS dalam Denominasi Rupiah," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (29 Juli 2014): 269.

[58]Wanda Destina Putri dan Shinta Permata Sari, "Fenomena Sell in May, Window Dressing, December Effect, dan January Effect terhadap Dinamika Harga Saham Perbankan," *UMMagelang Conference Series*, 1 Agustus 2022, 615–16.

4. Prinsip Biaya (Biaya Historis)

Pembalikan hierarki dalam prinsip biaya historis mencerminkan perubahan dari pendekatan pencatatan biaya awal menuju pendekatan nilai yang lebih akurat, yaitu *fair value* dan *true value*. Prinsip biaya historis, yang bertumpu pada biaya perolehan awal aset, sering tidak relevan karena tidak mencerminkan perubahan nilai pasar dan inflasi. Ketika aset, terutama properti, mengalami apresiasi signifikan, pencatatan berbasis biaya awal dapat memberikan gambaran keuangan yang kurang tepat.[59] *Fair value* menawarkan alternatif dengan mencerminkan nilai pasar saat ini, namun tetap berisiko kurang stabil. Di sisi lain, *true value* berupaya memberikan representasi nilai aset yg sesungguhnya, meskipun memerlukan pertimbangan mendalam & akuntabilitas tinggi.[60] Pergeseran ini memperlihatkan perdebatan antara akurasi ekonomi dan objektivitas pencatatan, menekankan pentingnya relevansi & keadilan informasi keuangan bagi pemangku kepentingan. Harahap menyatakan bahwa pada awalnya, laporan keuangan masih melaporkan *true value*, yaitu nilai aset yang sebenarnya. Namun, seiring perkembangan zaman, konsep ini bergeser menjadi *fair value*, atau nilai wajar aset. Saat ini, akuntansi konvensional tidak lagi mampu menjamin *true value*.[61]

---

[59]Evi Rahmawati, "Support and Against Historical Cost Accounting: Is It Value Relevance for Decision Making?," *Journal of Accounting and Investment* 7, no. 1 (2006): 123.

[60]Irwanto Handojo, "Sekelumit Konservatisme Akuntansi," *Media Bisnis* 4, no. 2 (30 September 2012): 1, doi:10.34208/mb.v4i2.1464.

[61]Ahmad Riyansyah, "Pemikiran Sofyan Syafri Harahap tentang Akuntansi Syariah Dan Penerapannya," AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law

5. Prinsip Pengungkapan Paripurna

Pembalikan hierarki dalam prinsip pengungkapan paripurna menggeser fokus dari pengungkapan terbatas pada informasi material menuju pengungkapan penuh yang mencakup informasi material dan non-material. Awalnya, prinsip ini hanya mewajibkan pengungkapan informasi yang dianggap penting bagi pemangku kepentingan.[62] Namun, Pendekatan tersebut sering mengabaikan informasi non material yang dapat memengaruhi pemahaman lengkap tentang kondisi perusahaan. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa pengungkapan hanya informasi material tidak selalu mencerminkan transparansi penuh, sehingga pemangku kepentingan mungkin kehilangan gambaran yang lebih menyeluruh. Dengan beralih ke pengungkapan hal yang material dan non material, perusahaan dapat menyajikan informasi yang lebih akurat dan komprehensif. Walaupun laporan menjadi lebih kompleks, hal ini mendukung akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik karena semua informasi relevan tersedia.

6. Prinsip Kesinambungan Usaha

Pembalikan hierarki dalam prinsip kesinambungan usaha menggeser asumsi keberlanjutan jangka panjang ke fokus pada kesiapan menghadapi likuidasi atau kebangkrutan. Prinsip tradisional menganggap perusahaan akan terus beroperasi dalam jangka panjang, sehingga aset dicatat berdasarkan biaya perolehan untuk stabilitas

1, no. 2 (21 Juli 2017): 20, http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/837.

[62]Hoesada, *Teori Akuntansi dalam Hampiran*, 260.

pelaporan. Namun, asumsi ini mengabaikan kemungkinan likuidasi akibat krisis finansial atau perubahan besar dalam bisnis. Dalam situasi seperti itu, biaya perolehan tidak mencerminkan nilai pasar realistis, sehingga laporan keuangan bisa menyesatkan pemangku kepentingan. Oposisi ini menyoroti dilema antara stabilitas pelaporan dan keakuratan dalam kondisi krisis, serta perlunya penyesuaian standar pelaporan untuk mencerminkan kondisi aktual. Contohnya, Standar Audit (SA) 570 dari Institut Akuntan Publik Indonesia mengizinkan penggunaan basis likuidasi jika kelangsungan usaha tidak relevan, seperti pada masa pandemi Covid-19. Hal ini menjaga objektivitas laporan keuangan dan membantu manajemen membuat keputusan yang lebih tepat di tengah tantangan keuangan.[63]

7. Prinsip Mempertemukan (*Matching Principle*)

Pembalikan hierarki dalam prinsip mempertemukan (*matching principle*) mengubah asumsi bahwa biaya dan pendapatan selalu dapat dicatat dalam periode yang sama menjadi pengakuan bahwa keduanya mungkin terjadi di periode berbeda. Awalnya, prinsip ini bertujuan mencerminkan kinerja perusahaan dengan mencatat biaya dan pendapatan bersama-sama. Namun, dalam praktiknya, biaya dan pendapatan tidak selalu bersamaan, seperti biaya riset yang baru menghasilkan pendapatan di masa depan atau pendapatan yang diterima sebelum biaya terkait muncul. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan

[63]Institut Akuntan Publik Indonesia, "SA 570 (Revisi 2021) - Naskah Final Satuan.pdf," 2021, 16, https://drive.google.com/file/d/1PyWx2tHwc-gXtLSfF2K61CpRE_z_bB5b/preview?usp=embed_facebook.

ketegangan antara pencatatan ideal dan pencatatan realistis berdasarkan waktu kejadian. Akibatnya, laporan keuangan sering memerlukan estimasi atau alokasi yang subjektif, yang dapat mengurangi akurasi dan keandalan data.

8. Prinsip Pengakuan Pendapatan

Pembalikan hierarki dalam prinsip pengakuan pendapatan mengacu pada perbedaan antara basis akrual dan basis kas. Basis akrual mencatat pendapatan saat produk atau layanan diberikan, mencerminkan aktivitas ekonomi perusahaan meski pembayaran belum diterima. Ini memberikan gambaran kinerja yang lebih lengkap, tetapi tidak selalu menggambarkan kondisi kas sebenarnya, sehingga berisiko jika pembayaran tertunda atau gagal. Sebaliknya, basis kas hanya mencatat pendapatan saat pembayaran diterima, memberikan gambaran lebih jelas tentang likuiditas dan stabilitas keuangan. Ketegangan ini mencerminkan dilema antara mencatat aktivitas bisnis ideal dan menggambarkan kondisi kas aktual, dengan pemilihan basis tergantung pada tujuan pelaporan dan kebutuhan pemangku kepentingan.

9. Prinsip Materialitas

Pembalikan hierarki dalam prinsip materialitas mencerminkan pergeseran dari penyaringan informasi yang dianggap signifikan menuju penyajian penuh tanpa pengecualian. Prinsip materialitas tradisional memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk menyaring informasi yang dinilai tidak relevan bagi pengambilan keputusan, sehingga laporan fokus pada elemen yang benar-benar signifikan. Namun, ketidakkonsistenan muncul karena penentuan materialitas bersifat

subyektif, sebagaimana diakui oleh FASB, dan dapat berbeda antar pemangku kepentingan.[64] Hal ini berarti informasi yang diabaikan oleh satu pihak bisa saja dianggap penting oleh pihak lain. Ketegangan ini menunjukkan adanya dilema antara efisiensi dan transparansi. Sementara penyaringan informasi dapat meringankan beban analisis, pelaporan penuh tanpa pengecualian memberikan gambaran yang lebih komprehensif, meminimalkan risiko manipulasi, dan meningkatkan kepercayaan publik. Pergeseran ini menekankan pentingnya penyajian data yang akurat dan transparan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang beragam dari para pemangku kepentingan.

10. Prinsip Konservatisme

Pembalikan hierarki dalam prinsip konservatisme mengarah pada pergeseran dari pendekatan konservatif menuju pengakuan apa adanya untuk mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara lebih seimbang. Prinsip konservatisme awalnya mengharuskan pengakuan potensi kerugian segera dan menunda pengakuan keuntungan hingga terealisasi, bertujuan untuk menjaga kehati-hatian dan menghindari optimisme yang berlebihan dalam laporan keuangan. Namun, menurut IASB, pendekatan ini sering kali menghasilkan laporan yang terlalu pesimistis dan bias, sehingga menciptakan ketidakkonsistenan karena perlakuan yang berbeda antara keuntungan dan kerugian.[65] Dalam situasi

[64]Maria Silvia Avi, "Materiality and Relevance in Financial Reporting. Interpretation Problems and Solutions Adopted Internationally.," *International Journal of Accounting and Finance Studies* 5, no. 2 (22 Juni 2022): 30, doi:10.22158/ijafs.v5n2p1.

[65]Fuad Hudaya Fatchan dan Ari Kuncara Widagdo, "Perplexity in Accounting Conservatism: A Critical Review," *Riset Akuntansi Dan Keuangan*

ini, pengakuan apa adanya, di mana baik kerugian maupun keuntungan diakui sesuai kejadian aktual, menawarkan transparansi yang lebih baik dan memberikan gambaran kinerja yang lebih akurat. Pergeseran ini mencerminkan kebutuhan untuk menyediakan informasi yang netral dan relevan, yang memungkinkan pemangku kepentingan menilai kondisi perusahaan tanpa pengaruh bias konservatif yang berlebihan.

11. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk

Pembalikan hierarki dalam prinsip substansi mengungguli bentuk menunjukkan pergeseran dari dominasi realitas ekonomi ke keseimbangan antara substansi ekonomi dan bentuk hukum. Prinsip ini pada awalnya menekankan pentingnya mencatat transaksi berdasarkan substansi ekonomi untuk menggambarkan kondisi perusahaan dengan lebih akurat, sering kali melebihi aspek formalitas hukum. Namun, penerapannya menghadapi kendala karena perbedaan antara substansi ekonomi dan bentuk legal tidak selalu jelas, yang membuka ruang untuk penilaian subjektif dan potensi manipulasi. Kasus Enron, di mana utang disembunyikan melalui entitas khusus (SPE), menunjukkan bahaya jika legalitas diabaikan sepenuhnya.[66] Ketegangan ini menggambarkan dilema antara akurasi yang dicapai dengan substansi ekonomi dan kepastian hukum yang diberikan oleh bentuk legal. Dengan bergeser ke keseimbangan antara keduanya, perusahaan dapat mencapai pelaporan

Indonesia 6, no. 1 (2 Juni 2021): 42, doi:10.23917/reaksi.v6i1.13824.

[66]Shihan Liu, Lingyuan Lu, dan Yidi Wu, "The Role of SPEs in the Enron Scandal and Its Implications for China" (2021 International Conference on Financial Management and Economic Transition (FMET 2021), Atlantis Press, 2021), 5, doi:10.2991/aebmr.k.210917.00

yang lebih objektif, akurat, dan sesuai regulasi, sehingga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

12. Prinsip Objektivitas

Pembalikan hierarki dalam prinsip objektivitas mencerminkan pergeseran dari objektivitas murni menuju keseimbangan dengan subjektivitas yang disertai etika. Prinsip objektivitas awalnya menekankan penyajian data yang bebas dari pandangan pribadi, dengan tujuan menjaga akurasi dan keandalan laporan. Namun, penerapan objektivitas tanpa mempertimbangkan aspek moral dan etika sering kali mengabaikan keadilan. Dalam praktiknya, objektivitas murni dapat digunakan untuk melegalkan tindakan yang tidak etis, seperti manipulasi atau pembenaran atas kecurangan, karena hanya berfokus pada fakta yang dapat diverifikasi.[67] Sebaliknya, subjektivitas yang didasarkan pada etika menawarkan penilaian yang lebih fleksibel dan manusiawi, tetapi juga membawa risiko bias. Ketegangan antara objektivitas dan subjektivitas ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan agar laporan keuangan tidak hanya akurat, tetapi juga adil dan bertanggung jawab secara moral.

13. Prinsip Daya Banding

Pembalikan hierarki dalam prinsip daya banding menunjukkan pergeseran dari anggapan bahwa laporan keuangan dapat dibandingkan secara konsisten menuju kesadaran bahwa perbedaan kebijakan

[67]Allysha Powanda Winburn dan Chaunesey M.J. Clemmons, "Objectivity is a Myth that harms The practice and Diversity of Forensic Science," Forensic Science International: Synergy 3 (13 September 2021): 2–3, doi:10.1016/j.fsisyn.2021.100196.

akuntansi dapat menghambat daya banding yang sebenarnya. Prinsip ini bertujuan agar laporan keuangan antar periode atau antar perusahaan mudah dibandingkan, sehingga pemangku kepentingan dapat menilai kinerja secara objektif. Namun, kenyataannya, variasi kebijakan akuntansi seperti metode penyusutan, pengakuan pendapatan, atau penilaian inventaris membuat data tidak sepenuhnya sebanding. Bahkan dalam satu perusahaan, perubahan kebijakan dari satu periode ke periode berikutnya dapat menimbulkan ketidakkonsistenan yang menyulitkan perbandingan langsung. Ketegangan ini menciptakan konflik antara harapan untuk memperoleh laporan yang seragam dan kondisi nyata yang mengharuskan kebijakan yang berbeda, sehingga daya banding laporan keuangan dapat terganggu dan analisis menjadi kurang andal bagi pemangku kepentingan.

14. Prinsip Konsistensi

Pembalikan hierarki dalam prinsip konsistensi menunjukkan pergeseran dari kewajiban mempertahankan metode akuntansi yang sama antar periode menuju fleksibilitas dalam menyesuaikan metode sesuai kondisi ekonomi atau standar baru. Prinsip konsistensi bertujuan agar laporan keuangan dapat dibandingkan secara adil, meningkatkan keandalan analisis tren antar periode. Namun, perubahan kondisi bisnis atau kebijakan ekonomi sering kali mengharuskan penyesuaian, seperti mengubah metode penyusutan atau penilaian inventaris agar lebih sesuai dengan situasi terkini. Ketika metode diubah, data antar periode menjadi kurang sebanding, yang dapat menyesatkan atau membingungkan pemangku kepentingan. Ketegangan ini menunjukkan konflik antara

kebutuhan akan konsistensi historis dengan kebutuhan fleksibilitas untuk mencerminkan realitas ekonomi. Akibatnya, laporan keuangan yang tampak konsisten bisa jadi tidak relevan, atau sebaliknya, laporan relevan yang sulit diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

15. Prinsip Netralitas

Pembalikan hierarki dalam prinsip netralitas menunjukkan pergeseran dari tujuan ideal penyajian data yang sepenuhnya netral menuju realitas di mana tekanan dari pemangku kepentingan menciptakan bias dalam laporan keuangan. Prinsip ini seharusnya menjamin bahwa semua pengguna laporan menerima informasi objektif yang dapat dipercaya, sehingga keputusan yang diambil dapat berdasarkan fakta yang akurat. Namun, dalam praktiknya, perusahaan sering kali menghadapi tekanan dari investor, kreditor, atau regulator yang memiliki kepentingan berbeda, mendorong penyajian data yang lebih menguntungkan. Misalnya, laporan keuangan dapat disusun untuk tampak lebih stabil melalui pemilihan metode akuntansi tertentu yang sebenarnya mencerminkan bias. Ketegangan ini menciptakan konflik antara komitmen pada netralitas dan dorongan untuk mempresentasikan data yang menguntungkan pihak tertentu, yang berisiko menyesatkan pemangku kepentingan dan mengaburkan gambaran akurat tentang kondisi perusahaan.

16. Prinsip Tepat Waktu

Pembalikan hierarki dalam prinsip ketepatan waktu menggambarkan pergeseran dari fokus pada penyajian informasi keuangan secara cepat menuju keseimbangan antara kecepatan dan

akurasi. Prinsip ini mengharuskan informasi disajikan secepat mungkin agar tetap relevan bagi pengambilan keputusan. Namun, pelaporan yang terburu-buru sering kali mengorbankan keakuratan data, karena informasi yang disajikan mungkin belum sepenuhnya diverifikasi. Ketidakkonsistenan muncul ketika perusahaan berusaha menyeimbangkan antara ketepatan waktu dan akurasi, yang sering kali sulit dicapai. Keputusan untuk merilis laporan lebih cepat dapat memberikan kesan informasi yang terbaru, tetapi risiko ketidakakuratan dapat menurunkan kualitas data yang diterima oleh pemangku kepentingan. Ketegangan ini menciptakan konflik antara kebutuhan akan informasi yang relevan dan pentingnya memastikan bahwa data yang disajikan adalah akurat dan dapat diandalkan.

Selain pembalikan hierarki pada prinsip dasar akuntansi, perubahan serupa diterapkan pada penyajian pernyataan dalam dokumen resmi sebagai sumber prinsip akuntansi. Fokus perubahan ini bergeser dari penyusunan informasi keuangan yang sulit dipahami menuju akses yang lebih mudah bagi publik. Sebelumnya, laporan keuangan disusun terutama untuk pengguna dengan pengetahuan mendalam tentang bisnis dan ekonomi, yang menciptakan hambatan bagi banyak pihak. Kini, peningkatan aksesibilitas laporan keuangan diupayakan untuk memastikan informasi dapat dipahami oleh lebih banyak pemangku kepentingan. Nilai kemudahan dalam memahami informasi keuangan menjadi semakin penting karena akses yang mudah memungkinkan publik untuk aktif menilai kinerja perusahaan dan mendukung transparansi.

Penerapan teknologi seperti AI, *big data*, dan *blockchain* dalam sektor keuangan turut berperan dalam menciptakan kemudahan ini. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan keamanan dan mempercepat transaksi, tetapi juga mendeteksi penipuan serta mengoptimalkan pengambilan keputusan dengan transparansi dan efisiensi yang lebih baik bagi masyarakat.[68] Selain itu, AI dalam praktik CSR mendukung upaya ini dengan mempermudah akses publik terhadap informasi, meningkatkan transparansi, serta menyajikan data yang akurat dan mudah dipahami, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam tanggung jawab sosial dan keberlanjutan perusahaan.[69] Perubahan ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan publik dalam menjaga transparansi dan kejujuran perusahaan, serta memastikan semua pihak dapat menilai kinerja keuangan secara akurat dengan informasi yang relevan dan mudah diakses.

Pembalikan hierarki dalam prinsip akuntansi juga ditandai dengan pergeseran dari ketiadaan batas kuantitatif untuk materialitas menuju penetapan batas yang jelas dalam standar akuntansi. Sebelumnya, ketidakjelasan mengenai apa yang dianggap material membuka peluang interpretasi subjektif yang dapat disalahgunakan

[68]Farah Labibah Caseba dan Totok Dewayanto, "Penerapan Artificial Intelligence, *big data*, dan Blockchain Dalam Fintech Payment terhadap Risiko Penipuan Komputer (Computer Fraud Risk): A Systematic Literature Review," *Diponegoro Journal of Accounting* 13, no. 3 (10 Juli 2024): 7–9, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/46058.

[69]Anna Viktorovna Shkalenko dan Anton V. Nazarenko, "Integration of AI and IoT into Corporate Social Responsibility Strategies for Financial Risk Management and Sustainable Development," *Risks* 12, no. 6 (Juni 2024): 17, doi:10.3390/risks12060087.

untuk memanipulasi informasi penting dalam laporan keuangan. Namun, perubahan dalam standar akuntansi yang kini menetapkan batas kuantitatif untuk materialitas memungkinkan interpretasi yang lebih konsisten dan transparan. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko manipulasi data, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Pembalikan ini memperkuat kepercayaan publik terhadap informasi yang disajikan, mencegah praktik korupsi, dan pada akhirnya meningkatkan integritas pasar keuangan. Meskipun tingkat materialitas dapat bervariasi untuk setiap jenis entitas, penerapan AI dapat memudahkan proses penentuan batas materialitas ini, termasuk untuk aspek tata kelola, sosial, dan lingkungan. Dengan bantuan AI, penilaian materialitas menjadi lebih akurat dan adaptif terhadap kebutuhan spesifik, mendukung transparansi dan keandalan laporan keuangan.[70]

D. Integrasi Nilai Tasawuf dalam Prinsip Dasar Akuntansi

1. Integrasi Nilai *Ṣuḥbah* dan *Ṣidq* pada Prinsip Entitas Ekonomi

Dalam sub bab sebelumnya, teridentifikasi adanya oposisi biner dalam prinsip entitas ekonomi, yaitu antara pemisahan aset dan penyatuan aset, di mana pemisahan aset merupakan oposisi biner yang dominan. Pertanyaannya adalah apakah posisi dominan ini akan digeser ke arah penyatuan aset atau tetap dipertahankan. Untuk mengatasi

[70]Benedikt Latos dkk., "Integration of Generative AI into a tool to assist participatory ESG double materiality assessment for SMEs," dalam *The Twentieth International Conference on Environmental, Cultural, Economic & Social Sustainability University of Aveiro* (the Twentieth International Conference on Environmental, Cultural, Economic & Social Sustainability University of Aveiro, Aveiro, 2024), 1–2.

ketegangan dalam oposisi biner tersebut, dilakukan integrasi nilai tasawuf. Realita di lapangan menunjukkan bahwa pemisahan aset umumnya diterapkan pada organisasi besar yang memiliki sumber daya dan struktur yang memadai, namun penerapannya menjadi lebih sulit pada organisasi kecil, nirlaba, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) akibat keterbatasan sumber daya dan kompleksitas operasional yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, integrasi nilai *ṣuḥbah* (persahabatan) dan *ṣidq* (kejujuran) berperan penting dalam mewujudkan prinsip akuntansi yang lebih etis, bermoral, dan spiritual. Nilai *ṣuḥbah* mencakup hubungan yang bebas dari egoisme dan kepentingan diri serta didasarkan pada keadilan dan saling menghormati, di mana persahabatan ideal dibangun dengan niat tulus, keseimbangan dalam memberi dan menerima, serta fleksibilitas tanpa fanatisme. Di sisi lain, nilai *ṣidq* menekankan kesadaran diri akan kelemahan manusia dan penerimaan penuh atas ketergantungan pada Tuhan, serta kemurnian niat dalam amal tanpa mengharapkan balasan. Integrasi kedua nilai ini membangun hubungan antara pemilik dan pengelola berdasarkan persahabatan dan kejujuran, yang memungkinkan komunikasi terbuka, transparansi dalam pengelolaan aset, serta pengambilan keputusan yang adil dan bijaksana. Dengan demikian, keputusan mengenai pemisahan atau penyatuan aset tidak mempengaruhi akuntabilitas selama pemilik dan pengelola menjunjung tinggi persahabatan dan kejujuran, sehingga integrasi nilai-nilai *ṣuḥbah* dan *ṣidq* menciptakan lingkungan organisasi yang harmonis, etis, dan berkelanjutan terlepas dari ukuran atau jenis organisasi tersebut.

2. Integrasi Nilai *Ijtihād* dan *Ṣidq* pada Prinsip Unit Moneter

Dalam sub bab sebelumnya, teridentifikasi adanya oposisi biner dalam prinsip unit moneter, yaitu antara satuan unit moneter lokal dan satuan ukur yang lebih stabil, di mana satuan unit moneter lokal merupakan pilihan yang lebih dominan. Tantangan yang muncul adalah apakah dominasi ini perlu digeser ke satuan ukur yang lebih stabil demi meningkatkan akurasi dalam pencatatan keuangan atau tetap dipertahankan. Untuk menjawab pertanyaan ini dan mengatasi ketegangan dalam oposisi tersebut, pendekatan integrasi nilai tasawuf diperkenalkan. Secara umum, akuntansi menggunakan mata uang lokal, seperti rupiah di Indonesia, sebagai satuan nilai moneternya.[71] Namun, ketidakstabilan mata uang lokal, khususnya saat terjadi inflasi, sering kali menurunkan keakuratan pencatatan. Standar satuan yang lebih stabil, baik dalam bentuk dolar, emas, atau instrumen lain yang tidak mudah terpengaruh oleh inflasi, dianggap lebih efektif dalam mencerminkan nilai fundamental dan kondisi pasar secara akurat. Oleh karena itu, faktor yang utama bukanlah jenis mata uang yang digunakan, tetapi apakah satuan tersebut cukup stabil untuk mempertahankan nilainya.

Kemajuan teknologi kini memungkinkan konversi antar mata uang melalui sistem digital yang cepat dan akurat, sehingga memudahkan penggunaan mata uang yang stabil sesuai kebutuhan

[71]"UU RI No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan," diakses 17 November 2024, https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/uu-bi/UndangUndang%20BI/Konsolidasi-UU-No.7-Tahun-2011-Mata%20Uang.pdf.

perusahaan. Hal ini membuka peluang untuk menggunakan mata uang lokal yang terjaga kestabilannya atau bahkan standar internasional, seperti dolar atau emas digital, sebagai satuan ukur yang lebih fleksibel dan dapat diandalkan. Laporan keuangan bisa disajikan dalam dua satuan alat ukur, misal Rupiah di Indonesia untuk mematuhi undang-undang, dan satunya dengan nilai ukur yang lebih terjamin kestabilannya. Dalam PSAK 52, mata uang fungsional didefinisikan sebagai mata uang yang digunakan dalam kegiatan operasi utama perusahaan, yang mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara substansial. Jika mata uang fungsional perusahaan adalah rupiah, maka mata uang pelaporan untuk penyajian laporan keuangan kepada pemerintah dan OJK harus menggunakan rupiah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[72] Untuk kepentingan internal dan publik, perusahaan dapat menyajikan lebih dari satu nilai ukur, dengan menggunakan rupiah sebagai mata uang pelaporan resmi dan mata uang lain yang lebih terjamin, seperti dolar atau emas, sebagai satuan ukur tambahan. Penyajian dalam mata uang yang lebih terjamin ini dapat meningkatkan kepercayaan publik, karena memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kestabilan nilai perusahaan di pasar internasional atau dalam konteks global.

Dalam konteks laporan keuangan, nilai *ijtihād* (kesungguhan) dan *ṣidq* (kejujuran) memainkan peran penting dalam memilih satuan ukur yang tepat untuk mencerminkan nilai perusahaan dengan akurat.

[72]Ikatan Akuntan Indonesia, "PSAK 52 tentang Mata Uang Pelaporan," 1998.

Ijtihād mencerminkan upaya sungguh-sungguh perusahaan dalam memilih satuan ukur yang paling relevan dan stabil, baik itu mata uang lokal seperti rupiah, mata uang internasional seperti dolar, atau bahkan standar komoditas yang lebih terjamin seperti emas. Pemilihan satuan ukur yang tepat, sesuai dengan kondisi ekonomi dan tujuan perusahaan, menjadi kunci untuk menggambarkan keadaan ekonomi perusahaan secara objektif. Di sisi lain, *ṣidq* menuntut agar pencatatan dan penyajian nilai dilakukan dengan keterbukaan dan transparansi, memastikan bahwa angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan adalah jujur, tidak terpengaruh oleh fluktuasi eksternal yang tidak relevan, seperti inflasi atau perubahan nilai tukar. Dengan mengintegrasikan kedua nilai ini, *ijtihād* memberikan kesungguhan dalam memilih satuan ukur yang sesuai, sementara *ṣidq* memastikan kejujuran dan integritas dalam penyajian informasi. Hal ini menghasilkan laporan keuangan yang stabil, akurat, dan dapat dipercaya, serta memberikan gambaran yang jujur tentang kondisi ekonomi perusahaan, baik untuk kepentingan internal maupun publik.

3. Integrasi Nilai *Murāqabah* pada Prinsip Periode Waktu

Dalam sub bab sebelumnya, teridentifikasi adanya oposisi biner dalam prinsip periode waktu, yaitu antara satuan periode waktu yang tetap dan periode waktu yang fleksibel, di mana periode waktu yang tetap merupakan oposisi biner yang dominan, umumnya 1 tahun. Prinsip periode waktu memungkinkan terjadinya penundaan atau manipulasi dalam pelaporan, yang dapat membuka peluang untuk korupsi. Oleh karena itu, diperlukan prinsip lain yang memungkinkan laporan

keuangan diakses dan disajikan secara langsung serta transparan setiap saat. Prinsip baru tersebut tidak hanya menjaga kejujuran, tetapi juga mempercepat pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap perubahan kondisi keuangan. Dengan dukungan teknologi modern, pelaporan secara *real-time* dapat dilakukan, sehingga informasi lebih akurat dan terbuka. Kubaščíková dkk. juga menekankan pentingnya fleksibilitas dalam pelaporan, di mana fleksibilitas ini tidak terpancang pada periode tahunan, sehingga pelaporan dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan untuk menjaga kejujuran dan transparansi data akuntansi.[73] Hal tersebut selaras dengan Pasal 78 ayat 4 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa RUPS dapat diselenggarakan kapan saja sesuai kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.[74] Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memastikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, tetapi juga menjaga agar laporan keuangan tetap konsisten dan jujur, serta melindungi integritas perusahaan dari potensi manipulasi yang sering terjadi dalam pelaporan berbasis periode tetap.

Pertanyaannya adalah apakah posisi dominan ini akan digeser oleh periode waktu fleksibel atau tetap dipertahankan. Periode waktu fleksibel ini mengandung arti harus siap tersaji kapan pun juga

[73]Zuzana Kubaščíková, Zuzana Juhászová, dan Miloš Tumpach, "Analysis of Reporting Period Flexibility," *SHS Web of Conferences* 83 (2020): 6, doi:10.1051/shsconf/20208301037.

[74]OJK, "UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas," 20, diakses 16 November 2024, https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Documents/5.%20UU-40-2007%20PERSEROAN%20TERBATAS.pdf.

mencegah mempercantik laporan keuangan di akhir periode. Untuk mengatasi ketegangan dalam oposisi biner tersebut, dilakukan integrasi nilai tasawuf. Oleh karena itu, integrasi nilai *murāqabah* (pengawasan terus-menerus) dalam oposisi biner ini akan berfungsi sebagai prinsip pengendalian internal yang melekat dalam proses pelaporan keuangan. *murāqabah* mengimplikasikan adanya kesadaran dan tanggung jawab moral yang konsisten dalam pengawasan, sehingga setiap pelaku dalam sistem akuntansi senantiasa merasa diawasi, tidak hanya oleh aturan eksternal, tetapi juga oleh nilai-nilai internal yang mendorong kejujuran dan transparansi. Dengan prinsip *murāqabah*, pelaporan keuangan dapat disiapkan kapan pun tanpa perlu menunggu akhir periode tertentu, sehingga mencegah potensi *window dressing* atau upaya mempercantik laporan pada waktu-waktu tertentu untuk mengesankan kondisi yang lebih baik dari yang sebenarnya. Selain itu, dengan adanya *murāqabah*, pelaporan *real-time* menjadi lebih dapat diandalkan, karena integritas pelaku akuntansi didukung oleh kesadaran etis yang mengedepankan kejujuran dan keterbukaan. Dengan begitu, prinsip ini tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga mendorong budaya kerja yang berorientasi pada akuntabilitas dan siap sedia dalam memberikan laporan yang transparan sesuai kebutuhan sewaktu-waktu, tanpa manipulasi.

4. Integrasi Nilai *Ijtihād* dan *Ṣidq* pada Prinsip Biaya Historis

Dalam sub bab sebelumnya, teridentifikasi adanya oposisi biner dalam prinsip biaya, yaitu antara biaya historis dan nilai wajar, dengan biaya historis sebagai prinsip dominan. Di luar oposisi ini muncul pula

prinsip *true value*. Perdebatan antara prinsip biaya historis (*historical cost*) dan nilai wajar (*fair value*) telah lama menjadi isu dalam ranah akademis. Prinsip *historical cost*, yang berfokus pada pencatatan aset berdasarkan biaya perolehan, sering dianggap kurang tepat dalam mencerminkan nilai pasar, terutama di tengah fluktuasi pasar. Pencatatan ini sering kali mengabaikan perubahan nilai pasar dan dampak inflasi, sehingga mengurangi relevansi laporan keuangan. Akibatnya, penilaian kinerja aset menjadi kurang akurat, dan transparansi bagi investor serta pemangku kepentingan berkurang. Selain itu, pencatatan berdasarkan *historical cost* cenderung memberikan gambaran statis yang tidak menyesuaikan dengan dinamika pasar, sehingga menimbulkan perbedaan signifikan antara nilai buku dan nilai pasar aset.[75]

Perdebatan antara nilai wajar (*fair value*) dan nilai sebenarnya (*true value*) juga menjadi topik penting dalam diskusi ini. Handojo menjelaskan bahwa konservatisme akuntansi sering kali membuat laporan keuangan lebih pesimis, dengan angka yang dilaporkan cenderung lebih rendah dari *true value* untuk mengurangi risiko.[76] Farahmita menambahkan bahwa perusahaan dengan tingkat asimetri informasi tinggi lebih memilih *fair value* agar laporan lebih relevan dengan kondisi pasar, meskipun tetap berupaya mencerminkan *true value*.[77] Savitri menekankan pentingnya menjaga *true value* dalam

[75]Rahmawati, "Support and Against Historical Cost Accounting," 123.

[76]Handojo, "Sekelumit Konservatisme Akuntansi," 1.

[77]Monica Weni Pratiwi dan Reta Sharfina Tahar, "Analisis Pengaruh Tingkat Hutang, Ukuran Perusahaan, Informasi Asimetri, Selisih Keuntungan Nilai Wajar, dan Kepemilikan Saham terhadap Pemilihan Metode Nilai Wajar pada Properti Investasi," *Media Riset Akuntansi* 7, no. 1 (22 Agustus 2017):

laporan keuangan untuk memenuhi prinsip *faithful representation* serta mencegah manipulasi laba yang merugikan pemangku kepentingan.[78] Harahap menyatakan bahwa awalnya, laporan keuangan melaporkan *true value*, yaitu nilai aset yang sebenarnya. Namun, seiring perkembangan, konsep ini bergeser menjadi *fair value*, atau nilai wajar aset. Saat ini, akuntansi konvensional tidak lagi mampu menjamin *true value*, sehingga diperlukan pendekatan akuntansi Islam yang lebih transparan dan adil.[79] Dean menegaskan bahwa IFRS, sebagai standar akuntansi global berbasis prinsip, memberikan fleksibilitas dalam penggunaan *true value* dan *fair value*. Di negara-negara seperti Australia dan Inggris, prinsip ini mengharuskan laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan secara benar dan adil, meskipun penerapannya sering terasa kaku karena terikat pada standar yang ada.[80]

Berdasarkan uraian di atas, prinsip *historical cost* dan *fair value* dapat kembali menggunakan prinsip *true value*. Prinsip ini sesuai dengan nilai *ṣidq*, yang menekankan akurasi dan kejujuran. *True value* membutuhkan usaha keras atau *ijtihād* untuk mencapai penilaian yang

---

103.

[78]Hangga Darisman dan Vinola Herawaty, "Pengaruh Auditor Tenure Terhadap Konservatisme Akuntansi dengan Konvergensi Ifrs Sebagai Variabel Moderasi," Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan, 29 Oktober 2019, 2.43.1, doi:10.25105/semnas.v0i0.5832.

[79]Ahmad Riyansyah, "Pemikiran Sofyan Syafri Harahap tentang Akuntansi Syariah Dan Penerapannya," AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law 1, no. 2 (21 Juli 2017): 20, http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/837.

[80]Graeme Dean dan Frank Clarke, "'True and Fair' and 'Fair Value'—Accounting and Legal Will-o'-the-Wisps," *Abacus* 41 (1 Juni 2005): ii–iii, doi:10.1111/j.1467-6281.2005.00174.x.

sesuai dengan nilai sebenarnya, bukan hanya berdasarkan nilai wajar atau nilai pasar. Prinsip ini menekankan pentingnya penilaian yang akurat terhadap aset, mencerminkan nilai riil yang tidak hanya bergantung pada harga pasar tetapi juga mempertimbangkan faktor mendasar. Nilai *ijtihād* dalam konteks ini berarti kesungguhan yang mengarahkan fokus pada perintah Allah, menjalankan tugas dan tanggung jawab, bukan pada takdir yang telah dijamin. Dengan petunjuk Tuhan, usaha menjadi lebih terarah dan bermakna, menghasilkan kebaikan serta menjauhkan dari kekhawatiran akan hal-hal di luar kendali. *Ṣidq* menekankan kesadaran diri akan kelemahan manusia dan ketergantungan penuh pada Tuhan, serta kemurnian niat dalam amal tanpa mengharapkan balasan.

Oleh karena itu, integrasi nilai *ijtihād* dan *ṣidq* dalam oposisi biner maupun dalam munculnya sesuatu di luar oposisi biner memungkinkan penerapan prinsip akuntansi yang lebih mendalam dan jujur, berorientasi pada kebenaran nilai aset yang sesungguhnya. *ijtihād* mendorong usaha untuk mencapai penilaian aset yang tepat melalui kajian mendalam, tidak sekadar mengandalkan nilai pasar atau standar yang ada, sementara *ṣidq* mendasari penilaian dengan kesadaran akan keterbatasan manusia dan kemurnian niat untuk menghasilkan laporan keuangan yang benar dan transparan. Integrasi kedua nilai ini tidak hanya menjamin keakuratan informasi yang disajikan tetapi juga memperkuat akuntabilitas moral. Dengan demikian, penggunaan nilai *ijtihād* dan *ṣidq* menciptakan landasan pelaporan yang tidak sekadar teknis, tetapi juga etis, mendekatkan laporan keuangan pada *true value*

yang mencerminkan kejujuran dan tanggung jawab. Dukungan terhadap penerapan teknologi modern dalam proses penilaian ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Ogundajo dkk. Mereka menyatakan bahwa penerapan teknologi disruptif seperti *big data*, *blockchain*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan akuntansi berbasis *cloud* dapat meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu dalam menyajikan biaya yang benar di sektor minyak dan gas.[81]

5. Integrasi Nilai *Khasyah*, *Ṣidq*, dan *Lā Taqif* pada Prinsip Pengungkapa Paripurna.

Dalam subbab sebelumnya, telah diidentifikasi adanya oposisi biner dalam prinsip pengungkapan paripurna, yaitu antara pengungkapan yang hanya mencakup informasi material dan pengungkapan menyeluruh yang mencakup baik informasi material maupun non-material. Saat ini, pengungkapan yang dominan adalah yang hanya berfokus pada informasi material. Prinsip pengungkapan paripurna ini menekankan informasi material sebagai hal yang dianggap cukup bagi pemangku kepentingan. Idealnya, pengungkapan yang komprehensif harus mencakup seluruh informasi yang relevan, baik material maupun non-material, untuk memberikan gambaran lengkap tentang perusahaan. Pengungkapan yang menyeluruh dan transparan memungkinkan pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan

[81]Grace Oyeyemi Ogundajo dkk., "*big data*, Blockchain and Artificial Intelligence for True Cost Accounting in the Oil and Gas Sector: Evidence from Nigeria," *Global Scientific and Academic Research Journal of Economics, Business and Management* 2, no. 9 (2023): 1, https://gsarpublishers.com/wp-content/uploads/2023/09/GSARJEBM1362023-Gelary-script.pdf.

adil, karena mereka memiliki akses ke informasi yang lebih lengkap. Sebaliknya, pembatasan hanya pada informasi material berpotensi menutupi aspek-aspek penting lainnya yang mungkin signifikan, sehingga mengurangi akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap entitas yang bersangkutan.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah posisi dominan yang hanya menekankan pengungkapan material ini akan bergeser menuju pengungkapan penuh yang mencakup informasi material dan non-material, atau tetap dipertahankan. Dukungan untuk pergeseran menuju pengungkapan penuh didasarkan pada argumen bahwa informasi yang lebih komprehensif dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Dalam konteks ini, nilai *khasyah* dan *ṣidq* berperan penting sebagai landasan etis dalam pengungkapan informasi. Nilai *khasyah*, yang berarti rasa takut kepada Allah, mencerminkan penghormatan yang mendalam serta memupuk rasa ketundukan dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Ketakutan ini menciptakan ketenangan, menjauhkan individu dari sikap sombong, dan menjaga adab serta akhlak, sehingga ilmu yang dimiliki menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan adanya rasa *khasyah*, pengungkapan informasi didorong bukan hanya oleh tuntutan hukum atau standar, tetapi juga oleh kesadaran moral untuk bersikap jujur dan transparan.

Di sisi lain, nilai *ṣidq* menekankan kesadaran akan keterbatasan manusia dan penerimaan atas ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan, serta kemurnian niat dalam beramal tanpa mengharapkan balasan. Nilai

ini mendorong integritas dalam pengungkapan, di mana kejujuran dan ketulusan menjadi landasan. Dengan demikian, informasi yang disampaikan benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya tanpa manipulasi. Selanjutnya, nilai *lā taqif*, yang mengandung makna semangat untuk terus mencari kebenaran, menjadi pendorong bagi individu dan organisasi untuk tidak berhenti dalam upaya mengungkap fakta dan realitas yang ada. Nilai ini mengajak semua pihak untuk berkomitmen dalam pencarian kebenaran, baik dalam konteks pengungkapan informasi maupun praktik bisnis secara keseluruhan.

Dengan terus berpegang pada semangat ini, diharapkan entitas akan mampu menyajikan laporan yang tidak hanya informatif, tetapi juga mencerminkan komitmen mereka terhadap etika dan tanggung jawab sosial. Integrasi nilai *khasyah*, *ṣidq*, dan *lā taqif* dalam oposisi biner ini diharapkan dapat menciptakan paradigma baru dalam pengungkapan informasi. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada pemenuhan kewajiban material, tetapi juga mengedepankan kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, para pemangku kepentingan akan memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik serta mendukung pembangunan hubungan yang lebih baik antara perusahaan dan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam praktik bisnis mereka, sehingga menghasilkan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat.

6. Integrasi Nilai *Hijrah* dan *Ṣidq* pada Prinsip Kesinambungan Usaha

Dalam sub bab sebelumnya, teridentifikasi adanya oposisi biner dalam prinsip kelangsungan usaha, yaitu antara kelangsungan usaha tanpa batas dan kemungkinan likuidasi sewaktu-waktu. Saat ini, opsi yang dominan adalah kelangsungan usaha tanpa batas, yang mencerminkan keyakinan bahwa perusahaan akan terus beroperasi dalam jangka panjang. Prinsip kelangsungan usaha (*going concern*) ini menjadi dasar bagi laporan keuangan yang lebih stabil dan mencerminkan prospek jangka panjang perusahaan. Namun, prinsip likuidasi juga memiliki peran penting dalam skenario di mana risiko besar mengancam keberlangsungan perusahaan, seperti potensi kebangkrutan. Prinsip ini lebih tepat digunakan untuk penilaian aset dan kewajiban berdasarkan nilai likuidasi, mencerminkan kondisi realistis perusahaan jika harus menghentikan operasional. Dalam situasi stabil, *going concern* tetap relevan; namun, dalam situasi darurat, prinsip likuidasi dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai aset perusahaan.

Dengan berkembangnya tantangan bisnis dan ketidakpastian ekonomi, muncul kebutuhan akan prinsip yang lebih fleksibel dan adaptif, yaitu prinsip kesiapan usaha. Prinsip ini menggabungkan keberlanjutan dan kesiapan menghadapi risiko. Dengan dukungan teknologi seperti *Enterprise Resource Planning* (ERP) dan analisis *big data*, prinsip ini menjadi lebih mudah diterapkan, memungkinkan manajemen memantau kesehatan keuangan secara *real-time* dan menyusun proyeksi yang akurat. Dalam kondisi ekonomi yang tidak

pasti, seperti saat pandemi Covid-19, standar yang fleksibel, seperti Standar Audit (SA) 570 dari Institut Akuntan Publik Indonesia, membolehkan penggunaan basis likuidasi ketika *going concern* tidak lagi relevan. Ini memastikan laporan keuangan tetap objektif dan membantu manajemen mengambil keputusan tepat dalam situasi kompleks.[82]

Pertanyaan kunci adalah apakah dominasi kelangsungan usaha tanpa batas akan bergeser menuju penggunaan prinsip likuidasi dalam situasi tertentu atau tetap dipertahankan. Di sini, nilai *hijrah* yang mencakup perpindahan fisik, niat, dan mental untuk melepaskan keterikatan pada masa lalu demi mencapai kondisi yang lebih baik dan dekat dengan tujuan utama dapat menjadi inspirasi filosofis bagi perusahaan. Integrasi nilai *hijrah* dalam menghadapi oposisi biner ini memungkinkan perusahaan untuk tidak hanya mempertahankan keberlanjutan tetapi juga siap beradaptasi sesuai perubahan yang ada. Dengan demikian, konsep ini akan terwujud sebagai prinsip yang lebih fleksibel dan siap beradaptasi dalam menghadapi tantangan bisnis yang dinamis dan beragam, memungkinkan perusahaan untuk tidak hanya mempertahankan keberlanjutan tetapi juga siap menghadapi berbagai kemungkinan termasuk likuidasi jika diperlukan.

[82]Institut Akuntan Publik Indonesia, "SA 570 (Revisi 2021) - Naskah Final Satuan.pdf," 16.

7. Integrasi Nilai *Ijtihād* dan *Ṣidq* pada Prinsip Mempertemukan (*Matching Principle*)

Dalam sub bab sebelumnya, teridentifikasi adanya oposisi biner dalam prinsip matching, yaitu antara penyelarasan biaya dan pendapatan dalam periode yang sama versus ketidaksesuaian alami antara keduanya. Oposisi biner yang dominan adalah penyelarasan biaya dan pendapatan dalam periode yang sama, di mana prinsip ini menekankan pentingnya mengakui biaya dan pendapatan dalam satu periode agar gambaran kinerja perusahaan terlihat akurat dan konsisten. Namun, realitas bisnis menunjukkan bahwa biaya dan pendapatan tidak selalu terjadi secara bersamaan, misalnya dalam kasus biaya riset yang manfaatnya baru terasa di masa depan atau pendapatan diterima sebelum biaya terkait muncul. Ketegangan ini menciptakan konflik antara pencatatan ideal yang menyelaraskan biaya dan pendapatan dengan pencatatan sesuai waktu kejadian sebenarnya, yang dapat mengandalkan estimasi atau alokasi subjektif, mengurangi objektivitas laporan keuangan.

Pertanyaannya adalah apakah prinsip matching yang ketat ini akan digeser menuju pencatatan yang lebih fleksibel tanpa keharusan menyelaraskan biaya dan pendapatan secara mutlak. Integrasi nilai *ijtihād* dan *ṣidq* dalam prinsip matching memungkinkan fleksibilitas yang lebih bermakna. Dengan *ijtihād*, perusahaan dapat memutuskan secara cermat kapan biaya perlu dicatat sebagai beban langsung atau dikapitalisasi, sesuai manfaat ekonomis jangka panjang, tanpa harus selalu menempatkan biaya dan pendapatan dalam periode yang sama. Pendekatan ini menyesuaikan pencatatan dengan sifat dan tujuan

pengeluaran, memungkinkan laporan keuangan mencerminkan manfaat riil dari transaksi. Sementara itu, *ṣidq* menekankan kejujuran dalam pengakuan biaya dan pendapatan, memastikan bahwa semua informasi yang disajikan adalah benar adanya dan mencerminkan kondisi transaksi yang sesungguhnya. Dengan nilai *ṣidq*, perusahaan dapat menjaga integritas laporan keuangan sehingga informasi yang disajikan benar-benar menggambarkan keadaan ekonomi secara transparan. Dengan menggabungkan *ijtihād* dan *ṣidq*, laporan keuangan dapat lebih akurat mencerminkan realitas bisnis, tetap relevan, dan andal bagi pengguna informasi keuangan.

8. Integrasi Nilai *Ṣidq* pada Prinsip Pengakuan Pendapatan

Dalam sub bab sebelumnya, teridentifikasi adanya oposisi biner dalam prinsip pengakuan pendapatan, yaitu antara basis akrual dan basis kas. Oposisi biner yang dominan adalah basis akrual karena basis ini lebih mencerminkan kinerja akuntansi secara komprehensif dibandingkan hanya mencatat arus kas saja. Secara logika, basis akrual mencakup basis kas, namun sebaliknya basis kas belum tentu mencakup basis akrual. Kesimpulannya, dalam konteks akuntansi, penggunaan basis akrual selalu mencakup basis kas karena basis akrual mengakui semua transaksi kas dan non-kas. Namun, penggunaan basis kas tidak secara otomatis mencakup basis akrual, karena basis kas hanya mencatat arus kas aktual tanpa memperhitungkan piutang atau hutang.

Nilai *ṣidq* menekankan kesadaran diri akan kelemahan manusia, penerimaan penuh atas ketergantungan pada Tuhan, serta kemurnian niat dalam amal tanpa mengharapkan balasan. Oleh karena itu, basis akrual

perlu diintegrasikan dengan nilai *ṣidq* agar pelaksanaannya benar dan informasi yang disajikan akurat. Integrasi nilai *ṣidq* dalam oposisi biner ini akan memastikan bahwa basis akrual tetap menyajikan organisasi dengan benar dan etis. Pertanyaannya adalah apakah posisi dominan ini akan digeser ke basis kas atau dipertahankan pada basis akrual. Dengan mempertimbangkan pentingnya integrasi nilai *ṣidq*, basis akrual dipertahankan sebagai metode dominan dalam akuntansi. Hal ini karena basis akrual tidak hanya memenuhi standar teknis dalam pengakuan pendapatan dan beban, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan etika yang tinggi, memastikan laporan keuangan yang transparan dan jujur.

9. Integrasi Nilai *Ṣuḥbah*, *Ṣidq*, dan *lā taqif* pada Prinsip Materialitas

Pada sub bab sebelumnya, telah teridentifikasi adanya oposisi biner dalam prinsip materialitas, yaitu antara menyajikan seluruh informasi atau hanya yang material saja. Saat ini, prinsip yang dominan adalah hanya menyajikan informasi material. Prinsip materialitas dalam akuntansi menyatakan bahwa suatu informasi dianggap material apabila pengabaian atau kesalahan penyajiannya dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Karena sifatnya yang subjektif dan kontekstual, tidak ada batasan angka yang pasti untuk menentukan materialitas.

Meski IFRS, GAAP, dan FASB memberikan panduan, penilaian profesional tetap berperan penting dalam praktiknya. Kurangnya kejelasan dalam batasan ini berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap regulasi, mengurangi kepercayaan pada laporan keuangan, dan membuka peluang manipulasi atau praktik creative accounting. Kasus

Enron menunjukkan risiko ini, di mana informasi material yang seharusnya diungkap justru disembunyikan, mencerminkan bahwa fleksibilitas dalam prinsip materialitas dapat disalahgunakan tanpa adanya transparansi yang memadai.

Pertanyaannya adalah apakah posisi dominan ini akan bergeser ke penyajian seluruh informasi, baik yang material maupun non-material, atau tetap bertahan hanya pada informasi yang material saja. Dalam konteks ini, penerapan nilai *ṣuḥbah* dan *ṣidq* menjadi sangat penting. Nilai *ṣuḥbah* menekankan pentingnya kolaborasi yang bebas dari egoisme dan kepentingan diri, serta diwarnai dengan keadilan dan saling menghormati. Hubungan sosial yang tulus dan keseimbangan dalam interaksi menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan di mana informasi dapat disampaikan dengan jujur dan transparan. Di sisi lain, nilai *ṣidq* mendorong pelaporan yang jujur dan murni, mengedepankan kesadaran akan keterbatasan manusia dan kebergantungan pada Tuhan, dengan niat yang tulus tanpa manipulasi. Nilai ini menggarisbawahi pentingnya integritas dalam penyajian laporan keuangan, di mana setiap informasi, baik yang material maupun non-material, disampaikan dengan akurasi dan kejelasan. Non-material, dalam hal ini, mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan publik, lingkungan, dan sosial, yang semakin menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Informasi non-material seperti dampak lingkungan dari operasional perusahaan, tanggung jawab sosial, serta keterlibatan komunitas adalah faktor-faktor yang sangat relevan dalam konteks keberlanjutan dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, penyajian

informasi yang komprehensif dan transparan, yang mencakup seluruh informasi relevan, baik material maupun non-material, menjadi kunci untuk memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi ekspektasi dan tanggung jawabnya terhadap semua pemangku kepentingan.

Selanjutnya, nilai *lā taqif*, yang berarti semangat untuk terus mencari kebenaran, menjadi pendorong bagi individu dan organisasi untuk tidak berhenti dalam upaya mengungkap fakta yang ada. Nilai ini mengajak semua pihak untuk berkomitmen dalam pencarian kebenaran dan kejelasan informasi. Dengan semangat ini, diharapkan entitas dapat menyajikan laporan yang lebih komprehensif, mencakup semua informasi relevan yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Dengan integrasi nilai *ṣuḥbah*, *ṣidq*, dan *lā taqif*, diharapkan akan tercipta paradigma baru dalam prinsip materialitas yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkaya informasi yang disajikan kepada pemangku kepentingan, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Dengan demikian, perusahaan dapat beroperasi dalam kerangka etika yang lebih kuat, serta menciptakan hubungan yang lebih baik dengan semua pihak terkait, menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan dalam praktik bisnis.

10. Integrasi Nilai *Ṣidq* pada Prinsip Konservatisme

Pada subbab sebelumnya, teridentifikasi adanya oposisi biner dalam prinsip konservatisme, yaitu antara konservatisme dan prinsip pelaporan apa adanya. Oposisi biner ini didominasi oleh konservatisme, yang dalam akuntansi menekankan kehati-hatian dengan mengakui

beban dan kewajiban lebih cepat daripada pendapatan dan aset. Pendekatan ini dianggap bijaksana karena melindungi perusahaan dari risiko kerugian tak terduga. Namun, konservatisme juga memicu kontroversi karena dapat menciptakan bias. Dengan menunda pengakuan keuntungan yang sah dan melebih-lebihkan risiko, konservatisme dapat menghasilkan laporan keuangan yang tidak mencerminkan realitas, membingungkan pemangku kepentingan yang mengandalkan data tersebut dalam pengambilan keputusan.

Hal ini bertentangan dengan tujuan utama akuntansi yang seharusnya menyajikan informasi akurat, relevan, dan adil. Seperti disampaikan oleh Savitri, konservatisme sering kali menghasilkan laporan keuangan yang lebih rendah dari nilai sebenarnya, sehingga mengurangi netralitas dan akurasi yang diperlukan.[83] Ball dan Shivakumar menegaskan bahwa konservatisme digunakan untuk mengendalikan optimisme berlebih dari pihak manajemen. Namun, optimisme yang berlebihan berisiko menciptakan ekspektasi yang tidak realistis, yang bisa merusak kepercayaan pemangku kepentingan jika kenyataan tidak sesuai dengan laporan keuangan yang disajikan.[84]

Pertanyaan yang muncul adalah apakah posisi dominan ini akan bergeser menuju pendekatan pelaporan yang apa adanya atau tetap pada konservatisme. Dalam konteks ini, nilai *ṣidq* memberikan panduan

[83]Enni Savitri, *Konservatisme Akuntansi* (Yogyakarta: Pustaka Sahila, 2016), 21.

[84]Mohsen Rashidi, "Manager Optimism Based on Environmental Uncertainty and Accounting Conservatism," *Interdisciplinary Journal of Management Studies (Formerly Known as Iranian Journal of Management Studies)* 14, no. 1 (1 Januari 2021): 62, doi:10.22059/ijms.2020.290260.673811.

penting. *Ṣidq*, yang mengedepankan kejujuran dan kemurnian niat, menekankan penyajian laporan keuangan dengan integritas tinggi dan bebas dari manipulasi atau bias. Laporan harus disusun dengan cara yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya tanpa pesimisme berlebihan maupun optimisme yang tidak berdasar. Integrasi nilai *ṣidq* memungkinkan penggeseran dari konservatisme ekstrem menuju pendekatan yang lebih seimbang. Dengan pendekatan ini, pelaporan keuangan akan lebih fokus pada kejujuran apa adanya, mencakup semua fakta dan keadaan tanpa menekankan pada kehati-hatian berlebihan. Hasilnya, laporan keuangan akan menjadi lebih netral dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang lebih adil bagi pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan yang baik dan bertanggung jawab. Dengan demikian, akuntansi dapat lebih memenuhi tujuan utamanya dalam menyajikan informasi yang akurat dan relevan.

11. Integrasi Nilai *Ijtihād* pada Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk

Pada sub bab sebelumnya, teridentifikasi adanya oposisi biner dalam prinsip substansi mengungguli bentuk, yaitu antara substansi ekonomi dan kepatuhan hukum atau formalitas hukum, dengan posisi dominan pada substansi ekonomi. Prinsip substansi ekonomi yang lebih diutamakan dibandingkan bentuk hukum ini mendapat kritik karena berpotensi mengabaikan kepatuhan terhadap regulasi, mengurangi transparansi laporan keuangan, dan meningkatkan subjektivitas, yang dapat membuka peluang manipulasi. Contoh kasus yang relevan adalah Enron, di mana perusahaan menggunakan *Special Purpose Entities* (SPEs) untuk menyembunyikan utang dan melanggar regulasi yang

seharusnya menjamin transparansi dalam pelaporan utang. Firma akuntansi Arthur Andersen gagal mendeteksi praktik ini, bahkan terlibat dalam penghancuran dokumen penting, sehingga menyebabkan kegagalan pengawasan. Akibatnya, kepercayaan investor hilang, dan situasi semakin memburuk karena kurangnya kontrol terhadap keuangan perusahaan, menambah keraguan terhadap integritas pengawasan akuntansi.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah posisi dominan ini akan bergeser ke arah formalitas hukum, dipertahankan, atau diseimbangkan antara substansi ekonomi dan bentuk hukum. Nilai *ijtihād*, yang berarti sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban dan mengikuti petunjuk, dapat diintegrasikan dalam oposisi biner ini untuk mendorong pelaporan keuangan yang memenuhi kewajiban etis dan regulatif, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran. Dengan mengintegrasikan *ijtihād*, pendekatan yang dominan tidak lagi hanya berpusat pada substansi ekonomi yang cenderung mengabaikan aspek hukum, tetapi juga berupaya serius menyeimbangkan substansi ekonomi dengan kepatuhan hukum.

Nilai *ijtihād* mendorong akuntan dan pihak terkait untuk melakukan pelaporan secara teliti dan bertanggung jawab, sehingga setiap keputusan pelaporan mempertimbangkan dampak hukum dan transparansi, tanpa mengabaikan esensi ekonomi yang relevan. Dengan demikian, risiko manipulasi atau pengabaian regulasi yang dapat merusak integritas laporan keuangan dapat diminimalkan. Integrasi nilai *ijtihād* memungkinkan penggeseran dari fokus tunggal pada substansi

ekonomi ke arah yang lebih seimbang antara substansi dan formalitas hukum. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan pelaporan keuangan yang lebih transparan, akurat, dan sesuai dengan standar kepatuhan, sehingga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan mengurangi risiko manipulasi yang merugikan.

12. Integrasi Nilai *Ṣidq*, *Murāqabah*, *Lā Taqif* pada Prinsip Objektivitas

Dalam sub bab sebelumnya, teridentifikasi adanya oposisi biner dalam prinsip objektivitas, yaitu antara objektivitas murni dan kebutuhan akan subjektivitas yang dilandasi etika. Saat ini, posisi dominan dipegang oleh objektivitas, yang mengacu pada penyajian fakta tanpa pengaruh pandangan pribadi, sehingga memastikan keakuratan dan keandalan laporan keuangan. Namun, penerapan prinsip ini dapat disalahgunakan jika tidak mempertimbangkan aspek etika, yang dapat melegalkan tindakan manipulatif yang menguntungkan pihak tertentu. Tanpa unsur etika, objektivitas berisiko mengabaikan aspek keadilan dan moralitas yang penting. Ketegangan antara objektivitas dan subjektivitas ini sangat penting untuk dipahami. Objektivitas yang diterapkan secara kaku bisa mengabaikan dampak moral dari suatu tindakan, sedangkan subjektivitas tanpa dasar objektivitas berisiko memunculkan bias pribadi. Oleh karena itu, keseimbangan antara keduanya sangat diperlukan. Objektivitas yang mengabaikan nilai etis dan kemanusiaan dapat mengarah pada pola pikir yang tidak mempertimbangkan dampak moral dan hanya berfokus pada aturan atau legalitas formal.

Dalam konteks agama, objektivitas saja tidak cukup. Seperti dijelaskan dalam *Syarah al-Ḥikam al-'Aṭā'iyyah*, kejujuran tidak hanya

berarti bertindak sesuai fakta, tetapi juga harus sesuai dengan kepatuhan kepada Tuhan. Kejujuran mencakup dimensi spiritual dan etis yang lebih luas, sehingga tidak sekadar menyampaikan fakta apa adanya, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan etika yang diajarkan oleh Tuhan. Dalam praktik akuntansi, tindakan yang tampak objektif, seperti pengurangan karyawan demi efisiensi bisnis, mungkin dianggap sah secara rasional dan sesuai aturan. Namun, dari perspektif etika, tindakan ini tidak sepenuhnya benar jika kita mempertimbangkan bahwa manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Efisiensi yang hanya berlandaskan objektivitas tanpa menghormati hak pekerja melanggar prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Integrasi nilai *ṣidq*, *murāqabah*, dan *lā taqif* dalam konteks ini akan mendorong pelaporan yang tidak hanya objektif, tetapi juga jujur dan etis. *Ṣidq*, yang mengakui kelemahan diri dan ketergantungan pada Tuhan, mengarahkan individu untuk bersikap jujur dalam setiap tindakan. *Murāqabah*, yaitu kesadaran akan pengawasan Tuhan yang terus-menerus, menambah kendali diri agar setiap keputusan tidak hanya berlandaskan aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak moral. *Lā taqif*, yang berarti semangat untuk tidak berhenti mencari kebenaran, mendorong individu untuk terus mengungkap fakta dan mempertimbangkan implikasi etis dari setiap tindakan. Dengan mengintegrasikan nilai *ṣidq*, *murāqabah*, dan *lā taqif*, tercipta suatu kerangka kerja yang mendukung pelaporan akuntansi yang lebih seimbang. Informasi yang disampaikan akan memiliki kejujuran, etika, dan integritas yang tinggi. Pendekatan ini tidak hanya akan

meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Dengan demikian, laporan yang dihasilkan akan mencerminkan realitas secara akurat dan adil, mempertimbangkan semua aspek moral dan etis, serta memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

13. Integrasi Nilai *Ijtihād* pada Prinsip Daya Banding

Dalam subbab sebelumnya, teridentifikasi adanya oposisi biner dalam prinsip daya banding, yaitu antara bisa dibandingkan dan tidak bisa dibandingkan, dengan posisi dominan pada bisa dibandingkan. Prinsip daya banding menekankan pentingnya laporan keuangan yang memungkinkan perbandingan antar periode atau antar perusahaan, sehingga pemangku kepentingan dapat mengevaluasi kinerja secara konsisten. Namun, pada kenyataannya, laporan keuangan sering kali sulit untuk dibandingkan secara sempurna akibat perbedaan kebijakan akuntansi, seperti variasi metode penyusutan atau pengakuan pendapatan yang berbeda antar perusahaan atau bahkan berubah antar periode dalam perusahaan yang sama. Hal ini menimbulkan ketegangan antara upaya menciptakan laporan yang sebanding dengan kendala nyata dari variasi praktik akuntansi, sehingga perbandingan laporan keuangan bisa menjadi kurang akurat atau bahkan menyesatkan.

Integrasi nilai *ijtihād* dalam oposisi ini berfungsi untuk memperkuat komitmen pada daya banding. *Ijtihād*, yang menekankan kesungguhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai petunjuk moral, mendorong akuntan dan manajemen untuk bekerja keras

menghasilkan laporan yang tetap sebanding, meskipun menghadapi perbedaan kebijakan akuntansi. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap keputusan dalam penyusunan laporan keuangan mencerminkan komitmen moral untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat dan adil bagi pemangku kepentingan. Dengan berlandaskan nilai *ijtihād*, upaya mempertahankan daya banding menjadi lebih rasional, karena didukung oleh tanggung jawab etis dan semangat pengabdian untuk kebaikan bersama. Ini mengurangi risiko ketidakakuratan yang mungkin menyesatkan.

Dalam konteks ini, *ijtihād* mengarahkan pada solusi kreatif dalam menghadapi perbedaan praktik akuntansi, seperti menyediakan pengungkapan tambahan atau rekonsiliasi, yang membantu pemangku kepentingan memahami data perbandingan dengan lebih jelas. Dengan demikian, integrasi *ijtihād* mendukung posisi dominan bisa dibandingkan, memastikan laporan keuangan tetap relevan, akurat, dan etis. Pendekatan ini memberikan landasan yang kokoh bagi pemangku kepentingan untuk melakukan perbandingan yang bermakna dan membuat keputusan yang tepat, tanpa terjebak dalam kebingungan akibat perbedaan kebijakan akuntansi.

14. Integrasi Nilai *Ijtihād* pada Prinsip Konsistensi

Dalam sub bab sebelumnya, telah teridentifikasi adanya oposisi biner dalam prinsip konsistensi, yaitu antara metode yang konsisten dan metode yang fleksibel, dengan posisi dominan pada metode yang memungkinkan perbandingan. Prinsip konsistensi menuntut perusahaan menggunakan metode akuntansi yang sama antar periode, agar laporan

keuangan dapat dibandingkan secara adil dan akurat. Namun, perubahan kondisi bisnis, standar akuntansi, atau kebijakan ekonomi sering kali memerlukan fleksibilitas untuk menyesuaikan metode akuntansi agar lebih relevan dengan situasi terkini. Ketegangan ini menciptakan konflik antara kebutuhan untuk mempertahankan konsistensi demi keandalan data historis dan kebutuhan untuk menyesuaikan metode akuntansi agar laporan lebih mencerminkan realitas ekonomi yang terus berubah. Akibatnya, pemangku kepentingan mungkin menerima laporan yang konsisten tetapi kurang relevan, atau laporan yang relevan tetapi sulit dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Integrasi nilai *ijtihād* dalam oposisi ini akan mendorong upaya sungguh-sungguh untuk menjaga konsistensi metode akuntansi sambil tetap mempertimbangkan relevansi laporan keuangan. Nilai *ijtihād*, yang menekankan kesungguhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan panduan moral, mengarahkan akuntan dan manajemen untuk konsisten dalam metode akuntansi, meskipun menghadapi perubahan dalam bisnis atau standar akuntansi. Dengan berlandaskan *ijtihād*, keputusan untuk mempertahankan konsistensi menjadi lebih rasional dan bermakna karena didukung oleh tanggung jawab etis untuk menyediakan informasi yang dapat diandalkan bagi pemangku kepentingan. Nilai ini juga mendorong relevansi dengan memungkinkan pengungkapan atau penyesuaian tambahan jika diperlukan, tanpa mengorbankan konsistensi yang penting untuk perbandingan antar periode. Dengan demikian, integrasi nilai *ijtihād* membantu mempertahankan posisi dominan pada metode yang konsisten, sehingga

laporan keuangan dapat dibandingkan secara akurat dan tetap bermakna bagi pemangku kepentingan. Ini mencerminkan keseimbangan antara keandalan data historis dan kebutuhan akan relevansi dalam perubahan ekonomi yang dinamis.

15. Integrasi Nilai *Ijtihād* pada Prinsip Netralitas

Dalam sub bab sebelumnya, teridentifikasi adanya oposisi biner pada prinsip netralitas, yaitu antara netralitas dan bias atau keberpihakan, dengan netralitas sebagai posisi dominan. Prinsip netralitas menekankan pentingnya menyajikan informasi keuangan secara objektif tanpa keberpihakan, guna memastikan semua pengguna laporan mendapatkan gambaran yang akurat dan dapat dipercaya mengenai kondisi perusahaan. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa tekanan dari berbagai pihak seperti investor atau kreditor sering kali menciptakan bias dalam penyajian data. Contohnya termasuk pemilihan metode akuntansi yang menguntungkan pihak tertentu atau upaya untuk membuat laporan keuangan terlihat lebih stabil daripada kondisi sebenarnya. Konflik ini mencerminkan ketegangan antara keinginan untuk mempertahankan netralitas dan kecenderungan untuk menyajikan data yang menguntungkan pihak tertentu, yang pada akhirnya dapat mengaburkan objektivitas laporan keuangan bagi para pemangku kepentingan. Pertanyaannya adalah apakah posisi dominan netralitas ini bisa dipertahankan.

Nilai *ijtihād*, yang berarti kesungguhan sejati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab berdasarkan perintah Allah, dapat diintegrasikan untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip

netralitas dalam penyajian data keuangan. Kesungguhan sejati mengarahkan fokus pada perintah Allah, menjalankan tugas dan tanggung jawab, bukan pada takdir yang telah dijamin. Dengan petunjuk Tuhan, usaha yang dilakukan menjadi lebih terarah dan bermakna, menghasilkan kebaikan serta menjauhkan dari kekhawatiran akan hal-hal di luar kendali. Dengan menerapkan *ijtihād*, para penyusun laporan keuangan didorong untuk melakukan penilaian dan pengambilan keputusan secara independen dan objektif, tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal. Hal ini meningkatkan objektivitas informasi yang disajikan, memperkuat etika profesional, serta memberikan kerangka kerja yang lebih terarah dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, *ijtihād* membantu mengurangi potensi bias, sehingga laporan keuangan menjadi lebih dapat dipercaya oleh semua pemangku kepentingan. Integrasi nilai *ijtihād* juga meningkatkan transparansi dan objektivitas laporan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan tersebut. Secara keseluruhan, integrasi nilai *ijtihād* dalam oposisi biner antara netralitas dan bias tidak hanya memungkinkan posisi dominan netralitas untuk dipertahankan, tetapi juga memperkuat kualitas dan integritas laporan keuangan. Dengan demikian, nilai *ijtihād* menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa penyajian data keuangan tetap objektif, dapat dipercaya, dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya, mendukung terciptanya laporan keuangan yang transparan dan dapat diandalkan oleh semua pemangku kepentingan.

16. Integrasi Nilai *Ijtihād* pada Prinsip Tepat Waktu

Dalam sub bab sebelumnya, teridentifikasi adanya oposisi biner pada prinsip tepat waktu, yaitu antara cepat dan akurat. Oposisi ini terletak pada penyajian informasi secara cepat versus penyajian informasi secara akurat. Di satu sisi, prinsip tepat waktu mengutamakan penyajian informasi keuangan secara cepat agar tetap relevan dan berguna bagi pengambilan keputusan. Namun, fokus pada kecepatan berisiko mengurangi akurasi karena proses verifikasi dan pemeriksaan mungkin tidak selesai sepenuhnya. Konflik ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan akan kecepatan untuk menjaga relevansi informasi dan kebutuhan akan akurasi untuk memastikan informasi dapat dipercaya. Jika terlalu cepat, laporan mungkin kurang tepat; jika terlalu akurat, informasi bisa menjadi kurang relevan karena keterlambatan.

Idealnya, oposisi biner antara cepat dan akurat dapat diseimbangkan dengan memanfaatkan teknologi yang mendukung efisiensi dan ketelitian dalam penyajian data keuangan. Teknologi modern memungkinkan proses verifikasi dan analisis data dilakukan dengan lebih cepat tanpa mengorbankan akurasi, sehingga informasi dapat disampaikan tepat waktu dan tetap terpercaya. Dengan demikian, organisasi dapat memenuhi kedua kebutuhan tersebut secara simultan, meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus menjaga relevansinya.

Nilai *ijtihād*, yang berarti kesungguhan sejati mengarahkan fokus pada perintah Allah, menjalankan tugas dan tanggung jawab,

bukan pada takdir yang telah dijamin. Dengan petunjuk Tuhan, usaha yang dilakukan menjadi lebih terarah dan bermakna, menghasilkan kebaikan serta menjauhkan dari kekhawatiran akan hal-hal di luar kendali. Integrasi nilai *ijtihād* dalam oposisi biner ini akan memperkuat komitmen terhadap prinsip tepat waktu dengan mendorong para penyusun laporan keuangan untuk melakukan penilaian dan pengambilan keputusan secara independen dan objektif. Dengan menerapkan *ijtihād*, mereka dapat memanfaatkan teknologi secara optimal untuk memastikan proses penyajian informasi berjalan cepat tanpa mengabaikan akurasi. Dengan demikian, integrasi nilai *ijtihād* membantu menciptakan keseimbangan yang harmonis antara cepat dan akurat, memungkinkan penyajian data keuangan yang relevan dan dapat dipercaya bagi semua pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, nilai *ijtihād* menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa penyajian data keuangan tetap tepat waktu, akurat, dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya, mendukung terciptanya laporan keuangan yang transparan dan dapat diandalkan.

17. Integrasi Nilai *Yusrā* pada Pemahaman atas Laporan Keuangan

Berdasarkan temuan pada dokumen sumber prinsip dasar akuntansi pada sub bab sebelumnya, laporan keuangan disusun untuk pengguna yang memiliki pengetahuan cukup tentang bisnis dan ekonomi. Namun, tidak semua orang memiliki pemahaman tersebut, sehingga publik sering menghadapi hambatan dalam mengakses dan memahami informasi keuangan. Padahal, keterlibatan publik penting untuk menjaga kejujuran dan transparansi perusahaan. Proses analisis

informasi keuangan juga membutuhkan ketekunan dan sering kali bantuan dari penasihat profesional, yang membuat akuntansi sulit dipahami oleh banyak orang. Akibatnya, terjadilah asimetri informasi antara perusahaan dan publik, yang berpotensi membuka peluang *fraud* karena terbatasnya akses dan pemahaman terhadap data keuangan.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penerapan nilai kemudahan atau *yusrā*, yang berarti kesederhanaan dan keringanan dalam penyajian informasi, sehingga laporan keuangan dapat diakses dan dipahami lebih mudah oleh semua pemangku kepentingan. Dengan menerapkan nilai kemudahan, laporan keuangan akan menjadi lebih transparan dan informatif bagi publik, membantu mengurangi asimetri informasi, serta memungkinkan semua pihak untuk menilai kondisi keuangan perusahaan dengan jelas. Penyederhanaan format dan penyajian data akan mendorong transparansi yang lebih baik, sehingga publik dapat menilai perusahaan secara tepat dan mengurangi risiko manipulasi data.

18. Integrasi Nilai *Ijtihād* dan *Ṣidq* dalam Penetapan Materialitas

Berdasarkan temuan pada dokumen sumber prinsip dasar akuntansi pada sub bab sebelumnya, ketiadaan batas kuantitatif untuk materialitas dalam laporan keuangan membuka peluang bagi praktik korupsi. Karena DSAK IAI tidak menetapkan angka atau persentase yang tegas untuk menentukan apa yang dianggap material, pihak yang bertanggung jawab dapat dengan mudah menginterpretasikan batas materialitas sesuai dengan kepentingan mereka. Hal ini memungkinkan penghilangan, kesalahan penyajian, atau pengaburan informasi penting

yang dapat memengaruhi keputusan pengguna utama laporan keuangan, seperti investor dan kreditor.

Fleksibilitas dalam penentuan materialitas ini juga menyulitkan auditor dan regulator untuk mengidentifikasi serta mencegah manipulasi data, sehingga meningkatkan risiko terjadinya korupsi. Tanpa standar kuantitatif yang jelas, konsistensi dalam pelaporan keuangan menjadi sulit dijaga, yang pada akhirnya merusak integritas laporan keuangan dan menurunkan kepercayaan publik serta stabilitas pasar keuangan. Dengan menerapkan nilai *ijtihād*, yang berarti kesungguhan dalam menetapkan standar yang tepat, dan *ṣidq*, yaitu kejujuran dalam penyajian informasi, batas kuantitatif untuk materialitas dapat ditentukan secara lebih jelas dan adil untuk setiap jenis entitas. Hal ini akan membantu memastikan bahwa informasi material disajikan secara konsisten dan transparan, memberikan kejelasan yang lebih besar bagi pengguna laporan keuangan, serta mengurangi risiko penyalahgunaan informasi.

Tabel 5.1
Integrasi Nilai Tasawuf dalam Prinsip Dasar Akuntansi

No.	Prinsip Akuntansi	Oposisi Biner	Nilai Tasawuf
1	Entitas Ekonomi	Pemisahan Aset vs Penyatuan Aset	*Ṣuḥbah* & *ṣidq*
2	Unit Moneter	Moneter Lokal vs	*Ijtihad* & *ṣidq*

		Ukur Stabil	
3	Periode Waktu	Waktu Tetap vs Waktu Fleksibel	*Murāqabah*
4	Biaya Historis	Biaya Historis vs Nilai Wajar vs. Nilai Benar	*Ijtihād* & *ṣidq*
5	Pengungkapan Paripurna	Material vs Material & Non-Material	*Ṣuḥbah, ṣidq* & *lā taqif*
6	Kesinambungan Usaha	Tanpa Batas vs Likuidasi Sewaktu-waktu	*Hijrah* & *ṣidq*
7	Matching Principle	Penyelarasan Biaya-Pendapatan vs Ketidaksesuaian	*Ijtihād* & *ṣidq*
8	Pengakuan Pendapatan	Basis Akrual vs Basis Kas	*Ṣidq*
9	Materialitas	Hanya Material vs Semua Informasi	*Ṣuḥbah, ṣidq* & *lā taqif*
10	Konservatisme	Konservatisme vs Apa Adanya	*Ṣidq*
11	Substansi Mengungguli Bentuk	Ekonomi vs Hukum/Formalitas	*Ijtihād*
12	Objektivitas	Objektivitas Murni vs Subjektivitas Etika	*Ṣidq, murāqabah* & *lā taqif*

13	Daya Banding	Bisa Dibandingkan vs Tidak Bisa	*Ijtihād*
14	Konsistensi	Metode Konsisten vs Fleksibel	*Ijtihād*
15	Netralitas	Netralitas vs Bias/Keberpihakan	*Ijtihād*
16	Tepat Waktu	Cepat vs Akurat	*Ijtihād*
17	Pemahaman atas Laporan	Sulit Dipahami vs Mudah Dipahami	*Yusrā*
18	Penetapan Materialitas	Tanpa Batas Kuantitatif vs Batas Kuantitatif yang jelas	*Ijtihād* & *ṣidq*

E. Rekomendasi Prinsip Dasar Akuntansi setelah Dekonstruksi

Prinsip dasar akuntansi yang diusulkan setelah proses dekonstruksi ini bersifat lebih fleksibel dan terbuka untuk interpretasi, bukan stabil atau final. Tujuannya adalah untuk menjawab tantangan zaman yang membutuhkan relevansi dan adaptasi, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang berlandaskan etika dan spiritualitas. Rekomendasi ini diharapkan dapat memperkaya konsep akuntansi, dan jika Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) kembali membuka sesi *public sharing*, hasil penelitian ini bisa menjadi acuan. Meskipun sebelumnya IAI membuka kesempatan serupa tanpa respons signifikan,

rekomendasi ini dapat menjadi pertimbangan bagi IAI untuk merumuskan prinsip akuntansi yang lebih inklusif dan adaptif.[85] Beberapa rekomendasi merupakan konsep baru, sementara yang lain tetap dipertahankan. Berikut adalah rekomendasi prinsip dasar akuntansi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut:

1. Prinsip hubungan Entitas Berbasis Persahabatan dan Kejujuran

Prinsip hubungan entitas berbasis persahabatan dan kejujuran diusulkan untuk menggantikan prinsip entitas ekonomi karena menawarkan pendekatan yang mengedepankan etika dan nilai spiritual. Dalam prinsip ini terdapat integrasi nilai *ṣuḥbah* (persahabatan) dan *ṣidq* (kejujuran) yang bertujuan untuk mengatasi ketegangan antara pemisahan dan penyatuan aset, serta memberikan fleksibilitas bagi organisasi kecil, nirlaba, dan UKM yang seringkali mengalami kendala dalam menerapkan pemisahan aset secara ketat. Melalui *ṣuḥbah*, prinsip ini membangun hubungan yang berlandaskan saling percaya dan menghormati, sementara *ṣidq* memastikan pelaporan yang jujur dan akurat, mencerminkan keadaan sebenarnya tanpa manipulasi. Dengan dasar persahabatan dan kejujuran ini, prinsip ini mendukung akuntabilitas yang kuat melalui transparansi, sehingga setiap keputusan terkait aset didasarkan pada etika yang kokoh. Hasilnya, tercipta lingkungan organisasi yang harmonis, adil, dan berkelanjutan bagi berbagai jenis entitas.

[85]Ikatan Akuntan Indonesia, "Pengesahan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Tahun 2019," 2019, https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/pengesahan-kerangka-konseptual-pelaporan-keuangan-tahun-2019#gsc.tab=0.

2. Prinsip Satuan Ukur yang Jujur

Prinsip satuan ukur yang jujur diusulkan sebagai alternatif pengganti prinsip unit moneter tradisional karena menawarkan pendekatan yang mengutamakan stabilitas dan akurasi nilai dalam pelaporan keuangan. Dalam akuntansi, penggunaan mata uang lokal sering kali terpengaruh oleh inflasi, yang dapat mengurangi keakuratan dan relevansi laporan keuangan. Oleh karena itu, dengan mengadopsi satuan ukur yang lebih stabil, seperti dolar atau emas, prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan nilai yang lebih konsisten dan dapat dipercaya. Meskipun setiap negara memiliki kebijakan tersendiri mengenai penggunaan mata uang dalam laporan keuangan, perkembangan teknologi saat ini memungkinkan penyajian dua alat ukur secara bersamaan, misalnya dalam bentuk rupiah dan emas, atau rupiah dan dolar. Indonesia, yang mewajibkan penggunaan rupiah, menghadapi tantangan ketidakstabilan nilai mata uangnya.

Namun, dengan menyajikan laporan keuangan dalam format real-time yang mencakup rupiah serta nilai pembanding yang lebih stabil, seperti dolar atau emas, hal ini dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Prinsip ini mengintegrasikan nilai *ijtihad* (kesungguhan) dan *ṣidq* (kejujuran) dalam pemilihan satuan ukur laporan keuangan, seperti rupiah, dolar, atau emas. Ijtihad mendorong perusahaan untuk bersungguh-sungguh memilih satuan ukur yang stabil dan relevan dengan kondisi ekonomi, sementara *ṣidq* memastikan pencatatan yang transparan dan jujur, tanpa

dipengaruhi fluktuasi eksternal yang tidak relevan. Dengan menggabungkan kedua nilai ini, perusahaan memastikan laporan keuangan yang akurat, dapat diandalkan, dan mencerminkan kondisi ekonomi secara objektif. Hal ini membangun kepercayaan publik dan memberikan gambaran yang stabil dan realistis tentang keadaan perusahaan.

3. Prinsip Pelaporan Dinamis

Prinsip pelaporan dinamis diusulkan sebagai pengganti prinsip periode waktu untuk memastikan pelaporan keuangan yang fleksibel, real-time, dan transparan. Prinsip periode waktu tetap, seperti tahunan, sering kali memungkinkan manipulasi data dan penundaan laporan, membuka peluang bagi korupsi. Prinsip pelaporan dinamis memungkinkan laporan disajikan kapan saja sesuai kebutuhan, mempercepat respons terhadap perubahan keuangan. Dalam prinsip ini terdapat integrasi nilai *murāqabah* (pengawasan terus-menerus) yang memperkuat prinsip ini dengan menekankan pengawasan moral yang konsisten, mendorong kejujuran dan mencegah potensi mempercantik laporan pada periode tertentu, sehingga pelaporan lebih akurat dan dapat dipercaya.

4. Prinsip Nilai Sebenarnya

Prinsip nilai sebenarnya diusulkan untuk menggantikan prinsip biaya historis karena menawarkan pendekatan yang lebih akurat dalam mencerminkan nilai aset. Prinsip biaya historis sering kali mengabaikan perubahan pasar dan dampak inflasi, sehingga laporan keuangan menjadi kurang relevan. Dengan berfokus pada nilai sebenarnya (*true value*),

prinsip ini bertujuan untuk memberikan penilaian yang jujur dan realistis, yang sesuai dengan kondisi riil dan stabil. Dalam prinsip ini terdapat integrasi nilai *ijtihād* (usaha sungguh-sungguh) dan *ṣidq* (kejujuran) yang memastikan proses penilaian aset yang mendalam dan transparan, memberikan kepercayaan yang lebih tinggi kepada pemangku kepentingan.

5. Prinsip Pengungkapan Penuh Berbasis Takut Pada Tuhan

Prinsip pengungkapan penuh berbasis takut pada tuhan diusulkan sebagai pengganti prinsip pengungkapan paripurna untuk mendorong transparansi yang lebih komprehensif dan berlandaskan etika. Prinsip pengungkapan yang hanya mencakup informasi material sering kali membatasi akses pemangku kepentingan terhadap gambaran utuh perusahaan. Dengan nilai *khasyah* (takut kepada Tuhan), prinsip ini memastikan bahwa informasi disampaikan secara penuh, mencakup aspek material dan non-material, dengan kejujuran dan integritas. Nilai *ṣidq* dan *lā taqif* memperkuat komitmen pada kebenaran, mencegah manipulasi, dan memberikan landasan moral yang lebih kuat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik pada laporan keuangan.

6. Prinsip Kesiapan Usaha

Nama prinsip kesiapan usaha diusulkan sebagai pengganti prinsip kelangsungan usaha untuk mencerminkan fleksibilitas dalam menghadapi ketidakpastian. Berbeda dengan prinsip kelangsungan usaha yang mengasumsikan operasi tanpa batas, prinsip kesiapan usaha mencakup kesiapan menghadapi potensi likuidasi atau perubahan besar jika diperlukan. Hal ini memungkinkan laporan keuangan yang lebih

adaptif dan realistis, khususnya dalam kondisi risiko tinggi. Dengan integrasi nilai *hijrah*, prinsip ini menekankan kesiapan mental dan strategis untuk beradaptasi demi kelangsungan usaha yang tangguh, sekaligus mencerminkan kondisi perusahaan secara lebih objektif dan transparan.

7. Prinsip Mempertemukan

Prinsip mempertemukan tetap dipertahankan karena menggambarkan pentingnya menyelaraskan biaya dan pendapatan dalam satu periode untuk memberikan gambaran kinerja perusahaan yang akurat dan konsisten. Meskipun realitas bisnis menunjukkan bahwa biaya dan pendapatan tidak selalu terjadi bersamaan, prinsip ini relevan dengan integrasi nilai *ijtihād* dan *ṣidq*. Dengan *ijtihād*, perusahaan dapat melakukan pertimbangan cermat kapan biaya perlu dicatat sebagai beban langsung atau dikapitalisasi, sesuai manfaat ekonomis jangka panjangnya, tanpa harus selalu menyelaraskan biaya dan pendapatan dalam periode yang sama. Sementara itu, *ṣidq* memastikan kejujuran dalam pengakuan biaya dan pendapatan, sehingga laporan keuangan tetap transparan dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya.

8. Prinsip Pengungkapan Pendapatan Berbasis Akrual

Prinsip pengakuan berbasis pendapatan akrual tetap dipertahankan karena lebih mencerminkan kinerja akuntansi secara komprehensif dibandingkan dengan basis kas. Basis akrual mencakup semua transaksi kas dan non-kas, memberikan gambaran yang lebih menyeluruh atas kondisi keuangan perusahaan, sementara basis kas

hanya mencatat arus kas aktual tanpa mempertimbangkan piutang atau hutang. Integrasi nilai *ṣidq* dalam prinsip ini menekankan kejujuran dan kemurnian niat dalam penyajian informasi, memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara etis dan transparan. Dengan demikian, basis akrual tetap menjadi metode yang unggul dalam memenuhi standar teknis dan nilai moral dalam akuntansi.

9. Prinsip Totalitas Informasi

Prinsip totalitas informasi diusulkan untuk menggantikan prinsip materialitas karena menekankan pentingnya menyajikan seluruh informasi yang relevan, baik yang material maupun non-material. Saat ini, fokus pada informasi material berisiko mengurangi transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, serta membuka peluang manipulasi. Dengan prinsip ini, perusahaan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang dampak sosial dan lingkungan dari operasional mereka. Dalam prinsip ini terdapat integrasi nilai *ṣuḥbah* (kolaborasi), *ṣidq* (kejujuran), dan *lā taqif* (semangat mencari kebenaran) memperkuat komitmen untuk menyampaikan informasi secara akurat dan jujur, sehingga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan mendukung praktik bisnis yang lebih etis.

10. Prinsip Nilai Kebenaran Progresif

Prinsip nilai kebenaran progresif diusulkan untuk menggantikan prinsip konservatisme karena menekankan pentingnya pelaporan yang jujur dan akurat, mengatasi bias yang mungkin ditimbulkan oleh konservatisme. Prinsip konservatisme sering kali mengutamakan kehati-hatian yang berlebihan, mengakui beban lebih cepat daripada

pendapatan, sehingga laporan keuangan tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya. Dengan mengintegrasikan nilai *ṣidq* (kejujuran), prinsip ini berfokus pada penyajian informasi yang objektif dan seimbang, tanpa pesimisme atau optimisme yang tidak realistis. Hasilnya, laporan keuangan menjadi lebih netral dan dapat dipercaya, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik bagi semua pemangku kepentingan.

11. Prinsip Keseimbangan Substansi Ekonomi dan Bentuk Hukum

Prinsip keseimbangan substansi ekonomi dan bentuk hukum diusulkan untuk menggantikan prinsip substansi mengungguli bentuk karena mencerminkan perlunya keseimbangan antara substansi ekonomi dan kepatuhan terhadap regulasi hukum. Fokus yang terlalu besar pada substansi ekonomi dapat mengabaikan formalitas hukum, meningkatkan risiko manipulasi dan mengurangi transparansi laporan keuangan. Dengan mengintegrasikan nilai *ijtihād*, prinsip ini mendorong pelaporan yang memperhatikan kedua aspek, memastikan bahwa laporan keuangan akurat, transparan, dan sesuai dengan standar kepatuhan. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan mengurangi potensi risiko yang merugikan perusahaan.

12. Prinsip Kejujuran dan Pengawasan Berkelanjutan

Prinsip kejujuran dan pengawasan berkelanjutan diusulkan untuk menggantikan prinsip objektivitas karena menekankan pentingnya keseimbangan antara keakuratan penyajian informasi dan pertimbangan etika. Meskipun objektivitas penting dalam laporan keuangan, pendekatannya yang kaku dapat mengabaikan nilai moral dan keadilan.

Dengan mengintegrasikan nilai *ṣidq* (kejujuran), *murāqabah* (kesadaran akan pengawasan Tuhan), dan *lā taqif* (semangat mencari kebenaran), prinsip ini memastikan pelaporan yang tidak hanya akurat tetapi juga etis. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan integritas dan transparansi dalam laporan keuangan, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, dan menciptakan dampak positif dalam praktik akuntansi.

13. Prinsip Daya Banding dengan Kesungguhan

Prinsip daya banding dipertahankan karena menekankan pentingnya laporan keuangan yang memiliki daya banding antar periode atau antar perusahaan. Prinsip ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kinerja secara konsisten meskipun terdapat variasi kebijakan akuntansi yang dapat menyulitkan perbandingan. Dengan integrasi nilai *ijtihād*, akuntan didorong untuk berkomitmen dalam menyusun laporan yang tetap memiliki daya banding meskipun menghadapi tantangan. Pendekatan ini memastikan laporan keuangan tetap relevan, akurat, dan etis, memberikan informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan. Dengan demikian, prinsip daya banding dengan kesungguhan membantu mengurangi kebingungan akibat perbedaan praktik akuntansi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

14. Prinsip Konsistensi dengan Kesungguhan

Prinsip konsistensi dipertahankan karena menekankan pentingnya penggunaan metode akuntansi yang sama antar periode, sehingga laporan keuangan dapat dibandingkan secara adil dan akurat.

Meskipun ada kebutuhan untuk fleksibilitas akibat perubahan kondisi bisnis atau standar akuntansi, prinsip ini tetap relevan untuk menjaga keandalan data historis. Dengan integrasi nilai *ijtihād*, akuntan dapat tetap konsisten sambil mempertimbangkan relevansi laporan keuangan. Pendekatan ini memungkinkan penyesuaian yang diperlukan tanpa mengorbankan konsistensi, memastikan bahwa laporan tetap informatif dan berguna bagi pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Prinsip konsistensi dengan kesungguhan menciptakan keseimbangan antara keandalan dan relevansi dalam praktik akuntansi.

15. Prinsip Netralitas dengan Kesungguhan

Prinsip netralitas dipertahankan karena menekankan pentingnya penyajian informasi keuangan secara objektif tanpa keberpihakan, memastikan semua pengguna laporan mendapatkan gambaran yang akurat mengenai kondisi perusahaan. Meskipun terdapat tekanan dari pihak-pihak tertentu yang dapat menciptakan bias, prinsip ini berfungsi untuk menjaga integritas laporan. Dengan mengintegrasikan nilai *ijtihād*, penyusun laporan didorong untuk mengambil keputusan secara independen, meningkatkan objektivitas dan etika profesional. Pendekatan ini mengurangi potensi bias dan meningkatkan transparansi, sehingga laporan keuangan menjadi lebih dapat dipercaya oleh semua pemangku kepentingan. Dengan demikian, prinsip netralitas dengan kesungguhan membantu mempertahankan kualitas dan integritas informasi yang disajikan.

16. Prinsip Tepat Waktu dengan Kesungguhan

Prinsip tepat waktu dipertahankan karena menekankan pentingnya penyajian informasi keuangan yang cepat dan relevan untuk pengambilan keputusan. Meskipun terdapat tantangan dalam menyeimbangkan kecepatan dan akurasi, prinsip ini tetap krusial dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Dengan memanfaatkan teknologi modern, informasi dapat disajikan dengan cepat tanpa mengorbankan akurasi. Integrasi nilai *ijtihād* mendorong akuntan untuk bertindak dengan objektivitas dan kesungguhan dalam proses pelaporan. Pendekatan ini memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya tepat waktu tetapi juga dapat dipercaya, transparan, dan memberikan nilai bagi semua pemangku kepentingan.

17. Prinsip Kemudahan

Prinsip kemudahan perlu ditambahkan untuk mengoreksi temuan dalam dokumen sumber prinsip dasar akuntansi yang menyatakan bahwa laporan keuangan hanya dapat dipahami oleh mereka yang memiliki pengetahuan memadai tentang bisnis dan ekonomi. Hal ini menciptakan hambatan akses bagi publik yang tidak memiliki latar belakang tersebut, sehingga mereka menghadapi kesulitan dalam memahami informasi keuangan. Dengan mengintegrasikan prinsip kemudahan, penyajian laporan keuangan dapat disederhanakan agar lebih mudah diakses dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan transparansi, mengurangi asimetri informasi, dan mendukung kejujuran serta akuntabilitas perusahaan.

18. Batasan Kuantitatif atas Materialitas

Batasan kuantitatif dalam materialitas perlu ditentukan dengan pertimbangan yang seksama karena ketiadaan batas yang jelas dalam laporan keuangan membuka peluang untuk praktik korupsi. Tanpa angka atau persentase yang tegas dari DSAK IAI, interpretasi materialitas dapat disesuaikan dengan kepentingan pihak tertentu, mengakibatkan penghilangan atau pengaburan informasi penting yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna, seperti investor dan kreditor. Fleksibilitas ini juga menyulitkan auditor dan regulator dalam mendeteksi manipulasi data, meningkatkan risiko korupsi. Dengan menerapkan nilai *ijtihād* dan *ṣidq*, batas kuantitatif dapat ditentukan secara lebih jelas, membantu memastikan konsistensi, transparansi, dan kejujuran dalam penyajian informasi. Berikut adalah penyajian uraian di atas dalam bentuk tabel:

Tabel 5.2
Rekomendasi Prinsip Dasar Akuntansi Pasca Dekonstruksi

No	Prinsip Dasar Akuntansi Sebelum Dekonstruksi	Deskripsi Sebelum Dekonstruksi	Rekomendasi Prinsip Dasar Akuntansi Setelah Dekonstruksi	Deskripsi Setelah Dekonstruksi	Nilai yang Diintegrasikan
1	Prinsip Entitas Ekonomi	Menganggap entitas bisnis sebagai unit ekonomi yang terpisah dari pemiliknya.	Prinsip Hubungan Entitas Berbasis Persahabatan dan Kejujuran	Pendekatan etika dan nilai spiritual, mengutamakan persahabatan dan kejujuran dalam hubungan antara entitas dan pemilik bisnis	*Ṣuḥbah* dan *ṣidq*
2	Prinsip Unit	Pelaporan	Prinsip Satuan	Menggunakan	*Ijtihad* dan *ṣidq*

	Moneter	keuangan menggunakan satuan mata uang lokal.	Ukur yang Jujur	satuan ukur yang terjamin kestabilannya terhadap inflasi	
3	Prinsip Periode Waktu	Pelaporan keuangan dilakukan secara berkala, biasanya tahunan.	Prinsip Pelaporan Dinamis	Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang bisa bisa diminta setiap saat	*Murāqabah*
4	Prinsip Biaya Historis	Aset dicatat berdasarkan biaya pembelian awal, bukan nilai pasar.	Prinsip Nilai Sebenarnya	Menggunakan nilai sebenarnya	*Ijtihād* dan *ṣidq*
5	Prinsip Pengungkapan Paripurna	Informasi yang disajikan mencakup aspek-aspek yang penting bagi keputusan pengguna.	Prinsip Pengungkapan Penuh Berbasis Takut Pada Tuhan	Informasi yang disajikan mencakup aspek-aspek yang penting bagi keputusan pengguna dan juga bagi sosial dan lingkungan	*Khasyah*, *ṣidq*, dan *lā taqif*
6	Prinsip Kelangsungan Usaha	Mengasumsikan bahwa entitas bisnis akan terus beroperasi dalam jangka waktu tidak terbatas.	Prinsip Kesiapan Usaha	Mengasumsikan bahwa entitas bisnis itu harus siap baik kemungkinan terus beroperasi dalam jangka panjang maupun likuidasi	*Hijrah*
7	Prinsip Mempertemukan	Mengaitkan pendapatan dan biaya dalam periode yang sama untuk akurasi kinerja.	Prinsip Mempertemukan dilakukan dengan Kesungguhan dan Kejujuran	Mempertahankan prinsip penyelarasan biaya dan pendapatan dengan upaya maksimal dan jujur	*Ijtihād*, *ṣidq*
8	Prinsip Pengakuan Pendapatan Akrual	Mencatat pendapatan dan biaya ketika terjadi, terlepas dari arus kas aktual.	Prinsip Pengakuan Pendapatan Berbasis Akrual dengan Kejujuran	Mempertahankan prinsip akrual dengan jujur	*Ṣidq*
9	Prinsip Materialitas	Hanya informasi material yang perlu diungkapkan.	Prinsip Totalitas Informasi	Menyajikan seluruh informasi, baik material maupun non-	*Ṣuḥbah*, *ṣidq*, *lā taqif*

				material.	
10	Prinsip Konservatisme	Mengutamakan kehati-hatian dalam mencatat biaya lebih cepat daripada pendapatan.	Prinsip Nilai Kebenaran Progresif	Mencatat secara apa adanya, jujur, dan tidak pesimistis	*Ṣidq*
11	Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk	Memprioritaskan substansi ekonomi daripada formalitas hukum.	Prinsip Keseimbangan Substansi Ekonomi dan Bentuk Hukum	Menyeimbangkan antara substansi ekonomi dan kepatuhan hukum	*Ijtihād*
12	Prinsip Objektivitas	Informasi keuangan disajikan secara objektif dan tidak bias.	Prinsip Kejujuran dan Pengawasan Berkelanjutan	Tidak sekedar apa adanya dan tanpa tendensi, tapi patuh dengan nilai kejujuran	*Ṣidq*, *Murāqabah*, *lā taqif*
13	Prinsip Daya Banding	Laporan keuangan harus dapat dibandingkan antar periode dan antar entitas.	Prinsip Daya Banding dengan Kesungguhan	Mempertahankan daya banding untuk konsistensi evaluasi antar periode/perusahaan.	*Ijtihād*
14	Prinsip Konsistensi	Metode akuntansi yang digunakan harus konsisten antar periode.	Prinsip Konsistensi dengan Kesungguhan	Mempertahankan konsistensi metode akuntansi untuk laporan yang adil dan akurat.	*Ijtihād*
15	Prinsip Netralitas	Informasi keuangan disajikan tanpa keberpihakan.	Prinsip Netralitas dengan Kesungguhan	Mempertahankan netralitas tanpa keberpihakan dalam penyajian informasi keuangan.	*Ijtihād*
16	Prinsip Tepat Waktu	Informasi keuangan disajikan sesegera mungkin agar relevan untuk pengambilan keputusan.	Prinsip Tepat Waktu dengan Kesungguhan	Mempertahankan ketepatan waktu pelaporan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.	*Ijtihād*
17	Belum ada	Tidak ada prinsip yang secara khusus menekankan kemudahan	Prinsip Kemudahan	Menyederhanakan laporan keuangan agar lebih mudah diakses oleh semua pemangku	*Yusrā*

		akses bagi publik yang tidak memiliki pengetahuan akuntansi.		kepentingan, memudahkan semua pihak mengawal kejujuran	
18	Belum ada	Tidak ada batasan kuantitatif yang jelas dalam menentukan materialitas.	Batasan Kuantitatif atas Materialitas dengan Kesungguhan dan Kejujuran	Menentukan batasan kuantitatif yang jelas untuk konsistensi dan transparansi.	*Ijtihād* dan *ṣidq*

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian ini menemukan bahwa:

1. Prinsip dasar akuntansi saat ini memiliki berbagai kelemahan sebagai berikut. Prinsip entitas ekonomi sulit diterapkan pada bisnis kecil dengan pemisahan keuangan yang kurang jelas, sementara prinsip unit moneter terkendala dengan inflasi. Prinsip periode waktu berpotensi terjadinya *windows dressing*, dan pengungkapan paripurna sering hanya berfokus pada pemilik modal. Prinsip kelangsungan usaha bisa menyesatkan dalam krisis, sementara prinsip mempertemukan sulit diterapkan pada biaya jangka panjang. Prinsip biaya historis dianggap kurang relevan karena tidak mencerminkan nilai aset yang sesungguhnya, prinsip pengakuan pendapatan dapat menyesatkan kondisi likuiditas perusahaan, khususnya pada penjualan kredit yang gagal ditagih, dan prinsip materialitas sering mengabaikan isu sosial serta lingkungan. Prinsip konservatisme cenderung mencatat kerugian lebih cepat daripada keuntungan. Prinsip substansi mengungguli bentuk memungkinkan mencatat transaksi yang tidak sah secara hukum. Prinsip objektivitas bisa disalahgunakan untuk justifikasi tidak etis. Prinsip daya banding terbatas oleh standar berbeda antar perusahaan. Prinsip konsistensi membatasi relevansi laporan dalam perubahan besar. Prinsip

netralitas sulit dipertahankan karena tekanan pemilik modal, dan prinsip tepat waktu bisa menurunkan kualitas informasi tanpa verifikasi. Nilai-nilai tasawuf digunakan untuk mendekonstruksi prinsip dasar akuntansi karena menekankan kesadaran moral, spiritual, dan integritas. Kejujuran dalam akuntansi sering dibatasi oleh materialitas dan objektivitas, yang membuka celah manipulasi. Sebaliknya, dalam tasawuf, kejujuran diukur melalui kepatuhan kepada Tuhan, akurasi tanpa kompromi, selaras dengan etika universal. Pendekatan tasawuf ini dapat memperbaiki ketidakjelasan, meningkatkan akurasi, transparansi, dan relevansi laporan keuangan dalam konteks sosial dan ekonomi.

2. Penggunaan nilai-nilai tasawuf dalam mendekonstruksi prinsip dasar akuntansi mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada melalui penerapan nilai-nilai spiritual seperti *ṣidq*, *yusrā*, *khasyah*, *hijrah ṣuḥbah*, *ijtihād*, *murāqabah*, dan *lā taqif*. Proses dekonstruksi dimulai dengan identifikasi prinsip dasar akuntansi, analisis oposisi biner, pembalikan hierarki, dan penyusunan rekomendasi prinsip dasar akuntansi berdasarkan hasil dekonstruksi. Prinsip entitas ekonomi didekonstruksi dengan *ṣuḥbah* dan *ṣidq*, prinsip unit moneter dengan *ijtihād* dan *ṣidq*, prinsip periode waktu dengan *murāqabah*, prinsip biaya historis dengan *ijtihād* dan *ṣidq*, prinsip pengungkapan paripurna dengan *ṣuḥbah*, *ṣidq*, dan *lā taqif*, prinsip kesinambungan usaha dengan *hijrah* dan *ṣidq*, prinsip mempertemukan dengan *ijtihād* dan *ṣidq,* prinsip pengakuan pendapatan dengan *ṣidq*, prinsip materialitas dengan *ṣuḥbah*, *ṣidq*, dan *lā taqif*, prinsip konservatisme

dengan *ṣidq*, prinsip substansi mengungguli bentuk dengan *ijtihād*, prinsip objektivitas dengan *ṣidq*, *murāqabah*, dan *lā taqif*, prinsip daya banding, konsistensi, netralitas, dan ketepatan waktu dengan *ijtihād*, dan menambahkan prinsip baru yaitu kemudahan atau yusrā. Dekonstruksi ini membuat prinsip akuntansi lebih etis, bermoral, dan sesuai dengan nilai spiritual.

3. Rekomendasi prinsip dasar akuntansi berdasarkan dekonstruksi nilai tasawuf mengusulkan perubahan yang lebih fleksibel dan relevan dengan menekankan nilai etis dan spiritual. Prinsip hubungan entitas berbasis persahabatan dan kejujuran diusulkan untuk menggantikan prinsip entitas ekonomi, prinsip satuan ukur yang jujur diusulkan untuk menggantikan unit moneter, dan prinsip pelaporan dinamis diusulkan untuk menggantikan periode waktu. Prinsip mempertemukan tetap dipertahankan dengan kesungguhan dan kejujuran. Prinsip pengakuan pendapatan berbasis akrual tetap dipertahankan dengan penekanan pada kejujuran. Prinsip totalitas informasi diusulkan untuk menggantikan materialitas, prinsip nilai kebenaran progresif diusulkan untuk menggantikan konservatisme, serta prinsip keseimbangan substansi ekonomi dan bentuk hukum diusulkan untuk menggantikan substansi mengungguli bentuk. Prinsip kejujuran dan pengawasan berkelanjutan diusulkan untuk menggantikan objektivitas, prinsip nilai sebenarnya diusulkan untuk menggantikan biaya historis, dan prinsip pengungkapan penuh berbasis takut pada tuhan diusulkan untuk menggantikan pengungkapan paripurna. Prinsip kesiapan usaha diusulkan untuk

menggantikan kelangsungan usaha, sementara prinsip daya banding, konsistensi, netralitas, dan ketepatan waktu tetap dipertahankan dengan kesungguhan. Prinsip kemudahan diusulkan sebagai prinsip dasar baru untuk mempermudah akses laporan keuangan. Batasan materialitas dengan kesungguhan dan kejujuran diusulkan juga sebagai prinsip dasar yang baru sebagai bentuk ketegasan dan kejelasan. Prinsip-prinsip tersebut semuanya diharapkan dapat memberikan kontribusi pada akuntansi yang lebih etis dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

B. Implikasi

Temuan penelitian ini memiliki implikasi baik dalam ranah teoretis maupun praktis. Implikasi teoretis penelitian ini mencakup perbaikan teori akuntansi dengan prinsip dasar baru, pengembangan model akuntansi berbasis kejujuran, pengawasan, dan takut pada Tuhan, serta perubahan kurikulum akuntansi dan revisi literatur untuk mencakup dimensi moral dan spiritual. Implikasi praktisnya, penerapan prinsip tasawuf dalam laporan keuangan secara praktis dapat meningkatkan transparansi, integritas, dan stabilitas sistem keuangan, baik untuk perusahaan besar, pemerintahan, maupun UKM. Perusahaan dapat memanfaatkan teknologi seperti AI, *big data*, dan *blockchain* untuk meningkatkan efisiensi dalam akuntansi, memungkinkan pelaku akuntansi lebih fokus pada kejujuran dan integritas, karena teknologi akan mengotomatisasi tugas-tugas teknis dan administratif. Penerapan prinsip tasawuf di sektor pemerintahan dapat meningkatkan transparansi

pengelolaan keuangan negara dan akuntabilitas publik, serta mencegah korupsi. Regulator dapat mendorong pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan keuangan, yang akan memperkuat kepercayaan publik.

Selain itu, prinsip tasawuf dalam pengelolaan anggaran dan pengukuran dampak sosial mendukung keberlanjutan dan transparansi. Perusahaan dapat segera mengadopsi nilai-nilai tasawuf, seperti kejujuran dalam penilaian aset dan kewajiban, yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini, serta memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan melalui praktik yang lebih etis. Perusahaan *go public* dan tertutup dapat memperluas pengungkapan dalam laporan tahunan serta mengevaluasi sistem akuntansi internal untuk menciptakan laporan yang lebih akurat dan transparan. Sementara itu, UKM dapat memanfaatkan perangkat akuntansi sederhana untuk mencatat transaksi secara transparan dan menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial, yang mendukung keberlanjutan dan stabilitas ekonomi baik pada tingkat bisnis maupun pemerintahan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat diajukan kepada Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) jika suatu saat IAI mengadakan sesi *publik sharing* untuk meminta masukan dari masyarakat terkait penyusunan kerangka konseptual akuntansi yang baru.

Meskipun memiliki implikasi teoretis dan praktis, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi kitab-kitab tasawuf lainnya seperti *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn.* karya al-Gazālī atau *Risālah al-Qusyairiyyah* karya al-Qusyairī, untuk memperdalam pemahaman

tentang penerapan nilai-nilai tasawuf dalam akuntansi. Fokus penelitian lanjutan bisa diarahkan pada pengaruh nilai-nilai seperti kejujuran dan pengawasan terhadap kinerja keuangan perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan reputasi bisnis. Selain itu, studi empiris yang membandingkan perusahaan yang mengadopsi prinsip tasawuf dengan yang tidak dapat memberikan wawasan lebih lanjut. Penelitian juga dapat mengkaji integrasi teknologi, seperti AI, *big data*, dan *blockchain*, dalam penerapan prinsip tasawuf untuk meningkatkan efisiensi dan nilai etis dalam akuntansi. Evaluasi efektivitas pelatihan etika berbasis tasawuf juga dapat memperkaya pemahaman tentang penerapan prinsip-prinsip ini dalam dunia akuntansi

Adapun keterbatasan dalam penelitian antara lain terletak pada literatur dan referensi yang digunakan, yang mungkin tidak mencakup seluruh variabel yang relevan. Hal ini membuka kemungkinan adanya variabel lain yang belum teridentifikasi, yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip tasawuf dalam konteks akuntansi yang berfokus pada kejujuran dan integritas memerlukan waktu yang panjang untuk dapat diimplementasikan secara menyeluruh, terutama di sektor-sektor yang masih kuat dipengaruhi oleh prinsip akuntansi konvensional. Penelitian ini juga belum mencakup uji empiris terhadap implementasi prinsip tasawuf di dunia nyata, yang mungkin dapat menghasilkan tantangan praktis terkait pengukuran dampak sosial dan lingkungan. Terakhir, keterbatasan juga muncul dalam hal sumber daya untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai integrasi

teknologi seperti AI, *big data*, dan *blockchain*, serta evaluasi pelatihan berbasis tasawuf yang lebih luas dalam dunia akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, M. Amin. *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Accounting Principles Board. *APB Statement No.4: Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business Enterprises*. American Institute of Certified Public Accountants, 1970.

Agustia, Dian, Iman Harymawan, Yani Permatasari, dan Sendy D. Haryanto. *Sustainability - Konsep dan Pelaporan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2023.

Al-Fayyadl, Muhammad. *Derrida*. Yogyakarta: LKiS, 2009.

Alfizi, Dina Lusianti, Dwi Indriastuti Yulianingsih, Eni Candra Nurhayati, Mohammad Sapta Heriyawan, Lela Zumala Rofiqoh, Mella Mardayanti, dkk. *Manajemen Integrasi Nilai Islam dalam Berbagai Perspektif Teori*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2023.

Altman, Edward I., Edith Hotchkiss, dan Wei Wang. *Corporate Financial Distress, Restructuring, and Bankruptcy: Analyze Leveraged Finance, Distressed Debt, and Bankruptcy*. John Wiley & Sons, 2019.

Amin, Muhammad Al. *Filsafat Teori Akuntansi*. Magelang: Unimma Press, 2018.

Amin, Samsul Munir. *Ilmu Tasawuf*. Jakarta: Amzah, 2012.

Anwar, Rusydie. *Syeikh Abu Hasan As-Syadzili, Kisah Hidup dan Dalil Tasawuf untuk Menggapai Kebahagiaan Sejati*. Yogyakarta: Araska, 2022.

Arató, Ferenc. "Deconstructing Exclusion: A Post-Structuralist Approach to Inclusiveness." dalam *Inclusive University - How to Increase Academic Excellence Focusing on The Aspects of Inclusion*, 43–60. Hungary: University of Pécs, 2015.

Arie Pratama, *Studi Implementasi Akuntansi Keuangan di Berbagai Industri* (Sleman: Bintang Semesta Media, 2022), 7–11.

Astuti, Tri, Ribka Shintia Febriarti Bonara, dan Marti Dewi Ungkari. *Akuntansi Keuangan*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Athaillah, Ibnu. *Laṭā'if al-Minan, Rahasia yang Mahaindah, Belajar Hidup Berkah dari Kekasih Allah*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008.

Baydoun, Nabil, Maliah Sulaiman, Roger J. Willett, and Shahul Ibrahim. *Principles of Islamic Accounting*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2018.

Belkaoui, Ahmed Riahi. *Accounting Theory*. Singapore: South-Western, 2006.

———. *Teori Akuntansi Buku Satu*. 5 ed. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006.

Bloom, Harold, Paul De Man, Jacques Derrida, Geoffrey H. Hartman, dan J. Hillis Miller. *Decontruction and Criticism*. New York: The Seabury Press, 1979.

Bukhārī, Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Riyadh: Dār al-Ḥaḍārah lil al-Nasyr wa al-Tauzī', 2014.

Chariri, Anis, dan Imam Ghozali. *Teori Akuntansi, Edisi Revisi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003.

Efriyenty, Dian Efriyenty. *Teori Akuntansi*. Batam: Batam Publisher, 2022.

Farhat, Abdul Wahab, dan Muhammad Abdullah. *Syekh Syekh Abū al-Ḥasan al-Syāżilī sang Wali Penembus Batas*. Depok: Keira Publishing, 2019.

Furchan, Arief. *Studi Tokoh: Metode Penelitian mengenai Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Gazdar, Kaevan. *Reporting Nonfinancials*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2007.

Ghazali, Imam. *Ihya' Ulumiddin Jilid 2*. Singapura: Pustaka Nasional, 1992.

———. *Ihya' Ulumiddin Jilid 4*. Singapura: Pustaka Nasional, 1998.

Ghozali, Imam. *25 Grand Theory, 25 Teori Besar Ilmu Manajemen Akuntansi dan Bisnis (Untuk Landasan Teori Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*. Semarang: Yoga Pratama, 2021.

Goyal, V.K., dan Ruchi Goyal. *Financial Accounting*. Delhi: PHI Learning, 2023.
Harahap, Sofyan Syafri. *Teori Akuntansi, Edisi Revisi 2011*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.
Hasibuan, Abdul Nasser. *Pengembangan Konsep Akuntansi Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2023.
Hery. *Intisari Konsep Dasar Akuntansi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2021.
Hidayati, Nur, Syukriy Abdullah, Nana Adriana, Maulana Kamal, Ribka Shintia Febriarti Bonara, Agus Samekto, Loso Judijanto, et al. *Teori Akuntansi : Teori, Implementasi dan Perkembangannya*. Bantul: Green Pustaka Indonesia, 2024.
Hoesada, Jan. *Teori Akuntansi dalam Hampiran Historiografis Taksonomis*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022.
Hofer, Nathan. *The Popularisation of Sufism in Ayyubid and Mamluk Egypt, 1173-1325*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016.
Ḥumairī, Muḥammad Ibn Abī al-Qāsim al-. *Jejak-Jejak Wali Allah, Melangkah Menuju Gerbang Kewalian Bersama Syekh Abū al-Ḥasan al-Syāżilī*. Jakarta: Erlangga, t.t.
Ikatan Akuntan Indonesia. "Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah." Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2007.
———. "Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan." Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2019.
———. "Kode Etik Akuntan Indonesia 2021," 2021.
———. *Prinsip Akuntansi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1973.
———. *Prinsip Akuntansi Indonesia 1984*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
———. "PSAK 52 tentang Mata Uang Pelaporan," 1998.
———. *Standar Akuntansi Keuangan, Buku Satu,1 Oktober 1994*. Jakarta: Salemba Empat, 1994.
Jamal, Azim. *Corporate Sufi*. Jakarta: Penerbit Hikmah, 2007.
Jurana. *Konsep Pendidikan Akuntansi Merdeka: Dekonstruksi Pemikiran Ki Hadjar Dewantara*. Surabaya: Penerbit Peneleh, 2021.
Kamayanti, Ari, Novrida Qudsi Lutfillah, Ayudia Sokarina, Hendrik Suhendri, Kurnia Ekasari, Bobby Briando, dan I. Nyoman

Darmayasa. *Metodologi Paradigma Nusantara*. Surabaya: Penerbit Peneleh, 2022.

———. *Metode Penelitian Kualitatif Akuntansi, Pengantar Religiositas Keilmuan*. Malang: Penerbit Peneleh, 2021.

———.*Metodologi Konstruktif Riset Akuntansi, Membumikan Religiositas*. Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh, 2016.

M. Suresh, R. Santhi, and C. Hariharan. *Basics of Business Accounting*. Madurai: Leilani Katie Publication, 2024.

Machado, Carolina, and J. Paulo Davim. *Circular Economy and Manufacturing*. Amsterdam: Elsevier, 2024.

MacNeal, Kenneth. *Truth in Accounting*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016.

Masdiantini, Putu Riesty, Sunitha Devi, Rieke Sri Rizki Asti Karini, Uray Ndaru Mustika, Oktavia Marpaung, Zalni Zalni, Yusli Mariadi, dkk. *Panduan Komperehensif Akuntansi dan Keuangan: Menguasai Dasar-Dasar dan Praktik Terbaik*. Bantul: Green Pustaka Indonesia, 2024.

Meenkera, Mahesh Kumar M., dan Sushil Beliya. *Accounting for Managers*. Bhopal: AG Publishing House, 2022.

Mulawarman, Aji Dedi. *Akuntansi Pertanian: a Prophetic Legacy*. Surabaya: Penerbit Peneleh, 2019.

Mulawarman, Aji Dedi. *Menyibak Akuntansi Syariah, Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013.

Niswonger, C, Rollin, Philip E. Fess, dan Carl S. Warren. *Prinsip-Prinsip Akuntansi, Jilid 1*. 16 ed. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992.

Norris, Christopher. *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida*. Yogyakarta: Buku Bijak, 2022.

Novita, Mega D. *Buku Etika dan Komunikasi Bisnis*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024.

Nugraha, Mulyawan Syafwandy. *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.

Radiansyah, Adrian, Fithriah Napu, Khas Sukma Mulya, Evi Martaseli, Harnavela Sofyan, Sigit Mareta, Henky Hendrawan, dkk. *Teori & Konsep Dasar Akuntansi di Berbagai Sektor*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Said, Roshima, Noor Zahirah Mohd Sidek, Zubir Azhar, dan Khairul Anuar Kamarudin. *State-of-the-Art Theories and Empirical Evidence: Selected Papers from the 6th International Conference on Governance, Fraud, Ethics, and Social Responsibility*. Singapura: Springer, 2017.

Sakandarī, Aḥmad ibn ’Aṭā’illāh al-. *Laṭā’if al-Minan*. Kairo: Dār al-Maʿārif, 2006.

Savitri, Enni. *Konservatisme Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Sahila, 2016.

Sholihan. *Falsafah Kesatuan Ilmu, Paradigma Keilmuan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*. Semarang: Rasail Media Group, 2021.

Singh, S. K. *Corporate Financial Accounting*. Agra: SBPD Publications, 2022.

Soleman, Risky. *Akuntansi Menyerupai Manusia dan Syaitan (Iblis)*. Bogor: Guepedia, 2023.

Soleman, Risky. *Akuntansi Sebuah Ulasan Sejarah, Manajemen, Psikologi, Teknik dan Hukum*. Bogor: Guepedia, 2022.

Sulistyanto, Sri. *Manajemen Laba (Teori & Model Empiris)*. Jakarta: Grasindo, 2008.

Syādzilī, Syekh Abū al-Ḥasan al-. *Risālah al-Amīn fī al-Wuṣūl li-Rabb al-ʻĀlamīn wa yalīhi al-Waṣāyā li-Sayyidī Quṭb al-Aqṭāb wa-Gauṡ al-Agwāṡ Abī al-Ḥasan al-Syādzilī Qaddasa Allāhu Sirrah*. Kairo: Dār al-Ḥaqīqah, 2008.

Syadzili, Syekh Abu al-Hasan asy-. *Risalah al-Amin, Kitab Tasawuf yang Mengantarkan Kita Cepat Sampai kepada-Nya*. Jakarta: Wali Pustaka, 2018.

Syekh Ibnu Ṣabbāg, Muḥammad bin Abī al-Qāsim al-Ḥumairī. *Durrat al-Asrār wa Tuḥfat al-Abrār fī Aqwāl wa Afʿāl wa Aḥwāl wa Maqāmāt wa Nasab wa Karāmāt wa Ażkār wa Daʻawāt Sayyidī Abū al-Ḥasan al-Syāżilī*. Kairo: Maktabah al-Azhariyah lit-Turāts, 2001.

Syekh Ibnu Ṣabbāg, Muḥammad bin Abī al-Qāsim al-Ḥumairī. *The Mystical Teachings of Al-Shadhili: Including His Life, Prayers, Letters, and Followers. A Translation from the Arabic of Ibn al-Sabbagh’s Durrat al-Asrar Wa Tuhfat al-Abrar*. New York: SUNY Press, 1993.

Tengku Irmayani, Kariono, dan Fredick Broven, *Artificial Intelligence dalam Politik Mengubah Lanskap Demokrasi di Era Digital* (Bantul: Jejak Pustaka, 2024), 167–69.

Triyuwono, Iwan, Ali Djamhuri, Aji Dedi Mulawarman, dan Darsono Prawironegoro. *Filsafat Ilmu Akuntansi, Berpikir Kontempelatif, Holistik, Intuitif, Imajinatif, Kreatif, Rasional dan Radikal dalam Akuntansi*. Malang: Mitra Wacana Media, 2016.

Upadhyay, Jayesh, Pramod Kumar Garg, Ishrat Rasool, dan Poonam Singh. *Financial Accounting Concepts & Application*. Delhi: RK Publication, 2024.

Waluyo. *Akuntansi Pajak (Ed.1)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2008.

Zarruq, Syekh Ahmad. *Al-Hikam Ibn 'Athaillah, Ulasan al-Arif Billah Syekh Ahmad Zarruq*. Jakarta: Qalam, 2017.

Zulhelmy, Suhendi. *Dasar–Dasar Akuntansi Islamic View*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.

Zarrūq, Syekh Aḥmad. *Syarah As-Sābi'a 'Asyara 'ala al-Ḥikam al-Aṭā'iyyah*. Kairo: Maktabah at-Taufiqiyyah, 2018.

Jurnal Ilmiah

Abdanadillah, Zaelza, M. Ali Fikri, dan Adhitya Bayu Suryantara. "Analisis Rasio Keuangan Accrual Basis dan Cash Basis terhadap Return Saham pada Perusahaan Dagang yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 2 (22 Juni 2022): 274–91. doi:10.29303/risma.v2i2.215.

Aglamia, Annisa, Anjani Shafa, Galih Nur Sya'ban, Syifa Iqlimah, dan Putri Tri Respitasari. "Analisis Kecurangan Laporan Keuangan : (Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya)." *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 5 (28 Mei 2024): 581–87.

Ainiyah, Nur, Marisha Khanida, dan Yuyun Ristiani. "Potensi Fraud pada Laporan Keuangan Berbasis Fair Value." *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 2 (30 September 2021): 50–63. doi:10.36815/prive.v4i2.1341.

Alfansyur, Andarusni, dan Mariyani Mariyani. "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu pada

Penelitian Pendidikan Sosial." *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (27 Desember 2020): 146–50. doi:10.31764/historis.v5i2.3432.

Alfia, Yulis, Iwan Triyuwono, dan Aji Mulawarman. "Kritik atas Tujuan Akuntansi Syariah: Perspektif Realitas Sadrian." *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)* 3, no. 2 (2018). http://journal.pnm.ac.id/index.php/aksi/article/view/68.

Alkaraan, Fadi, Mohammad Albahloul, Tony Abdoush, Dr Mahmoud Elmarzouky, dan Nadia Gulko. "Big Four 'Rhetorical' Strategies: Carillion's Collapse." *Journal of Accounting and Management Information Systems* 23 (1 Juli 2024): 295–316. doi:10.24818/jamis.2024.02001.

Alsaqer, Brooj Nasser A. "The Role of Deconstructing as a Part of Translation Process in Literary Text." *World Journal of Advanced Research and Reviews* 20, no. 2 (2023): 960–68. doi:10.30574/wjarr.2023.20.2.2335.

Altiria, Seradona. "Dekonstruksi Derrida pada Kajian Linguistik Kognitif." *Prosiding Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya (KOLITA)* 21, no. 21 (30 Oktober 2023): 270–80. doi:10.25170/kolita.21.4857.

Amalia, Citra, Nadya Safitri, Lily Zahrani, Elly Ami Wardani, dan Saridawati Saridawati. "Etika dalam Praktik Akuntansi Keuangan (Studi Kasus PT Garuda Indonesia Tbk)." *Journal Sains Student Research* 2, no. 3 (27 Mei 2024): 741–47. doi:10.61722/jssr.v2i3.1476.

Andabai, Priye Werigbelegha, dan Stephen Ebifemo-ere. "A Theoretical Study on The Failure of Lehman Brothers and Merril Lynch: A Lesson for Banking Institutions in Nigeria." *BW Academic Journal*, 30 November 2023, 6–6.

Anggraini, Erlina. "Redefining the Concept of Asceticism (Zuhd) in Tasawwuf:Abul Hasan Ash-Shadhili's View and His Tariqa Shadhiliyya." *Teosofia: Indonesian Journal of Islamic Mysticism* 8, no. 1 (29 Juni 2019): 13–30.

Ardian, Iwan. "Spiritual and Religion Concept in Nursing for Diabetic Melitus Patients." *NURSCOPE: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ilmiah Keperawatan* 2, no. 2 (1 Desember 2016): 40–48. doi:10.30659/nurscope.2.2.40-48.

Arie, Arie Pradina Putri. “Transformasi Akuntansi di Era Big Data dan Teknologi Artificial Intelligence (AI).” *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 5, no. 2 (4 Juli 2024): 937–43. doi:10.36312/jcm.v5i2.3279.

Astuti, An Ras Try, dan Andi Faisal. “Tasawwuf sebagai Lokomotif Syariah Enterprise Theory.” *AL MA’ARIEF : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 3, no. 1 (27 Juni 2021): 12–25. doi:10.35905/almaarief.v3i1.1538.

Avi, Maria Silvia. “Materiality and Relevance in Financial Reporting. Interpretation Problems and Solutions Adopted Internationally.” *International Journal of Accounting and Finance Studies* 5, no. 2 (22 Juni 2022): p1. doi:10.22158/ijafs.v5n2p1.

Baridwan, Zaki. “Perkembangan Teori dan Penelitian Akuntansi.” *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)* 15, no. 4 (1 Oktober 2000): 486–97.

Billings, B. Anthony, D. Larry Crumbley, dan Cedric L. Knott. “Tangible and Intangible Costs of White-Collar Crime.” *Journal of Forensic and Investigative Accounting* 13, no. 2 (2021).

Bistara, Rahabistara. “Tariqah Dimensi Esoteris dalam Islam (Studi Pemikiran Sayyed Hossein Nasr).” *Journal of Islamic Civilization* 2, no. 2 (29 Agustus 2020): 72–79. doi:10.33086/jic.v2i2.1704.

Bonisoli, Lorenzo, Emilio Galdeano-Gómez, dan Laura Piedra-Muñoz. “Deconstruction: the Qualitative Methodology for the Analysis of Sustainability Assessment Tools of Agri-system.” *MethodsX* 5 (1 Januari 2018): 635–38. doi:10.1016/j.mex.2018.06.003.

Buresh, Donald. “The Fall of Arthur Andersen, LLP and Enron Corporation, and the Rise of the Sarbanes-Oxley Act of 2002.” *International Journal of Social Science and Human Research* 6, no. 10 (1 Januari 2023): 6317–43. doi:10.47191/ijsshr/v6-i10-71.

Butala, Amy, dan Zafar U. Khan. “Accounting Fraud at Xerox Corporation: Ethical Considerations.” *Journal of Leadership, Accountability and Ethics* 16, no. 5 (30 Desember 2019). doi:10.33423/jlae.v16i5.2657.

Çakalı, Kaan Ramazan. “Agency Problem in Corporate Governance: Worldcom Case.” *İşletme* 3, no. 1 (18 Maret 2022): 15–31.

Canfield, George F. “The Scope and Limits of the Corporate Entity Theory.” *Columbia Law Review* 17, no. 2 (1917): 128–43. doi:10.2307/1111674.

Caplan, Dennis, Saurav Dutta, dan David Marcinko. “Unmasking the Fraud at Toshiba.” *Issues in Accounting Education* 34 (25 April 2019). doi:10.2308/iace-52429.

Caseba, Farah Labibah, dan Totok Dewayanto. “Penerapan Artificial Intelligence, Big Data, dan Blockchain dalam Fintech Payment terhadap Risiko Penipuan Komputer (computer Fraud Risk): A Systematic Literature Review.” *Diponegoro Journal of Accounting* 13, no. 3 (10 Juli 2024). https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/46058.

Chaidir, Aisyah Bunga, Guntur Haludin, Rosi Rahmawati, Nadia Jasmine, Dewi Swangsa, dan Marcelina Putri Widayanto. “Analisis Peran Kepemimpinan terhadap Kinerja Perusahaan dalam Perspektif Budaya Organisasi: Studi Kasus pada Skandal Perusahaan Toshiba.” *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 1 (4 Juli 2024): 734–42. doi:10.54783/jser.v6i1.446.

Chapman, Robert. “Ineffective Risk Management and the Collapse of Carillion.” *PM World Journal* VII, no. XII (30 Desember 2018).

Chi, Yu-Ho, dan David A. Ziebart. “The Need for Due Diligence and Financial Statement Analysis – The Bank of America-Merrill Lynch Case.” *Journal of Accounting and Finance* 23, no. 1 (15 Februari 2023). doi:10.33423/jaf.v23i1.5829.

Chong, H Gin. “A Review on the Evolution of The Definitions of Materiality.” *International Journal of Economics and Accounting* 6 (1 Januari 2015): 15–32.

Christensen, David S. “The Seeds of Accounting Conservatism.” *European Journal of Business and Management Research* 8, no. 2 (27 Maret 2023): 181–85. doi:10.24018/ejbmr.2023.8.2.1897.

Christian, Natalis, Charline Marshella Ong, Jillian Veronica Wisely, Jaslyn, dan Joan. “Analisis Manipulasi Laporan Keuangan oleh PT Kimia Farma pada Tahun 2001 Menggunakan Teori Fraud.” *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 2 (10 Juni 2024): 113–19.

Christian, Natalis, Resnika Resnika, Haris Yukie, Riksen Sitorus, Viona Angelina, Sherly Sherly, dan Febrika Febrika. "Pendeteksian Fraudulent Financial Reporting dengan Earnings Manipulation Financial Shenanigans: Studi Kasus PT Envy Technologies Indonesia Tbk." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis* 7, no. 1 (25 Juni 2022): 14–50. doi:10.38043/jiab.v7i1.3543.

Christian, Natalis, dan Piere Ricardo. "Kajian Impact of Fraud: Nasional dan Internasional." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 6, no. 2 (15 Mei 2022): 102–17. doi:10.31955/mea.v6i2.1978.

Clikeman, Paul M., dan Jen Zimmerman. "Journal of Forensic and Investigative Accounting." *Journal of Forensic and Investigative Accounting* 12, no. 3 (2020). https://s3.amazonaws.com/web.nacva.com/JFIA/Issues/JFIA-2020-No3-11.pdf.

Constantin, Natasha, dan Fitzerald Kennedy Sitorus. "Dekonstruksi Makna dan Bahasa dalam Perspektif Jacques Derrida." *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)* 3, no. 3 (15 Desember 2023): 795–801. doi:10.47233/jkomdis.v3i3.1315.

Damayanti, Ratna Ayu, dan Syarifuddin. "Dekonstruksi Hubungan Keagenan dalam Proses Anggaran." *Contemporary Journal on Business and Accounting* 1, no. 1 (7 Mei 2021): 89–118. doi:10.58792/cjba.v1i1.8.

Darisman, Hangga, dan Vinola Herawaty. "Pengaruh Auditor Tenure terhadap Konservatisme Akuntansi dengan Konvergensi IFRS sebagai Variabel Moderasi." *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 29 Oktober 2019, 2.43.1-2.43.8. doi:10.25105/semnas.v0i0.5832.

Dean, Graeme, dan Frank Clarke. "'True and Fair' and 'Fair Value'—Accounting and Legal Will-o'-the-Wisps." *Abacus* 41 (1 Juni 2005). doi:10.1111/j.1467-6281.2005.00174.x.

Dewi, Ika Oktaviana, Imam Wahyudi, Nanang Setiawan, dan Jamilatul Uyun. "Fraud Ditinjau dari Etika Profesi dan Etika Bisnis Kasus PT Garuda Indonesia." *Media Komunikasi Ilmu Ekonomi* 40, no. 1 (30 Juni 2023): 41–53. doi:10.58906/melati.v40i1.101.

Dewi, Santi Rahma. "Upgrading Tata Kelola Keuangan bagi UMKM Terintegrasi dengan Financial Digital." *Jurnal Pengabdian*

Masyarakat 4, no. 1 (9 Mei 2023): 135–47. doi:10.32815/jpm.v4i1.1144.

Dharma, Ferry Adhi. "Konstruksi Realitas Sosial:Pemikiran Peter L. Berger tentang Kenyataan Sosial:" *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (1 September 2018): 1–9. doi:10.21070/kanal.v6i2.101.

Djasuli, Mohamad, Achmad Fawaid Asad, Gita Arasy Harwida, dan Achdiar Redy Setiawan. "Akuntansi 'Sirrun': Menyingkap Standar Akuntansi Internasional Berbasis Ajaran Tasawuf Syaikhona Kholil." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 14, no. 3 (31 Desember 2023): In Press. doi:10.21776/ub.jamal.2023.14.3.39.

Eliza, Any, dan Rahmat Fajar Ramdani. "Perbandingan Historical Cost dan Current Cost sebagai Dasar Penilaian Zakat Perbankan Syariah." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 8, no. 1, April (25 April 2020): 55–70. doi:10.35836/jakis.v8i1.126.

Endiana, I. Dewa Made, dan Ni Nyoman Ayu Suryandari. "Opini Going Concern: Ditinjau dari Agensi Teori dan Pemicunya." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 5, no. 2 (30 Juni 2021): 224–43. doi:10.24034/j25485024.y2021.v5.i2.4490.

Faizah, Kurniyatul. "Spiritualitas dan Landasan Spiritual (Modern and Islamic Values); Definisi dan Relasinya dengan Kepemimpinan Pendidikan." *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 19, no. 1 (22 April 2021): 068–086. doi:10.29062/ar-risalah.v19i1.957.

Farhan, Ali. "Zuhud, Sebuah Laku Tasawuf Untuk Tazkiyah Peradaban Akuntansi." *Akuntansi : Jurnal Akuntansi Integratif* 6, no. 2 (2 Oktober 2020): 87–96. doi:10.29080/jai.v6i2.261.

Fatchan, Fuad Hudaya, dan Ari Kuncara Widagdo. "Perplexity in Accounting Conservatism: A Critical Review." *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 6, no. 1 (2 Juni 2021): 42–53. doi:10.23917/reaksi.v6i1.13824.

Fauziah, Dita, Ai Nur Bayinah, Sepky Mardian, dan Fahma Rianti. "Tren dan Dinamika Penelitian Akuntansi Syariah di Indonesia: Analisis Bibliometrik." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 10, no. 1, April (8 April 2022): 89–98. doi:10.35836/jakis.v10i1.275.

Fera, Pietro. “The Effectiveness of the Matching Principle in Different Financial Reporting Systems and Its Impact on the Quality of Earnings.” *Corporate Ownership and Control* 16, no. 3 (2019): 129.

Gottschalk, Petter. “Evaluation of Fraud Examinations: The Case of Inappropriate Accounting Practices at Fuji Xerox.” *Deviant Behavior* 40, no. 11 (2 November 2019): 1421–27. doi:10.1080/01639625.2018.1559640.

Gudio, Hylian Tanre. “Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia.” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan* 1, no. 3 (17 Maret 2024): 35–39. doi:10.59407/jakpt.v1i3.474.

Haeruddin dan Lina Mariana. “Analisis Sistem Akuntansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) (Studi Kasus: BUM Desa di Kec. Galesong Utara Kabupaten Takalar).” *AkMen Jurnal Ilmiah* 18, no. 1 (1 April 2021): 36–45. doi:10.37476/akmen.v18i1.1351.

Hanafi, Rustam. “Uniformity Jalan Menuju Comparability : (Studi Terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia).” *Akses* 3, no. 6 (2008): 56963. doi:10.31942/akses.v3i6.503.

Handojo, Irwanto. “Sekelumit Konservatisme Akuntansi.” *Media Bisnis* 4, no. 2 (30 September 2012): 1–12. doi:10.34208/mb.v4i2.1464.

Harahap, Darwis. “Analisis Stabilitas Dinar Emas dan Dolar AS dalam Denominasi Rupiah.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (29 Juli 2014): 269–82.

Haryanti, Rizka. “Analisis Kecurangan Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya dengan Analisis Fraud Pentagon.” *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan* 1, no. 02 (31 Januari 2023): 92–99. doi:10.58812/sak.v1i02.70.

Hejranijamil, Marziyeh, Afsane Hejranijamil, dan Javad Shekarkhah. “Accounting Conservatism and Uncertainty in Business Environments; Using Financial Data of Listed Companies in the Tehran Stock Exchange.” *Asian Journal of Accounting Research* 5 (28 Agustus 2020): 179–94. doi:10.1108/AJAR-04-2020-0027.

Inyang, William Smart, Rose Emmanuel Eyo, dan Mary Eyong Nkang. "Accounting Theory's Elements, Structures, Conceptual Framework and Financial Reporting: A Conceptual Approach." *Internasional Journal of Advanced Researh (IJAR)* 8, no. 12 (2020).

Irfan. "Semiotika Dekonstruksi dan Post-Strukturalis Pemikiran Jacques Derrida dan Roland Barthes." *Tanra: Jurnal Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Dan Desain Universitas Negeri Makassar* 9, no. 2 (4 Juni 2022): 97–104. doi:10.26858/tanra.v9i2.33302.

Isaac, Odogu Laime, Okpobo Timinipre Joseph, dan Obalakumo Anderson Pereowei. "Effect of Window Dressing Accounting and Quality of Corporate Reporting of Quoted Banks In Nigeria." *International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)* 7, no. 2 (2023).

Isgiyarta, Jaka. "Telaah Kritis Filsafat Positivisme untuk Pengembangan Teori Akuntansi." *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia* 15, no. 2 (2011). https://journal.uii.ac.id/JAAI/article/view/3752.

Islamiyati, Rosi. "Tarekat Syāżiliyyah dalam Dimensi Kesalehan Individual dan Kesalehan Sosial serta Pengaruh Modernisasi dan Globalisasi." *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 22, no. 1 (11 Maret 2022): 137–56. doi:10.14421/ref.2022.2201-07.

Jariya, Achchi Mohamed Inun, dan Thirunavukkarsu Velnampy. "Management Accounting Research Approaches: A Critical Review." *International Journal of Financial Research* 12, no. 1 (2021).

Junaedi, Edy, dan Irwan Maulana. "Fraud Perbankan Syariah dan Moralitas Keislaman." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 13, no. 1 (22 Desember 2014): 46–72.

Kalsie, Anjala. "Downfall of Lehman Brothers: Impact on the US and India." *Journal of Business Thought*, 2014, 3–17.

Kapojos, Peter Marshall, Joubert Barens Maramis, David P. E. Saerang, Lucky O. H. Dotulong, dan Djurwati Soepeno. "Penerapan Sebuah Prinsip dalam Laporan Keuangan Pemerintah: 'Substansi Mengungguli Bentuk Formal' atau 'Bentuk Formal Mengungguli Substansi'?" *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 10, no. 2 (20 Juni 2022). doi:10.35794/emba.v10i2.41385.

Katarina, Kramarova. “The Global Problem of Inflation and Need for Inflation Adjusted-Financial Reporting.” *SHS Web of Conferences*, 2021. doi:https://doi.org/10.1051/shsconf/202112909010.

Kawa, Barbara. “The Problems with Comparability Among Financial Statements Prepared within Polish Entities under IFRS: English.” *Journal of Management and Financial Sciences*, no. 47 (28 September 2023): 9–19. doi:10.33119/JMFS.2023.47.1.

Kubaščíková, Zuzana, Zuzana Juhászová, dan Miloš Tumpach. “Analysis of Reporting Period Flexibility.” *SHS Web of Conferences* 83 (2020): 01037. doi:10.1051/shsconf/20208301037.

Kusmila, Zesmi, dan Adek IrmaRosi. “Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementrian Agama Kabupaten Kerinci: Zesmi Kusmila, Adek Irma Rosi.” *Jurnal Administrasi Nusantara* 6, no. 2 (29 Desember 2023): 103–11.

Laitinen, Erkki Kalervo. “Matching of Expenses in Financial Reporting: A Matching Function Approach.” *Journal of Financial Reporting and Accounting* 18, no. 1 (17 Januari 2020): 19–50. doi:10.1108/JFRA-01-2019-0009.

Lativa, Lativa. “Philosophy of Science Perspective on Quality of Financial Statements.” *International Journal Multidisciplinary Science* 3, no. 2 (16 Mei 2024): 142–48. doi:10.56127/ijml.v3i2.1528.

Latos, Benedikt, Daniela Becks, Antoine Gaillard, Martin Perau, Bernd Respondek, Michael Kranz, Jan Kukulies, dan Christian Kruse. “Integration of Generative AI into a Tool to Assist Participatory ESG Double Materiality Assessment for SMEs.” Dalam *The Twentieth International Conference on Environmental, Cultural, Economic & Social Sustainability University of Aveiro*. Aveiro, 2024.

Liu, Shihan, Lingyuan Lu, dan Yidi Wu. “The Role of SPEs in the Enron Scandal and Its Implications for China,” 1–6. Atlantis Press, 2021. doi:10.2991/aebmr.k.210917.001.

Majid, Amir Bandar Abdul. “Dekonstruksi dan Rekonstruksi terhadap Pendidikan Karakter di Masa Pandemi Covid 19: Strategi

Pembelajaran Mata Kuliah Muamalat." *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 7, no. 1 (5 April 2021): 96–111. doi:10.31943/jurnal_risalah.v7i1.173.

Malewa, Catherine Melania, Muhammad Achyar Ibrahim, dan Abdul Rahman. "Pengaruh Internal Control dan Whistleblowing System terhadap Tingkat Kecurangan." *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 31 Januari 2023, 61–69. doi:10.26487/akrual.v16i1.24268.

Marsigalia, Bruno, dan Renato Giovannini. "Sector Neutrality: A Possible Improvement of the Accounting Standards. Evidence from Nz Model." *Corporate Ownership and Control* 16, no. 2 (2019): 73.

Martasari, Sofi Ayu Nur, Bagus Setiawan, dan Sevina Yushinta Anjani. "Kurangnya Pemahaman tentang Konsep Dasar Ilmu Sosial di Jenjang Sekolah Menengah." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 3, no. 1 (2024): 01–11. doi:10.55606/jurrish.v3i1.2187.

Maulida, Natasya Atmim. "The Deconstruction in the Short Story Jimat Sero by Eka Kurniawan." *Jurnal Kawruh Abiyasa* 3, no. 1 (11 Juli 2023): 25–34. doi:10.59301/jka.v3i1.56.

Meirison, Meirison, dan M. Harir Muzakki. "Implementing The Spirit of Jihad in Sufism." *Jurnal Theologia* 31, no. 1 (21 Juni 2020): 1–20.

Meiryani, Azhar Susanto. "Full Disclosure in Financial Reporting." *International Journal of Scientific & Technology Research*, 25 Juni 2019. https://www.semanticscholar.org/paper/Full-Disclosure-in-Financial-Reporting-Meiryani/c0f430cbdf8ae56ebc94761fa545ec6d8467d038.

Moncarz, Elisa S, Raúl Moncarz, Alejandra Cabello, dan Benjamin Moncarz. "The Rise and Collapse of Enron: Financial Innovation, Errors and Lessons." *Contaduría y Administración*, no. 218 (2006).

Mukaromah, Nimatul Fitria, dan Amin Wahyudi. "Etika Bisnis dalam Akuntansi menurut Perspektif Surat Al-Baqarah Ayat 282." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 10 (27 Oktober 2024): 7359–74. doi:10.47467/alkharaj.v6i10.2935.

Mukminin, Khairul. “How Close Islamic Banks Are to Global Fraud-Learnings from Dubai Islamic Bank in the Time of Sub-Prime Crisis.” *European Journal of Islamic Finance*, no. 11 (4 Desember 2018). doi:10.13135/2421-2172/2762.

Mulawarman, Aji Dedi, Iwan Triyuwono, Gugus Irianto, dan Unti Ludigdo. “Menuju Teori Akuntansi Syariah Baru.” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 1 Januari 2011, 61–78. doi:10.20885/jeki.vol1.iss1.art4.

Musmini, Lucy Sri, Gede Adi Yuniarta, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, dan I. Gede Agus Pertama Yudantara. “Epistemology of Accounting Practices: Another Frame of Objectivity Claims,” 393–97. Atlantis Press, 2019. doi:10.2991/teams-19.2019.66.

Nasrullah, Muhammad. “Tarekat Syāżiliyyah dan Pengaruh Ideologi Aswaja di Indonesia.” *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 2 (31 Desember 2020): 237–45. doi:10.33852/jurnalin.v4i2.225.

Nathania, Felicia. “Unveiling the Motivation of Fraudulent Financial Statement in ENVY: Fraud Triangle Theory.” *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi* 8, no. 1 (1 Januari 2024): 284–88. doi:10.33395/owner.v8i1.1923.

Nathie, Mahmood. “Islamic Bank Failure: A Case Study.” *ISRA International Journal of Islamic Finance* 2, no. 1 (15 Juni 2010): 7–34. doi:10.55188/ijif.v2i1.77.

Nugrahanti, Yeterina Widi. “Perangkap Kapitalisme dalam Adopsi International Financial Reporting Standards (IFRS).” *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan* 5, no. 1 (2016). https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/5574.

Nursanty, Ida Ayu. “Spiritual Religius sebagai Basis Etika Akuntan Profesional.” *Valid: Jurnal Ilmiah* 13, no. 3 (12 Juli 2016): 289–97.

Ogundajo, Grace Oyeyemi, Ishola Rufus Akintoye, Chizoba Ajah, Mba O Obasi, dan George M Thankgod. “Big Data, Blockchain and Artificial Intelligence for True Cost Accounting in the Oil and Gas Sector: Evidence from Nigeria.” *Global Scientific and Academic Research Journal of Economics, Business and Management* 2, no. 9 (2023). https://gsarpublishers.com/wp-content/uploads/2023/09/GSARJEBM1362023-Gelary-script.pdf.

Osho, Augustine E, dan Florence M Ayorinde. “The General Tenets of Positive Accounting Theory Towards Accounting Practice and Disclosure in Corporate Organizations in Nigeria.” *Journal of Economics and Sustainable Development* 9, no. 20 (2018). https://core.ac.uk/reader/234648624.

Othman, Radiah, Rashid Ameer, dan Fawzi Laswad. “Uncovering Toshiba’s Fraudulent Financial Statements: an Audit Perspective.” *Journal of Forensic and Investigative Accounting* 12, no. 2 (t.t.). http://web.nacva.com/JFIA/Issues/JFIA-2020-No2-3.pdf.

Pakpahan, Wyler, dan Jasmansyah. “Prinsip Kejujuran dalam Perusahaan (studi Kasus Skandal Penyimpangan Akuntansi PT Toshiba).” *Seniman Transactions on Management and Business* 1, no. 2 (2020). https://seniman.nusaputra.ac.id/index.php/seniman/article/view/16/4.

Paledung, Marannu, Desi Nurdiyanti, Ratna Ayu Damayanti, dan Darwis Said. “Tren Perkembangan Penelitian Akuntansi Hijau: Systematic Literature Review.” *Jurnal Akuntansi Kontemporer* 15, no. 2 (21 Mei 2023): 72–81. doi:10.33508/jako.v15i2.4366.

Phillips, Matthew J. “Towards a Social Constructionist, Criticalist, Foucauldian-Informed Qualitative Research Approach: Opportunities and Challenges.” *SN Social Sciences* 3, no. 10 (10 Oktober 2023): 175. doi:10.1007/s43545-023-00774-9.

Pradana, Cikita Rizki, dan Tjandra Wasesa. “Perbandingan Penerapan Pengakuan Pendapatan Metode Persentase Penyelesaian Fisik dan Cost to Cost pada PT Interkon Cipta Persada di Surabaya.” *AKUNTANSI 45* 1, no. 1 (15 Mei 2020): 37–48. doi:10.30640/akuntansi45.v1i1.93.

Prasetyo, Eko, Arnadi Chairunnas, dan Niken Argaheni. “Studi Komparatif Kecurangan Di Negara Barat Dengan Negara Timur.” *Jurnal Proaksi* 8, no. 2 (26 Juli 2021): 322–28. doi:10.32534/jpk.v8i2.1813.

Pratiwi, Ananta Dian. “Kritik atas Prinsip Objektivitas dalam Kode Etik Akuntan menurut Pemikiran Martin Luther.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 4, no. 2 (2015). https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2772.

Pratiwi, Monica Weni, dan Reta Sharfina Tahar. "Analisis Pengaruh Tingkat Hutang, Ukuran Perusahaan, Informasi Asimetri, Selisih Keuntungan Nilai Wajar, dan Kepemilikan Saham terhadap Pemilihan Metode Nilai Wajar Pada Properti Investasi." *Media Riset Akuntansi* 7, no. 1 (22 Agustus 2017): 101.

Proho, Mahir. "Going Concern Assessment: a Literature Review." *Journal of Forensic Accounting Profession* 3 (26 Januari 2024): 48–62. doi:10.2478/jfap-2023-0009.

Putri, Wanda Destina, dan Shinta Permata Sari. "Fenomena Sell in May,Window Dressing, December Effect, dan January Effect terhadap Dinamika Harga Saham Perbankan." *UMMagelang Conference Series*, 1 Agustus 2022, 614–23.

Puwanto, Marini. "Peran Filsafat Ilmu Fondasi Utama dalam Penelitian Akuntansi Multiparadigma." *Soetomo Communication and Humanities* 3, no. 2 (31 Desember 2022): 67–75. doi:10.25139/sch.v3i2.5909.

Rahmawati, Alni, Moeljadi Moeljadi, Djumahir Djumahir, dan Sumiati Sumiati. "How Do Agency Theory, Stewardship Theory and Intellectual Capital as a Solution for Agency Conflict?" *Journal of Management Research* 10, no. 2 (17 April 2018): 94. doi:10.5296/jmr.v10i2.12843.

Rahmawati, Evi. "Support and Against Historical Cost Accounting: Is It Value Relevance for Decision Making?" *Journal of Accounting and Investment* 7, no. 1 (2006): 113–25.

Rangkuti, Lusi Elviani, dan Amerruddin Shah Suboh. "Comparative Analysis of Accrual and Cash Accounting Methods in Financial Reporting." *East Asian Journal of Multidisciplinary Research* 3, no. 6 (27 Juni 2024): 2167–80. doi:10.55927/eajmr.v3i6.9953.

Rashid, Muhammad Mustafa. "Case Analysis: Enron; Ethics, Social Responsibility, and Ethical Accounting as Inferior Goods?" *Journal of Economics Library* 7, no. 2 (12 Juli 2020): 97–105. doi:10.1453/jel.v7i2.2072.

Rashidi, Mohsen. "Manager Optimism Based on Environmental Uncertainty and Accounting Conservatism." *Interdisciplinary Journal of Management Studies (Formerly Known as Iranian Journal of Management Studies)* 14, no. 1 (1 Januari 2021): 61–86. doi:10.22059/ijms.2020.290260.673811.

Reksiana, Reksiana. “Kerancuan Istilah Karakter, Akhlak, Moral dan Etika.” *Thaqafiyyat : Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam* 19, no. 1 (13 Agustus 2018): 1–30. doi:10.14421/thaq.2018.%x.

Riduwan, Akhmad, dan Andayani Andayani. “Dimensi Kritis Pemikiran Akuntansi yang Teralienasi: Dialog Imajiner Konstruksionis dan Dekonstruksionis.” *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 19, no. 2 (26 September 2019): 167–90. doi:10.25105/mraai.v19i2.3854.

Rifai, Fuad Yanuar Akhmad, dan Ahmad Labib Asrori. “Akuntansi dalam Kajian Filsafat Ilmu dan Spiritualitas Islam.” *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9, no. 1 (18 Januari 2023): 16–24. doi:10.37567/alwatzikhoebillah.v9i1.1534.

Riyansyah, Ahmad. “Pemikiran Sofyan Syafri Harahap tentang Akuntansi Syariah dan Penerapannya.” *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (21 Juli 2017). http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/837.

Rohman, Taufiqur, dan Umi Suswati Anggraeni. “Kerangka Konseptual Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah.” *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 2 (5 Desember 2021): 33–66. doi:10.54471/muhasabatuna.v3i2.1170.

Rohman, Abdul Aziz Wahab, dan Muhammad Hifdil Islam. “Konsep Tasawuf Imam Al-Ghazali dari Aspek Moral dalam Kitab Bidayatul Hidayah.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (13 September 2022): 1509–14. doi:10.31004/jpdk.v4i5.6804.

Rosmanidar, Elyanti, dan Youdhi Prayogo. “Problematika Penerapan Accrual Accounting Pada Lembaga Keuangan Syariah.” *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 6, no. 2 (11 Desember 2022): 225–40. doi:10.30631/iltizam.v6i2.1526.

Saadah, Salamatus. “Fraud pada PT BTPN Syariah di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (21 Maret 2024): 895–902. doi:10.29040/jiei.v10i1.12340.

Sahid, Tries Handriman Jamain Universitas. “Opini Audit Going Concern:Faktor-Faktor Penyebabnya.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing* 7, no. 2 (31 Juli 2020): 44–52.

Sahrul, Farhan Ananda, dan Gunardi Lie. “Analisis mengenai Kasus Jiwasraya.” *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 3, no. 1 (2024).

Saifulah. “Distingsi dan Diaspora Tasawuf Abū Al-Ḥasan al-Syāżilī.” *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (8 Desember 2014): 353–81. doi:10.15642/teosofi.2014.4.2.353-381.

Salampessy, Zulkarim, dan Maria Juneferstina. “Menyelami Konsep Kesatuan Usaha dalam Teori-Teori Akuntansi.” *Jurnal Administrasi Terapan* 2, no. 1 (31 Maret 2023): 218–24. doi:10.31959/jat.v2i1.1789.

Saridawati, Saridawati, Rotua Tiofanta Simamora, dan Rhenda Basya Sembiring. “Analisis Pelanggaran Etika dalam Praktik Akuntansi Keuangan: Studi Kasus PT. Maskapai Garuda Indonesia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (14 Juni 2024): 13165–74. doi:10.31004/innovative.v4i3.11459.

Setiawan, Johan, dan Ajat Sudrajat. “Pemikiran Postmodernisme dan Pandangannya terhadap Ilmu Pengetahuan.” *Jurnal Filsafat* 28, no. 1 (28 Februari 2018): 25–46. doi:10.22146/jf.33296.

Shkalenko, Anna Viktorovna, dan Anton V. Nazarenko. “Integration of AI and IoT into Corporate Social Responsibility Strategies for Financial Risk Management and Sustainable Development.” *Risks* 12, no. 6 (Juni 2024): 87. doi:10.3390/risks12060087.

Silalahi, Heriantonius, dan Budi Kurnia. “Fringe Benefits in Tax Law: Matching Principle and Tax Justice Perspective.” *Ilomata International Journal of Tax and Accounting* 4, no. 4 (20 Oktober 2023): 684–702. doi:10.52728/ijtc.v4i4.870.

Siregar, Dwi Faradiba, Annisa Rizki Pratiwi, dan Iskandar Muda. “Was Accountant/Auditor Behavior Leading Op to Enron, Worldcom, and 2007-2008 Market Meltdowns Episodes Ethical?” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 2 (3 Juni 2024). doi:10.30651/jms.v9i2.22799.

Soewelo, Hartinowati. “Pentingnya Penerapan Prinsip Konsistensi dalam Pengakuan Pendapatan dan Pengaruhnya terhadap Kewajiban Penyajian Laporan Laba/Rugi.” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-*

Manajemen-Akuntansi 2, no. 5 (2004): 137–51. doi:10.30742/equilibrium.v2i5.189.

Sukarya, Alifah Ghina, Muhammad Sheva Mufsyi Salam, dan Naila Anindita Yudiantoro. "Enron Corporation: Studi Kasus tentang Peran Etika Bisnis dalam Pandangan Etika Terapan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (31 Juli 2024): 116–25. doi:10.5281/zenodo.13360166.

Surajaya, I Ketut. "Scandal in Japan Transgression, Performance and Ritual." *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 14, no. 2 (31 Agustus 2024). doi:10.17510/paradigma.v14i2.1508.

Susilowati, Lantip. "Tanggung Jawab, Keadilan dan Kebenaran Akuntansi Syariah |." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2017). https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/nisbah/article/view/618.

Suyatno, Suyatno. "Nilai, Norma, Moral, Etika dan Pandangan Hidup Perlu Dipahami oleh Setiap Warga Negara dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara." *PKn Progresif* 7, no. 1 (2012): 158683.

Syahraeni, Nur Hikmah, dan Sitti Nikmah Marzuki. "Kasus Penipuan di Perbankan Syariah: Analisis Fraud Internal dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Nasabah." *Jurnal Lan Tabur* 6, no. 1 (30 September 2024): 122–40.

Tache, Marta, dan Iustina Cristina Costea-Marcu. "A Historical Approach to the Financial Reporting under IFRS." *International Journal of Business and Management Invention (IJBMI)*, II, 10, no. 3 (2021). doi:10.35629/8028-1003021926.

Tamimi, Oday, dan Ildikó Orbán. "Hyperinflation and Its Impact on the Financial Results." *Intellectual Economics* 14, no. 2 (2020): 5–16. doi:10.13165/IE-20-14-2-01.

Tkachuk, Natalia V. "Historical Cost and Fair Value: Advantages, Disadvantages, Application." *Journal of History Culture and Art Research* 8, no. 1 (1 April 2019): 173. doi:10.7596/taksad.v8i1.2052.

Trevathan, Stephen Davis. "Living without Why: An Exploration of Personal Muslim Authenticity." University of Birmingham, College of Arts of Law Department of Theology and Religion, 2013.

Triyuwono, Iwan. “Akuntansi Syari’ah: Menuju Puncak Kesadaran Ketuhanan Manunggaling Kawulo Gusti.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 2, no. 2 (2011). https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/148.

———. “Konsekuensi Penggunakan Entity Theory sebagai Konsep Dasar Standar Akuntansi Perbankan Syari’ah.” *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia* 7, no. 1 (2003). https://journal.uii.ac.id/JAAI/article/view/849.

Vieira, Rui, dan Keith Hoskin. “Re-Thinking the ‘Disciplinary’ Power of Accounting: A Foucauldian Reading of How Disciplinary Accounting Knowledge Translates into Managerial Strategy in a Portuguese Bank.” *Critical Perspectives on Accounting* 99 (1 Maret 2024): 102715. doi:10.1016/j.cpa.2024.102715.

Wang, Zhemin, Zhijun Lin, dan Sophia Ju. “Healthsouth Corporation: The First Case Against a Company under The Sarbanes-Oxley Act.” *Journal of Business Case Studies (JBCS)* 5, no. 1 (1 Januari 2009): 9–18. doi:10.19030/jbcs.v5i1.4689.

Watts, Galen, dan Dick Houtman. “The Specter of Authenticity: Social Science after the Deconstruction of Romanticism.” *History of the Human Sciences*, 24 Mei 2024, 09526951241245014. doi:10.1177/09526951241245014.

Wicaksana, Pascal Caya Khrisna, dan Lucky Nurhadiyanto. “Analisis Criminal Profiling terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Berbasis General Theory Of Crime.” *UNES Law Review* 6, no. 4 (7 Juni 2024): 9862–75. doi:10.31933/unesrev.v6i4.1842.

Widianingsih, Luky Patricia. “Accounting of Peace: Green Movement in Industry 4.0 (Necessity of Deconstruction?).” *International Journal of Advanced Research (IJAR)* 6, no. 5 (2018). doi:http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/7006.

Wiggins, Rosalind Z, Rosalind L Bennett, dan Andrew Metrick. “The Lehman Brothers Bankruptcy D: The Role of Ernst & Young,” t.t.

Williams, Paul F. “The Decline of Substance over Form in Accounting: a Problematic Dichotomy.” *Accounting, Economics, and Law: A Convivium* 13, no. 3 (1 Agustus 2023): 391–402. doi:10.1515/ael-2021-0119.

Winburn, Allysha Powanda, dan Chaunesey M.J. Clemmons. "Objectivity is a Myth that Harms the Practice and Diversity of Forensic Science." *Forensic Science International: Synergy* 3 (13 September 2021): 100196. doi:10.1016/j.fsisyn.2021.100196.

Yunita, Sella, Agrianti Komalasari, dan Saring Suhendro. "The Effect of Timeliness of Financial Reporting on Abnormal Return during the Covid-19 Period with Profitability and Company Size as Moderating Variables (Study on the Food and Beverages Sector Companies Listed on the IDX in 2020-2021)." *International Journal of Business and Applied Economics* 2, no. 3 (27 Mei 2023): 391–404. doi:10.55927/ijbae.v2i3.4304.

Yusa, I Made Marthana. "Upside Down Building: suatu Karya Dekonstruksi Desain Arsitektur." *Jurnal Studi Kultural* 1, no. 2 (2016): 65–69.

Zahariev, Andrey, Stoyan Prodanov, Anelia Radulova, Galina Zaharieva, Mariyana Pavlova, Petko Angelov, Taner Ismailov, Aleksandrina Aleksandrova, dan Kristi Marinova. "The Bank Insolvency: From Lehman Brothers to COVID-19 (International Remarks and National Peculiarities)." *SSRN Electronic Journal*, 1 Januari 2020. doi:10.2139/ssrn.3688961.

Zdolšek, Daniel, Timotej Jagrič, dan Iztok Kolar. "Auditor's Going-Concern Opinion Prediction: the Case of Slovenia." *Economic Research-Ekonomska Istraživanja* 35, no. 1 (31 Desember 2022): 106–21. doi:10.1080/1331677X.2021.1888766.

Zhou, Yining, Geoff Lamberton, dan Michael B. Charles. "an Explanatory Model of Materiality in Sustainability Accounting: Integrating Accountability and Stakeholder Heterogeneity." *Sustainability* 15, no. 3 (Januari 2023): 2700. doi:10.3390/su15032700.

Zulfikar, Iwan Triyuwono, Unti Ludigdo, dan Ahmad Riduwan. "The Social Interpretation of Accounting Entity in the Perspective of the Semar's Philosophy." *International Journal of Business, Economics and Law* 12, no. 1 (2017). https://ijbel.com/wp-content/uploads/2017/05/ACC-47.pdf.

Zumrotul, Azizah, dan Muhammad Nurkholis Kholik. “Implementasi Ilmu Taswawuf dalam Dunia Kerja.” *AN-NIBRAAS* 2, no. 01 (30 Juni 2023): 50–61.

Internet

“Arti kata akhlak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 22 Oktober 2024. https://kbbi.web.id/akhlak.

“Arti kata etika - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 22 Oktober 2024. https://kbbi.web.id/etika.

“Arti kata moral - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 22 Oktober 2024. https://kbbi.web.id/moral.

“Arti kata spiritual - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 22 Oktober 2024. https://kbbi.web.id/spiritual.

“Kode Etik Akuntan Memiliki Dua Nama, Ini Sebabnya.” Diakses 16 November 2024. https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/kode-etik-akuntan-memiliki-dua-nama,-ini-sebabnya.

“Qur’an Kemenag.” Diakses 25 Desember 2024. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=282&to=282.

“Qur’an Kemenag.” Diakses 27 Desember 2024. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=119&to=119.

“UU RI No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.” Diakses 17 November 2024. https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/uu-bi/UndangUndang%20BI/Konsolidasi-UU-No.7-Tahun-2011-Mata%20Uang.pdf.

Ikatan Akuntan Indonesia. “Pengesahan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Tahun 2019,” 2019. https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/pengesahan-kerangka-konseptual-pelaporan-keuangan-tahun-2019#gsc.tab=0.

Institut Akuntan Publik Indonesia. “SA 570 (Revisi 2021) - Naskah Final Satuan.pdf,” 2021. https://drive.google.com/file/d/1PyWx2tHwc-gXtLSfF2K61CpRE_z_bB5b/preview?usp=embed_facebook.

OJK. "UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas." Diakses 16 November 2024. https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Documents/5.%20UU-40-2007%20PERSEROAN%20TERBATAS.pdf.

Team, Almaany. "Terjemahan dan Arti Kata اجتهاد dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman." Diakses 21 September 2024. https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF/.

———. "Terjemahan dan Arti Kata الصدق dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman." Diakses 20 September 2024. https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%82/.

———. "Terjemahan dan Arti Kata المراقبة dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman." Diakses 21 September 2024. https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9/.

———. "Terjemahan Dan Arti Kata خوف Dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman." Diakses 30 Oktober 2024. https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%AE%D9%88%D9%81/.

———. "Terjemahan dan Arti Kata صحبة dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman." Diakses 20 September 2024. https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%A9/.

———. "Terjemahan dan Arti Kata لا تقف dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman." Diakses 21 September 2024. https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%81/.

———. “Terjemahan dan Arti Kata هجرة dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman.” Diakses 20 September 2024. https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9/.

———. “Terjemahan dan Arti Kata يسرى dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman.” Diakses 25 Oktober 2024. https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%89/.

BIODATA PENULIS

Nama	: Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si.*
Alamat	: Jl. Bukit Beringin Barat C 168, Semarang
Nomor Hp	: 081325681980
E-mail	: radenarfan@walisongo.ac.id
Tempat, Tanggal Lahir	: Yogyakarta, 10 Juni 1980
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Istri	: Nautika Attamimi, S.E.I.
Anak	: Raden Abil Hasan Asy-Syadzili, Raden Ahmad Athaillah As-Sakandari

**Berdasarkan Surat Keterangan Tepas Darah Dalem Kraton Yogyakarta No. 974/T.D/M.2001, Ybs. masih keturunan ke-16 dari Sunan Ampel Surabaya*

Pendidikan

1. Program Doktor Studi Islam, Konsentrasi Akuntansi Syariah, UIN Walisongo Semarang (2022-2025)
2. Magister Sains Akuntansi, Universitas Diponegoro (2006-2008)
3. Kursus Pra-Magister Manajemen, Universitas Diponegoro (2004)
4. Sarjana Ekonomi Pembangunan, Universitas Diponegoro Semarang (1998-2002)
5. SMA Negeri 1 Semarang (1995-1998)
6. SMP Negeri 3 Semarang (1992-1995)
7. SD Negeri Gayamsari II Semarang (1986-1992)

Pelatihan

1. Pelatihan Bina Insan Kamil, SEBI Consulting (2005)
2. Pelatihan Perbankan Syariah Dasar, Bank Syariah Mandiri (2005)
3. Pelatihan Administrasi Kredit, Bank Syariah Mandiri (2005)
4. Training for Trainer, Toha Putra Center (2007)

Pengalaman Kerja

1. Staf Proyek Pembuatan Peta Digital Rencana Jalan Tol Semarang-Solo, Kerja Sama UNDIP-BAPPEDA Jawa Tengah (2003)
2. Staf Back Office, Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang (2004-2005)
3. Staf SDI & Umum, Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang (2005-2007)
4. Analis Officer BUMN PT. PNM (Persero) Cabang Semarang (2007-2008)
5. Dosen, UIN Walisongo Semarang (2009-Sekarang)

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Umum PMII Rayon Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro (2002)
2. Anggota KSEI (Kajian Studi Ekonomi Islam), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro (2002)

3. Anggota KSPM (Kelompok Studi Pasar Modal), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro (2002)

Publikasi

1. *Rekonstruksi Regulasi Fintech Syariah: Referensi Hukum dan Akuntansi untuk Inklusivitas Bisnis*, Darbooks Media, 2025
2. *Market Share Perbankan Syariah Tidak Capai 20%, Arfan: Perlu Andil Mahasiswa*, Amanat.id, 2024
3. *Akuntansi, Manajemen, dan Ilmu Hukum dalam Paradigma Unity of Sciences (Wahdatul 'Ilm)*, Rafi Sarana Perkasa, 2021
4. *Memahami Laporan Keuangan bagi Praktisi dan Akademisi Hukum Syariah*, Mutiara Aksara, 2020
5. *Laporan Penelitian Individual: Analisis Potensi Ekonomi Kawasan Sekitar Kampus*, I WALISONGO, DDAD IAIN, 2017
6. *Pengaruh Profitabilitas dan Kapitalisasi Pasar terhadap Nilai Emiten Jakarta Islamic Index*, Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 2015
7. *Perbandingan Ajaran Syadziliyah dan Stoikisme dalam Memaknai Enterpreunership dan Akuntabilitas*, EAIC: Esoterik Annual International Conferences, 2022
8. *Analisis Perbedaan Volume Perdagangan Saham-Saham yang Optimal pada Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia (BEI)*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008

9. *Analisis Rasionalitas Investor dalam Pemilihan dan Penentuan Portofolio Optimal Pada Saham-Saham Jakarta Islamic Index*, Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 2012
10. *Teknik Memilih BUMN sebagai Tempat Kerja bagi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dengan Menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP)*, 2013
11. *Mindset Akuntansi Islami*, FSH Walisongo, 2011